



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 44 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) bersama Bupati dan Walikota menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 109);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut dengan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 adalah dokumen rencana aksi daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Filantropi adalah setiap orang perseorangan atau lembaga yang berdasarkan kedermawanan berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi tantangan berkelanjutan.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Aktor pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

- (3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals berisi 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tanpa kemiskinan;
 - b. tanpa kelaparan;
 - c. kehidupan sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan berkualitas;
 - e. kesetaraan gender;
 - f. air bersih dan sanitasi layak;
 - g. energi bersih dan terjangkau;
 - h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - i. industri, inovasi dan infrastruktur;
 - j. berkurangnya kesenjangan;
 - k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
 - l. konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
 - m. penanganan perubahan iklim;
 - n. ekosistem lautan;
 - o. ekosistem daratan;
 - p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
 - q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 3

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN RAD TPB/SDGs.
- BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN RAD TPB/SDGs.
- BAB IV : PENGUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG.
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 5

- (1) Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB/SDGs.
- (3) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2025

GOVERNOR BENGKULU,
Ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
Ttd
H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM



ROSEFFENDI, S.H., M.HUM

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 197210122002121004



Pemerintah
Provinsi Bengkulu

RENCANA AKSI DAERAH (RAD)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2030



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2025



GUBERNUR BENGKULU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 dapat disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengimplementasikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, sehingga seluruh arah kebijakan, sasaran, dan program pembangunan daerah berkontribusi langsung terhadap pencapaian 17 Tujuan TPB/SDGs. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pembangunan jangka menengah di Provinsi Bengkulu.

Akhir kata, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu, kini dan di masa yang akan datang.

Bengkulu,

2025

GUBERNUR BENGKULU

H. HELMI HASAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	BAB I. 1
1.1 Keselarasan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) terhadap RPJMD.....	BAB I. 1
1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs.....	BAB I. 13
1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.....	BAB I. 14
1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.....	BAB I. 15
1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.....	BAB I. 16
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs.....	BAB II. 1
2.1 Tujuan 1 : Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun.....	BAB II. 1
2.2 Tujuan 2 : Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.....	BAB II. 14
2.3 Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	BAB II. 22
2.4 Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.....	BAB II. 26
2.5 Tujuan 5 : Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.....	BAB II. 33
2.6 Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	BAB II. 39
2.7 Tujuan 7 : Energi Bersih dan	

	Terjangkau.....	BAB II. 45
2.8	Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....	BAB II. 50
2.9	Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.....	BAB II. 57
2.10	Tujuan 10 : Mengurangi Ketimpangan.....	BAB II. 62
2.11	Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.....	BAB II. 68
2.12	Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	BAB II. 74
2.13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.....	BAB II. 78
2.14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	BAB II. 81
2.15	Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.....	BAB II. 84
2.16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.....	BAB II. 89
2.17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	BAB II. 92
BAB III	TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGS.....	BAB III. 1
3.1	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun.....	BAB III. 1
3.2	Tujuan 2 : Mengakhiri Kelaparan,	

	Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.....	BAB III. 8
3.3	Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	BAB III. 14
3.4	Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.....	BAB III. 22
3.5	Tujuan 5 : Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.....	BAB III. 30
3.6	Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	BAB III. 36
3.7	Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau.....	BAB III. 42
3.8	Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....	BAB III. 46
3.9	Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.....	BAB III. 51
3.10	Tujuan 10 : Mengurangi Ketimpangan.....	BAB III. 55
3.11	Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.....	BAB III. 59
3.12	Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	BAB III. 65
3.13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.....	BAB III. 69
3.14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	BAB III. 73
3.15	Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.....	BAB III. 77
3.16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat	

	yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.....	BAB III. 81
3.17	Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	BAB III. 88
BAB IV	KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG.....	BAB IV. 1
4.1	Peran Non-State Actor di Provinsi Bengkulu.....	BAB IV. 1
4.1.1	Strategi dan Rencana Aksi Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu.....	BAB IV. 2
4.1.2	Strategi dan Rencana Aksi Filantropi di Provinsi Bengkulu	BAB IV. 4
4.1.3	Strategi dan Rencana Aksi SDGs Center di Provinsi Bengkulu.....	BAB IV. 6
4.1.4	Strategi dan Rencana Aksi Pelaku Usaha di Provinsi Bengkulu.....	BAB IV. 8
4.2	Pendanaan TPB/SDGs di Provinsi Bengkulu.....	BAB IV. 10
4.3	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.	BAB IV. 11
BAB V	PENUTUP.....	BAB V. 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Keselarasan dan Sinergi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	BAB I. 5
Tabel 2. 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, 2023 – 2024.	BAB II. 1
Tabel 2. 2	Persentase Kemiskinan Ekstrem, 2021-2024.....	BAB II. 4
Tabel 2. 3	Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Bengkulu 2021-2023	BAB II. 4
Tabel 2. 4	Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, 2023 – 2024.....	BAB II. 9
Tabel 2. 5	Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen), September 2024.....	BAB II. 10
Tabel 2. 6	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin 2024.....	BAB II. 10
Tabel 2. 7	Perkembangan Stunting di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	BAB II. 16
Tabel 2. 8	Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2020 – 2023.....	BAB II. 20
Tabel 2. 9	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024..	BAB II. 23
Tabel 2. 10	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	BAB II. 24
Tabel 2. 11	Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024.....	BAB II. 28
Tabel 2. 12	Perkembangan APM menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024.....	BAB II. 29

Tabel 2. 13	Perkembangan APK menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024.....	BAB II. 30
Tabel 2. 14	Angka Melek Aksara Penduduk 15 Tahun ke Atas di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	BAB II. 32
Tabel 2. 15	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 35
Tabel 2. 16	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2024.....	BAB II. 36
Tabel 2. 17	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 38
Tabel 2. 18	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 41
Tabel 2. 19	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023...	BAB II. 43
Tabel 2. 20	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024...	BAB II. 47
Tabel 2. 21	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023...	BAB II. 48
Tabel 2. 22	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 51
Tabel 2. 23	Proporsi Lapangan Kerja Informal Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024...	BAB II. 53
Tabel 2. 24	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 54
Tabel 2. 25	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 55

Tabel 2. 26	Kondisi mantap jalan Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 58
Tabel 2. 27	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita Provinsi Bengkulu 2019-2023 (Ribuan Rupiah)....	BAB II. 60
Tabel 2. 28	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 61
Tabel 2. 29	Rasio Gini Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 64
Tabel 2. 30	Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 65
Tabel 2. 31	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023.....	BAB II. 66
Tabel 2. 32	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 69
Tabel 2. 33	Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam di Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024.....	BAB II. 63
Tabel 2. 34	Indeks Kualitas Udara (IKU) di Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023...	BAB II. 72
Tabel 2. 35	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024...	BAB II. 75
Tabel 2. 36	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Provinsi Bengkulu tahun 2023-2024 (Juta Ton CO ₂ eq)....	BAB II. 79
Tabel 2. 37	Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023 (Ribuan Hektar).....	BAB II. 82
Tabel 2. 38	Luas Penutupan Lahan Hutan di Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023 (Ribuan Hektar).....	BAB II. 86
Tabel 2. 39	Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Provinsi Bengkulu tahun 2006-2018 (Hektar).....	BAB II. 87
Tabel 2. 40	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di	

Tabel 3. 1	Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.. Matriks Keterkaitan Tujuan 1 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB II. 90 BAB III. 3
Tabel 3. 2	Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan.....	BAB III. 5
Tabel 3. 3	Matriks Keterkaitan Tujuan 2 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 10
Tabel 3. 4	Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	BAB III. 12
Tabel 3. 5	Matriks Keterkaitan Tujuan 3 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 16
Tabel 3. 6	Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	BAB III. 18
Tabel 3. 7	Matriks Keterkaitan Tujuan 4 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 24
Tabel 3. 8	Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	BAB III. 26
Tabel 3. 9	Matriks Keterkaitan Tujuan 5 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 32
Tabel 3. 10	Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender.....	BAB III. 34
Tabel 3. 11	Matriks Keterkaitan Tujuan 6 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 38
Tabel 3. 12	Target Pencapaian Indikator Tujuan 6	

	Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	BAB III. 40
Tabel 3. 13	Matriks Keterkaitan Tujuan 7 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 44
Tabel 3. 14	Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau.....	BAB III. 45
Tabel 3. 15	Matriks Keterkaitan Tujuan 8 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 48
Tabel 3. 16	Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....	BAB III. 49
Tabel 3. 17	Matriks Keterkaitan Tujuan 9 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 53
Tabel 3. 18	Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur.....	BAB III. 54
Tabel 3. 19	Matriks Keterkaitan Tujuan 10 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 57
Tabel 3. 20	Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....	BAB III. 58
Tabel 3. 21	Matriks Keterkaitan Tujuan 11 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 61
Tabel 3. 22	Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.....	BAB III. 63
Tabel 3. 23	Matriks Keterkaitan Tujuan 12 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD	

	Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 67
Tabel 3. 24	Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan.....	BAB III. 68
Tabel 3. 25	Matriks Keterkaitan Tujuan 13 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 71
Tabel 3. 26	Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.....	BAB III. 72
Tabel 3. 27	Matriks Keterkaitan Tujuan 14 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 75
Tabel 3. 28	Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Laut.....	BAB III. 76
Tabel 3. 29	Matriks Keterkaitan Tujuan 15 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 79
Tabel 3. 30	Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan.....	BAB III. 80
Tabel 3. 31	Matriks Keterkaitan Tujuan 16 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 83
Tabel 3. 32	Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.....	BAB III. 85
Tabel 3. 33	Matriks Keterkaitan Tujuan 17 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029..	BAB III. 90
Tabel 3. 34	Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	BAB III. 91

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1** Perbandingan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi 2023 dan 2024..... BAB II. 2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu, 2013 – 2024	BAB I. 2
Grafik 2. 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu, 2013 – 2024	BAB II. 2
Grafik 2. 2	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu 2024.....	BAB II. 6
Grafik 2. 3	Kemiskinan Kabupaten/ Kota 2024 (Persen).....	BAB II. 8
Grafik 2. 4	Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu, 2019-2024.....	BAB II. 11
Grafik 2. 5	Perkembangan Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Makanan Terhadap Garis Kemiskinan di Perkotaan Dan Perdesaan, 2018-2024.....	BAB II. 11
Grafik 2. 6	Perkembangan Data Stunting Bengkulu Tahun 2018-2023.....	BAB II. 15
Grafik 2. 7	Prevalensi Balita Wasting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021.....	BAB II. 18
Grafik 2. 8	Prevalensi Balita Wasting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022.....	BAB II. 18

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terhadap RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah upaya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, serta melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, pembangunan ini juga memastikan keadilan dan penerapan tata kelola yang baik guna menjaga serta meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global 2030 yang mencakup 17 tujuan dan 169 target yang dilaksanakan dalam periode 2015–2030. Pada dasarnya, pelaksanaan SDGs adalah bagian dari upaya menjalankan agenda pembangunan nasional sekaligus mendukung keberhasilan pencapaian agenda 2030 di tingkat global. Ke-17 goals TPB/SDGs yaitu :

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan pakar.

Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global, Pemerintah Indonesia terlibat secara langsung dan senantiasa

mengupayakan masuknya kepentingan-kepentingan nasional yang strategis ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global ini merupakan kontribusi yang positif dari Indonesia sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yaitu dengan merumuskan Rencana Aksi TPB/SDGs sesuai dengan periode RPJMD. Rencana Aksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan Rencana Aksi diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs.

Visi Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2045 adalah **Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Visi jangka panjang tersebut diturunkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 yaitu **Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Untuk mencapai visi di atas, misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius.
2. Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah.
3. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.
4. Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 terdapat 7 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius
2. Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur

3. Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah
4. Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas
5. Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan
6. Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam jaringan ekonomi lokal
7. Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis dalam pembangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif

Selain itu, pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 terdapat 21 Program Unggulan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Percepatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan melalui Program Seribu Jalan Mulus.
2. Perwujudan Universal Health Coverage (UHC) dengan menjamin seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu mendapat BPJS gratis.
3. Penyediaan Ambulance gratis.
4. Penyediaan moda angkutan darat perkotaan gratis.
5. Stabilisasi harga BBM subsidi di wilayah terluar.
6. Merdeka ijazah bagi anak bangsa.
7. Pengangkatan dan penyantunan anak yatim.
8. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan pemberdayaan pemerintahan desa dengan penguatan Bumdes, Desa Wisata melalui One Village-One Product.
9. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui bantuan bibit, peralatan pertanian, alat tangkap dan stabilisasi harga dengan mengembangkan pusat-pusat pengolahan agropolitan.
10. Meningkatkan kesejahteraan ASN melalui kenaikan TPP, pemberian insentif serta penyediaan jasa medis.
11. Pendirian Rumah Sakit Khusus Jantung, Kanker atau Ginjal.
12. Optimalisasi pemanfaatan aset terbengkalai.
13. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk peningkatan lapangan kerja dan pendapatan daerah.
14. Cetak Sawah Baru (CSB) dan perbaikan serta peningkatan irigasi dalam mewujudkan ketahanan pangan.
15. Peningkatan kerukunan antar umat beragama.
16. Peningkatan infrastruktur pelabuhan Pulau Baai, Bandara Fatmawati, dan Kereta Api Lubuk Linggau-Kota Bengkulu.

17. Pembebasan lahan PTPN VII untuk pembangunan wisata dan istana peristirahatan Presiden.
18. Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam melalui pembangunan Taman Berburu dan Taman Safari di Bengkulu Tengah, Seluma dan Kepahiang.
19. Perwujudan Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia.
20. Evaluasi kasus agraria dan pertambangan.
21. Penyelarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Bengkulu terkait dan selaras dengan agenda pembangunan yang berkelanjutan. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius mendukung pencapaian target TPB pada pilar pembangunan pembangunan hukum dan tata kelola dan pilar pembangunan sosial. Misi Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah mendukung pencapaian TPB pada ekonomi, pilar sosial dan pilar pembangunan lingkungan, Misi Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman mendukung pencapaian target TPB pada pilar pembangunan ekonomi. Misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius mendukung pencapaian target TPB pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan jo Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029, yang juga sedang dalam proses penyusunan. RAD TPB/SDGs ini menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu dan RKPD Kab/Kota se-Bengkulu.

Saat ini penyusunan dokumen RAD TPB Provinsi Bengkulu 2025-2030 beriringan dengan proses penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029, namun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), di

Provinsi Bengkulu telah diarusutamakan dalam RPJMD 2025-2029. Berdasarkan hasil mapping terhadap tujuan SDGs dengan misi, tujuan, sasaran pembangunan dan indikator sasaran pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD 2025-2029, maka seluruh tujuan SDGs/TPB telah selaras dengan sasaran pembangunan di Bengkulu hingga 2029, sebagaimana terlibat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Keselarasan dan Sinergi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi : Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	1 Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
				2 Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, berbudaya dan religius	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	1 Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
			Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	1 Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	1 Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
				2 Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis	Nilai Indeks <i>e-Government</i> (SPBE)	1 Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
		IPTEK		berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	1 Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
			Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
			Indeks Sistem Merit	1 Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
				inklusif di semua tingkatan.
			Indeks Demokrasi Daerah	1 Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
Visi : Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan Misi 2 : Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah.	Meningkatkan indeks infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	1 Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
		Meningkatnya indeks infrastruktur dasar	Nilai komponen Bidang Infrastruktur Dasar pada IPI	1 Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
		Meningkatnya indeks infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah	Nilai komponen Bidang Infrastruktur Strategis serta Konektivitas Wilayah pada IPI	1 Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
Visi : Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan	Meningkatkan Kualitas kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan		Pendapatan per kapita (Juta Rupiah)	1 Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Berkelanjutan Misi 3 : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.	sosial dan demokratis			kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
		Meningkatnya pendapatan per kapita	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (juta rupiah)	1 Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
			Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1 Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
			Indeks Gini	1 Goal 10 : Berkurangnya Kesenjangan
		Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	1 Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
			Indeks Modal Manusia (IMM)	1 Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
		Meningkatnya Kualitas	Usia Harapan	1 Goal 3: Kehidupan Sehat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
		Sumber daya manusia	Hidup	dan Sejahtera
			Total Fertility Rate	1 Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
			Angka Kematian Ibu	1 Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
			Angka Kematian Balita	1 Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
			Prevalensi Stunting	1 Goal 2: Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	1 Goal 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
			Harapan lama Sekolah	1 Goal 4: Pendidikan Berkualitas
			Rata-rata Lama sekolah	1 Goal 4: Pendidikan Berkualitas
			Angka Literasi/ Numerasi	1 Goal 4: Pendidikan Berkualitas
		Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1 Goal 5: Kesenjangan Gender
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	1 Goal 5 : Kesenjangan Gender
				2 Goal 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
				2 Goal 10 : Berkurangnya Kesenjangan
			Tingkat Partisipasi	1 Goal 5 : Kesenjangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
			Angkatan Kerja Perempuan	Gender
				2 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Visi : Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan Misi 4 : Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
			Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Proporsi PDRB EKRAF	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase pertumbuhan sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatnya produktivitas sektor Koperasi dan UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Rasio volume usaha Koperasi terhadap PDRB	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
			Rasio Kewirausahaan Daerah	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
		Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi (triliun rupiah)	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		Stabilnya Perekonomian Daerah	Tingkat Inflasi	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
			Inklusi Keuangan	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
				2 Goal 10 : Berkurangnya Kesenjangan
		Meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	1 Goal 2 : Tanpa Kelaparan
			Indeks Ekonomi Hijau	1 Goal 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
				2 Goal 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
				3 Goal 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan iklim	Penurunan Intensitas Emisi GRK	1 Goal 13 : Penanganan Perubahan Iklim
			Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	1 Goal 13 : Penanganan Perubahan Iklim
				2 Goal 15 : Kehidupan di Darat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
			Indeks Risiko Bencana	1 Goal 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
				2 Goal 13 : Penanganan Perubahan Iklim
		Meningkatnya infrastruktur dan pembangkit EBT	Persentase peningkatan infrastruktur EBT	1 Goal 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

1.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*Leave No One Behind*" atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”.

Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menerapkan prinsip inklusif dengan melibatkan empat platform partisipasi, yaitu Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Organisasi Masyarakat Sipil dan Media, dengan fokus utama pada kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Meskipun masing-masing platform memiliki peran tersendiri, semuanya saling terkait dan berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan regulasi, menyusun perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan program, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pencapaian SDGs. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan dalam mengawasi anggaran, pelaksanaan, serta pemantauan TPB/SDGs.

Organisasi Masyarakat Sipil dan Media berperan dalam menyebarluaskan informasi serta mengadvokasi TPB/SDGs, meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan program, serta berkontribusi dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha berperan dalam mengadvokasi sektor bisnis dan dunia usaha, memfasilitasi serta melaksanakan program,

meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan.

Sementara itu, akademisi dan pakar berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, guna memberikan landasan ilmiah dalam pelaksanaan dan pengembangan SDGs di Indonesia.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, tetapi juga mencakup strategi pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup aspek kebijakan, pendanaan, teknologi, peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data guna memastikan tercapainya seluruh tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga diperluas melalui sumber-sumber lain, termasuk pendanaan dari sektor swasta serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs yang telah disebutkan, Provinsi Bengkulu mengikuti semangat nasional dalam menjadikan SDGs sebagai sebuah gerakan bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDGs ini juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seluas mungkin, sebagaimana tercermin dalam proses penyusunan serta dokumen Matriks Rencana Aksi, baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Komitmen pelaksanaan SDGs di Indonesia diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai wujud implementasi di daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor S.184.Bapperida Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.

Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut telah disusun tim koordinasi pelaksanaan SDGs Provinsi Bengkulu yang terdiri-dari tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja. Tim Pengarah diketuai oleh Gubernur, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu dan Tim Pokja dibagi berdasarkan pilar pembangunan SDGs yang diketuai oleh Kepala Bidang dan Sekretaris lingkup Bapperida Provinsi Bengkulu.

Sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip inklusif SDGs, Tim Koordinasi SDGs Provinsi Bengkulu disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah,

pelaku usaha, filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan media.

1.4. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Sesuai dengan amanat pada pasal 5 Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 Tanggal 13 September 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Menyusun Dan Menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Bersama Bupati/ Walikota di wilayahnya masing masing dengan melibatkan Ormas/Filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Tahap penyusunan RAD TPB/SDGs dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Persiapan Awal Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan kegiatan pertama melibatkan pihak OPD Provinsi Bengkulu, Akademisi, Filantropi, Organisasi Kemasyarakatan dan Media.
2. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu. Rapat ini merupakan rapat per pilar pembangunan yang berisi penjelasan mengenai Indikator dan Data yang diminta dalam rangka melengkapi penyusunan RAD TPB/SDGs bagi unsur Organisasi Perangkat Daerah. Rapat ini merupakan tahapan tata cara pengisian matriks RAD TPB/SDGs mulai dari pengisian matriks 1 yang berisi target capaian dan matriks 2 yang berisi program dan kegiatan yang diisi oleh masing-masing OPD Provinsi Bengkulu dan Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Bengkulu dan unsur Non Organisasi Perangkat Daerah berupa tahapan tata cara pengisian matriks RAD TPB/SDGs bagi Para Pemangku Kepentingan lainnya seperti LSM dan Filantropi. Rapat Koordinasi pengisian matriks dilaksanakan untuk menentukan Indikator Provinsi Bengkulu yang sudah ditetapkan dibandingkan dengan indikator dari masing-masing instansi yang bisa mencapai target sesuai dengan indikator yang ada dan disusun ke dalam matriks 3.
3. Selanjutnya Rapat Penyusunan Draft Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu. Rapat ini merupakan rapat per pilar pembangunan oleh Tim Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu.
4. Tahapan selanjutnya adalah Konsultasi Publik untuk menggali masukan dan penyempurnaan draft Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu dari publik. Tim Sekretariat TPB/SDGs mengajak seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD.

5. Selanjutnya Rapat Pemantapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu. Rapat ini merupakan rapat per pilar pembangunan oleh Tim Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu.
6. Tahapan selanjutnya adalah rapat Tim Pembahasan draft Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2030 bersama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu.
7. Proses selanjutnya adalah dilakukan review oleh Sekretariat SDGs Indonesia.
8. Terakhir adalah Penetapan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.

1.5. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Bengkulu terdiri atas lima bagian, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan SDGs Terhadap RPJMD Pada bagian ini diuraikan keselarasan dan sinergi dari TPB/SDGs terhadap RPJMD.
- 1.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
Pada bagian ini menjelaskan prinsip pelaksanaan TPB/SDGs yaitu universal, terintegrasi antardimensi, inklusif dan no one left behind, serta mencakup sarana pelaksanaan.
- 1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
Pada bagian ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melaksanakan TPB/SDGs secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- 1.4. Metodologi Penyusunan RENAksi TPB/SDGs
Pada bagian ini menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proses penyusunan rencana aksi yang inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- 1.5. Sistematika RENAksi TPB/SDGs
Pada bagian ini menjelaskan sistematika penyusunan dokumen rencana aksi TPB/SDGs.

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

Pada bagian ini, kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat daerah dapat dijelaskan secara ringkas dan disajikan dalam bentuk infografis yang memuat maksimal 3 indikator per tujuan.

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGS

Pada bagian ini dijelaskan target dan arah kebijakan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs. Dituliskan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing tujuan sebagai arah pelaksanaan kegiatan. Target setiap indikator ditampilkan sebagaimana dicontohkan dalam matriks (Format matriks 1). Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada RPJMD yang berlaku. Indikator SDGs yang diacu di daerah merujuk pada Lampiran 5 (Daftar Indikator SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

4.1. Partisipasi NSA

Pada bagian ini dijelaskan tentang kemitraan nonstate actor (NSA) dalam mendukung pelaksanaan TPB/SDGs. NSA meliputi dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, akademisi, dan mitra internasional. Setiap NSA dipersilakan untuk memilih goal SDGs yang akan dilaksanakan.

4.2. Interlinkages/Roadmap

Pada bagian ini dapat dijelaskan tentang keterkaitan antara berbagai tujuan, target dan indikator SDGs di daerah jika telah tersedia kajian tersebut. Bagi daerah yang belum memiliki kajian keterkaitan tujuan, target, indikator SDGs maka tidak diwajibkan mengisi bagian ini.

4.3. Pendanaan TPB/SDGs

Pada bagian ini dijelaskan tentang pendanaan untuk pelaksanaan SDGs baik yang berasal dari APBD maupun dari non-pemerintah. Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB/SDGs membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah, sector swasta termasuk sektor keuangan, filantropi, lembaga mitra pembangunan, donor, dan masyarakat sipil. Semua pemangku kepentingan SDGs di daerah, melalui penjaminan alokasi, penggunaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran yang efektif, serta pemanfaatan pendanaan inovatif dan berkelanjutan, dapat bergerak lebih efisien melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang inklusif dan berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang rangkuman upaya proses penyusunan RAD SDGs, manfaat penyusunan Renaksi SDGs dan sasaran Renaksi SDGs.

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Matriks Program/Kegiatan Pemerintah (Matriks 2b daerah)
- Lampiran 2 : Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah (Matriks 3 LSM, filantropi, akademia)

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGS



BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN

PELAKSANAAN SDGs

2.1 Tujuan SDGs 1 : Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024–September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 8 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 12,3 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 13,56 persen menjadi 12,32 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,56 persen menjadi 12,63 persen.

Tabel 2.1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, 2023 – 2024

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)			Persentase Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Aceh	8.37	14.99	12.64	168.71	550.25	718.96
Sumatera Utara	7.01	7.44	7.19	623.78	487.14	1.110.92
Sumatera Barat	4.16	6.79	5.42	125.69	189.75	315.43
Riau	6.11	6.52	6.36	183.28	289.76	473.04
Jambi	9.60	6.08	7.26	120.63	152.08	272.70
Sumatera Selatan	9.02	11.43	10.51	310.04	638.81	948.84
Bengkulu	12.32	12.63	12.52	86.71	174.44	261.15
Lampung	7.91	12.04	10.62	239.51	699.80	939.30
Bangka Belitung	4.09	6.49	5.08	37.09	41.49	78.58
Kepulauan Riau	4.36	8.55	4.78	102.23	22.72	124.96
INDONESIA	6.66	11.34	8.57	11.046,59	13.008,13	24.054,72

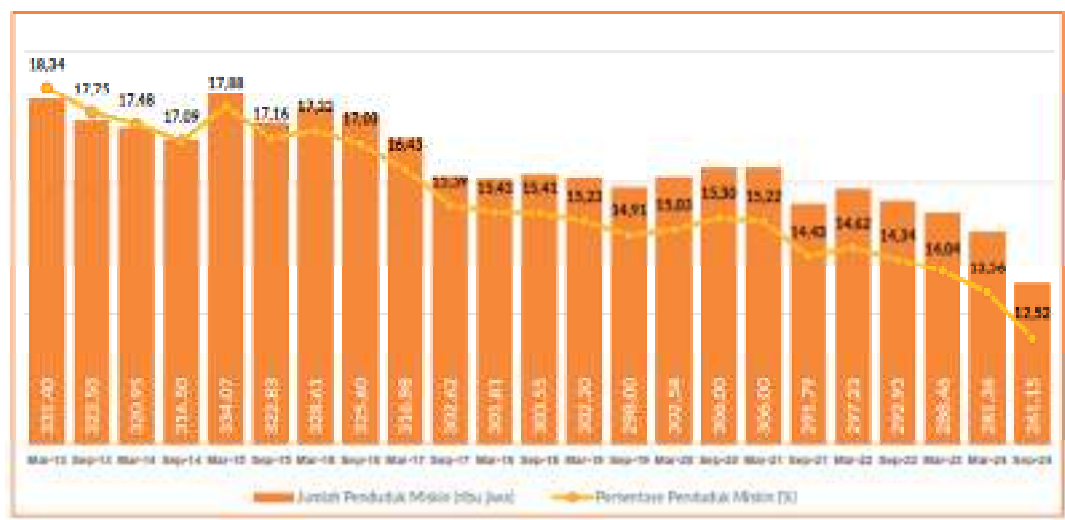
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Persentase dan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera pada September 2024. Provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar berada di Aceh, yaitu sebesar 12,64 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar 4,78 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Provinsi Sumatera Utara sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bangka Belitung.

Secara umum, pada periode Maret 2013–September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan,

baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada periode ini, terdapat 3 fase perkembangan kemiskinan. Pada Maret 2013-September 2019 mengalami fluktuasi baik jumlah maupun persentase. Pada Maret 2020-Maret 2021 kembali mengalami kenaikan setelah cukup lama melandai walaupun secara persentase di Maret 2021 mengalami penurunan namun secara jumlah stagnan. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode ini disebabkan oleh adanya pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19. Sementara itu pada September 2021- September 2024 kembali turun sebagai dampak membaiknya kondisi perekonomian, kecuali pada Maret 2022. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2013 sampai dengan September 2024 disajikan pada Grafik dibawah ini.

Grafik 2.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Bengkulu, 2013 – 2024



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2.1.1 Target Global : Mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.

2.1.1.1 Indikator 1.2.1 : Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah US \$ 1,9 PPP per hari. Pada tahun 2017, nilai US \$ 1,9 PPP ≈ Rp10.195,6 per kapita per hari. Untuk keterbandingan antar negara, kemiskinan diukur menggunakan konsep Purchasing Power Parity (PPP).

Gambar 2.1
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Per Provinsi 2023 dan 2024

Provinsi	Mar 2023	Mar 2024	Provinsi	Mar 2023	Mar 2024
Aceh	1.83	0.95	Kalimantan Barat	0.99	0.57
Sumatera Utara	0.78	0.54	Kalimantan Tengah	0.35	0.30
Sumatera Barat	0.41	0.57	Kalimantan Selatan	0.47	0.37
Riau	0.67	0.43	Kalimantan Timur	0.10	0.27
Jambi	0.81	0.41	Kalimantan Utara	0.34	0.44
Sumatera Selatan	1.29	0.59	Sulawesi Utara	0.78	0.56
Bengkulu	2.08	0.69	Sulawesi Tengah	1.44	1.27
Lampung	1.32	0.90	Sulawesi Selatan	1.01	0.70
Kepulauan Bangka Belitung	0.24	0.29	Sulawesi Tenggara	1.65	1.06
Kepulauan Riau	0.35	0.23	Gorontalo	2.44	1.46
DKI Jakarta	0.57	0.35	Sulawesi Barat	0.75	1.46
Jawa Barat	0.79	0.78	Maluku	2.59	1.98
Jawa Tengah	1.11	0.89	Maluku Utara	0.67	0.52
DI Yogyakarta	1.24	0.85	Papua Barat	6.43	4.45
Jawa Timur	0.82	0.66	Papua	7.67	5.59
Banten	1.12	0.62	Papua Barat Daya	-	5.25
Bali	0.19	0.23	Papua Selatan	-	3.60
Nusa Tenggara Barat	2.64	2.04	Papua Tengah	-	6.09
Nusa Tenggara Timur	3.93	2.82	Papua Pegunungan	-	4.01

Sumber : Susenas BPS

Berdasarkan data estimasi jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Bengkulu tahun 2021–2023, terlihat adanya tren penurunan yang cukup signifikan. Jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 74,84 ribu jiwa pada 2021 menjadi 73,33 ribu jiwa pada 2022, dan turun tajam menjadi 42,73 ribu jiwa pada 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya dampak positif dari berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Beberapa daerah mencatat penurunan drastis, seperti Bengkulu Utara yang turun dari 14,84 ribu jiwa pada 2021 menjadi hanya 1,33 ribu jiwa pada 2023, serta Kota Bengkulu yang berkurang dari 23,24 ribu jiwa menjadi 10,54 ribu jiwa dalam periode yang sama.

Namun demikian, masih terdapat kabupaten/kota dengan tren fluktuatif atau penurunan yang relatif lambat. Rejang Lebong, misalnya, justru mengalami lonjakan pada 2022 menjadi 9,59 ribu jiwa sebelum menurun ke 8,19 ribu jiwa pada 2023, sementara Seluma cenderung stagnan bahkan meningkat dari 6,94 ribu jiwa pada 2021 menjadi 7,50 ribu jiwa pada 2023. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketimpangan antarwilayah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, meskipun secara keseluruhan capaian Provinsi Bengkulu cukup baik, perhatian khusus tetap diperlukan pada daerah dengan angka tinggi atau cenderung stagnan agar upaya penurunan kemiskinan ekstrem dapat merata di seluruh wilayah.

Tabel 2.2
Persentase Kemiskinan Ekstrem, 2021-2024

No	Nama Daerah	Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Provinsi Bengkulu	3.72	3.61	2.08	0.69
2	Bengkulu Selatan	4.61	3.97	2.98	
3	Rejang Lebong	1.27	3.48	2.94	
4	Bengkulu Utara	4.84	1.74	0.43	
5	Kaur	6.48	7.87	3.50	
6	Seluma	3.51	4.26	3.71	
7	Mukomuko	2.60	3.17	1.19	
8	Lebong	1.34	1.05	0.84	
9	Kepahiang	1.64	2.03	1.07	
10	Bengkulu Tengah	1.32	1.26	0.43	
11	Kota Bengkulu	6.21	5.63	2.76	

Sumberdata: Bappenas

Kendati pada beberapa kabupaten persentase kemiskinan ekstrem berfluktuatif, namun pada tingkat provinsi, persentase kemiskinan ekstrem konsisten mengalami penurunan.

Pada Tahun 2021, persentase kemiskinan ekstrem di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 3,72 persen. Angka tersebut terus menurun hingga menjadi 0,69 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.3
Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
Provinsi Bengkulu 2021-2023

No	Kode	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (Ribuan Jiwa)		
			2021*	2022*	2023**
1	17.00	Provinsi Bengkulu	74.85	73.33	42.73
2	1701	Bengkulu Selatan	8.03	7.08	5.43
3	1702	Rejang Lebong	3.48	9.59	8.19
4	1703	Bengkulu Utara	14.84	5.40	1.33
5	1704	Kaur	8.00	9.82	4.41
6	1705	Seluma	6.94	8.51	7.50
7	1706	Mukomuko	4.91	6.05	2.29
8	1707	Lebong	1.56	1.24	0.99

No	Kode	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (Ribu Jiwa)		
			2021*	2022*	2023**
9	1708	Kepahiang	2.32	2.89	1.54
10	1709	Bengkulu Tengah	1.52	1.46	0.50
11	1771	Kota Bengkulu	23.24	21.29	10.54

Keterangan :
* : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
** : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Berdasarkan tabel estimasi jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023, terlihat adanya tren penurunan signifikan. Secara total, jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 tercatat sebesar 74,84 ribu jiwa, turun menjadi 73,33 ribu jiwa pada 2022, dan berkurang drastis pada 2023 menjadi 42,73 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang cukup berarti dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

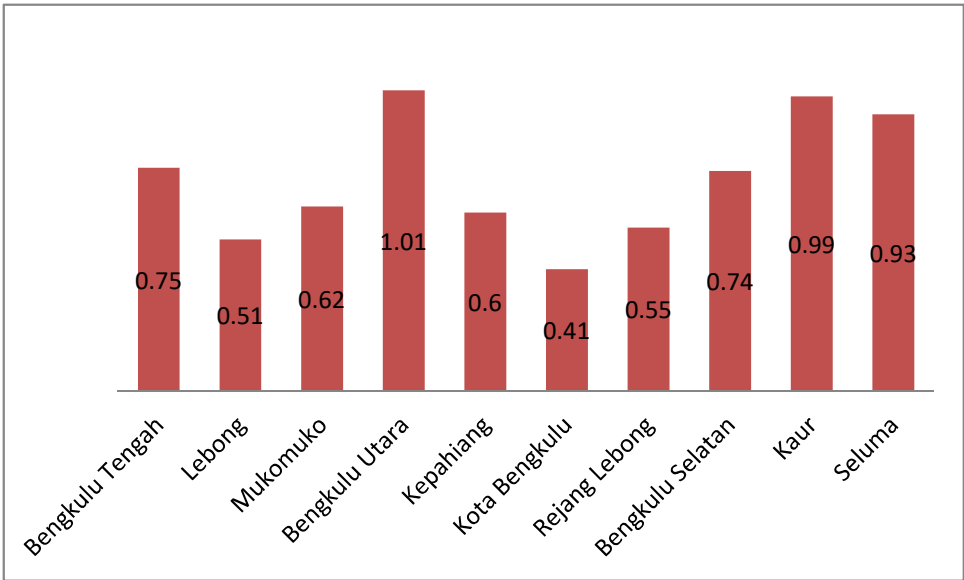
Jika dilihat per kabupaten/kota, Kota Bengkulu menyumbang jumlah terbesar, yaitu 23,24 ribu jiwa pada 2021, menurun menjadi 21,29 ribu jiwa di 2022, dan turun lebih jauh menjadi 10,54 ribu jiwa pada 2023. Meski masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi, penurunannya sangat signifikan.

Di sisi lain, Bengkulu Utara yang pada 2021 menempati posisi kedua tertinggi dengan 14,84 ribu jiwa, berhasil menurunkan drastis jumlah penduduk miskin ekstrem menjadi hanya 1,33 ribu jiwa pada 2023. Sementara itu, Seluma juga mengalami penurunan dari 6,94 ribu jiwa pada 2021 menjadi 7,50 ribu jiwa di 2023, namun relatif lebih lambat dibandingkan daerah lain.

Beberapa kabupaten lain seperti Rejang Lebong, Kaur, Mukomuko, Kepahiang, Lebong, dan Bengkulu Tengah juga menunjukkan penurunan, meskipun dengan variasi yang berbeda. Rejang Lebong sempat mengalami lonjakan pada 2022 (9,59 ribu jiwa) namun kembali menurun di 2023 (8,19 ribu jiwa).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin ekstrem hampir setengahnya hanya dalam kurun waktu dua tahun. Namun, tantangan masih tersisa di daerah dengan angka relatif tinggi seperti Kota Bengkulu, Rejang Lebong, dan Seluma, yang membutuhkan perhatian dan intervensi lebih intensif agar penurunan bisa lebih merata di seluruh wilayah.

Grafik 2.2
Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem
Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu 2024



Sumber : Hasil Perhitungan Satgas Data P3KE

Berdasarkan estimasi persentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi Bengkulu tahun 2024, terlihat adanya perbedaan antar kabupaten/kota. Kabupaten Bengkulu Utara tercatat memiliki persentase tertinggi sebesar 1,01%, diikuti Kaur sebesar 0,99% dan Seluma sebesar 0,93%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga daerah tersebut masih menghadapi tantangan besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, Bengkulu Tengah (0,75%) dan Bengkulu Selatan (0,74%) berada pada kategori menengah, yang meskipun lebih rendah tetap memerlukan intervensi dan percepatan program pengurangan kemiskinan ekstrem.

Di sisi lain, beberapa kabupaten mencatat angka yang lebih rendah, seperti Mukomuko (0,62%), Kepahiang (0,60%), Rejang Lebong (0,55%), dan Lebong (0,51%). Kota Bengkulu menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin ekstrem terendah, yaitu 0,41%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh akses infrastruktur, layanan dasar, serta peluang ekonomi yang lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Secara umum, angka kemiskinan ekstrem di Bengkulu masih berkisar antara 0,41% hingga 1,01%. Oleh karena itu, meskipun secara agregat tergolong rendah, kesenjangan antar wilayah menunjukkan perlunya fokus intervensi pada daerah dengan persentase tinggi, sambil menjadikan praktik di Kota Bengkulu sebagai rujukan dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem.

Karakteristik Penduduk Kelompok Pengeluaran Terendah Provinsi Bengkulu, Pendekatan analisa kemiskinan dapat juga dilakukan dengan membagi pengeluaran penduduk ke dalam beberapa kelompok, salah satunya dengan membagi ke dalam 10 kelompok (desil).

2.1.2 Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

2.1.2.1 Indikator 1.2.1 : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

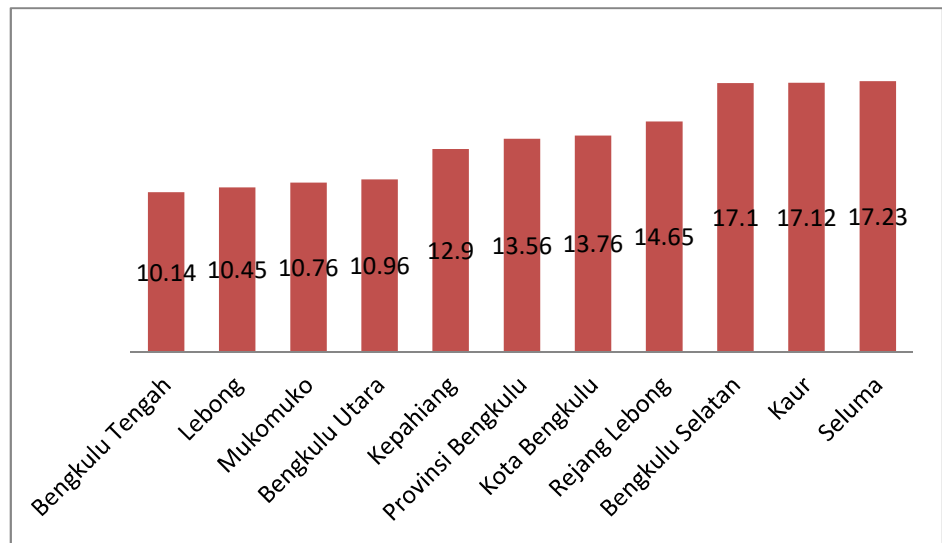
Berbagai pandangan mengenai kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang sulit diukur namun tetap penting sebagai dasar kebijakan. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai deprivasi kesejahteraan, sementara Amartya Sen menekankan pada perampasan kapabilitas. Penyebabnya dapat bersifat alamiah (keterbatasan sumber daya) maupun struktural (ketidakmerataan distribusi sumber daya).

Pengukuran kemiskinan penting untuk memastikan perhatian pada kelompok miskin, mengidentifikasi sasaran intervensi, memantau kebijakan, serta menilai efektivitas lembaga penanggulangan kemiskinan. Ravallion (1998) menyebutkan tahapan pengukurannya: menentukan indikator kesejahteraan, menetapkan standar minimum (garis kemiskinan), dan menyusun ringkasan statistik. World Bank menambahkan ukuran agregat kemiskinan, yaitu *Headcount Index (P0)*, *Poverty Gap Index (P1)*, dan *Poverty Severity Index (P2)*.

Di Indonesia, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) yang mengukur kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan ditentukan dari Garis Kemiskinan Makanan (52 komoditas setara 2100 kkal/kapita/hari) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan).

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada September 2024 mencapai 261,15 ribu orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 20,2 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 27,31 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 12,52 persen, menurun 1,04 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 1,52 persen poin terhadap Maret 2023.

Grafik 2.3
Kemiskinan Kabupaten/ Kota 2024 (Persen)



Sumber: Susenas Maret 2024

Berdasarkan data kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2024 (Sumber: Susenas Maret 2024), terlihat adanya perbedaan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan antarwilayah. Kabupaten Seluma menempati posisi tertinggi dengan tingkat kemiskinan sebesar 17,23%, diikuti oleh Kabupaten Kaur (17,12%) dan Kabupaten Bengkulu Selatan (17,10%), yang menunjukkan masih tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah selatan provinsi. Sebaliknya, tingkat kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah (10,14%), diikuti Kabupaten Lebong (10,45%), Kabupaten Mukomuko (10,76%), dan Kabupaten Bengkulu Utara (10,96%), yang mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut relatif lebih baik. Kota Bengkulu berada pada posisi menengah dengan angka 13,76%, sementara Kabupaten Rejang Lebong mencatat 14,65%. Secara umum, data ini menggambarkan bahwa ketimpangan kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu masih cukup lebar, dengan selisih lebih dari 7 poin persentase antara daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih spesifik dan berbasis wilayah untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah, seperti penguatan ekonomi lokal, peningkatan akses layanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif agar kesenjangan antarwilayah dapat ditekan dan target pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu dapat tercapai.

Kemiskinan diukur menurut Garis Kemiskinan (Makanan dan Bukan Makanan). Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan

oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.

Tabel 2.4
Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, 2023 – 2024

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(I)	(II)	(III)	(IV)
Perkotaan			
Maret 2023	517.906	180.896	698.802
Maret 2024	546.830	189.928	736.758
September 2024	551.184	191.581	742.765
Perubahan Mar'23–Sept'24(%)	6,43	5,91	6,29
Perubahan Mar'24–Sept'24(%)	0,80	0,87	0,83
Perdesaan			
Maret 2023	443.990	165.251	609.241
Maret 2024	468.390	172.095	640.485
September 2024	469.716	172.904	642.620
Perubahan Mar'23–Sept'24(%)	5,79	4,63	5,48
Perubahan Mar'24–Sept'24(%)	0,28	0,47	0,33
Total			
Maret 2023	486.093	170.449	656.542
Maret 2024	507.610	178.107	685.717
September 2024	509.660	179.156	688.816
Perubahan Mar'23–Sept'24(%)	5,78	5,11	5,60
Perubahan Mar'24–Sept'24(%)	0,16	0,59	0,26

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp672.816,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,26 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 5,60 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel dibawah ini bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2024 di perkotaan sebesar 74,21 persen dan di perdesaan sebesar 73,09 persen.

Pada September 2024, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 18,10 persen di perkotaan dan 22,52 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (10,54 persen di perkotaan dan 12,40 persen di perdesaan). Komoditas lainnya adalah daging ayam ras (6,16 persen di perkotaan dan 3,27 persen di perdesaan), tongkol/tuna/cakalang (4,88 persen di perkotaan dan 3,82 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,29 persen di perkotaan dan 3,07 persen di perdesaan), dan seterusnya.

Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (8,31 persen di perkotaan dan 9,03 persen di perdesaan), bensin (3,75 persen di perkotaan dan 5,13 persen di perdesaan), dan listrik (2,83 persen di perkotaan dan 2,72 persen di perdesaan). Urutan selanjutnya adalah sumbangan dari pendidikan, perlengkapan mandi, dan pakaian jadi laki-laki dewasa, dan seterusnya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.5

Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (persen), September 2024

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	74,21	Makanan:	72,09
Beras	18,10	Beras	22,52
Rokok kretek filter	10,54	Rokok kretek filter	12,40
Daging ayam ras	6,16	Tengklol/tuna/cakalang	3,82
Tengklol/tuna/cakalang	4,88	Daging ayam ras	3,27
Telur ayam ras	4,29	Cabe merah	3,27
Susu bubuk	2,76	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	3,21
Cabe merah	2,75	Telur ayam ras	3,07
Mie instan	2,53	Gula pasir	2,02
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,07	Mie instan	1,78
Tempe	1,78	Kue basah	1,62
Telur	1,75	Bawang merah	1,42
Kemang merah	1,57	Daging ayam kampung	1,41
lainnya	15,03	lainnya	13,28
Bukan Makanan:	25,79	Bukan Makanan:	26,91
Perumahan	8,31	Perumahan	9,03
Bensin	3,75	Bensin	5,13
Listrik	2,83	Listrik	2,72
Pendidikan	2,51	Pendidikan	1,50
Perlengkapan mandi	1,16	Perlengkapan mandi	0,98
Angkutan	0,69	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,82
Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,67	Pajak kendaraan bermotor	0,80
lainnya	5,87	lainnya	5,93

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, Garis Kemiskinan per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar Rp3.249.701,-/bulan, naik sebesar persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp3.066.904,-/bulan.

Tabel 2.6

Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2024	671.095	4,57	3.066.904
September 2024	672.816	4,83	3.249.701
Perubahan Maret 2024-September 2024 (%)	0,26	5,69	5,96

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

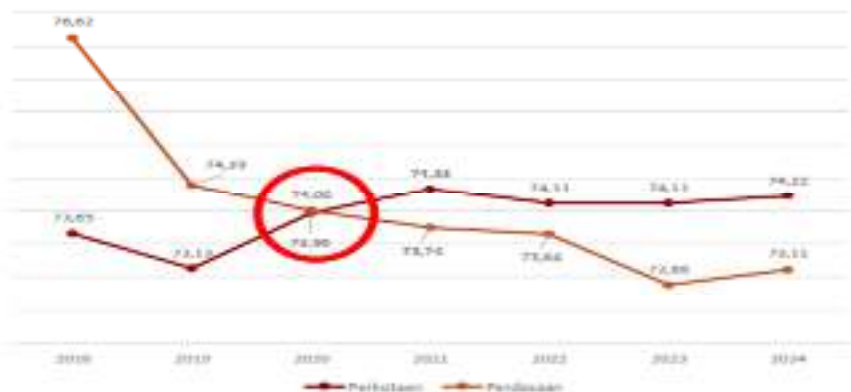
Grafik 2.4
 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu, 2019-2024



Sumber: Susenas 2019-2024

GK Provinsi Bengkulu, baik GK Makanan maupun GK Non makanan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2019, GK Total tercatat sebesar Rp 499.660. GK tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp 671.095 pada 2024.

Grafik 2.5
 Perkembangan Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Makanan Terhadap Garis Kemiskinan Di Perkotaan Dan Perdesaan, 2018-2024



Sumber: Susenas 2018-2024

GK makanan merupakan komponen terbesar penyusun Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pada Tahun 2020, kontribusi GK Makanan di Perkotaan dan Perdesaan hanya berbeda 0,04 persen poin. Pada tahun 2021-2024, Kontribusi GK Makanan di Perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Pada Tahun 2024, pengeluaran penduduk miskin untuk konsumsi makanan mencapai 74,22 persen di perkotaan dan 73,11 persen di perdesaan. Beras merupakankomoditi yang mengambil porsi terbesar pengeluarankonsumsi makanan pendudukdi Provinsi Bengkulu

tahun 2023, yakni sebesar 19,97 persen. Konsumsi kedua dan ketiga terbesar adalah rokok kretek filter dan nasi campur/rames masing-masing sebesar 19,27 persen dan 6,38 persen.

2.1.3 Target Global : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

2.1.3.1 Indikator 1.3.1(a) : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat hingga akhir 2024 jumlah kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 278,1 juta peserta atau 98,45 persen dari total populasi penduduk. hal ini didukung 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota yang telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, juga telah dihadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan. Selain itu, sebagai upaya memperluas cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik dan sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan hingga tahun 2024. Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28 persen, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682. Sedangkan jumlah mitra rumah sakit mitra naik 88 persen, dari 1.681 menjadi 3.162. BPJS Kesehatan juga telah mengoptimalkan Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), Voice Interactive JKN (VIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165. Bukan hanya itu di tahun 2024, BPJS Kesehatan juga menghadirkan inovasi layanan melalui BPJS Kesehatan Online yang bisa dimanfaatkan peserta melalui layanan video conference lewat Aplikasi Zoom untuk mengurus administrasi, informasi, atau pengaduan seputar JKN.

Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Bengkulu sudah di angka 99,76% dengan tingkat keaktifan peserta sebanyak 83,11%. Pemerintah Provinsi pun terus berupaya meningkatkan Universal Health Coverage atau UHC ini dan setidaknya di tahun 2026 mendatang ditarget sudah mencapai 100 persen. Membentuk Unit Reaksi Cepat (URC), menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepesertaan agar mendapatkan pelayanan dan jaminan yang sesuai dengan harapan

dan kualitas.

2.1.4 Tantangan Tujuan SDGs 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Upaya Provinsi Bengkulu dalam mengakhiri kemiskinan masih menghadapi sejumlah tantangan meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan ini penting untuk diidentifikasi agar strategi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) khususnya Tujuan 1 dapat lebih terarah.

Pertama, dari sisi kemiskinan ekstrem, meskipun persentasenya telah menurun signifikan hingga mencapai 0,69 persen pada tahun 2024, kelompok miskin ekstrem masih ada dan sangat rentan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun bencana. Kerentanan ini diperkuat oleh ketimpangan antarwilayah kabupaten/kota, di mana beberapa daerah memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang relatif lebih tinggi.

Kedua, pada aspek kemiskinan umum, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu masih tercatat sebesar 12,52 persen per September 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Meskipun mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, tingkat kemiskinan masih menghadapi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta ketimpangan antarprovinsi di Sumatera. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya ketahanan rumah tangga miskin terhadap guncangan ekonomi, sebagaimana terlihat pada periode pandemi Covid-19 ketika angka kemiskinan kembali meningkat.

Ketiga, pada aspek perlindungan sosial, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bengkulu sudah sangat tinggi mencapai 99,76 persen. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta masih berada pada kisaran 83,11 persen. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemanfaatan layanan jaminan sosial. Selain itu, cakupan perlindungan sosial non-kesehatan seperti jaminan ketenagakerjaan maupun perlindungan bagi kelompok rentan lainnya masih perlu diperluas.

Keempat, tantangan juga muncul dari kenaikan Garis Kemiskinan (GK). Pada September 2024, GK tercatat sebesar Rp672.816 per kapita per bulan, meningkat 5,60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan GK ini menimbulkan risiko meningkatnya jumlah penduduk miskin baru apabila terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok. Komposisi pengeluaran rumah tangga miskin yang masih didominasi oleh konsumsi pangan, khususnya beras, serta tingginya proporsi pengeluaran untuk rokok, menunjukkan kerentanan sekaligus pola konsumsi yang belum produktif.

Kelima, terdapat tantangan bersifat struktural dan kapabilitas. Produktivitas tenaga kerja miskin, terutama di sektor pertanian tradisional, masih rendah. Akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi belum merata, khususnya di perdesaan. Selain itu, kapasitas individu dan komunitas miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan masih terbatas sehingga menghambat transformasi menuju kemandirian.

Dengan demikian, meskipun Provinsi Bengkulu telah menunjukkan kemajuan dalam penurunan kemiskinan, pencapaian Tujuan 1 SDGs masih menghadapi tantangan yang memerlukan strategi terpadu, inovatif, dan berkelanjutan agar kemiskinan dapat benar-benar diatasi dalam segala bentuk dan dimensi.

2.2 Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Ketahanan pangan merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengentasan kemiskinan. Tujuan SDGs ke-2 menekankan pentingnya mengakhiri kelaparan dalam segala bentuk, menjamin akses semua orang terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau sepanjang tahun, serta mendorong sistem pertanian berkelanjutan.

Bagi Provinsi Bengkulu, isu ketahanan pangan memiliki relevansi penting mengingat sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Produksi pangan utama relatif mencukupi, namun produktivitas masih terkendala keterbatasan irigasi, pupuk, teknologi, dan kapasitas petani. Dari sisi distribusi, terdapat disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang menyebabkan harga pangan di daerah terpencil lebih tinggi. Sementara itu, pola konsumsi masih didominasi beras dengan diversifikasi yang rendah, sehingga berdampak pada kualitas gizi masyarakat. Masih ditemui persoalan gizi kurang, stunting, serta ketergantungan pada pangan tertentu yang menimbulkan kerentanan terhadap guncangan harga.

Tantangan lainnya mencakup perubahan iklim, degradasi lahan, dan keterbatasan pengelolaan sumber daya genetik lokal. Oleh karena itu, strategi penguatan ketahanan pangan di Bengkulu perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian yang ramah lingkungan, diversifikasi pangan lokal, perbaikan pola konsumsi dan gizi, serta penguatan sistem distribusi pangan. Upaya tersebut memerlukan sinergi lintas sektor, pemberdayaan petani kecil, serta dukungan

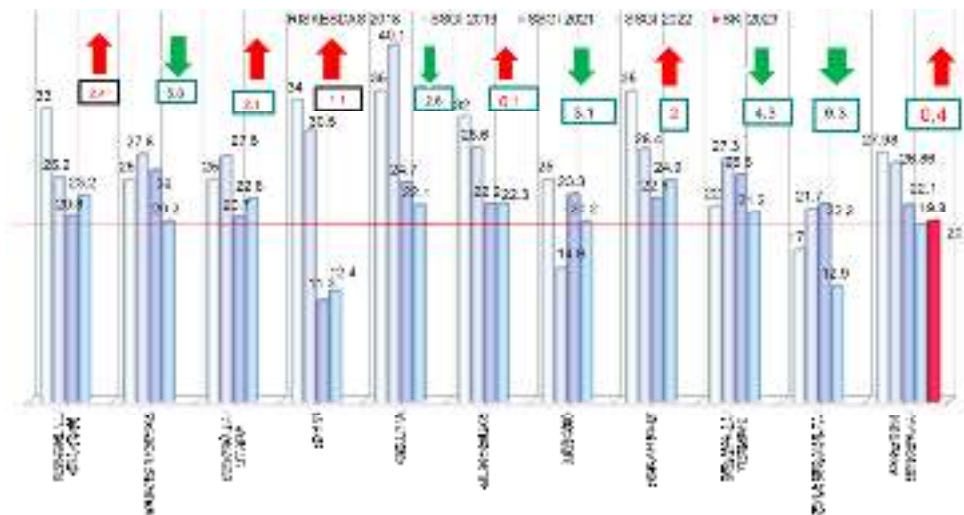
kelembagaan untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

2.2.1 Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula

2.2.1.1 Indikator 2.2.1 : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

Prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun merupakan indikator penting dalam Tujuan 2 dan Tujuan 3 SDGs, karena mencerminkan masalah gizi kronis yang berimplikasi pada kesehatan, perkembangan kognitif, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Perkembangan Data Stunting di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.6
Perkembangan Data Stunting Bengkulu Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2024

Grafik perkembangan stunting di Provinsi Bengkulu tahun 2018–2023 menunjukkan tren yang cukup dinamis antar kabupaten/kota. Secara umum, terjadi penurunan prevalensi stunting dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat beberapa daerah dengan angka cukup tinggi. Misalnya, Kabupaten Seluma dan Mukomuko sempat menunjukkan prevalensi di atas 30% pada 2018, namun turun secara bertahap hingga berada di kisaran 20–25% pada 2023. Sementara itu, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu menunjukkan

capaian relatif baik dengan angka stunting yang terus menurun signifikan, bahkan mendekati atau di bawah rata-rata provinsi.

Secara provinsi, prevalensi stunting Provinsi Bengkulu turun dari 27,98% (2018) menjadi 20,2% (2023). Hal ini merupakan capaian positif, meskipun angka tersebut masih berada sedikit di atas target nasional penurunan stunting <14% pada 2024. Fluktuasi data terlihat jelas, seperti adanya kenaikan di beberapa kabupaten pada periode 2019–2021, yang kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menghambat akses layanan gizi dan kesehatan. Namun, intervensi program percepatan penurunan stunting yang digencarkan pemerintah daerah, seperti perbaikan gizi balita, sanitasi, dan penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, mulai menunjukkan hasil. Tantangan ke depan adalah memastikan konsistensi penurunan di seluruh kabupaten/kota agar tidak ada daerah dengan beban stunting tinggi yang tertinggal. Perkembangan Stunting di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perkembangan Stunting di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stunting (TB/U)	%	22,9	22.1	19,8	20.2	18.8

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, *Profil Kesehatan Ibu dan Anak Provinsi Bengkulu Tahun 2024*

Di Provinsi Bengkulu, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 prevalensi stunting tercatat sebesar 22,9%, menurun menjadi 22,1% pada tahun 2021, dan kembali turun signifikan menjadi 19,8% pada tahun 2022. Meskipun sempat sedikit meningkat menjadi 20,2% pada tahun 2023, capaian tahun 2024 berhasil menekan prevalensi menjadi 18,8%. Angka ini menggambarkan adanya progres positif menuju target nasional prevalensi stunting di bawah 14% pada tahun 2024.

Penurunan prevalensi ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pemerintah kabupaten/kota, lintas sektor, serta mitra pembangunan yang melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara konvergen. Berbagai intervensi gizi spesifik seperti peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan bergizi, pemantauan tumbuh kembang balita, serta promosi ASI eksklusif berjalan beriringan dengan intervensi gizi sensitif, antara lain perbaikan akses air bersih, sanitasi, serta

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola asuh dan gizi seimbang.

Namun demikian, tantangan masih perlu diatasi, terutama terkait kesenjangan antarwilayah kabupaten/kota, keterbatasan akses pangan bergizi di daerah terpencil, serta pengaruh faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan ibu. Oleh karena itu, strategi percepatan perlu terus diperkuat dengan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Dengan langkah yang konsisten, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mempercepat pencapaian target penurunan stunting, sehingga mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

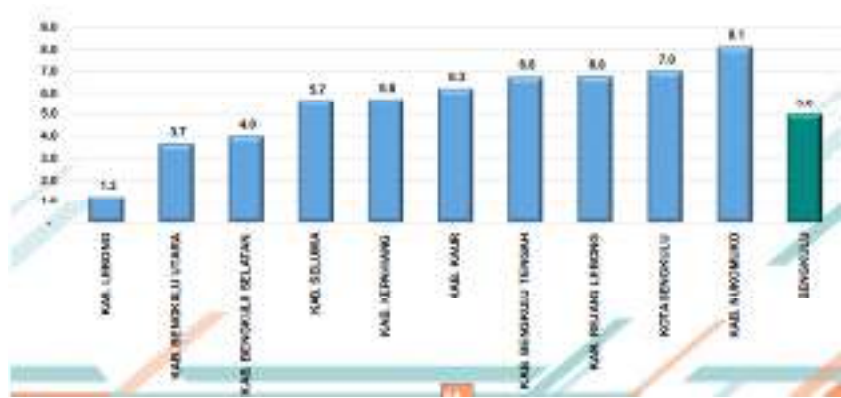
2.2.1.2 Indikator 2.2.2 : Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari lima tahun, berdasarkan tipe

Prevalensi wasting atau gizi kurus merupakan salah satu indikator penting dalam pemantauan status gizi anak balita yang menggambarkan kondisi berat badan tidak seimbang terhadap tinggi badan akibat kekurangan gizi akut. Indikator ini menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Di Provinsi Bengkulu, pengukuran prevalensi wasting dilakukan melalui survei kesehatan maupun pemantauan status gizi secara berkala, dengan membedakan antara wasting moderat (kurus) dan wasting berat (sangat kurus). Hasil pemantauan menunjukkan bahwa prevalensi wasting masih berada pada kategori yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun tren penurunan mulai terlihat, prevalensi gizi kurus maupun sangat kurus masih menunjukkan kesenjangan antarwilayah kabupaten/kota yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses pangan, pola asuh dan pengetahuan gizi orang tua, kondisi sanitasi dan air bersih, serta cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang belum merata.

Upaya penurunan prevalensi wasting telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui berbagai program, baik intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, suplementasi gizi, dan pemantauan tumbuh kembang, maupun intervensi gizi sensitif melalui peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, penyediaan air minum aman, perbaikan sanitasi, dan edukasi gizi keluarga. Selain itu, penguatan sistem surveilans gizi berbasis masyarakat juga terus dikembangkan untuk mendukung

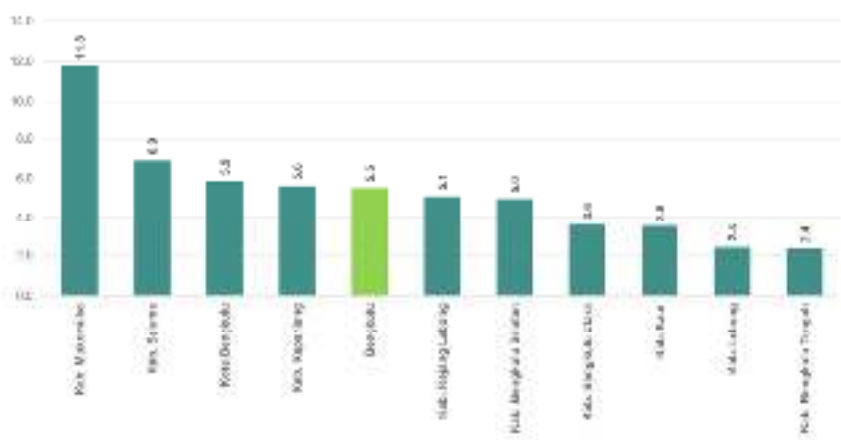
deteksi dini kasus gizi buruk. Ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terintegrasi, melibatkan lintas sektor, serta berfokus pada kelompok rentan, sehingga percepatan penurunan prevalensi wasting di Provinsi Bengkulu dapat tercapai sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan.

Grafik 2.7
Prevalensi Balita Wasting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2022

Grafik 2.8
Prevalensi Balita Wasting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2023

Berdasarkan data prevalensi balita wasting di Provinsi Bengkulu tahun 2021 dan 2022 terlihat dinamika yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Pada tahun 2021, prevalensi wasting relatif bervariasi, dengan angka tertinggi di Kabupaten Mukomuko (8,1%), diikuti oleh Kota Bengkulu (7,0%) dan Rejang Lebong (6,8%). Sementara itu, angka terendah tercatat di Kabupaten Lebong (1,3%) dan Bengkulu Utara (3,7%). Secara provinsi, prevalensi wasting berada pada level 5,0%, masih di bawah ambang batas masalah kesehatan masyarakat menurut WHO ($\geq 5\%$). Namun, terdapat beberapa daerah dengan angka di atas rata-rata provinsi, yang

menunjukkan adanya ketimpangan dalam pencapaian gizi anak antarwilayah.

Pada tahun 2022, distribusi prevalensi mengalami perubahan. Kabupaten Mukomuko kembali mencatat prevalensi tertinggi, bahkan meningkat menjadi 11,8%, jauh di atas rata-rata provinsi 5,5%, sehingga perlu menjadi perhatian utama. Kabupaten Seluma juga menunjukkan angka cukup tinggi yaitu 6,9%, sementara kabupaten dengan angka terendah adalah Bengkulu Tengah dan Lebong (masing-masing 2,4%). Jika dibandingkan dengan 2021, beberapa daerah berhasil menurunkan prevalensi (misalnya Rejang Lebong dan Kaur), namun ada daerah yang justru melonjak drastis (Mukomuko). Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan gizi belum merata, diperlukan penguatan intervensi spesifik (seperti pemberian makanan tambahan dan penanganan balita gizi buruk) dan sensitif (peningkatan sanitasi, air bersih, dan pendidikan gizi) yang lebih terarah, khususnya di daerah dengan prevalensi tinggi.

Kesimpulan, prevalensi balita wasting di Provinsi Bengkulu tahun 2021–2022 menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah, dengan beberapa kabupaten seperti Mukomuko dan Seluma mengalami prevalensi tinggi bahkan di atas rata-rata provinsi, sementara kabupaten lain relatif rendah. Hal ini menandakan intervensi perbaikan gizi belum berjalan merata di seluruh daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan penanggulangan gizi buruk melalui pendekatan lintas sektor. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain: memperluas cakupan program perbaikan gizi balita berbasis keluarga, meningkatkan ketahanan pangan lokal, memperbaiki akses layanan kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat program sanitasi dan penyediaan air bersih. Fokus prioritas intervensi sebaiknya diarahkan pada daerah dengan prevalensi tertinggi untuk menekan ketimpangan sekaligus mempercepat penurunan wasting secara provinsi.

2.2.1.3 Indikator 2.2.2.(a) : Kualitas konsumsi pangan yang diidentifikasi oleh skor pola pangan harapan (PPH)

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Provinsi Bengkulu diukur melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan sesuai kebutuhan gizi. Semakin mendekati angka 100, semakin baik kualitas pola konsumsi pangan suatu daerah. Selama periode 2020–2023, skor PPH Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, skor PPH berada pada angka 82,6 dan relatif stabil di tahun 2021 sebesar 82,7. Selanjutnya, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 87,1 dan terus meningkat hingga mencapai 87,8 pada tahun 2023. Hal ini

mengindikasikan bahwa secara rata-rata, masyarakat Bengkulu mengalami perbaikan dalam keberagaman dan kualitas konsumsi pangan yang lebih seimbang dari tahun ke tahun.

Jika ditinjau antarwilayah, peningkatan skor PPH juga terlihat cukup merata meskipun masih terdapat variasi capaian. Kota Bengkulu menjadi wilayah dengan capaian tertinggi pada 2023 yakni 90,9, mencerminkan pola konsumsi pangan yang lebih beragam. Beberapa daerah lain juga menunjukkan perkembangan signifikan, seperti Rejang Lebong yang naik dari 79,3 pada 2020 menjadi 89,4 pada 2023, serta Seluma yang pada awalnya hanya 71,0 di tahun 2020 dan meningkat pesat hingga 86,7 pada tahun 2023. Kabupaten Bengkulu Selatan juga mengalami fluktuasi dengan penurunan skor pada 2021, namun berhasil mencapai 91,0 di tahun 2022 sebelum sedikit menurun menjadi 89,2 di tahun 2023. Sementara itu, Mukomuko, Kaur, dan Kepahiang secara konsisten mencatat skor yang cukup baik meskipun masih sedikit lebih rendah dibandingkan daerah dengan capaian tertinggi.

Secara keseluruhan, capaian skor PPH Provinsi Bengkulu dalam periode 2020–2023 menggambarkan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat di hampir seluruh wilayah. Perbaikan ini menunjukkan bahwa program diversifikasi pangan, peningkatan ketersediaan pangan, dan edukasi gizi yang dijalankan telah memberikan dampak positif. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk mengurangi disparitas antarwilayah agar seluruh kabupaten/kota dapat mencapai skor PPH yang merata dan semakin mendekati angka ideal.

Tabel 2.8
Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2020 - 2023

Wilayah	2020	2021	2022	2023
Provinsi Bengkulu	82,6	82,7	87,1	87,8
Bengkulu Selatan	84,6	82,5	91,0	89,2
Rejang Lebong	79,3	84,1	82,5	89,4
Bengkulu Utara	84,7	88,3	89,1	88,0
Kaur	75,8	83,6	88,3	86,5
Seluma	71,0	73,8	87,9	86,7
Mukomuko	87,9	85,4	87,3	88,5
Lebong	81,4	84,1	86,7	87,3
Kepahiang	75,5	81,7	84,4	85,7
Bengkulu Tengah	83,8	80,6	86,7	90,9

Wilayah	2020	2021	2022	2023
Kota Bengkulu	84,2	82,5	87,0	86,2

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

2.2.2 Tantangan Tujuan SDGs 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar. Produktivitas pertanian belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana, sistem irigasi yang belum memadai, keterlambatan distribusi pupuk, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dan kapasitas petani. Diversifikasi pangan juga masih rendah, dengan pola konsumsi masyarakat yang sangat bergantung pada beras sehingga berdampak pada kurang beragamnya asupan gizi. Selain itu, disparitas harga pangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi, terutama di daerah terpencil yang terkendala distribusi logistik. Situasi ini diperburuk oleh ancaman perubahan iklim, degradasi lahan, serta keterbatasan pengelolaan sumber daya genetik lokal yang berpotensi menurunkan produksi pangan dalam jangka panjang.

Permasalahan gizi juga masih menjadi tantangan serius. Meskipun prevalensi stunting di Bengkulu menurun dari 27,98% pada tahun 2018 menjadi 18,8% pada tahun 2024, angka ini masih berada di atas target nasional <14% pada 2024. Terdapat pula kesenjangan antarwilayah, di mana beberapa kabupaten seperti Seluma dan Mukomuko mencatat angka stunting lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Kondisi serupa juga terlihat pada prevalensi wasting, yang pada tahun 2022 mencapai 5,5% di tingkat provinsi. Kabupaten Mukomuko bahkan mencatat prevalensi 11,8% atau lebih dari dua kali lipat rata-rata provinsi, yang menunjukkan belum meratanya intervensi gizi. Faktor lain seperti rendahnya pengetahuan gizi keluarga, pola asuh yang kurang tepat, serta terbatasnya akses layanan kesehatan ibu dan anak turut memperburuk situasi gizi di daerah tertentu.

Dari sisi kualitas konsumsi pangan, capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 82,6 pada tahun 2020 menjadi 87,8 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Namun demikian, disparitas antarwilayah masih terlihat, di mana beberapa daerah seperti Seluma dan Kepahiang meskipun menunjukkan peningkatan signifikan, tetap berada di bawah capaian tertinggi seperti Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah. Kesenjangan ini erat kaitannya dengan keterbatasan akses pangan

bergizi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, khususnya kemiskinan rumah tangga.

Selain itu, permasalahan juga muncul pada aspek kelembagaan dan sinergi program. Integrasi lintas sektor antara pertanian, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial masih belum optimal dalam menangani persoalan gizi dan ketahanan pangan. Program intervensi gizi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang balita, belum menjangkau secara merata daerah-daerah dengan prevalensi tinggi. Di sisi lain, kelembagaan desa seperti BUMDes dan kelompok tani juga belum sepenuhnya berperan optimal dalam mendukung kemandirian pangan maupun diversifikasi produk lokal. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi dan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

2.3 Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Tujuan 3 SDGs menekankan pentingnya upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta perluasan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali. Bagi Provinsi Bengkulu, pencapaian tujuan ini menjadi prioritas penting mengingat kesehatan merupakan fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Selama beberapa tahun terakhir, Provinsi Bengkulu telah menunjukkan kemajuan di sejumlah indikator kesehatan, seperti perbaikan akses terhadap layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas gizi masyarakat, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi meskipun masih fluktuatif. Tantangan yang dihadapi antara lain masih adanya disparitas akses layanan di wilayah terpencil, keterbatasan tenaga kesehatan spesialis, serta kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya optimal dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin.

Dengan penguatan sistem pelayanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga medis, pemenuhan sarana prasarana kesehatan, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat, Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus mendorong tercapainya kehidupan sehat dan kesejahteraan semua usia. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target SDGs pada 2030, sekaligus

memperkuat kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif.

- 2.3.1

Target Global

:

Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup
- 2.3.1.1

Indikator 3.1.1*

:

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Indikator ini mengukur jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yang terjadi selama kehamilan, persalinan, maupun dalam masa nifas akibat penyebab terkait kehamilan. AKI mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan, akses terhadap fasilitas persalinan, serta efektivitas upaya pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKI	Nilai	179	50	28	125	92

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Bengkulu periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi signifikan, dari 179 per 100.000 kelahiran hidup pada 2020 turun hingga 28 pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 125 di 2023 sebelum menurun ke 92 pada 2024. Perubahan ini mencerminkan adanya perbaikan layanan kesehatan maternal, tetapi keberlanjutannya masih menghadapi tantangan. Permasalahan yang muncul antara lain keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, keterlambatan rujukan, serta kualitas layanan dan tenaga kesehatan yang belum merata. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kehamilan rutin masih rendah, sehingga risiko komplikasi belum sepenuhnya tertangani. Upaya penguatan layanan kesehatan ibu, perbaikan sistem rujukan, dan peningkatan ketersediaan tenaga medis terlatih perlu terus diperkuat agar target SDGs menurunkan AKI di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 2030 dapat tercapai.

- 2.3.2

Target Global

:

Pada tahun 2030, mengakhiri bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal
- 2.3.2.1

Indikator 3.2.1*

:

Mengurangi Angka Kematian Bayi (AKB)

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10

Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 KH

di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
AKB/1000 Kelahiran Hidup	Nilai	7	1	7	8	8	12.04

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2024

- 2.3.3

Target Global

:

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang
- 2.3.3.1

Indikator 3.8.2(a)

:

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 3, yaitu *Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan bagi Semua Usia*. JKN diharapkan dapat memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, agar mereka memiliki akses layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani masalah biaya. Di Provinsi Bengkulu, cakupan kepesertaan JKN terus menunjukkan perkembangan positif, di mana pada tahun 2024 telah mencapai 99,5 persen dari total penduduk. Capaian ini menandakan bahwa Bengkulu hampir mencapai target cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC), meskipun masih terdapat kesenjangan kecil dalam kepesertaan akibat kendala administratif, validasi data, dan keterbatasan informasi di sebagian wilayah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pemerintah kabupaten/kota telah berupaya memperluas cakupan JKN melalui integrasi program jaminan kesehatan daerah dengan skema nasional, peningkatan validasi data kepesertaan, serta dukungan anggaran untuk membiayai iuran masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan JKN sebagai instrumen perlindungan sosial di bidang kesehatan. Ke depan, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sistem informasi kepesertaan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan yang ditanggung JKN perlu terus dilakukan agar Provinsi Bengkulu dapat mempertahankan capaian tinggi yang sudah diraih dan sekaligus mewujudkan UHC secara berkelanjutan sesuai dengan target SDGs dan arah pembangunan kesehatan nasional.

2.3.4 Tantangan Tujuan SDGs 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Derajat kesehatan masyarakat Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar, perbaikan status gizi, serta meluasnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hampir mencapai Universal Health Coverage (UHC). Namun demikian, pencapaian tersebut masih menghadapi tantangan besar. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih berfluktuasi cukup tinggi. AKI misalnya, sempat menurun signifikan hingga 28 per 100.000 kelahiran hidup pada 2022, namun kembali melonjak menjadi 125 pada 2023 sebelum turun lagi menjadi 92 pada 2024. Kondisi ini mencerminkan belum stabilnya kualitas pelayanan kesehatan maternal,

keterbatasan akses di wilayah terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kehamilan rutin.

Selain itu, angka kematian bayi di Provinsi Bengkulu juga masih memerlukan perhatian serius. Data menunjukkan AKB meningkat dari 7 per 1.000 kelahiran hidup pada 2021 menjadi 12,04 pada 2024. Kenaikan ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem pelayanan kesehatan bayi dan balita, termasuk keterbatasan dalam deteksi dini penyakit, cakupan imunisasi, serta akses layanan neonatal yang memadai di seluruh wilayah. Tingginya AKB sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial-ekonomi, status gizi, dan lingkungan, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan multisektor yang lebih komprehensif.

Cakupan JKN yang telah mencapai 99,5 persen pada 2024 memang menjadi capaian membanggakan, tetapi kualitas layanan kesehatan yang ditanggung JKN masih menghadapi tantangan. Kesenjangan akses masih dirasakan di beberapa wilayah terpencil karena keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga medis spesialis, serta sarana transportasi untuk menjangkau pusat layanan kesehatan rujukan. Selain itu, kendala administratif seperti validasi data kepesertaan juga menimbulkan masalah dalam pemanfaatan layanan. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas JKN sebagai instrumen perlindungan sosial di bidang kesehatan apabila tidak segera diperbaiki.

Secara keseluruhan, tantangan Tujuan 3 di Provinsi Bengkulu mencakup fluktuasi tinggi pada indikator kematian ibu dan bayi, ketimpangan akses layanan kesehatan antarwilayah, keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas medis, serta masalah gizi yang masih berkaitan erat dengan stunting dan wasting. Disparitas kualitas layanan juga memperlihatkan bahwa meskipun cakupan administratif seperti JKN hampir universal, kualitas layanan dan pemerataan akses masih menjadi pekerjaan rumah besar. Oleh karena itu, upaya percepatan pencapaian Tujuan 3 perlu diarahkan pada penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kualitas rujukan maternal dan neonatal, distribusi tenaga medis yang lebih merata, serta penguatan sinergi lintas sektor untuk memastikan kehidupan yang sehat dan kesejahteraan bagi semua usia dapat benar-benar terwujud di Provinsi Bengkulu.

2.4 Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Tujuan 4 SDGs yaitu Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat

untuk semua, merupakan salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu. Pendidikan berkualitas menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan global. Di Bengkulu, capaian pembangunan pendidikan menunjukkan tren positif dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, semakin luasnya akses pendidikan bagi kelompok rentan, serta meningkatnya perhatian terhadap mutu pembelajaran. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa disparitas akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, keterbatasan sarana prasarana di beberapa kabupaten/kota, serta kesenjangan kualitas tenaga pendidik yang berpengaruh terhadap pemerataan mutu pendidikan.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah antara lain melalui program wajib belajar 12 tahun, peningkatan akses pendidikan anak usia dini, penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan, serta pengembangan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, dukungan terhadap program literasi, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan pendidikan nonformal juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Ke depan, strategi pembangunan pendidikan di Provinsi Bengkulu diarahkan pada perluasan akses yang merata, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pemerataan sarana prasarana, serta integrasi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan langkah ini, diharapkan tujuan SDGs 4 dapat tercapai secara optimal dan sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang menempatkan sumber daya manusia sebagai pilar utama.

2.4.1 Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas

2.4.1.1 Indikator 4.3.1* : Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin / Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur 16-18 (Proxi)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam mendukung pencapaian Tujuan 4 SDGs, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua. APS menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu, sehingga mencerminkan akses dan keterjangkauan layanan pendidikan di daerah. Di Provinsi Bengkulu,

capaian APS menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada kelompok usia 7–12 tahun atau jenjang pendidikan dasar, APS tetap tinggi dan konsisten di atas 99 persen, dengan capaian 99,51 persen pada tahun 2024. Untuk kelompok usia 13–15 tahun atau jenjang pendidikan menengah pertama, APS relatif stabil di kisaran 97 persen, yaitu 97,93 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah pertama di Bengkulu telah mengakses layanan pendidikan formal.

Namun demikian, tantangan masih terlihat pada kelompok usia sekolah menengah atas (16–18 tahun) dan perguruan tinggi (19–24 tahun). APS pada usia 16–18 tahun berada di kisaran 79 persen pada 2024, yang berarti masih ada sekitar seperlima remaja di Bengkulu yang belum terakomodasi di jenjang SMA/SMK. Sementara itu, APS pada kelompok usia 19–24 tahun menunjukkan peningkatan, namun masih relatif rendah, dari 33,04 persen pada tahun 2022 menjadi 35,13 persen pada 2024. Hal ini mencerminkan bahwa akses ke pendidikan tinggi masih terbatas, terutama karena faktor biaya, keterjangkauan sarana, serta pilihan alternatif memasuki dunia kerja setelah lulus SMA/SMK. Ke depan, upaya peningkatan APS di Provinsi Bengkulu perlu difokuskan pada penguatan akses pendidikan menengah dan tinggi melalui penyediaan beasiswa, perluasan fasilitas pendidikan, serta integrasi program vokasi dengan kebutuhan pasar kerja sehingga kesempatan belajar sepanjang hayat dapat semakin terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (A P S)											
	7-12			13-15			16-18			19-24		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
BENGKULU	99.49	99.42	99.51	97.73	97.91	97.93	79.31	79.57	79.07	33.04	34.05	35.13

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2024

2.4.2 Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan

2.4.2.1 Indikator 4.5.1* : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki- laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator penting dalam Tujuan 4 SDGs, yaitu menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif, merata, dan kesempatan belajar sepanjang hayat. APM menunjukkan proporsi anak usia sekolah yang benar-benar bersekolah sesuai jenjang usianya, sedangkan APK mengukur tingkat partisipasi pendidikan tanpa memperhatikan kesesuaian usia pada jenjang tertentu. Analisis berdasarkan karakteristik sosial seperti jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, status ekonomi, dan kondisi disabilitas menjadi penting untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam akses pendidikan. Dalam konteks Provinsi Bengkulu, rasio APM dan APK dapat mencerminkan kesenjangan yang ada antara perempuan dan laki-laki, perkotaan dan perdesaan, kelompok ekonomi kuintil terbawah dan teratas, maupun antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Umumnya, data nasional menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki APS dan APM yang relatif lebih baik dibanding laki-laki, namun disparitas justru lebih nyata antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara kelompok ekonomi bawah dengan kelompok atas. Sementara itu, kelompok disabilitas masih menghadapi hambatan signifikan dalam akses pendidikan, baik karena keterbatasan layanan inklusif maupun sarana prasarana yang belum memadai. Perkembangan APM Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Perkembangan APM menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

Provinsi	Angka Partisipasi Murni (A P M)								
	SD/ Sederajat			SMP/ Sederajat			SM/ Sederajat		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
BENGKULU	98.60	98.61	98.33	80.25	81.08	82.36	66.61	67.09	69.14

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan data APM Provinsi Bengkulu tahun 2022–2024, terlihat bahwa partisipasi sekolah di tingkat SD/ sederajat telah sangat tinggi dan stabil di atas 98 persen (98,60 persen pada 2022; 98,61 persen pada 2023; dan 98,33 persen pada 2024). Hal ini menunjukkan hampir seluruh anak usia SD telah bersekolah sesuai jenjangnya.

Pada jenjang SMP/ sederajat, APM mengalami peningkatan dari 80,25 persen pada 2022 menjadi 82,36 persen pada 2024, yang mencerminkan perbaikan akses pendidikan menengah pertama meskipun belum sepenuhnya menjangkau semua anak usia sekolah. Tantangan terbesar masih terlihat pada jenjang SMA/ SMK/ sederajat, di mana APM baru mencapai 66,61 persen pada 2022 dan meningkat menjadi 69,14 persen pada 2024. Artinya, hampir sepertiga remaja usia SMA di Bengkulu belum dapat bersekolah sesuai jenjang. Hal ini berkorelasi dengan perbedaan akses antara pedesaan dan perkotaan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta pilihan remaja untuk masuk ke dunia kerja lebih cepat. Jika dibandingkan dengan indikator APK, kondisi ini juga mencerminkan bahwa banyak anak usia sekolah menengah atas yang bersekolah tidak sesuai jenjang usia, serta masih terbatasnya kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, strategi percepatan pencapaian SDGs di Provinsi Bengkulu perlu difokuskan pada peningkatan rasio APM dan APK secara lebih merata dengan intervensi berbasis kelompok sasaran, seperti pemberian beasiswa untuk keluarga miskin, penyediaan layanan pendidikan inklusif bagi disabilitas, pembangunan sarana pendidikan di wilayah terpencil, serta penguatan literasi gender untuk mendorong kesetaraan kesempatan belajar bagi perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.13
Perkembangan APK menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (A P K)								
	SD/ Sederajat			SMP/ Sederajat			SM/ Sederajat		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
BENGKULU	109.23	107.67	107.16	90.79	93.10	92.24	93.97	94.53	97.41

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan data APK Provinsi Bengkulu tahun 2022–2024, terlihat bahwa partisipasi pendidikan dasar (SD/ sederajat) berada pada tingkat yang sangat tinggi, bahkan melampaui angka 100 persen, yaitu 109,23 persen pada tahun 2022, 107,67 persen pada tahun 2023, dan 107,16 persen pada tahun 2024. Capaian di atas 100 persen ini mengindikasikan adanya siswa yang bersekolah di jenjang SD meskipun usianya sudah lebih tinggi dari kelompok usia sekolah dasar. Fenomena ini umumnya terkait dengan keterlambatan masuk sekolah atau pengulangan kelas, yang sekaligus menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah universal, masih terdapat tantangan dalam ketepatan usia sekolah.

Pada jenjang SMP/ sederajat, APK menunjukkan tren yang relatif stabil meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Capaian sebesar 90,79 persen pada tahun 2022 meningkat menjadi 93,10 persen pada

tahun 2023, sebelum menurun tipis ke 92,24 persen pada tahun 2024. Angka ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan tingkat menengah pertama di Bengkulu sudah cukup baik, namun masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh anak usia sekolah, karena masih ada sekitar 7-8 persen anak yang belum terakomodasi di jenjang SMP. Sementara itu, APK pada jenjang SMA/SMK/ sederajat menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 93,97 persen pada 2022 menjadi 94,53 persen pada 2023, dan mencapai 97,41 persen pada 2024. Tren positif ini menggambarkan perbaikan akses pendidikan menengah atas, sekaligus mengindikasikan semakin luasnya kesempatan remaja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, capaian APK di Provinsi Bengkulu mencerminkan bahwa akses pendidikan pada setiap jenjang terus mengalami perbaikan, khususnya di tingkat SMA/SMK. Namun demikian, adanya APK SD yang tinggi di atas 100 persen menegaskan perlunya perhatian pada ketepatan usia masuk sekolah dan efektivitas pembelajaran agar tidak terjadi keterlambatan. Di sisi lain, masih terdapat pekerjaan rumah untuk meningkatkan APK SMP agar lebih mendekati universal, serta mendorong perluasan kesempatan pendidikan di perguruan tinggi sehingga kesinambungan belajar sepanjang hayat dapat benar-benar terwujud.

2.4.3 Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi

2.4.3.1 Indikator 4.6.1(a) : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun

Angka Melek Aksara (AMA) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia dan capaian pembangunan pendidikan di daerah. Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis, sehingga menjadi fondasi utama bagi peningkatan literasi, keterampilan, serta akses terhadap peluang sosial maupun ekonomi. Tingginya angka melek aksara menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan dalam menjangkau masyarakat luas, sementara rendahnya capaian menandakan masih adanya kelompok rentan yang tertinggal dari akses pendidikan formal.

Di Provinsi Bengkulu, capaian AMA memiliki arti strategis dalam mendukung terwujudnya pendidikan inklusif dan berkeadilan sebagaimana yang dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs) khususnya Goal 4. Keberhasilan dalam meningkatkan angka melek aksara tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan formal, tetapi juga erat hubungannya dengan keberlanjutan program literasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu, AMA menjadi salah satu tolok ukur penting yang dapat mencerminkan kualitas pembangunan manusia di Bengkulu. Angka Melek Aksara Penduduk 15 Tahun ke Atas di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Angka Melek Aksara Penduduk 15 Tahun ke Atas di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Provinsi	Angka Melek Aksara Penduduk 15 Tahun ke Atas				
	2020	2021	2022	2023	2024
BENGKULU	98.01	97.88	97.80	97.89	97.91

Sumber : *bps.go.id*

Data menunjukkan bahwa angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Bengkulu relatif tinggi dan stabil selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, angka melek aksara tercatat sebesar 98,01 persen, sedikit menurun menjadi 97,88 persen pada 2021, lalu 97,80 persen pada 2022. Namun, capaian ini kembali menunjukkan tren positif dengan kenaikan tipis pada 2023 sebesar 97,89 persen, dan meningkat lagi menjadi 97,91 persen pada 2024.

Stabilitas capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia produktif dan dewasa di Bengkulu telah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Meski demikian, masih terdapat sekitar 2–3 persen penduduk yang buta aksara. Kelompok ini umumnya berada di wilayah pedesaan, kelompok usia lanjut, atau masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan. Oleh karena itu, intervensi khusus seperti program pemberantasan buta aksara berbasis komunitas, pemberdayaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta literasi fungsional yang menyasar kelompok rentan perlu terus diperkuat.

Secara umum, pencapaian angka melek aksara di Provinsi Bengkulu sudah mendekati target universal, dan merupakan modal penting dalam mendukung pencapaian SDGs Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, khususnya pada aspek akses pendidikan yang inklusif dan pembelajaran sepanjang hayat.

2.4.4 Tantangan Tujuan SDGs 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Permasalahan dan tantangan terkait indikator APM, APK dan Angka Melek Aksara di Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Masih adanya buta aksara, meskipun angka melek aksara di Bengkulu sudah tinggi (97,91% pada 2024), masih terdapat sekitar 2% penduduk usia 15 tahun ke atas yang belum bisa membaca dan menulis. Kelompok rentan umumnya adalah masyarakat lanjut usia, perempuan di daerah pedesaan, serta mereka yang tidak pernah atau tidak menyelesaikan pendidikan dasar.
2. Ketepatan usia sekolah yang belum optimal, APM SD sudah mendekati universal (98,3% pada 2024), tetapi pada SMP (82,36%) dan SMA/SMK (69,14%) terjadi penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan masih ada anak usia sekolah yang terlambat masuk sekolah, putus sekolah, atau memilih jalur nonformal.
3. APK yang tinggi di SD, tetapi belum merata di jenjang lebih tinggi, APK SD mencapai lebih dari 100% (107,16% pada 2024) yang menandakan akses sudah luas, tetapi terdapat masalah keterlambatan masuk sekolah dan pengulangan kelas. APK SMP (92,24%) dan SMA/SMK (97,41%) memang relatif baik, tetapi belum sepenuhnya menjangkau seluruh anak usia sekolah, terutama dari kelompok miskin dan pedesaan.
4. Disparitas akses pendidikan antar kelompok sosial, masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan, desa dan kota, kelompok ekonomi kuintil bawah dan atas, serta anak penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Anak-anak dari keluarga miskin dan daerah pedesaan cenderung memiliki APM dan APK yang lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya.
5. Risiko putus sekolah dan transisi ke jenjang lebih tinggi, penurunan APM pada jenjang SMP dan SMA/SMK menandakan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan pendidikan dari SD ke SMP, serta dari SMP ke SMA/SMK atau perguruan tinggi. Faktor penyebab antara lain keterbatasan ekonomi, pernikahan usia dini, minimnya fasilitas pendidikan di daerah tertentu, serta motivasi belajar yang rendah.
6. Kualitas pendidikan dan hasil belajar, tingginya APK dan APM belum sepenuhnya menjamin kualitas pembelajaran dan capaian literasi-numerasi siswa. Tantangan terletak pada peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana-prasarana pendidikan, serta penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah.

2.5 Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan ini menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidaksetaraan yang masih dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah domestik, sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan memastikan perempuan memiliki akses, kesempatan, dan hak yang setara dengan laki-laki, pembangunan dapat berjalan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Di Provinsi Bengkulu, isu kesetaraan gender memiliki posisi strategis mengingat perempuan merupakan hampir setengah dari jumlah penduduk. Berbagai capaian telah ditorehkan, seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan, dunia kerja, maupun pengambilan keputusan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan, tingginya beban kerja ganda bagi perempuan, serta masih adanya kasus kekerasan berbasis gender. Selain itu, representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan politik, pemerintahan, dan ekonomi juga masih perlu diperkuat agar tercipta ruang yang lebih setara dalam proses pembangunan daerah.

Upaya untuk mencapai kesetaraan gender di Bengkulu tidak hanya sebatas pada pemenuhan hak perempuan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga mencakup penghapusan norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan. Hal ini perlu diimbangi dengan kebijakan afirmatif, program pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan dari kekerasan, serta penguatan peran perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, pencapaian Tujuan 5 SDGs akan menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan di Bengkulu berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.

2.5.1 Target Global : Menghapuskan semua praktek berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan

2.5.1.1 Indikator 5.3.1* : Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun

Perkawinan usia anak merupakan salah satu isu krusial dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan

Kaum Perempuan dan Anak Perempuan. Praktik perkawinan sebelum usia 18 tahun tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak panjang pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta kualitas hidup perempuan. Anak perempuan yang menikah di usia dini lebih berisiko mengalami putus sekolah, keterbatasan akses ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta komplikasi kesehatan akibat kehamilan di usia muda. Oleh karena itu, indikator ini sangat penting dalam mengukur sejauh mana upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan telah berjalan di Provinsi Bengkulu. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Provinsi Bengkulu	10.68	11.93	8.80	7.01	6.30

Sumber : bps.go.id, 2024

Data BPS menunjukkan bahwa proporsi perempuan usia 20–24 tahun di Provinsi Bengkulu yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angkanya tercatat sebesar 10,68 persen, kemudian justru naik pada 2021 menjadi 11,93 persen. Namun, tren penurunan yang cukup signifikan terjadi setelahnya, yakni 8,80 persen di tahun 2022, lalu turun lagi menjadi 7,01 persen pada 2023, dan mencapai titik terendah di tahun 2024 yaitu 6,30 persen.

Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak, baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi, maupun intervensi program pemerintah dan lembaga terkait. Meski demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian perempuan muda di Bengkulu belum sepenuhnya terbebas dari praktik perkawinan usia dini. Tantangan yang dihadapi antara lain faktor sosial budaya, rendahnya pendidikan, serta kondisi ekonomi keluarga yang mendorong terjadinya perkawinan dini. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan kebijakan afirmatif, pendidikan reproduksi dan kesehatan, serta pemberdayaan sosial ekonomi bagi keluarga dan anak perempuan untuk menekan angka perkawinan anak hingga mendekati nol kasus pada tahun-tahun mendatang.

- 2.5.2 Target Global** : **Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat**
- 2.5.2.1 Indikator 5.5.1*** : **Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah**

Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian Tujuan 5 SDGs: Kesenjangan Gender, khususnya target 5.5 yang menekankan pentingnya menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan serta kesempatan yang setara dalam kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan. Indikator ini diukur melalui proporsi kursi parlemen tingkat pusat maupun daerah yang diduduki oleh perempuan. Representasi perempuan yang memadai dalam lembaga legislatif maupun eksekutif sangat penting untuk memastikan perspektif gender masuk ke dalam kebijakan publik, sehingga pembangunan dapat lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin,
2024

Provinsi/Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bengkulu Selatan	27	0	27
Rejang Lebong	20	10	30
Bengkulu Utara	28	3	31
Kaur	23	2	25
Seluma	27	3	30
Kepahiang	22	3	25
Lebong	24	5	29
Curup	24	5	29
Kota Bengkulu	23	9	32
Provinsi Bengkulu	35	10	45
Jumlah	253	50	303

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Provinsi Bengkulu proporsi kursi legislatif daerah yang diduduki oleh perempuan masih relatif rendah. Berdasarkan data tahun 2024, dari total 258 anggota DPRD kabupaten/kota, hanya 40 orang atau sekitar 15,5 persen adalah perempuan, sementara sisanya sebanyak 197 orang atau 84,5 persen merupakan laki-laki. Distribusi keterwakilan perempuan juga tidak merata antar daerah. Misalnya, Kabupaten Bengkulu Selatan belum memiliki keterwakilan perempuan sama sekali, sedangkan Kota Bengkulu mencatat jumlah tertinggi dengan 9 orang perempuan dari total 32 anggota DPRD. Beberapa daerah lain seperti Rejang Lebong (10 orang perempuan) dan Lebong serta Curup (masing-masing 5 orang perempuan) menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kemajuan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah masih jauh dari target minimal 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional. Kesenjangan representasi ini mengindikasikan masih adanya hambatan struktural, kultural, maupun politik yang mengurangi peluang perempuan untuk terlibat aktif dalam politik formal. Ke depan, diperlukan upaya penguatan kapasitas politik perempuan, penerapan kebijakan afirmatif yang lebih efektif, serta dukungan dari partai politik untuk meningkatkan jumlah calon legislatif perempuan yang kompetitif. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan kepada masyarakat juga menjadi kunci agar partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dapat meningkat secara berkelanjutan.

2.5.2.2 Indikator 5.5.2* : Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial

Kesetaraan gender dalam dunia kerja tidak hanya diukur dari akses perempuan terhadap kesempatan kerja, tetapi juga sejauh mana mereka dapat menempati posisi strategis dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Indikator proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial menjadi penting untuk menggambarkan keberhasilan Provinsi Bengkulu dalam mendorong pemberdayaan perempuan di sektor formal. Representasi perempuan di posisi manajerial menunjukkan adanya pengakuan atas kapasitas, kompetensi, dan peran penting perempuan dalam mendukung pembangunan ekonomi serta tata kelola organisasi, baik di sektor publik maupun swasta.

Meningkatnya keterlibatan perempuan pada level manajerial juga sejalan dengan Tujuan 5 SDGs, khususnya target 5.5, yang menekankan pentingnya memastikan partisipasi penuh dan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan. Hal ini menjadi bagian

penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial
Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial di Provinsi Bengkulu	24.67	25.66	23.20	33.36	33.5

Sumber : bps.go.id, 2024

Berdasarkan data BPS, proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial di Provinsi Bengkulu dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial tercatat sebesar 24,67 persen, kemudian naik menjadi 25,66 persen pada 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 23,20 persen, yang mengindikasikan adanya dinamika pasar kerja dan tantangan dalam mempertahankan peran perempuan pada posisi strategis.

Meski demikian, situasi membaik pada tahun 2023 dan 2024, di mana terjadi lonjakan tajam hingga mencapai 33,36 persen dan sedikit meningkat lagi pada 2024 menjadi 33,50 persen. Capaian ini menunjukkan perkembangan positif karena berarti lebih dari sepertiga posisi manajerial di Bengkulu telah diisi oleh perempuan. Kondisi ini menempatkan Provinsi Bengkulu pada jalur yang lebih baik dalam mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja.

Walaupun menunjukkan peningkatan, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan keberlanjutan tren positif ini serta pemerataan peluang di berbagai sektor. Faktor budaya, stereotip gender, dan keterbatasan akses pada pelatihan kepemimpinan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan yang mendorong perempuan untuk lebih siap bersaing dan berperan dalam posisi manajerial di masa depan.

2.5.3 Tantangan Tujuan SDGs 5 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Permasalahan dan tantangan dari Tujuan 5 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Masih terjadinya perkawinan anak, meski trennya menurun, berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi perempuan.
2. Keterwakilan perempuan di legislatif masih rendah dan jauh dari target 30 persen, dengan ketimpangan antarwilayah.
3. Perempuan pada posisi manajerial menunjukkan tren positif, namun keberlanjutan dan pemerataannya masih terkendala stereotip gender dan akses terbatas pada pengembangan kapasitas.
4. Beban ganda perempuan dalam pekerjaan domestik dan publik yang belum seimbang dengan laki-laki.
5. Kasus kekerasan berbasis gender masih terjadi dan membutuhkan perlindungan serta penanganan lebih kuat.
6. Norma sosial dan budaya patriarki masih membatasi ruang gerak serta partisipasi perempuan dalam ranah publik, politik, dan ekonomi.

2.6 Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pencapaian Tujuan 6 SDGs menekankan pada upaya menjamin akses yang merata terhadap air minum aman, layanan sanitasi, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan di Provinsi Bengkulu yang menempatkan pemenuhan layanan dasar masyarakat sebagai prioritas, termasuk penyediaan air bersih dan sanitasi sehat yang berwawasan lingkungan.

Di Provinsi Bengkulu, capaian akses air bersih dan sanitasi terus mengalami peningkatan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian wilayah, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, belum sepenuhnya mendapatkan layanan air minum aman dan sanitasi layak. Ketersediaan infrastruktur yang terbatas, kondisi geografis, serta distribusi penduduk yang tersebar menjadi hambatan dalam pemerataan akses. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk praktik sanitasi yang baik, masih perlu ditingkatkan.

Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Bengkulu juga menghadapi tekanan akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan alih

fungsi lahan yang berpotensi menurunkan kualitas serta kuantitas air. Di sisi lain, ketersediaan air baku untuk sistem penyediaan air minum perlu dijaga agar tetap berkelanjutan melalui konservasi daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang merata, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat. Program edukasi perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan manfaat layanan. Dengan demikian, pencapaian Tujuan 6 SDGs di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mengurangi kesenjangan layanan dasar, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.6.1 Target Global : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

2.6.1.1 Indikator 6.1.1* : Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman

Akses terhadap air minum yang aman merupakan salah satu faktor penentu kualitas kesehatan masyarakat dan kesejahteraan rumah tangga. Di Provinsi Bengkulu, penyediaan layanan air minum menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, ketidakmerataan distribusi layanan, serta ancaman pencemaran sumber air akibat aktivitas domestik maupun industri. Hal ini berdampak pada masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum yang memenuhi standar aman.

Peningkatan persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman menjadi prioritas pembangunan daerah, sejalan dengan target Tujuan 6 SDGs. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong pembangunan dan perbaikan sistem penyediaan air minum berbasis jaringan perpipaan, penguatan kualitas pelayanan perusahaan daerah air minum, serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menjangkau wilayah pedesaan dan terpencil.

Selain pembangunan infrastruktur, aspek keberlanjutan juga ditekankan melalui upaya perlindungan dan konservasi sumber daya air, peningkatan kualitas pengawasan air minum, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar sumber air. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akses air minum aman bagi seluruh rumah tangga di Bengkulu dapat terus

meningkat, sehingga mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu	62.47	67.39	73.07	73.08	72.10

Sumber : *bps.go.id*, 2024

Berdasarkan data, pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tercatat sebesar 62,47%. Angka ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 67,39%, dan pada tahun 2022 naik signifikan menjadi 73,07%. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya nyata pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam memperluas akses air minum yang aman melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan sistem distribusi, dan program berbasis masyarakat.

Pada tahun 2023, capaian relatif stabil di angka 73,08%, menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga sudah mulai menikmati layanan air minum yang lebih baik. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 72,10%. Hal ini mengindikasikan masih terdapat kendala dalam keberlanjutan layanan, baik dari sisi kualitas, kontinuitas distribusi, maupun pengelolaan sumber daya air yang belum merata di seluruh wilayah provinsi.

Secara umum, tren lima tahun terakhir menggambarkan adanya kemajuan yang positif, dengan kenaikan rata-rata lebih dari 10 poin persentase dibandingkan awal periode. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan utama yang perlu diperhatikan, antara lain: keterbatasan infrastruktur air bersih di daerah pedesaan dan wilayah terpencil, ketergantungan masyarakat pada sumber air non-pipa yang belum terjamin keamanannya, serta tantangan dalam menjaga kualitas air minum yang sesuai standar kesehatan.

Capaian ini memberikan gambaran bahwa Provinsi Bengkulu telah berada pada jalur yang cukup baik dalam mendukung pencapaian SDGs, namun diperlukan strategi lebih berkelanjutan, seperti penguatan kelembagaan pengelolaan air minum, peningkatan investasi infrastruktur, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan sumber air yang aman. Dengan langkah tersebut, diharapkan persentase rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum yang dikelola secara aman dapat terus meningkat hingga mencapai target nasional dan global SDGs.

2.6.1 Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan

2.6.1.1 Indikator 6.2.1* : Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun

Sanitasi yang layak dan aman merupakan salah satu prasyarat penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak. Akses sanitasi yang memadai, ditambah dengan kebiasaan mencuci tangan menggunakan air dan sabun, terbukti mampu menurunkan risiko penyakit menular, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Secara umum, kondisi sanitasi di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya kemajuan, meskipun belum merata di seluruh wilayah. Sebagian besar rumah tangga, terutama di wilayah perkotaan, telah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang lebih baik. Namun, di sejumlah wilayah pedesaan dan terpencil, masih terdapat rumah tangga yang menggunakan sarana sanitasi sederhana yang belum memenuhi standar aman, serta belum seluruhnya memiliki akses mudah terhadap fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.

Permasalahan lain yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Hal ini berdampak pada masih terbatasnya praktik cuci tangan pakai sabun di rumah tangga, meskipun fasilitas dasar sudah tersedia. Selain itu, permasalahan kualitas infrastruktur sanitasi juga menjadi hambatan, di antaranya keterbatasan sistem pembuangan limbah domestik yang aman, kurangnya pengelolaan

limbah cair rumah tangga, serta minimnya pelayanan sanitasi berbasis masyarakat.

Tantangan-tantangan ini mengindikasikan bahwa pencapaian target SDGs di bidang sanitasi di Provinsi Bengkulu memerlukan upaya lebih intensif. Ke depan, perlu ada peningkatan sinergi program antara pemerintah daerah, desa, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi aman, pembangunan fasilitas cuci tangan di tempat-tempat umum maupun rumah tangga, serta edukasi berkelanjutan tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

Dengan upaya tersebut, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mempercepat pencapaian indikator persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun, sehingga sejalan dengan target nasional maupun global dalam SDGs. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023

Provinsi/Kab/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bengkulu Selatan	68.02	72.02	74.73	84.09	83.81
Rejang Lebong	73.36	70.02	71.50	70.20	64.41
Bengkulu Utara	77.41	79.23	81.37	83.44	82.84
Kaur	79.72	76.09	78.63	81.23	86.43
Seluma	73.51	78.26	84.29	86.16	87.17
Mukomuko	80.68	81.04	86.78	79.12	80.94
Lebong	44.04	46.80	51.55	51.92	55.62
Kepahiang	62.32	65.95	66.89	64.58	69.25
Bengkulu Tengah	72.85	85.44	80.23	74.65	83.07
Kota Bengkulu	93.19	95.71	95.79	94.49	93.94
Provinsi Bengkulu	75.91	78.10	79.81	79.58	80.28

Sumber : bps.go.id, 2024

Berdasarkan data capaian Provinsi Bengkulu tahun 2019–2023, terlihat adanya tren peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman. Pada tahun 2019, capaian provinsi berada di angka 75,91%, kemudian meningkat menjadi 78,10% di tahun 2020, 79,81% pada 2021, dan relatif stabil di angka 79,58% pada 2022. Pada tahun 2023, capaian naik menjadi 80,28%, yang menunjukkan perbaikan akses sanitasi di tingkat rumah tangga.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pencapaian sanitasi aman di Provinsi Bengkulu menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kota Bengkulu konsisten mencatatkan capaian tertinggi dengan angka di atas 90% sepanjang 2019–2023 (bahkan mencapai 95,79% pada 2021). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan relatif lebih mudah mendapatkan akses sanitasi layak yang dikelola secara aman.

Sebaliknya, Kabupaten Lebong mencatatkan angka capaian paling rendah. Pada tahun 2019, hanya 44,04% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman. Meskipun terjadi peningkatan bertahap hingga mencapai 55,62% pada 2023, angka ini masih jauh di bawah rata-rata provinsi. Kabupaten lain dengan capaian relatif rendah adalah Kepahiang (69,25% pada 2023) dan Rejang Lebong yang justru mengalami penurunan signifikan dari 73,36% pada 2019 menjadi 64,41% pada 2023.

Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Seluma, Kaur, Mukomuko, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara menunjukkan tren positif. Seluma mencatat peningkatan dari 73,51% di 2019 menjadi 87,17% pada 2023. Begitu juga Kaur yang naik dari 79,72% menjadi 86,43% dalam periode yang sama.

Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa capaian sanitasi aman di Provinsi Bengkulu menunjukkan kemajuan, tetapi masih belum merata antarwilayah. Tantangan utama yang dihadapi adalah disparitas antar kabupaten/kota, rendahnya kualitas infrastruktur sanitasi di daerah pedesaan dan terpencil, serta keterbatasan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun di rumah tangga. Selain itu, faktor perilaku masyarakat juga masih berpengaruh, di mana sebagian rumah tangga belum sepenuhnya menerapkan praktik sanitasi yang sehat meskipun fasilitas telah tersedia.

Ke depan, diperlukan upaya strategis dalam memperkuat akses sanitasi aman, terutama di daerah dengan capaian rendah. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat, penyediaan fasilitas cuci tangan di rumah tangga maupun ruang publik, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dengan langkah tersebut, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu meningkatkan capaian indikator secara merata di seluruh kabupaten/kota serta berkontribusi pada pencapaian target nasional maupun global SDGs.

2.6.2 Tantangan Tujuan SDGs 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Adapun tantangan dan permasalahan Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua sebagai berikut :

1. Keterbatasan Infrastruktur Air Bersih, sebagian wilayah pedesaan dan terpencil belum terjangkau layanan air minum yang dikelola secara aman. Jaringan perpipaan masih terbatas dan belum merata ke seluruh kabupaten/kota.
2. Kualitas dan Kontinuitas Layanan Air Minum, terjadi fluktuasi capaian akses air minum layak, misalnya penurunan dari 73,08% (2023) menjadi 72,10% (2024) dan ancaman pencemaran sumber air dari aktivitas domestik maupun industri menurunkan kualitas air.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan alih fungsi lahan menekan ketersediaan air baku dan upaya konservasi DAS dan rehabilitasi hutan belum optimal.
4. Disparitas Antarwilayah dalam Akses Sanitasi, Kota Bengkulu mencatat capaian tinggi (di atas 90%), sedangkan kabupaten seperti Lebong (55,62% pada 2023) dan Rejang Lebong (64,41% pada 2023) masih jauh tertinggal. Kemudian perbedaan capaian antarwilayah menunjukkan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur sanitasi.
5. Kualitas Infrastruktur Sanitasi yang Terbatas, sistem pembuangan limbah domestik aman masih minim. Dan pengelolaan limbah cair rumah tangga belum terintegrasi secara baik.
6. Rendahnya Kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sebagian masyarakat belum terbiasa mencuci tangan dengan sabun meskipun fasilitas tersedia. Dan masih ada praktik sanitasi tidak sehat di sejumlah wilayah pedesaan.
7. Keterbatasan Pendanaan dan Kapasitas Kelembagaan, investasi dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi masih belum mencukupi kebutuhan. Dan kapasitas pemerintah daerah dan pengelola layanan masih perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan.

2.7 Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Energi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Akses energi yang terjangkau, andal, dan

berkelanjutan merupakan kunci untuk mendukung aktivitas rumah tangga, layanan publik, serta produktivitas sektor ekonomi di daerah. Oleh karena itu, Tujuan 7 SDGs menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Secara umum, akses energi di Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perkembangan yang positif, khususnya dalam hal ketersediaan listrik rumah tangga. Rasio elektrifikasi di provinsi ini terus meningkat dan mendekati 100%, meskipun masih terdapat sebagian kecil rumah tangga di wilayah pedesaan dan terpencil yang belum sepenuhnya terlayani jaringan listrik PLN. Untuk menutupi keterbatasan tersebut, pemerintah juga mulai mengembangkan program energi terbarukan berbasis lokal seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta pemanfaatan biomassa skala kecil.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang masih perlu diperhatikan. Pertama, distribusi energi belum merata, di mana wilayah terpencil dan perdesaan masih menghadapi keterbatasan akses maupun kualitas layanan. Kedua, ketergantungan pada energi fosil masih cukup tinggi, sehingga potensi energi terbarukan yang melimpah di Bengkulu (seperti tenaga surya, tenaga air, angin, dan biomassa) belum dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, masih terdapat persoalan terkait keterjangkauan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terkadang mengalami beban biaya energi rumah tangga cukup besar.

Selain itu, permasalahan keberlanjutan juga menjadi perhatian. Pemanfaatan energi terbarukan masih berada pada tahap awal dan membutuhkan dukungan investasi, regulasi, serta teknologi agar dapat berkembang lebih cepat. Upaya transisi energi di Bengkulu juga perlu diarahkan untuk mengurangi emisi karbon dan memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Bengkulu telah berada pada jalur yang cukup baik dalam menjamin akses energi bagi masyarakat, tetapi masih menghadapi kesenjangan wilayah, keterbatasan pemanfaatan energi terbarukan, serta isu keterjangkauan bagi kelompok rentan. Ke depan, strategi yang perlu dilakukan adalah mempercepat pemerataan infrastruktur energi hingga ke pelosok desa, memperkuat investasi energi terbarukan, mendorong efisiensi penggunaan energi, serta memastikan bahwa kebijakan energi berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat mempercepat pencapaian Tujuan 7 SDGs, sehingga energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.7.1 Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern

2.7.1.1 Indikator 7.1.1* : Rasio elektrifikasi

Rasio elektrifikasi merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana rumah tangga telah memperoleh akses terhadap energi listrik yang andal dan terjangkau. Akses listrik yang merata tidak hanya mendukung kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan publik, serta memperkuat kualitas hidup masyarakat. Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio elektrifikasi Provinsi Bengkulu	99.20	99.93	99.99	99.79	99.95

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Berdasarkan data perkembangan rasio elektrifikasi Provinsi Bengkulu tahun 2020–2024, terlihat capaian yang sangat tinggi dan konsisten mendekati 100%. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi mencapai 99,20%, meningkat menjadi 99,93% pada tahun 2021, dan hampir sempurna pada tahun 2022 sebesar 99,99%. Meski pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 99,79%, angka ini kembali naik pada 2024 menjadi 99,95%.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Provinsi Bengkulu telah menikmati akses listrik. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperluas jaringan listrik PLN hingga ke wilayah pedesaan dan terpencil. Namun demikian, masih ada tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait keberlanjutan dan kualitas layanan. Di beberapa daerah, gangguan pasokan listrik, keterbatasan infrastruktur jaringan, serta akses energi alternatif masih menjadi isu yang perlu ditangani.

Selain itu, meskipun rasio elektrifikasi sudah sangat tinggi, aspek keberlanjutan energi juga perlu diperkuat. Saat ini ketergantungan terhadap energi fosil masih dominan, sementara potensi energi terbarukan di Bengkulu seperti tenaga surya, air, angin, dan biomassa belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu,

transisi menuju energi bersih menjadi langkah penting untuk mendukung pencapaian Tujuan 7 SDGs: Energi Bersih dan Terjangkau.

Secara umum, capaian rasio elektrifikasi Provinsi Bengkulu dapat dikategorikan sangat baik. Namun, tantangan selanjutnya bukan hanya memperluas akses, melainkan juga memastikan ketersediaan energi listrik yang andal, berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Dengan demikian, energi dapat benar-benar menjadi pendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.

2.7.1.2 Indikator 7.1.2.(b) : Rasio penggunaan gas rumah tangga

Penggunaan energi bersih dan modern di tingkat rumah tangga merupakan bagian penting dari pencapaian Tujuan 7 SDGs: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua. Salah satu indikator yang mencerminkan kemajuan adalah peningkatan penggunaan gas (LPG) sebagai sumber energi rumah tangga yang lebih bersih dan efisien dibandingkan dengan kayu bakar maupun minyak tanah.

Tabel 2.21
Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio elektrifikasi Provinsi Bengkulu	87.23	89.51	92.05	94.64	95.63

Sumber : *bps.go.id*, 2024

Berdasarkan data, rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2019–2023. Pada tahun 2019, rasio penggunaan gas tercatat 87,23%, kemudian meningkat menjadi 89,51% pada 2020, 92,05% pada 2021, 94,64% pada 2022, dan mencapai 95,63% pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Provinsi Bengkulu telah beralih menggunakan gas sebagai sumber energi utama untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya memasak.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program konversi energi dan distribusi LPG bersubsidi yang dijalankan pemerintah. Selain itu, faktor kemudahan akses serta keterjangkauan harga turut

mendorong peralihan rumah tangga dari penggunaan bahan bakar tradisional menuju energi modern.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, distribusi tabung LPG ke wilayah terpencil belum sepenuhnya lancar, sehingga masyarakat pedesaan kadang mengalami kesulitan akses. Kedua, isu keterjangkauan harga masih menjadi persoalan bagi sebagian rumah tangga berpenghasilan rendah, khususnya ketika terjadi fluktuasi harga energi. Ketiga, penggunaan gas sebagai energi transisi tetap memiliki keterbatasan dari sisi keberlanjutan, sehingga ke depan perlu diarahkan menuju pemanfaatan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, peningkatan rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Bengkulu merupakan capaian positif yang mendukung target Tujuan 7 SDGs. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga keterjangkauan dan ketersediaan gas secara merata, sekaligus mempersiapkan masyarakat untuk beralih secara bertahap ke sumber energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan modern.

2.7.3 Tantangan Tujuan SDGs 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Pencapaian Tujuan 7 SDGs di Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, khususnya pada indikator rasio elektrifikasi yang hampir menyentuh angka 100% dalam lima tahun terakhir. Hampir seluruh rumah tangga telah memperoleh akses listrik, sejalan dengan komitmen pemerintah memperluas jaringan PLN hingga ke wilayah pedesaan dan terpencil. Rasio penggunaan gas rumah tangga juga mengalami peningkatan signifikan, dari 87,23% pada 2019 menjadi 95,63% pada 2023, menandakan adanya pergeseran menuju energi rumah tangga yang lebih bersih dan modern. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Tantangan utama yang dihadapi adalah belum meratanya distribusi energi di wilayah pedesaan dan terpencil, yang meskipun telah terjangkau jaringan listrik, masih menghadapi masalah kualitas layanan seperti gangguan pasokan dan keterbatasan infrastruktur jaringan. Selain itu, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sehingga potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, angin, dan biomassa di Bengkulu belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan lain muncul pada aspek keterjangkauan, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang masih merasakan beban biaya energi, baik listrik maupun gas, apalagi ketika terjadi fluktuasi harga. Pemanfaatan energi terbarukan

juga masih dalam tahap awal dan memerlukan dukungan investasi, regulasi, serta transfer teknologi agar dapat berkembang pesat. Dengan demikian, meskipun Provinsi Bengkulu telah berada pada jalur positif dalam menjamin akses energi, tantangan keberlanjutan, pemerataan, serta keterjangkauan tetap perlu diatasi untuk memastikan energi bersih dan modern benar-benar dapat dinikmati seluruh masyarakat secara inklusif.

2.8 Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pencapaian SDGs di Provinsi Bengkulu. Tujuan 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga membuka kesempatan kerja yang produktif, menyeluruh, dan layak bagi seluruh masyarakat.

Kondisi ekonomi Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan positif, meskipun masih dihadapkan pada fluktuasi akibat dinamika global dan inflasi. Sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa masih menjadi penopang utama perekonomian, namun kontribusi sektor industri pengolahan dan pariwisata mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini menjadi modal penting untuk diversifikasi ekonomi ke depan.

Di sisi ketenagakerjaan, angka partisipasi angkatan kerja Provinsi Bengkulu relatif tinggi, tetapi masih terdapat persoalan pada kualitas pekerjaan. Sebagian masyarakat masih bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah, tanpa jaminan perlindungan sosial yang memadai. Tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun, namun tantangan pengangguran terdidik serta ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) dengan kebutuhan pasar kerja masih cukup besar.

Selain itu, isu kesenjangan antarwilayah juga masih terlihat. Pertumbuhan ekonomi lebih terpusat di wilayah perkotaan, sementara wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, infrastruktur, dan teknologi. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan di seluruh daerah.

Secara umum, pencapaian Tujuan 8 SDGs di Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih memerlukan strategi yang lebih terarah. Upaya yang diperlukan

antara lain: penguatan sektor ekonomi produktif berbasis potensi lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan (green jobs), serta perluasan akses UMKM pada pembiayaan dan pasar.

Dengan langkah tersebut, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja yang produktif, serta mewujudkan pekerjaan layak bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan pencapaian Tujuan 8 SDGs.

2.8.1 Target Global : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

2.8.1.1 Indikator 8.1.1.(a) : PDRB Per kapita

Indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB per kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang dihitung dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	36.623.100	36.552.000	32.565.000	46.285.283,47	49.230.000

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Berdasarkan data PDRB per kapita Provinsi Bengkulu tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi nilai. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp36.623.100. Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp36.552.000, dan kembali menurun cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp32.565.000. Namun, kondisi tersebut membaik pada tahun 2023 dengan lonjakan signifikan hingga Rp46.285.283,47 dan terus meningkat pada tahun 2024 mencapai Rp49.230.000.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi kontraksi ekonomi pada tahun 2021–2022 yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, perekonomian Bengkulu mampu pulih dengan cepat pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan positif pada 2023–2024 mencerminkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi, peningkatan produktivitas, dan pemulihan daya beli masyarakat.

Secara umum, tren peningkatan PDRB per kapita menunjukkan arah positif terhadap pencapaian Tujuan 8 SDGs, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, peningkatan ini perlu terus diiringi dengan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta pemberdayaan sektor unggulan daerah agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.8.2 Target Global : Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan

2.8.2.1 Indikator 8.3.1* : Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin

Indikator proporsi lapangan kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu. Lapangan kerja informal masih mendominasi terutama di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa nonformal. Pekerja perempuan banyak terserap di sektor perdagangan, jasa rumah tangga, dan usaha kecil skala rumah tangga, sedangkan laki-laki lebih dominan pada pekerjaan informal di bidang pertanian, konstruksi, dan transportasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor informal berperan besar dalam menopang ekonomi daerah, pekerja yang berada di dalamnya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan perlindungan sosial, upah yang belum layak, dan minimnya kepastian kerja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu memperkuat strategi penciptaan lapangan kerja formal yang produktif dan inklusif, serta mendorong transformasi sektor informal menjadi usaha yang lebih berdaya saing. Upaya ini dapat ditempuh melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta perlindungan sosial bagi pekerja informal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proporsi pekerja informal dapat dikurangi secara bertahap sehingga tercipta

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menjamin kesempatan kerja yang layak dan setara bagi seluruh masyarakat tanpa memandang gender. Proporsi Lapangan Kerja Informal Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Proporsi Lapangan Kerja Informal Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Lapangan Kerja Informal	65.12	69.23	68.16	67.54	67.77

Sumber : *bps.go.id*, 2024

Proporsi lapangan kerja informal di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang relatif tinggi dalam periode 2019–2023. Berdasarkan data, pada tahun 2019 proporsi pekerja informal tercatat sebesar 65,12 persen dan meningkat menjadi 69,23 persen pada tahun 2020. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya terjadi sedikit penurunan, yakni 68,16 persen pada 2021, 67,54 persen pada 2022, dan 67,77 persen pada 2023, angka ini masih menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja di Bengkulu bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sektor informal tetap menjadi penyerap tenaga kerja utama, khususnya di bidang pertanian, perdagangan kecil, dan jasa nonformal. Dari sisi gender, pekerja laki-laki cenderung mendominasi sektor informal di bidang pertanian, transportasi, dan konstruksi, sementara pekerja perempuan lebih banyak terserap pada sektor perdagangan kecil, jasa rumah tangga, serta usaha mikro berbasis keluarga.

Tingginya proporsi pekerja informal ini menjadi tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pekerja informal umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, kepastian kerja, serta pendapatan yang stabil. Oleh karena itu, perlu ada upaya strategis untuk mendorong transformasi sektor informal menuju formalitas, antara lain melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, perluasan akses permodalan, serta kebijakan perlindungan sosial yang menjangkau pekerja informal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proporsi pekerja informal dapat dikurangi secara bertahap, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pekerjaan yang layak serta setara bagi laki-laki maupun perempuan di Provinsi Bengkulu.

- 2.8.3 Target Global : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal**
- 2.8.3.1 Indikator 8.9.1.a : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara**

Indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu. Jumlah kunjungan wisatawan asing tidak hanya mencerminkan tingkat daya tarik destinasi wisata, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian daerah melalui peningkatan konsumsi, investasi, serta terbukanya lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Provinsi Bengkulu memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam seperti pantai dan taman nasional, wisata sejarah dan budaya, hingga event tahunan berskala nasional seperti Festival Tabut yang dapat menarik minat wisatawan internasional.

Namun demikian, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bengkulu masih relatif fluktuatif dan belum optimal dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Faktor keterbatasan akses transportasi, sarana prasarana pariwisata yang belum merata, serta promosi internasional yang masih terbatas menjadi tantangan utama dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan kualitas infrastruktur penunjang, penguatan promosi dan kerjasama dengan pelaku industri pariwisata, serta pengembangan destinasi unggulan yang mampu bersaing di pasar global. Dengan langkah-langkah ini, Provinsi Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, memperkuat kontribusi pariwisata terhadap PDRB, sekaligus mendukung pencapaian SDGs khususnya pada dimensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	923	1820	2918	3119	3.742

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2025

Secara keseluruhan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Pemulihan pasca-pandemi terlihat sangat jelas mulai tahun 2021, dengan lonjakan signifikan di tahun 2022. Meskipun pada tahun 2023 pertumbuhan melambat, angka 2024 kembali meningkat cukup tinggi hingga mencapai 3.742 kunjungan.

Tren ini mencerminkan bahwa sektor pariwisata Bengkulu memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh, asalkan didukung oleh strategi yang tepat. Peningkatan kualitas infrastruktur, promosi yang lebih gencar, penguatan kerja sama lintas sektor, serta inovasi produk wisata berbasis alam dan budaya akan menjadi kunci dalam mempertahankan momentum pertumbuhan dan menjadikan Bengkulu sebagai destinasi internasional yang kompetitif.

2.8.3 Target Global : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal

2.8.3.2 Indikator 8.9.1.b : Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara

Wisatawan nusantara memegang peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata Provinsi Bengkulu. Kunjungan wisatawan domestik tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan perputaran ekonomi lokal, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana destinasi wisata Bengkulu mampu menarik minat masyarakat Indonesia. Keberadaan wisatawan nusantara juga mendorong promosi secara organik melalui media sosial, testimoni, dan jejaring personal, yang semakin memperkuat citra Bengkulu sebagai tujuan wisata yang potensial.

Provinsi Bengkulu memiliki keunggulan wisata berbasis alam seperti pantai, taman nasional, air terjun, serta wisata budaya dan sejarah yang menjadi daya tarik tersendiri. Namun, jumlah kunjungan wisatawan nusantara sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas layanan, serta promosi yang dilakukan secara konsisten. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	455.785	1.043.722	1.682.082	2.135.000	4.311.497

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2025

Data menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif dalam lima tahun terakhir. Dari 455 ribu kunjungan pada tahun 2020, jumlah wisatawan nusantara meningkat hampir sepuluh kali lipat menjadi lebih dari 4,3 juta pada tahun 2024. Lonjakan terbesar terjadi pada 2021 dan 2024, yang dapat dihubungkan dengan pemulihan pasca-pandemi, perbaikan konektivitas, serta promosi yang lebih agresif.

Peningkatan yang signifikan ini memberikan peluang besar bagi Provinsi Bengkulu untuk memperkuat posisi sebagai destinasi wisata unggulan di Sumatera. Namun demikian, tingginya kunjungan juga perlu diimbangi dengan manajemen pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas daya dukung lingkungan, serta pengembangan fasilitas penunjang yang ramah wisatawan.

2.8.4 Tantangan Tujuan SDGs 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Berikut tantangan dan permasalahan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu :

1. Dominasi sektor informal yang tinggi, lebih dari separuh tenaga kerja masih bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah, tanpa perlindungan sosial, dan pendapatan yang tidak stabil.
2. Ketidaksesuaian keterampilan, keterampilan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga menyulitkan penciptaan pekerjaan yang produktif dan berdaya saing.
3. Tingginya pengangguran terdidik, lulusan pendidikan menengah dan tinggi banyak yang belum terserap ke dunia kerja karena terbatasnya lapangan pekerjaan berkualitas.
4. Kesenjangan pertumbuhan antarwilayah, pertumbuhan ekonomi masih terpusat di wilayah perkotaan, sedangkan wilayah pedesaan tertinggal dalam akses infrastruktur, teknologi, dan permodalan.
5. Kualitas pekerjaan yang masih rendah, sebagian besar pekerjaan belum memenuhi kriteria layak dari sisi upah, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman.
6. Pemanfaatan sektor unggulan belum optimal, sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan memiliki potensi besar namun belum dimaksimalkan secara berkelanjutan.
7. Keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan dan pasar, banyak pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan mendapatkan akses modal dan memperluas jangkauan pasar.

8. Infrastruktur dan konektivitas yang belum merata, terutama di daerah pedesaan dan kawasan wisata, masih menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
9. Promosi pariwisata yang belum optimal, potensi wisata alam, budaya, dan event unggulan belum sepenuhnya menarik minat wisatawan mancanegara karena minimnya promosi dan kerja sama internasional.
10. Belum berkembangnya pekerjaan ramah lingkungan (green jobs), upaya menciptakan lapangan kerja yang mendukung transisi ekonomi hijau masih terbatas.

2.9 Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

Tujuan 9 SDGs menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh, peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan inovasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di Provinsi Bengkulu, upaya pembangunan infrastruktur terus diarahkan untuk mendukung konektivitas wilayah, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Pembangunan jaringan jalan, listrik, dan telekomunikasi telah menjadi prioritas guna membuka keterisolasian wilayah pedesaan, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga berperan dalam mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di provinsi ini.

Selain itu, sektor industri di Bengkulu masih didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Penguatan sektor ini memerlukan dukungan teknologi, peningkatan kualitas SDM, serta akses pembiayaan yang lebih luas agar mampu tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Di sisi lain, inovasi menjadi faktor kunci dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Pemerintah daerah bersama dunia usaha dan perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat ekosistem riset dan inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan demikian, pencapaian Tujuan 9 SDGs di Provinsi Bengkulu tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan industri berbasis potensi lokal serta penciptaan ekosistem inovasi yang mendukung keberlanjutan pembangunan.

- 2.9.1

Target Global

:

Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
- 2.9.1.1

Indikator 9.1.1.(a)

:

Kondisi mantap jalan Provinsi

Indikator kondisi mantap jalan provinsi merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas infrastruktur transportasi darat yang ada di Provinsi Bengkulu. Ketersediaan jalan dengan kondisi baik dan mantap sangat berpengaruh terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Jalan provinsi yang berada dalam kondisi mantap akan mempercepat arus transportasi, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing wilayah. Dengan demikian, kualitas jalan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Secara umum, kondisi jalan provinsi di Bengkulu masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran pemeliharaan, kerusakan akibat curah hujan tinggi, serta faktor geografis yang cukup menantang. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan melalui program pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rutin. Peningkatan proporsi jalan dalam kondisi mantap menjadi prioritas agar konektivitas antarwilayah dapat terwujud secara optimal. Ke depan, dengan perencanaan yang terarah dan dukungan pendanaan yang memadai, diharapkan kondisi mantap jalan provinsi Bengkulu dapat terus meningkat sehingga memperkuat peran infrastruktur sebagai penggerak pembangunan ekonomi, memperluas aksesibilitas masyarakat, serta mendorong pencapaian tujuan SDGs di sektor infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 2.26

Kondisi mantap jalan Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi mantap jalan Provinsi	75.97	75.92	58.15	59.87	62.84

Sumber : Dinas PUTR Provinsi Bengkulu, 2025

Kondisi mantap jalan Provinsi Bengkulu pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada awal

periode, tahun 2020 dan 2021, kondisi jalan provinsi berada pada tingkat yang relatif baik dengan capaian masing-masing 75,97% dan 75,92%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam menjadi 58,15%, turun sekitar 17 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pemeliharaan infrastruktur jalan, yang bisa dipengaruhi oleh faktor anggaran, cuaca ekstrem, maupun beban lalu lintas yang meningkat.

Setelah penurunan drastis di tahun 2022, kondisi jalan provinsi mulai menunjukkan perbaikan bertahap, yakni meningkat menjadi 59,87% pada 2023 dan 62,84% pada 2024. Meski demikian, angka ini masih belum kembali ke level awal periode. Secara umum, tren lima tahun terakhir memperlihatkan penurunan kualitas jalan jika dibandingkan antara tahun 2020 dan 2024, meskipun terdapat upaya pemulihan di dua tahun terakhir. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pemeliharaan berkelanjutan dan peningkatan investasi infrastruktur agar kondisi mantap jalan provinsi dapat kembali stabil dan mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2.9.2 Target Global : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang

2.9.2.1 Indikator 9.2.1* : Rasio PDRB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita

Indikator rasio PDRB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita merupakan ukuran penting dalam menilai kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah serta pemerataan manfaatnya bagi penduduk. Sektor industri pengolahan berperan strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan kontribusi sektor ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengembangkan basis ekonomi produktif yang mampu bersaing dan memperkuat daya saing wilayah. Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita Provinsi Bengkulu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
 Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita
 Provinsi Bengkulu 2019-2023 (Ribu Rupiah)

Provinsi	Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita				
	2019	2020	2021	2022	2023
BENGKULU	1.411	1.353	1.367	1.390	1.398

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan data nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita di Provinsi Bengkulu periode tahun 2019-2023, terlihat tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, nilai tambah per kapita tercatat sebesar Rp1.411 ribu, kemudian menurun menjadi Rp1.353 ribu pada tahun 2020 yang diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 terjadi sedikit pemulihan dengan nilai Rp1.367 ribu, dan berlanjut meningkat menjadi Rp1.390 ribu pada tahun 2022. Tahun 2023 kembali mencatat kenaikan kecil menjadi Rp1.398 ribu. Meskipun peningkatan ini menunjukkan arah yang positif, pertumbuhannya relatif lambat dan belum menunjukkan lonjakan signifikan.

Analisis ini mengindikasikan bahwa kontribusi industri pengolahan di Bengkulu terhadap perekonomian masih terbatas, baik dari sisi skala produksi maupun diversifikasi industrinya. Kenaikan nilai tambah yang kecil setiap tahunnya memperlihatkan perlunya strategi yang lebih kuat dalam mendorong industrialisasi berbasis potensi lokal, termasuk peningkatan teknologi produksi, dukungan infrastruktur, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Dengan demikian, pengembangan sektor industri pengolahan harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

- 2.9.3

Target Global

:

Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau
- 2.9.3.1

Indikator 9.c.1*

:

Proporsi penduduk terlayani mobile broadband

Akses terhadap layanan mobile broadband merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan peningkatan infrastruktur yang tangguh, inovatif, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	98.93	98.98	89.39	93.97	96.65

Sumber : *bps.go.id*

Data Proporsi Penduduk Terlayani Mobile Broadband di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa pada tahun 2020 cakupan layanan telah mencapai 98,93 persen dan meningkat tipis menjadi 98,98 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan hingga 89,39 persen yang mengindikasikan adanya kendala baik dari sisi infrastruktur telekomunikasi maupun faktor teknis lain seperti pemeliharaan jaringan dan ketersediaan kapasitas. Kondisi ini kembali membaik pada tahun 2023 dengan proporsi 93,97 persen, dan terus meningkat menjadi 96,65 persen pada tahun 2024.

Tren ini memperlihatkan bahwa meskipun secara umum cakupan layanan mobile broadband di Provinsi Bengkulu sudah sangat tinggi, masih terdapat dinamika yang menunjukkan perlunya upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan. Penurunan yang terjadi pada tahun 2022 menandakan adanya kerentanan terhadap kestabilan infrastruktur digital, sehingga penguatan jaringan dan pemerataan akses, terutama di wilayah perdesaan dan daerah sulit jangkauan, menjadi hal yang krusial. Dengan proporsi di atas 90 persen pada sebagian besar periode, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Bengkulu berada dalam jalur yang baik menuju inklusi digital. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan akses broadband tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau, stabil, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong transformasi digital yang berkelanjutan.

2.9.4 Tantangan Tujuan SDGs 9 Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

Tantangan dan permasalahan Tujuan 9 SDGs di Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- 1. Infrastruktur Jalan
 - a. Kondisi mantap jalan provinsi masih rendah (2020: 75,97%, turun menjadi 62,84% pada 2024).
 - b. Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan baru.

- c. Faktor geografis dan curah hujan tinggi mempercepat kerusakan infrastruktur.
 - d. Konektivitas antarwilayah belum optimal, sehingga biaya logistik tetap tinggi.
2. Industri Pengolahan
- a. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih rendah.
 - b. Nilai tambah per kapita cenderung stagnan (2019: Rp1.411 ribu menjadi 2023: Rp1.398 ribu).
 - c. Struktur industri didominasi oleh IKM berbasis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan.
 - d. Rendahnya adopsi teknologi, inovasi, serta keterbatasan akses permodalan dan pasar.
3. Inovasi dan Teknologi Digital
- a. Akses mobile broadband cukup tinggi (>90%), tetapi sempat turun drastis pada 2022 (89,39%).
 - b. Ketimpangan akses broadband masih terjadi di wilayah pedesaan dan terpencil.
 - c. Kualitas layanan internet belum merata, terutama dari sisi stabilitas dan kecepatan.
 - d. Ekosistem inovasi (kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi) masih lemah.
4. Permasalahan Umum
- a. Keterbatasan investasi infrastruktur dan industri berskala besar.
 - b. Ketergantungan pada sektor primer menyebabkan nilai tambah ekonomi rendah.
 - c. Keterampilan SDM industri belum sesuai dengan kebutuhan era digital dan industri berkelanjutan.
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan untuk mendukung industrialisasi ramah lingkungan.

2.10 Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara

Tujuan 10 SDGs berfokus pada upaya mengurangi kesenjangan, baik di dalam suatu negara maupun antarnegara. Bagi Provinsi Bengkulu, isu kesenjangan masih menjadi tantangan yang cukup besar, terutama dalam aspek distribusi pendapatan, akses terhadap pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Perbedaan tingkat kesejahteraan antara perkotaan dan pedesaan, antar kabupaten/kota, maupun antar kelompok sosial-ekonomi masih terlihat, khususnya dalam hal akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja yang layak.

Pencapaian tujuan ini di Provinsi Bengkulu memerlukan strategi yang menitikberatkan pada penguatan inklusivitas pembangunan.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan dasar dan program perlindungan sosial, pemberdayaan kelompok rentan termasuk perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat, serta pengembangan potensi ekonomi lokal di wilayah tertinggal. Selain itu, memperluas akses keuangan, mendorong UMKM, serta memperkuat konektivitas antarwilayah menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesenjangan intra-daerah dapat ditekan, sekaligus memperkuat kontribusi Provinsi Bengkulu dalam memperkecil ketimpangan pembangunan secara nasional.

2.10.1 Target Global : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

2.10.1.1 Indikator 10.1.1.(a) : Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai rasio yang semakin mendekati angka 0 menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah, sedangkan nilai mendekati 1 mencerminkan ketimpangan yang semakin tinggi. Bagi Provinsi Bengkulu, indikator ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi mampu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi Rasio Gini di Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi seiring dengan perkembangan ekonomi daerah. Secara umum, tingkat ketimpangan masih berada pada kategori sedang, dengan variasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terus berjalan, distribusi pendapatan belum sepenuhnya merata di seluruh kelompok masyarakat, sehingga perlu perhatian dalam memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara inklusif. Rasio Gini Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Rasio Gini Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Gini	0.323	0.326	0.315	0.333	0.343

Sumber : *bps.go.id*

Berdasarkan data pada Tabel, Rasio Gini Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, Rasio Gini tercatat sebesar 0,323 dan mengalami sedikit peningkatan pada 2021 menjadi 0,326. Namun, pada 2022 terjadi perbaikan distribusi pendapatan dengan penurunan Rasio Gini menjadi 0,315. Tren ini berbalik pada tahun 2023 dan 2024, di mana ketimpangan kembali meningkat dengan nilai masing-masing 0,333 dan 0,343. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi perbaikan, tantangan dalam menciptakan distribusi pendapatan yang merata masih cukup besar di Provinsi Bengkulu.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan masih perlu penguatan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan miskin. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, serta penguatan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Dengan demikian, Provinsi Bengkulu dapat menekan ketimpangan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat.

- 2.10.1

Target Global

:

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- 2.10.1.2

Indikator 10.1.1.(b)

:

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menjadi indikator penting dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pembangunan daerah. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang pengeluarannya masih berada di bawah standar kebutuhan minimum yang ditetapkan secara nasional, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Di Provinsi Bengkulu, data ini tidak hanya dihitung secara umum, tetapi juga dipilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur untuk melihat kerentanan sosial ekonomi yang lebih spesifik.

Kondisi kemiskinan di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa kelompok usia produktif dan lansia masih menjadi bagian yang cukup rentan, terutama pada rumah tangga dengan pendapatan tidak tetap. Selain itu, analisis berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan adanya perbedaan kerentanan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan, khususnya kepala rumah tangga perempuan, cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Gambaran ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Provinsi Bengkulu memiliki dimensi multidimensi, tidak hanya terkait besaran pendapatan, tetapi juga aspek demografi dan kesenjangan gender. Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kemiskinan	15.30	14.43	14.34	14.04	12.52

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka kemiskinan tercatat sebesar 15,30%, kemudian menurun menjadi 14,43% pada tahun 2021. Penurunan ini berlanjut meskipun relatif lambat pada tahun 2022 dengan capaian 14,34%, dan kembali turun menjadi 14,04% pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, angka kemiskinan berhasil ditekan lebih signifikan hingga mencapai 12,52%, yang merupakan capaian terendah dalam periode lima tahun terakhir.

Tren ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Provinsi Bengkulu, yang dapat dikaitkan dengan berbagai intervensi pembangunan, peningkatan akses layanan dasar, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Penurunan sebesar 2,78 poin persentase dari 2020 hingga 2024 menandakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan mulai menunjukkan hasil yang positif. Meskipun demikian, angka kemiskinan Bengkulu masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sehingga diperlukan konsistensi kebijakan agar tren penurunan ini berlanjut pada tahun-tahun mendatang.

2.10.2 Target Global : Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya

2.10.2.1 Indikator 10.2.1* : Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas

Indikator proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat, khususnya dalam menggambarkan kelompok rentan yang berada jauh di bawah garis kesejahteraan rata-rata. Di Provinsi Bengkulu, indikator ini penting karena tidak hanya mencerminkan dimensi kemiskinan relatif, tetapi juga memberi gambaran tentang kualitas distribusi pendapatan antar kelompok sosial, termasuk antara laki-laki dan perempuan serta kelompok penyandang disabilitas.

Kondisi di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa kelompok dengan penghasilan di bawah 50 persen median pendapatan masih cukup signifikan, terutama di wilayah perdesaan dengan keterbatasan akses pekerjaan formal dan layanan dasar. Kelompok perempuan dan penyandang disabilitas cenderung lebih rentan berada pada kategori ini akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial yang memadai. Hal ini menjadikan indikator ini penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Bengkulu. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.31
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan	8.43	8.23	8.37	6.55	5.39

Sumber : *bps.go.id*, 2024

Berdasarkan data proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan di Provinsi Bengkulu tahun 2019–2023 terlihat adanya tren penurunan. Pada periode 2019–2021, angkanya relatif stabil di kisaran 8,2–8,4 persen, dengan sedikit penurunan pada 2020 (8,23 persen) dan kenaikan tipis pada 2021 (8,37 persen) yang diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap distribusi pendapatan.

Sejak 2022, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 8,37 persen menjadi 6,55 persen, kemudian berlanjut pada 2023 dengan capaian 5,39 persen. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun, indikator ini turun 3,04 poin persentase, yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan relatif bagi kelompok berpendapatan rendah. Meskipun tren ini memberikan sinyal positif, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut terjadi secara merata di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat di Provinsi Bengkulu.

2.10.3 Tantangan Tujuan SDGs 10 Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara

Tantangan dan permasalahan Tujuan 10 SDGs (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara) di Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)
 - a. Rasio Gini Provinsi Bengkulu menunjukkan fluktuasi dengan tren meningkat (2020: 0,323 menjadi 2024: 0,343).
 - b. Ketimpangan pendapatan masih berada pada kategori sedang, dengan kesenjangan lebih nyata di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan.
 - c. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, sehingga manfaat pembangunan belum merata.
2. Kemiskinan
 - a. Tingkat kemiskinan menurun cukup signifikan (2020: 15,30% menjadi 2024: 12,52%), tetapi masih relatif tinggi dibanding rata-rata nasional.
 - b. Kelompok usia produktif dengan pekerjaan tidak tetap, lansia, serta rumah tangga dengan kepala perempuan masih tergolong rentan.
 - c. Dimensi kemiskinan di Provinsi Bengkulu bersifat multidimensi, mencakup pendapatan, akses layanan dasar, dan kesenjangan gender.
3. Kesenjangan Sosial-Ekonomi
 - a. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% median pendapatan cukup besar, meskipun menurun dari 8,43% (2019) menjadi 5,39% (2023).
 - b. Perempuan dan penyandang disabilitas cenderung lebih rentan berada pada kelompok berpendapatan rendah akibat keterbatasan akses sumber daya ekonomi, pekerjaan, dan perlindungan sosial.
 - c. Kesenjangan antarwilayah masih nyata, terutama antara perkotaan dan pedesaan dalam akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja.

4. Akses Inklusi Sosial dan Ekonomi

- a. Kelompok rentan (perempuan, difabel, masyarakat adat, rumah tangga miskin) belum sepenuhnya mendapatkan akses setara ke layanan dasar dan peluang ekonomi.
- b. Akses keuangan dan layanan perbankan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM masih terbatas.
- c. Konektivitas antarwilayah belum merata sehingga memperkuat disparitas pembangunan.

2.11 Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Pembangunan kota dan permukiman di Provinsi Bengkulu pada periode 2025–2030 diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Tujuan 11 SDGs. Pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan perumahan, serta dinamika urbanisasi menuntut adanya perencanaan tata ruang yang lebih terintegrasi, pengelolaan lingkungan yang baik, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar yang merata.

Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dasar di kawasan permukiman, kerentanan terhadap bencana alam, serta kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dasar perumahan dan permukiman, memperluas akses transportasi publik yang aman dan terjangkau, serta mengembangkan ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan.

Selain itu, upaya membangun kota dan permukiman tangguh juga diwujudkan melalui penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan permukiman. Prinsip inklusivitas turut menjadi perhatian dengan memastikan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan dan ruang kota.

Dengan arah pembangunan tersebut, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menciptakan kota dan permukiman yang layak huni, mendukung produktivitas masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Tujuan ini tidak hanya mendorong tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tahan daerah terhadap berbagai risiko di masa depan.

- 2.11.1

Target Global

:

Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh
- 2.11.1.1

Indikator 11.1.1.(a)

:

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Hunian yang layak dan terjangkau merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan. Di Provinsi Bengkulu, indikator ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana masyarakat telah memperoleh tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek fisik bangunan, ketersediaan sarana prasarana dasar, maupun keterjangkauan biaya.

Meskipun kualitas perumahan di berbagai wilayah Bengkulu telah mengalami peningkatan, masih terdapat persoalan berupa keterbatasan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, ketimpangan akses antara perkotaan dan perdesaan, serta keberadaan kawasan permukiman kumuh. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi juga memberi tekanan terhadap ketersediaan hunian layak, sehingga diperlukan perhatian serius agar akses masyarakat terhadap hunian dapat lebih merata dan berkelanjutan. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak	47.94	51.36	54.98	54.74	56.52

Sumber : bps.go.id, 2024

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Provinsi Bengkulu tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak tercatat sebesar 47,94 persen, kemudian meningkat menjadi 51,36 persen pada 2021, dan 54,98 persen pada 2022. Hal

ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat.

Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 54,74 persen, meskipun kembali meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 56,52 persen. Secara keseluruhan, dalam periode lima tahun terjadi peningkatan sebesar 8,58 poin persentase dibandingkan tahun 2020. Tren positif ini menggambarkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat di Provinsi Bengkulu, meskipun fluktuasi di tahun 2023 mengindikasikan perlunya perhatian terhadap kesinambungan program perumahan agar capaian peningkatan akses hunian layak dapat lebih stabil dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

- 2.11.2

Target Global

: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
- 2.11.2.1

Indikator 11.1.1.(a)

: Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Provinsi Bengkulu memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik geologis maupun hidrometeorologis. Letaknya yang berada di jalur cincin api dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menjadikannya rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, serta bencana iklim ekstrem lainnya. Kondisi ini menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan jiwa, hilangnya harta benda, serta mengganggu pembangunan sosial dan ekonomi. Indikator jumlah korban meninggal, hilang, dan terdampak bencana per 100.000 orang menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat risiko tersebut, dan meskipun upaya penanggulangan terus dilakukan, angka korban masih menunjukkan adanya tantangan pada aspek mitigasi, kesiapsiagaan, dan kapasitas respons darurat.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen memperkuat sistem penanggulangan bencana dengan fokus pada pengurangan risiko. Strategi yang ditempuh meliputi penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan, pembangunan infrastruktur yang tangguh, serta pengembangan tata ruang berbasis mitigasi bencana. Kolaborasi dengan BNPB, BPBD, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan dunia usaha juga menjadi kunci dalam membangun ketahanan daerah.

Dengan langkah tersebut, diharapkan jumlah korban bencana dapat ditekan secara signifikan, serta meningkatkan resiliensi masyarakat agar lebih siap, tangguh, dan adaptif menghadapi ancaman bencana. Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam di Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam di Provinsi Bengkulu
tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam	12.105	35.287	77.747	5.647	1.165

Sumber : *bps.go.id*, 2025

Berdasarkan data jumlah korban yang diakibatkan bencana alam di Provinsi Bengkulu tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 12.105 korban, kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 35.287 korban pada 2021, dan melonjak tajam pada 2022 dengan jumlah korban mencapai 77.747 jiwa. Lonjakan pada periode ini mengindikasikan tingginya intensitas maupun dampak bencana alam yang terjadi, serta menunjukkan kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana yang masih cukup tinggi.

Namun demikian, kondisi mulai membaik pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023, jumlah korban menurun drastis menjadi 5.647 jiwa, dan semakin berkurang lagi pada 2024 hingga hanya tercatat 1.165 jiwa. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, baik melalui perbaikan sistem peringatan dini, penguatan kesiapsiagaan masyarakat, maupun peningkatan infrastruktur tangguh bencana. Secara keseluruhan, pencapaian ini menjadi capaian positif dalam upaya pengurangan risiko bencana, meskipun tetap perlu diantisipasi potensi lonjakan korban di masa mendatang mengingat karakteristik Provinsi Bengkulu yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam.

- 2.11.3

Target Global

:

Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota
- 2.11.3.1

Indikator 11.6.2.(b)

:

Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) digunakan untuk menilai kondisi udara ambien dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Bagi Provinsi Bengkulu, indikator ini penting karena udara yang bersih dan sehat merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung kualitas hidup dan keberlanjutan pembangunan. Secara umum, kualitas udara di Bengkulu masih tergolong baik hingga sedang, ditunjang oleh luasnya tutupan hutan, ruang terbuka hijau, serta tingkat aktivitas industri yang relatif rendah. Namun demikian, kualitas udara tetap dipengaruhi oleh aktivitas transportasi, pembangunan perkotaan, pembakaran sampah, serta potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.

Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui penguatan pemantauan secara berkala, pengendalian emisi dari transportasi dan industri, pengembangan transportasi ramah lingkungan, serta perluasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Selain itu, edukasi dan pelibatan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan kualitas udara. Dengan langkah-langkah tersebut, Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mempertahankan Indeks Kualitas Udara pada kategori baik, sehingga mendukung kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indeks Kualitas Udara (IKU) di Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Indeks Kualitas Udara (IKU) di Provinsi Bengkulu
tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Udara (IKU)	92.69	90.52	90.81	91.27	92.49

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara (IKU) di Provinsi Bengkulu tahun 2019–2023, kondisi kualitas udara berada pada kategori baik dengan nilai yang relatif stabil. Pada tahun 2019, IKU tercatat sebesar 92,69 dan mengalami sedikit penurunan pada 2020 menjadi 90,52, yang kemudian kembali naik tipis pada 2021 dengan nilai 90,81. Fluktuasi ini masih dalam rentang yang tidak terlalu jauh sehingga kualitas udara tetap terjaga dengan baik.

Selanjutnya, pada 2022 IKU meningkat menjadi 91,27 dan terus membaik hingga mencapai 92,49 pada 2023, hampir menyamai kondisi tahun 2019. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Provinsi Bengkulu cukup baik dan relatif terjaga meskipun sempat mengalami penurunan kecil. Hal ini mengindikasikan adanya peran kebijakan lingkungan, pengelolaan

emisi, serta keberadaan ruang terbuka hijau yang mampu menjaga kualitas udara. Namun, upaya pengendalian pencemaran udara tetap perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi peningkatan aktivitas industri, transportasi, maupun faktor lingkungan lainnya yang dapat menurunkan kualitas udara di masa mendatang.

2.11.4 Tantangan Tujuan SDGs 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Tantangan dan Permasalahan Tujuan 11 SDGs di Provinsi Bengkulu antara lain:

1. Akses Hunian Layak dan Terjangkau
 - a. Meskipun persentase rumah tangga dengan hunian layak meningkat dari 47,94% (2020) menjadi 56,52% (2024), capaian ini masih rendah sehingga hampir separuh penduduk belum memiliki hunian sesuai standar.
 - b. Masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam ketersediaan sarana-prasarana dasar perumahan.
 - c. Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah terbatas, sementara kawasan kumuh masih ditemukan di beberapa titik.
2. Kerentanan terhadap Bencana
 - a. Bengkulu termasuk wilayah dengan risiko tinggi bencana (gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan iklim ekstrem).
 - b. Data menunjukkan fluktuasi jumlah korban bencana yang sangat signifikan (77.747 jiwa pada 2022 turun drastis menjadi 1.165 jiwa pada 2024).
 - c. Kapasitas mitigasi, sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat masih belum merata di seluruh daerah.
3. Kualitas Lingkungan Perkotaan
 - a. Indeks Kualitas Udara (IKU) relatif baik (90–92) tetapi berfluktuasi, dipengaruhi oleh transportasi, pembakaran sampah, dan potensi karhutla.
 - b. Perkembangan kota berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kualitas udara dan ruang terbuka hijau bila tidak dikendalikan.
 - c. Pengelolaan sampah perkotaan masih menghadapi keterbatasan sistemik dan partisipasi masyarakat yang belum optimal.
4. Kesenjangan Layanan dan Infrastruktur
 - a. Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, transportasi publik, dan ruang terbuka belum merata.
 - b. Perkotaan lebih cepat berkembang dibanding perdesaan, sehingga menimbulkan kesenjangan pelayanan.

- c. Akses bagi kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) terhadap layanan kota dan permukiman masih belum sepenuhnya inklusif.

2.12 Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Bagi Provinsi Bengkulu, pencapaian Tujuan 12 SDGs pada periode 2025–2030 diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengurangi limbah, serta memperkuat ekonomi sirkular.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, tantangan yang muncul adalah tingginya tekanan terhadap sumber daya alam, meningkatnya volume sampah dan limbah, serta rendahnya kesadaran mengenai praktik konsumsi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat kebijakan pengelolaan sampah terpadu, memperluas penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R), serta mendorong inovasi pada sektor produksi agar lebih efisien dan minim dampak lingkungan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci melalui peningkatan literasi lingkungan, kampanye konsumsi hijau, dan dukungan terhadap produk-produk lokal yang berkelanjutan. Dunia usaha juga didorong untuk menerapkan standar produksi ramah lingkungan, meminimalkan emisi, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu membangun pola produksi dan konsumsi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Implementasi tujuan ini akan memperkuat daya saing ekonomi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekologi di wilayah Bengkulu.

2.12.1 Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian

**2.12.1.1 Indikator 12.3.1.(a) : paska panen
Persentase penurunan susut dan
sisa pangan (food loss and waste)
/ Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
(Proxi)**

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi masyarakatnya. IKP tidak hanya menilai ketersediaan pangan, tetapi juga keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga. Indikator ini sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan 2: Tanpa Kelaparan, yang menargetkan peningkatan ketahanan pangan, perbaikan gizi, serta pengembangan pertanian berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Bengkulu
tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	70.28	69.94	65.74	69.88	69.9

Sumber : *satudata.badanpangan.go.id, 2024*

Berdasarkan data satudata.badanpangan.go.id (2024), perkembangan IKP di Provinsi Bengkulu selama tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, nilai IKP Bengkulu berada di angka 70,28 dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 69,94. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2022 ketika IKP turun signifikan menjadi 65,74, yang mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, terutama akibat pandemi COVID-19, gangguan distribusi, serta tekanan inflasi harga pangan.

Memasuki tahun 2023, kondisi ketahanan pangan Bengkulu mulai menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya IKP menjadi 69,88, dan relatif stabil di tahun 2024 dengan capaian 69,9. Meskipun terjadi pemulihan, nilai IKP ini belum berhasil menyamai capaian tahun 2020. Hal ini menegaskan bahwa meskipun sistem pangan mulai pulih, masih terdapat kerentanan yang perlu diantisipasi, baik terkait aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi pangan bergizi.

Tren fluktuatif IKP dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu perlu memperkuat strategi ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut mencakup peningkatan produksi pangan lokal berbasis pertanian berkelanjutan, penguatan rantai distribusi

dan akses pangan di wilayah terpencil, pengendalian harga agar tetap terjangkau, serta edukasi gizi seimbang kepada masyarakat. Selain itu, mitigasi dampak perubahan iklim juga perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas produksi pangan jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan ketahanan pangan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sesuai target SDGs 2030.

2.12.2 Target Global : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali

2.12.2.1 Indikator 12.5.1.(a) : Persentase timbunan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Salah satu indikator kunci dalam tujuan ini adalah persentase timbunan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah, yang mencerminkan sejauh mana masyarakat dan pemerintah daerah mampu mengurangi timbunan sampah melalui kegiatan pemilahan, daur ulang, serta pemanfaatan kembali sampah menjadi produk yang lebih bermanfaat.

Di Provinsi Bengkulu, tingkat daur ulang sampah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber, serta kapasitas pengelolaan sampah yang belum merata di seluruh kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar timbunan sampah masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dengan potensi daur ulang yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Meskipun demikian, upaya peningkatan persentase sampah yang didaur ulang terus dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas pengolahan sampah, termasuk Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan bank sampah. Program-program pemberdayaan masyarakat juga mulai dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilahan sampah dari rumah tangga, sekaligus mendorong ekonomi sirkular berbasis pengelolaan sampah.

Untuk mempercepat pencapaian target SDGs, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, antara lain memperluas cakupan fasilitas pengolahan sampah, memperkuat regulasi dan insentif bagi pengelola

sampah berbasis daur ulang, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, persentase timbunan sampah yang didaur ulang di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

2.12.3 Tantangan Tujuan SDGs 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Tantangan dan permasalahan Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan di Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Ketahanan Pangan dan Food Loss
 - a. Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) fluktuatif (70,28 pada 2020 turun menjadi 65,74 pada 2022 dan stabil di 69,9 pada 2024).
 - b. Kerentanan terhadap gangguan distribusi, inflasi harga pangan, dan dampak perubahan iklim.
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait konsumsi pangan bergizi dan upaya mengurangi sisa pangan.
2. Pengelolaan Sampah dan Limbah
 - a. Persentase sampah yang didaur ulang masih rendah karena keterbatasan infrastruktur pengolahan (TPS3R, bank sampah, TPA ramah lingkungan).
 - b. Tingkat pemilahan sampah dari rumah tangga rendah, sehingga sebagian besar sampah berakhir di TPA.
 - c. Kapasitas pengelolaan sampah belum merata di seluruh kabupaten/kota.
3. Perubahan Perilaku Konsumsi dan Produksi
 - a. Konsumsi masyarakat masih cenderung boros sumber daya dan belum ramah lingkungan.
 - b. Dunia usaha belum optimal menerapkan prinsip produksi hijau, efisiensi energi, dan pengurangan limbah.
 - c. Ekonomi sirkular masih dalam tahap awal, dengan keterbatasan inovasi dan dukungan kebijakan.
4. Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat
 - a. Literasi lingkungan dan budaya konsumsi hijau masih rendah.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam praktik 3R (reduce, reuse, recycle) belum menjadi kebiasaan.
 - c. Dukungan terhadap produk lokal berkelanjutan masih terbatas, sehingga daya saing produk ramah lingkungan belum optimal.

2.13 Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang juga dirasakan dampaknya secara nyata di Provinsi Bengkulu. Kondisi geografis Provinsi Bengkulu yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera menjadikannya rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, abrasi pantai, dan gelombang pasang. Selain itu, meningkatnya suhu, perubahan pola curah hujan, serta kerusakan ekosistem turut mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam periode tahun 2025–2030, pencapaian Tujuan 13 SDGs di Provinsi Bengkulu diarahkan pada penguatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara terpadu. Pemerintah daerah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan energi yang lebih efisien, pemanfaatan energi terbarukan, serta pelestarian hutan dan kawasan lindung. Pada saat yang sama, adaptasi dilakukan dengan memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi risiko bencana, membangun infrastruktur yang tangguh, serta memperluas edukasi dan kesadaran publik tentang perubahan iklim.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat sipil, menjadi faktor kunci dalam implementasi Tujuan 13. Kolaborasi ini diwujudkan dalam program-program penanggulangan bencana berbasis komunitas, konservasi lingkungan, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Melalui langkah-langkah tersebut, Provinsi Bengkulu diharapkan tidak hanya mampu mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga memperkuat ketahanan daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Dengan tindakan yang cepat, terencana, dan inklusif, Bengkulu dapat berkontribusi nyata dalam agenda global menghadapi krisis iklim.

2.13.1 Target Global : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional

2.13.1.1 Indikator 13.2.2.(a) : Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perubahan iklim global. Upaya penurunan emisi GRK menjadi bagian penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya Tujuan 13:

Penanganan Perubahan Iklim, yang menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kebijakan dan aksi nyata di berbagai sektor pembangunan.

Di tingkat daerah, termasuk Provinsi Bengkulu, pengendalian emisi GRK dilakukan melalui berbagai program, seperti peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan limbah, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Indikator potensi penurunan emisi GRK digunakan untuk mengukur kontribusi daerah dalam menurunkan jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas pembangunan, sehingga dapat mendukung target nasional penurunan emisi sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan Nationally Determined Contribution (NDC). Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Provinsi Bengkulu tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Provinsi Bengkulu tahun 2023-2024 (Juta Ton CO₂eq)

Indikator	2023	2024
Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	7,332	1,018

Berdasarkan data yang tersedia, capaian potensi penurunan emisi GRK di Provinsi Bengkulu menunjukkan hasil yang fluktuatif. Pada tahun 2023, potensi penurunan emisi tercatat sebesar 7,332 juta ton CO₂eq, angka yang cukup tinggi dan mencerminkan adanya berbagai program mitigasi iklim yang berjalan efektif. Namun, pada tahun 2024 capaian tersebut menurun signifikan menjadi hanya 1,018 juta ton CO₂eq.

Penurunan yang tajam ini dapat diinterpretasikan sebagai adanya tantangan dalam menjaga konsistensi program penurunan emisi. Faktor yang memengaruhi bisa berasal dari keterbatasan pembiayaan program hijau, belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan, hingga keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar-sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian penurunan emisi GRK di Bengkulu masih rentan terhadap berbagai dinamika pembangunan dan lingkungan.

Untuk menjaga keberlanjutan pencapaian, Provinsi Bengkulu perlu memperkuat kebijakan daerah terkait mitigasi perubahan iklim, memperluas implementasi program rendah karbon, serta mendorong investasi hijau di sektor energi, transportasi, industri, dan kehutanan. Selain itu, penting pula memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam upaya penurunan emisi. Dengan strategi yang tepat, Provinsi Bengkulu dapat

meningkatkan kembali kontribusinya dalam pengendalian perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian target SDGs 2030.

2.13.2 Tantangan Tujuan SDGs 13 Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan Iklim dan Dampaknya

Tantangan dan permasalahan Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya di Provinsi Bengkulu antara lain:

1. Kerentanan Geografis dan Bencana Iklim
 - a. Letak Provinsi Bengkulu di pesisir barat Sumatera membuatnya rentan terhadap banjir, longsor, abrasi pantai, dan gelombang pasang.
 - b. Meningkatnya suhu dan perubahan pola curah hujan memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.
2. Fluktuasi Penurunan Emisi GRK
 - a. Potensi penurunan emisi GRK 2023 tercatat tinggi (7,332 juta ton CO₂eq), namun turun drastis pada 2024 (1,018 juta ton CO₂eq).
 - b. Menunjukkan belum konsistennya implementasi program mitigasi perubahan iklim.
3. Keterbatasan Sumber Daya dan Pembiayaan
 - a. Pendanaan program hijau masih terbatas.
 - b. Investasi di sektor energi terbarukan dan rendah karbon belum optimal.
4. Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi
 - a. Belum maksimalnya integrasi isu iklim dalam perencanaan pembangunan lintas sektor.
 - b. Kelembagaan daerah masih lemah dalam pengawasan, monitoring, dan evaluasi program mitigasi-adaptasi.
5. Alih Fungsi Lahan dan Degradasi Lingkungan
 - a. Masih terjadi alih fungsi hutan dan lahan yang memicu peningkatan emisi GRK.
 - b. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum seimbang dengan laju kerusakan.
6. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - a. Literasi perubahan iklim masih rendah.
 - b. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, konservasi, dan pengurangan risiko bencana belum maksimal.
7. Keterlibatan Dunia Usaha dan Teknologi Hijau
 - a. Dunia usaha belum banyak beralih ke teknologi ramah lingkungan.
 - b. Ekonomi hijau dan rendah karbon masih belum menjadi arus utama investasi daerah.

2.14 Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Provinsi Bengkulu memiliki garis pantai yang panjang dan langsung berhadapan dengan Samudera Hindia, sehingga menjadikan sumber daya kelautan sebagai salah satu aset strategis bagi pembangunan daerah. Potensi perikanan tangkap, budidaya laut, wisata bahari, hingga jasa lingkungan ekosistem pesisir merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Namun, di sisi lain, wilayah pesisir dan laut Provinsi Bengkulu menghadapi tekanan serius akibat praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran laut, degradasi ekosistem pesisir, serta dampak perubahan iklim seperti abrasi dan naiknya permukaan air laut.

Pencapaian Tujuan 14 SDGs di Provinsi Bengkulu periode tahun 2025–2030 difokuskan pada pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat konservasi ekosistem pesisir dan laut, mendorong praktik perikanan berkelanjutan, serta mengurangi pencemaran laut melalui pengendalian limbah domestik maupun industri. Selain itu, pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat dan penguatan kapasitas nelayan menjadi prioritas agar manfaat ekonomi kelautan dapat dirasakan secara inklusif.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam melaksanakan strategi ini. Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga riset, dunia usaha, serta komunitas lokal dalam inovasi teknologi kelautan, pengawasan sumber daya laut, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut.

Dengan langkah-langkah tersebut, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan samudera, sekaligus memanfaatkannya secara bijak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya ini bukan hanya melindungi kekayaan laut bagi generasi mendatang, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor kelautan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

2.14.1 Target Global : Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia pada tahun 2020

2.14.1.1 Indikator 14.5.1* : Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut /Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan (Proxi)

Pengelolaan kawasan hutan dan konservasi perairan merupakan bagian penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Indikator ini berkaitan erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya Tujuan 14: Ekosistem Lautan dan Tujuan 15: Ekosistem Daratan, yang menekankan perlunya perlindungan, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut maupun daratan. Luas kawasan hutan dan konservasi perairan menjadi proksi dalam mengukur komitmen daerah terhadap perlindungan lingkungan, serta menggambarkan kapasitas ekosistem dalam mendukung kehidupan masyarakat, baik melalui jasa lingkungan maupun sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.

Di Provinsi Bengkulu, kawasan hutan dan perairan memiliki peran vital, bukan hanya sebagai penyangga kehidupan, tetapi juga sebagai benteng terhadap perubahan iklim, sumber pangan, dan basis penghidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, menjaga luas kawasan hutan dan konservasi perairan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan berkelanjutan. Fluktuasi luas kawasan mencerminkan dinamika pengelolaan lahan, kebijakan konservasi, serta ancaman dari deforestasi, degradasi, dan alih fungsi lahan. Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Bengkulu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Bengkulu
tahun 2019-2023 (Ribuan Hektar)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan	924.631,12	924.517,90	917.109	912.031	922.291,16

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu (2024), luas kawasan hutan dan konservasi perairan pada periode tahun 2019-2023 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019 luas kawasan tercatat sebesar 924.631,12 ribu hektar, sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 924.517,90 ribu hektar. Pada tahun 2021, luas kawasan berkurang lebih signifikan menjadi 917.109 ribu hektar, kemudian menurun lagi di tahun 2022 menjadi 912.031 ribu hektar, yang merupakan titik terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2023 luas kawasan kembali meningkat cukup besar menjadi 922.291,16 ribu hektar, mendekati capaian tahun 2019.

Tren ini menunjukkan bahwa kawasan hutan dan konservasi perairan di Provinsi Bengkulu mengalami tekanan yang cukup tinggi

pada periode tahun 2019-2022, kemungkinan akibat alih fungsi lahan, degradasi ekosistem, serta aktivitas manusia yang mengancam kelestarian kawasan. Namun, peningkatan pada tahun 2023 menjadi sinyal positif bahwa upaya perlindungan, rehabilitasi, dan konservasi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil. Ke depan, diperlukan penguatan kebijakan perlindungan kawasan konservasi, pengendalian deforestasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam sekaligus mendukung pencapaian target SDGs 2030.

2.14.2 Tantangan Tujuan SDGs 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tantangan dan permasalahan Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Tekanan terhadap Ekosistem Laut dan Pesisir
 - a. Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (overfishing, destructive fishing).
 - b. Abrasi pantai, kenaikan permukaan air laut, dan kerusakan terumbu karang akibat perubahan iklim.
2. Fluktuasi Luas Kawasan Konservasi
 - a. Data 2019–2022 menunjukkan penurunan signifikan luas kawasan hutan dan konservasi perairan (dari 924.631,12 ribu ha menjadi 912.031 ribu ha).
 - b. Mengindikasikan adanya degradasi ekosistem, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan.
3. Pencemaran Laut dan Pesisir
 - a. Limbah domestik dan industri yang tidak terkelola dengan baik.
 - b. Sampah plastik dan polusi laut mengancam biota serta kualitas ekosistem.
4. Kapasitas dan Kelembagaan
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi antar-sektor dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi.
 - b. Belum optimalnya integrasi isu kelautan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Kesejahteraan Nelayan dan Masyarakat Pesisir
 - a. Ketergantungan pada sumber daya laut tanpa diversifikasi ekonomi.
 - b. Rendahnya kapasitas nelayan dalam mengakses teknologi ramah lingkungan, permodalan, dan pasar.

6. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi laut.
 - b. Peran komunitas lokal dalam menjaga kawasan konservasi belum optimal.
7. Investasi dan Inovasi Terbatas
 - a. Minimnya investasi pada wisata bahari berkelanjutan dan teknologi kelautan hijau.
 - b. Dunia usaha belum banyak terlibat dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut.

2.15 Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keragaman Hayati

Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan ekosistem daratan yang meliputi hutan hujan tropis, kawasan konservasi, taman nasional, serta lahan pertanian yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Ekosistem daratan tersebut memiliki fungsi vital sebagai penyedia jasa lingkungan, pengatur iklim, penyimpan karbon, serta habitat bagi keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik yang dilindungi. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah deforestasi, alih fungsi lahan, degradasi hutan, serta ancaman kepunahan flora dan fauna akibat aktivitas manusia maupun dampak perubahan iklim.

Dalam periode tahun 2025-2030, pencapaian Tujuan 15 SDGs di Provinsi Bengkulu diarahkan pada upaya perlindungan, restorasi, dan pengelolaan ekosistem daratan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pengelolaan hutan lestari, memperluas program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta meningkatkan efektivitas kawasan konservasi. Upaya ini juga diiringi dengan pengendalian perambahan hutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan kelembagaan masyarakat adat dan lokal dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

Pemanfaatan sumber daya alam diarahkan agar tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, dengan mendorong praktik pertanian ramah lingkungan, agroforestry, dan ekowisata berbasis konservasi. Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil akan diperkuat untuk mendukung riset, inovasi, serta pendidikan lingkungan dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Dengan langkah-langkah tersebut, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem daratan sekaligus memulihkan lahan yang telah terdegradasi. Keberhasilan tujuan ini tidak hanya melindungi kekayaan alam dan keragaman hayati untuk generasi mendatang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan berkeadilan.

2.15.1 Target Global : Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional

2.15.1.1 Indikator 15.1.1* : Proporsi tutupan hutan terhadap luas daratan

Indikator proporsi tutupan hutan terhadap luas daratan merupakan bagian penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-15: Ekosistem Daratan, yang menekankan pentingnya melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan. Indikator ini mengukur sejauh mana suatu wilayah menjaga keseimbangan ekologis melalui ketersediaan tutupan hutan, yang berperan sebagai penyerap karbon, pengatur iklim, penjaga siklus hidrologi, serta habitat keanekaragaman hayati. Tingginya proporsi tutupan hutan menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan, sedangkan penurunan tutupan hutan menjadi peringatan adanya ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem.

Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik wilayah yang kaya akan potensi sumber daya hutan, yang tidak hanya berfungsi sebagai ekosistem alami, tetapi juga sebagai penopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Tutupan hutan di Bengkulu sangat penting dalam mendukung ketahanan lingkungan, mencegah bencana ekologis seperti banjir dan longsor, serta menjadi penyangga utama terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan di daerah. Ke depan, menjaga proporsi tutupan hutan di Provinsi Bengkulu membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui perlindungan kawasan konservasi, rehabilitasi hutan, serta pengendalian alih fungsi lahan agar target SDGs 2030 dapat tercapai.

Tabel 2.38
 Luas Penutupan Lahan Hutan di Provinsi Bengkulu
 tahun 2019-2023 (Ribuan Hektar)

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Penutupan Lahan Hutan	674.6	191.9	654.2	651.3	647.4

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Data menunjukkan bahwa luas penutupan lahan hutan di Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, luas tutupan hutan tercatat sebesar 674,6 ribu hektar, namun pada 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi hanya 191,9 ribu hektar. Penurunan tajam ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan metode pencatatan, perubahan tata kelola data, atau adanya pergeseran status lahan yang sebelumnya termasuk kategori hutan. Namun pada tahun 2021, luas tutupan hutan kembali meningkat drastis menjadi 654,2 ribu hektar, dan relatif stabil di tahun 2022 sebesar 651,3 ribu hektar serta sedikit menurun pada 2023 menjadi 647,4 ribu hektar.

Secara umum, tren dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan luas tutupan hutan, meskipun nilainya relatif stabil setelah 2021. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam pencapaian SDGs, khususnya indikator proporsi tutupan hutan terhadap luas daratan, karena penurunan tutupan hutan berimplikasi terhadap berkurangnya daya dukung lingkungan, potensi meningkatnya kerentanan bencana ekologis, serta berkurangnya kemampuan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih kuat melalui program rehabilitasi hutan, pengendalian alih fungsi lahan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan, agar tutupan hutan di Provinsi Bengkulu tetap terjaga dan sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan.

- 2.15.2

Target Global

:

Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
- 2.15.2.1

Indikator 15.3.1*

:

Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan

Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan

menjaga ekosistem daratan. Indikator ini berfungsi untuk menggambarkan sejauh mana kualitas lahan dapat terjaga dalam mendukung fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Pada tingkat provinsi, indikator ini seringkali diproksikan melalui data luas dan penyebaran lahan kritis, karena lahan kritis mencerminkan kondisi lahan yang telah kehilangan fungsi produktifnya akibat degradasi. Lahan kritis yang semakin berkurang mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya alam serta keberhasilan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi lingkungan. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Provinsi Bengkulu tahun 2006-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Provinsi Bengkulu
tahun 2006-2018 (Hektar)

Indikator	2006	2011	2013	2018
Luas dan Penyebaran Lahan Kritis	708.949	642.587	721.674	148.887

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, luas lahan kritis di Provinsi Bengkulu pada tahun 2006 tercatat sebesar 708.949 hektar. Angka ini menurun menjadi 642.587 hektar pada 2011, namun kembali meningkat pada 2013 menjadi 721.674 hektar, yang menunjukkan adanya dinamika dalam proses degradasi maupun rehabilitasi lahan. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2018, ketika luas lahan kritis turun drastis menjadi hanya 148.887 hektar. Penurunan tajam ini mengindikasikan adanya keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, serta upaya konservasi lingkungan yang lebih optimal pada periode tersebut.

Secara keseluruhan, tren penurunan lahan kritis dari 2006 hingga 2018 menunjukkan arah positif bagi pencapaian SDGs di Provinsi Bengkulu, terutama dalam indikator pengendalian degradasi lahan. Namun demikian, fluktuasi yang terjadi di periode tahun 2006-2013 juga menjadi catatan bahwa pengelolaan lingkungan harus terus dijaga secara konsisten. Ke depan, konsolidasi program rehabilitasi lahan, penguatan tata kelola hutan, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lahan menjadi langkah penting untuk mempertahankan capaian positif sekaligus mencegah munculnya kembali degradasi lahan di Provinsi Bengkulu.

2.15.3 Tantangan Tujuan SDGs 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, mengelola Bhutan Secara lestari, Menghentikan Penggurunan, memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keragaman Hayati

Tantangan dan permasalahan Tujuan 15 SDGs (Ekosistem Daratan) di Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Deforestasi dan Alih Fungsi Lahan
 - a. Tekanan tinggi terhadap kawasan hutan akibat pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman.
 - b. Alih fungsi hutan berimplikasi pada berkurangnya proporsi tutupan hutan terhadap luas daratan.
2. Degradasi dan Lahan Kritis
 - a. Lahan kritis yang cukup luas di Bengkulu, meskipun tren menunjukkan penurunan signifikan, tetap berisiko kembali meningkat tanpa pengelolaan berkelanjutan.
 - b. Erosi tanah, banjir, dan kebakaran hutan/lahan mempercepat proses degradasi.
3. Fluktuasi Data Tutupan Hutan
 - a. Data 2019–2023 menunjukkan ketidakstabilan luas tutupan hutan (turun drastis 2020, lalu naik kembali 2021–2023).
 - b. Hal ini menandakan lemahnya konsistensi pengelolaan hutan, dan kemungkinan perbedaan tata kelola data.
4. Ancaman Keanekaragaman Hayati
 - a. Banyak flora dan fauna endemik Bengkulu yang terancam punah akibat perambahan hutan, perburuan liar, serta hilangnya habitat alami.
 - b. Fragmentasi habitat membatasi ruang gerak satwa dilindungi.
5. Kebakaran Hutan dan Lahan
 - a. Kebakaran musiman menambah laju degradasi ekosistem daratan, menurunkan kualitas udara, dan mengganggu kesehatan masyarakat.
6. Kelembagaan dan Penegakan Hukum
 - a. Lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan (pembalakan liar, perambahan).
 - b. Kapasitas kelembagaan konservasi dan pengelolaan hutan belum optimal.
7. Perubahan Iklim
 - a. Meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan memperparah kerusakan lahan.
 - b. Perubahan iklim juga mempercepat degradasi lahan dan mempengaruhi produktivitas ekosistem daratan.

8. Keterlibatan Masyarakat

- a. Partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam menjaga hutan belum sepenuhnya kuat.
- b. Tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat pada pemanfaatan langsung hutan berpotensi menambah tekanan terhadap ekosistem.

2.16 Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila didukung oleh masyarakat yang damai, inklusif, serta kelembagaan yang efektif dan berintegritas. Bagi Provinsi Bengkulu, penguatan tata kelola pemerintahan, akses keadilan, serta partisipasi masyarakat menjadi pilar penting untuk menciptakan lingkungan pembangunan yang adil dan berkeadilan. Tantangan yang masih dihadapi antara lain tingkat partisipasi politik dan sosial yang belum merata, keterbatasan akses masyarakat rentan terhadap layanan hukum, serta perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam periode tahun 2025–2030, pencapaian Tujuan 16 SDGs diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi dan harmoni sosial melalui penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan literasi hukum, serta perluasan akses layanan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kapasitas institusi pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan terbuka, dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Upaya mendorong perdamaian dan inklusivitas juga dilakukan melalui pembangunan ruang dialog, penguatan budaya toleransi, serta pencegahan potensi konflik sosial. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem sosial-politik yang sehat, damai, dan produktif.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu membangun masyarakat yang damai dan inklusif, memastikan akses keadilan yang setara bagi semua orang, serta memperkuat kelembagaan yang efektif dan berintegritas di seluruh tingkatan pemerintahan. Hal ini tidak hanya memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menciptakan ruang

yang kondusif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Provinsi Bengkulu.

- 2.16.1

Target Global

:

Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun
- 2.16.1.1

Indikator 16.1.3.(a)

:

Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir merupakan indikator penting dalam upaya mewujudkan tujuan SDGs ke-16, yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai tindak kejahatan yang mengancam hak hidup, rasa aman, serta kualitas hidup warga. Pada level provinsi, data ini biasanya diproses dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Semakin tinggi jumlah laporan kejahatan, semakin besar pula potensi meningkatnya proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan, sehingga membutuhkan perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	3.224	3.212	4.163	3.934	5.261

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu, jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 3.224 kasus dan relatif stabil pada 2021 dengan 3.212 kasus. Namun pada 2022, terjadi peningkatan signifikan menjadi 4.163 kasus, yang kemudian menurun kembali pada 2023 menjadi 3.934 kasus. Akan tetapi, pada tahun 2024 angka ini kembali melonjak tajam menjadi 5.261 kasus, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat periode penurunan, tingkat kejahatan di Provinsi Bengkulu masih cukup fluktuatif dan cenderung meningkat dalam jangka panjang. Peningkatan jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan mencerminkan adanya tantangan besar dalam aspek keamanan dan perlindungan masyarakat. Oleh

karena itu, ke depan diperlukan penguatan strategi penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat keamanan, serta program pencegahan berbasis masyarakat untuk mengurangi risiko penduduk menjadi korban kejahatan kekerasan, sejalan dengan pencapaian tujuan SDGs di bidang perdamaian dan keadilan.

2.16.2 Tantangan Tujuan SDGs 16 Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan

Tantangan dan permasalahan Tujuan 16 SDGs (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) di Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Tingkat Kejahatan yang Fluktuatif dan Cenderung Meningkat
 - a. Data 2020–2024 menunjukkan tren jumlah kasus kejahatan yang naik-turun, dengan lonjakan tajam pada 2024.
 - b. Hal ini mengindikasikan masih tingginya potensi penduduk menjadi korban kekerasan.
2. Akses Keadilan Belum Merata
 - a. Kelompok rentan (perempuan, anak, masyarakat miskin, dan kelompok marginal) masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan hukum.
 - b. Keterbatasan bantuan hukum gratis dan rendahnya literasi hukum masyarakat memperparah kesenjangan ini.
3. Partisipasi Politik dan Sosial yang Belum Optimal
 - a. Partisipasi masyarakat dalam proses politik, perencanaan pembangunan, dan pengawasan masih belum merata.
 - b. Kelompok tertentu, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, kurang terwakili.
4. Kelembagaan yang Perlu Diperkuat
 - a. Masih ada kelemahan dalam tata kelola pemerintahan terkait transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.
 - b. Kapasitas institusi publik belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat.
5. Potensi Konflik Sosial
 - a. Adanya kerentanan konflik akibat kesenjangan sosial-ekonomi, intoleransi, dan perebutan sumber daya alam.
 - b. Minimnya ruang dialog dan budaya toleransi yang kuat meningkatkan risiko terjadinya gesekan antarwarga.
6. Lemahnya Penegakan Hukum
 - a. Masih ditemukan praktik pelanggaran hukum yang tidak ditindak secara optimal.

- b. Persepsi masyarakat terhadap integritas aparat hukum dan keamanan belum sepenuhnya positif.
- 7. Pemanfaatan Teknologi yang Belum Maksimal
 - a. Digitalisasi layanan publik dan sistem informasi hukum belum sepenuhnya terintegrasi.
 - b. Keterbatasan akses digital masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, menghambat peningkatan pelayanan yang inklusif.
- 8. Kesadaran dan Literasi Hukum yang Rendah
 - a. Banyak masyarakat belum memahami hak-haknya di bidang hukum dan keadilan.
 - b. Rendahnya literasi hukum berdampak pada tingginya kasus kekerasan dan kejahatan yang tidak dilaporkan.

2.17 Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pencapaian seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan memerlukan dukungan sarana pelaksanaan yang kuat serta kemitraan yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Provinsi Bengkulu menyadari bahwa keterbatasan sumber daya, kapasitas, dan teknologi tidak dapat diatasi secara sendiri, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan agenda SDGs 2025–2030.

Tujuan 17 SDGs di Provinsi Bengkulu diarahkan pada penguatan kapasitas perencanaan, penganggaran, serta pemantauan pembangunan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah daerah mendorong mobilisasi pendanaan inovatif, optimalisasi potensi investasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, kerja sama antar daerah, kemitraan dengan sektor swasta, lembaga internasional, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil terus ditingkatkan guna memperluas jaringan dukungan bagi pembangunan daerah.

Revitalisasi kemitraan juga mencakup upaya memperkuat data dan sistem informasi pembangunan yang terintegrasi, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaian target SDGs secara transparan dan akuntabel. Dengan dukungan sinergi multipihak, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian SDGs, memperluas dampak pembangunan, serta memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, Tujuan 17 tidak hanya menjadi penopang teknis dalam implementasi SDGs, tetapi juga landasan penting bagi terbangunnya kolaborasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang

pada akhirnya memperkuat daya saing serta ketahanan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

2.17.1 Tantangan Tujuan SDGs 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tantangan dan permasalahan Tujuan 17 SDGs Provinsi Bengkulu antara lain:

1. Keterbatasan Pendanaan, masih bergantung pada dana transfer pusat dan minim mobilisasi sumber pendanaan alternatif.
2. Kapasitas Perencanaan & Kelembagaan Lemah, integrasi SDGs ke dokumen daerah belum optimal, SDM terbatas, koordinasi antar-OPD lemah.
3. Data & Sistem Informasi Belum Terpadu, banyak indikator tanpa data mutakhir, sistem informasi masih tersebar dan belum terintegrasi.
4. Teknologi & Infrastruktur Digital Terbatas, pemanfaatan digitalisasi pembangunan belum optimal, akses internet belum merata terutama di perdesaan.
5. Kemitraan Multipihak & Global Belum Maksimal, kolaborasi dengan swasta, akademisi, CSO, maupun mitra internasional masih lemah, serta promosi potensi daerah belum optimal.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGS



BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN

TPB/SDGS

3.1 Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-1 menekankan upaya menghapus kemiskinan ekstrem dan menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Bagi Provinsi Bengkulu, isu kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan kelompok rentan. Kemiskinan yang multidimensi mencakup aspek pendapatan, keterbatasan akses layanan dasar, keterbatasan aset produktif, serta kerentanan terhadap bencana dan guncangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga penguatan kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan sosial adaptif.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.2, Indikator 1.1.1 tingkat kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Provinsi Bengkulu masih memiliki tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,69 persen, sehingga diperlukan percepatan intervensi untuk memastikan pemenuhan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Target yang ditetapkan pada periode 2025–2026 menunjukkan penurunan bertahap dari 0,5-0,25 persen hingga mencapai 0,25-0 persen, dan selanjutnya ditetapkan sebesar 0 persen mulai tahun 2027 hingga 2030. Penetapan target tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendukung agenda nasional dan global SDGs melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta intervensi berbasis wilayah pada kelompok dan lokasi yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Sementara itu, proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan secara umum menunjukkan tren menurun dari 12,52% pada 2024 menjadi target 8,47% pada tahun 2030. Tren ini menggambarkan efektivitas intervensi lintas sektor yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Bapperida, dan perangkat daerah terkait dalam memperluas akses ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Pada aspek perlindungan sosial, indikator proporsi peserta jaminan kesehatan melalui sistem JKN menunjukkan capaian tinggi, stabil di atas 99% hingga 2030. Begitu pula dengan kepesertaan pada

Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang meningkat dari 32,5% menjadi 36,88% dalam kurun waktu 2024–2030. Hal ini menandakan perluasan cakupan jaminan sosial bagi tenaga kerja formal maupun informal terus berjalan. Di sisi lain, indikator layanan dasar juga mengalami kemajuan signifikan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar terus meningkat, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur dasar bagi masyarakat rentan, termasuk kelompok miskin dan perempuan.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan guncangan sosial, BPBD Provinsi Bengkulu mencatat adanya penurunan jumlah korban meninggal akibat bencana dari 41,65 per 100.000 jiwa pada 2024 menjadi 39,0 pada 2030. Indeks risiko bencana juga menunjukkan perbaikan, turun dari 144,08 menjadi 130 pada 2030, sejalan dengan peningkatan kapasitas daerah dalam mitigasi bencana. Indikator terkait strategi adaptasi masyarakat terhadap risiko bencana menunjukkan tren membaik dengan target 19,50% pada 2030. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa Provinsi Bengkulu telah berada pada jalur yang tepat menuju penghapusan kemiskinan melalui penguatan sistem perlindungan sosial, peningkatan layanan dasar, serta ketahanan masyarakat terhadap risiko dan bencana.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 1 diarahkan pada:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memperkuat program perlindungan sosial berbasis data terpadu.
2. Perluasan akses jaminan sosial, terutama kesehatan dan perlindungan kelompok rentan.
3. Peningkatan akses layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, transportasi, energi, dan perumahan layak.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui penguatan UMKM, pertanian, perikanan, dan pengembangan ekonomi desa.
5. Penguatan ketahanan masyarakat miskin terhadap bencana melalui strategi adaptasi iklim dan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

Tujuan 1 secara langsung mendukung Misi ke-3, yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman. Tujuan ini juga terkait dengan Misi ke-2, yakni mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah untuk menunjang akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 1 sejalan dengan Prioritas Pembangunan Daerah ke-4, yaitu mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, Tujuan 1 juga mendukung Prioritas Pembangunan Daerah ke-5, yaitu memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan.

Beberapa Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025–2029 yang mendukung pencapaian Tujuan 1 antara lain:

1. Perwujudan *Universal Health Coverage (UHC)* dengan BPJS gratis.
2. Penyediaan ambulance gratis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan.
3. Program *Merdeka Ijazah* bagi anak bangsa untuk menjamin akses pendidikan setara.
4. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan BUMDes melalui *One Village-One Product* dan desa wisata.
5. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui bantuan bibit, peralatan, alat tangkap, serta pengembangan pusat pengolahan agropolitan.
6. Program *Cetak Sawah Baru (CSB)* dan peningkatan serta perbaikan irigasi untuk memperkuat ketahanan pangan.

Dengan keterpaduan arah kebijakan Tujuan 1 dan strategi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, menghapus kemiskinan ekstrem, serta membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dan berkeadilan.

Tabel 3.1

Matriks Keterkaitan Tujuan 1 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 1	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Menurunkan angka kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, serta memperkuat sistem perlindungan	✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya	✓ Prioritas 4: Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam	✓ Perwujudan Universal Health Coverage (UHC) dengan BPJS gratis. ✓ Penyediaan ambulance gratis. ✓ Program Merdeka Ijazah. ✓ Penguatan ekonomi

Tujuan SDGs 1	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
sosial yang inklusif dan berkelanjutan	kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman. ✓ Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah.	kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas. ✓ Prioritas 5: Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan.	kerakyatan berbasis UMKM dan BUMDes melalui <i>One Village-One Product</i> dan desa wisata. ✓ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui bantuan bibit, peralatan, alat tangkap, serta pengembangan pusat pengolahan agropolitan. ✓ Program Cetak Sawah Baru (CSB) dan perbaikan/peningkatan irigasi.



Tabel 3.2 Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun												
Target Global : Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.												
1.1.1	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	-	BPS, RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029	%	0.69	0.5 - 0.25	0.25 - 0	0	0	0	0	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dikbud, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Bapperida
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.												
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	BPS, RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029	%	12.52	12.08 - 11,20	11,91 - 11,00	11,30 - 10,69	11,07 - 10,08	10,08 - 8,99	9,48 - 8,87	Dikbud, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, DP3APPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan

Kode Indikator	Nama Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												Perikanan, DPMD, Dinas Koperasi dan UKM
Target global : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.												
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	-	Dinkes, RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029	%	99,5	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	100	Dinkes
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	-	RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029	%	32,52	33,02	34,88	35,38	35,38	36,38	36,88	Dinas Nakertrans
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.												
1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar											
	Layanan air Minum	-	Perkim	%	52.21	55.11	58.43	62.16	66.30	70.84	75.77	Perkim
	Layanan sanitasi dasar	-	Perkim	%	85.80	89.57	93.05	96.30	99.33	102.19	104.88	Perkim
	Mobilitas dasar	-	Dishub	%	22.34	28	30	32	36	38	40	Dishub

Kode Indikator	Nama Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	Persentase Rumah Tangga dengan Status Kepemilikan Rumah Sendiri	BPS	%	90	91	92	93	94	95	96	BPS
Target Global :Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.												
1.5.1	Jumlah Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	-	BPBD	Per 100.000 jiwa	41.65	41.65	41.30	41.00	40.00	39.50	39.00	BPBD
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	Indeks Resiko Bencana	RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029	Indeks	144,08	140	140	137	134	131	131	BPBD
1.5.4	persentase Pemerintah Daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan resiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan resiko bencana nasional	-	BPBD	%	N/A	22.76	22.50	22.00	20.00	19.50	19.00	BPBD

3.2 Tujuan 2 : Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-2 berfokus pada penghapusan kelaparan, pemenuhan gizi yang baik, serta peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan. Bagi Provinsi Bengkulu, sektor pangan dan pertanian merupakan tulang punggung ekonomi sekaligus kunci dalam penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup masih adanya kerawanan pangan, prevalensi stunting dan wasting, produktivitas petani kecil yang terbatas, serta kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan dan dampak perubahan iklim.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.4, berdasarkan baseline tahun 2024, kondisi ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu masih menghadapi tantangan yang cukup besar, dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 9,86% dan prevalensi daerah rawan pangan 11,7%. Namun, target hingga tahun 2030 menunjukkan upaya penurunan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2025, kedua indikator tersebut mulai menurun menjadi 8,33% dan 8,00%, dan diproyeksikan terus turun hingga mencapai 6,41% dan 3,00% masing-masing pada tahun 2030. Artinya, dalam enam tahun ke depan, Bengkulu menargetkan penurunan ketidakcukupan pangan sekitar 35% dan penurunan kerentanan pangan lebih dari 70% dibanding baseline 2024. Tren ini menunjukkan arah kebijakan yang kuat dalam memperkuat cadangan pangan, memperbaiki distribusi logistik, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi yang berkelanjutan sepanjang tahun.

Pada aspek status gizi masyarakat, baseline 2024 memperlihatkan angka stunting sebesar 18,8% dan wasting sebesar 3,86%, yang menandakan masih adanya permasalahan gizi kronis dan akut pada anak-anak di bawah lima tahun. Namun, target yang ditetapkan hingga tahun 2030 menunjukkan komitmen nyata untuk mempercepat penurunan kasus tersebut. Angka stunting ditargetkan menurun menjadi 13,3%, sedangkan wasting turun menjadi 1,93%, atau hampir separuh dari kondisi awal. Selain itu, skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai indikator kualitas konsumsi pangan juga meningkat dari 89,8 pada tahun 2024 menjadi 91,8 pada 2030, mencerminkan peningkatan keragaman dan keseimbangan gizi dalam konsumsi masyarakat. Dengan demikian, arah target menunjukkan perbaikan menyeluruh, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas asupan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan intervensi lintas sektor antara kesehatan, pangan, dan pemberdayaan keluarga.

Dari sisi produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, baseline 2024 menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 181,17 dan pendapatan petani rata-rata Rp59,14 juta per tenaga kerja. Target hingga tahun 2030 memperlihatkan peningkatan bertahap menjadi NTP 184,17 dan pendapatan Rp89,82 juta, yang berarti terjadi kenaikan sekitar 52% dalam pendapatan petani selama enam tahun. Produktivitas pertanian per subsektor (dalam USD PPP) juga naik dari 7,91 juta menjadi 9,45 juta, menandakan peningkatan efisiensi dan nilai tambah hasil pertanian. Namun, indikator anomali harga pangan justru menunjukkan tren meningkat dari 1,88% pada 2024 menjadi 6,36% pada 2030, menandakan bahwa meskipun produksi meningkat, stabilitas harga pangan masih menjadi tantangan akibat fluktuasi pasokan dan faktor eksternal seperti cuaca ekstrem. Oleh karena itu, intervensi pemerintah perlu difokuskan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada stabilisasi harga dan penguatan sistem distribusi pangan agar pencapaian ketahanan pangan tetap inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan Tujuan 2 diarahkan pada:

1. Percepatan penurunan stunting dan wasting melalui intervensi gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan pangan bergizi terjangkau.
2. Penguatan ketahanan pangan daerah dengan meningkatkan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan lokal.
3. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani-nelayan kecil melalui akses teknologi, permodalan, dan pasar.
4. Pengembangan pertanian berkelanjutan dan ramah iklim, termasuk diversifikasi tanaman, pemanfaatan lahan tidur, dan inovasi budidaya.
5. Stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan memperbaiki sistem distribusi pangan.

Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 menempatkan pemenuhan kebutuhan pangan, perbaikan gizi, dan peningkatan produktivitas pertanian sebagai prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan 2 langsung mendukung Misi ke-3, yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Selain itu, Tujuan 2 juga terkait erat dengan Misi ke-4, yakni mewujudkan keselarasan pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari sisi prioritas pembangunan, arah ini tercermin pada agenda memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi masyarakat dan penanganan stunting.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, program unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 yang relevan dengan Tujuan 2 antara lain:

1. Cetak Sawah Baru (CSB) dan perbaikan serta peningkatan irigasi, meningkatkan ketersediaan lahan produktif dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
2. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui bantuan bibit, peralatan pertanian, alat tangkap, serta pengembangan pusat-pusat pengolahan agropolitan, mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, sekaligus meningkatkan pendapatan petani/nelayan kecil.
3. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan pemberdayaan desa melalui Bumdes dan program One Village-One Product (OVOP), memperkuat diversifikasi pangan, hilirisasi hasil pertanian, dan pengolahan produk lokal.
4. Stabilisasi harga BBM subsidi di wilayah terluar, menjaga stabilitas distribusi logistik dan harga pangan.
5. Program Merdeka Ijazah bagi Anak Bangsa & penyantunan anak yatim, mendukung ketahanan pangan keluarga melalui perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak.

Dengan integrasi arah kebijakan SDGs dan strategi RPJMD, pencapaian Tujuan 2 di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan yang tangguh, menurunkan stunting dan wasting secara signifikan, meningkatkan kesejahteraan petani–nelayan, serta memastikan akses pangan sehat, bergizi, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Tabel 3.3

Matriks Keterkaitan Tujuan 2 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 2	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Mewujudkan ketahanan pangan, perbaikan gizi masyarakat, serta peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan	✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan	✓ Prioritas 5: Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan	✓ Program Cetak Sawah Baru (CSB) dan perbaikan serta peningkatan irigasi. ✓ Peningkatan kesejahteraan

Tujuan SDGs 2	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
ketahanan ekonomi lokal	terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman. ✓ Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.	mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan. ✓ Prioritas 4: Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, dan penanganan stunting melalui perbaikan gizi.	petani dan nelayan melalui bantuan bibit, peralatan, alat tangkap, serta pengembangan pusat pengolahan agropolitan. ✓ Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan BUMDes melalui One Village-One Product (OVOP) dan desa wisata. ✓ Stabilisasi harga BBM subsidi di wilayah terluar untuk menjaga distribusi logistik dan harga pangan. ✓ Program Merdeka Ijazah & penyantunan anak yatim sebagai perlindungan sosial terhadap kelompok rentan.



Tabel 3.4 Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan												
Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.												
2.1.1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment).	-	BPS, Dinas Ketahanan Pangan	% / kkal	9.86	8.33	7.95	7.56	7.18	6.79	6.41	Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan.	Persentase daerah rentan rawan pangan	BPS, Dinas Ketahanan Pangan	%	11.7	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	3.00	Dinas Ketahanan Pangan
Target Global :Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.												
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	-	Dinkes	%	18,8	17,7	16,9	15,9	15.00	14,1	13,3	Dinkes
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari lima tahun, berdasarkan tipe	-	Dinkes	%	3.86	3.46	3.10	2.77	2.47	2.19	1.93	Dinkes
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diidentifikasi oleh skor pola pangan harapan (PPH)	-	Dinas Ketahanan Pangan	Skor 1-100	89.8	90.0	90.5	90.8	91.0	91.5	91.8	Dinas Ketahanan Pangan

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target Global : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skal kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lain nya pengetahuan, keuangan, pasar, peluang nilai tambah, dan pekerja non-pertanian.												
2.3.1	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman / peternakan / perikanan/ kehutanan	Nilai Tukar Petani (NTP) (gabungan)	BPS	Nilai	181.17	181.67	182.17	182.67	183.17	183.67	184.17	Dinas TPHP
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian pertenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/peri kanan/kehutanan	-	BPS	RP. Juta/ tenaga Kerja	59,143,750	62,422,110	66,288,484	70,852,620	76,224,267	82,513,176	89,829,094	Dinas TPHP
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut subsektor.		BPS	USD PPP	7,916,390	8,153,881.70	8,398,498.15	8,650,453.10	8,909,966.69	9,177,265.69	9,452,583.66	Dinas TPHP
Target global : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi, terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lain nya serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.												
2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan		TPHP	%								Dinas TPHP
Target Global : Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem.												
2.c.1	Indikator anomali harga pangan	angka stabilitas harga pangan	DTP	%	1.88	4.30	4.71	5.12	5.53	5.95	6.36	Dinas Ketahanan Pangan

3.3 Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Tujuan Global 3 SDGs, yaitu Menjamin Kehidupan Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan bagi Seluruh Penduduk di Semua Usia, menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup manusia melalui kesehatan yang optimal dan kesejahteraan yang merata tanpa diskriminasi. Upaya ini mencakup penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita; pencegahan serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular; peningkatan kesehatan reproduksi; serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi semua orang. Selain itu, tujuan global ini juga berfokus pada penguatan sistem kesehatan nasional, peningkatan pembiayaan kesehatan, penyediaan tenaga medis yang kompeten, dan penerapan kebijakan berbasis hak kesehatan. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Tujuan 3 diharapkan mampu mendorong setiap negara, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.6, berdasarkan data baseline tahun 2024 dan target capaian 2025–2030, arah kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Bengkulu menunjukkan tren peningkatan yang positif sejalan dengan Tujuan SDGs 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Upaya penurunan angka kematian ibu dari 92 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup, serta penurunan angka kematian bayi dan neonatal masing-masing dari 12,04 menjadi 10 dan dari 11,6 menjadi 9 per 1.000 kelahiran hidup, mencerminkan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Selain itu, program eliminasi malaria di seluruh kabupaten/kota hingga tahun 2030 dan penguatan deteksi dini penyakit menular seperti TBC menjadi fokus utama untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Dalam pengendalian penyakit tidak menular, prevalensi merokok usia ≥ 10 tahun ditargetkan turun dari 19,4% menjadi 17% pada tahun 2030, seiring dengan implementasi kebijakan pengendalian tembakau dan peningkatan kesadaran hidup sehat. Peningkatan jumlah pasien gangguan jiwa berat dari 150 menjadi 190 orang dipandang sebagai hasil dari membaiknya deteksi dan layanan kesehatan mental, bukan peningkatan prevalensi kasus. Upaya lain yang juga diperkuat adalah peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dari 75,4% menjadi 83%, serta pemenuhan target cakupan Jaminan Kesehatan Nasional hingga 100% pada tahun 2030.

Selain aspek kesehatan fisik, peningkatan layanan kesehatan reproduksi juga menjadi prioritas, dengan penurunan angka kelahiran remaja usia 15–19 tahun dari 38 menjadi 31 per 1.000 kelahiran dan stabilnya proporsi kelahiran yang ditangani tenaga kesehatan terlatih di atas 82%. Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk meningkat dari 0,75 menjadi 0,8, menandakan adanya penguatan kapasitas dan distribusi tenaga medis di daerah. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta perluasan akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan hingga tahun 2030.

Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan Tujuan 3 di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita melalui penguatan layanan kesehatan ibu–anak dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.
2. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui deteksi dini, edukasi masyarakat, dan peningkatan akses obat-obatan esensial.
3. Memastikan cakupan kesehatan universal (UHC) dengan menjamin seluruh masyarakat terdaftar sebagai peserta JKN.
4. Promosi gaya hidup sehat dan pencegahan faktor risiko, termasuk pengendalian perilaku merokok dan peningkatan gizi masyarakat.
5. Penguatan sistem kesehatan daerah dengan peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan serta pembangunan fasilitas kesehatan modern.

Kebijakan ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Tujuan 3 mendukung Misi ke-3, yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman. Misi ini menempatkan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi secara setara bagi seluruh masyarakat.

Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 3 terkait langsung dengan agenda mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas. Fokus ini memperkuat komitmen Bengkulu dalam memperluas akses layanan kesehatan berkualitas hingga ke kelompok rentan.

Adapun program unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 yang mendukung pencapaian Tujuan 3 antara lain:

- 1. Universal Health Coverage (UHC) dengan BPJS gratis untuk seluruh masyarakat Bengkulu.
- 2. Penyediaan ambulance gratis sebagai upaya memperluas layanan darurat medis.
- 3. Pembangunan Rumah Sakit Khusus Jantung, Kanker, atau Ginjal untuk memperkuat penanganan penyakit tidak menular.
- 4. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penyediaan jasa medis guna menjamin kualitas tenaga kesehatan.
- 5. Program Seribu Jalan Mulus dan penyediaan moda angkutan darat gratis, yang turut memperlancar akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan.

Dengan integrasi arah kebijakan SDGs dan RPJMD ini, pencapaian Tujuan 3 diharapkan mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menekan beban penyakit menular dan tidak menular, serta memastikan seluruh penduduk Bengkulu memperoleh layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas. Hal ini sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia daerah menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 3.5
Matriks Keterkaitan Tujuan 3 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 3	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Memperluas akses layanan kesehatan yang setara, berkualitas, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan	✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman.	✓ Prioritas 4: Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas.	✓ Perwujudan <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> dengan BPJS gratis. ✓ Penyediaan ambulance gratis. ✓ Pembangunan Rumah Sakit Khusus Jantung, Kanker, atau Ginjal. ✓ Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penyediaan jasa medis. ✓ Program <i>Seribu Jalan Mulus</i>

Tujuan SDGs 3	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
			✓ Penyediaan moda angkutan darat gratis untuk memperlancar akses ke fasilitas kesehatan



Tabel 3.6 Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia												
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.												
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	-	Renstra Dinkes	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	92	89	86	83	80	77	74	Dinkes
3.1.2*	Indikator proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhir nya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) difasilitasi kesehatan	-	BPS, DINKES	Persentase	78,35	94.62	96.34	97.92	99.38	100.00	100.00	Dinkes
Target Global : Pada tahun 2030, mengakhiri bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000												
3.2.1*	(a)Angka Kematian Balita (AKBa);	-	Renstra Dinkes	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	12.04	11,50	11	10,5	10	9,5	9	Dinkes
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	-	Renstra Dinkes	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	11,6	11	10,5	10	9,5	9	8,5	Dinkes
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	-	Renstra Dinkes	Kematian per 1.000 kelahiran hidup	10.2	9.2	8.4	8	7.6	7.2	6.8	Dinkes
Target Global : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya												

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	-	Dinkes	Kasus malaria per 1.000 orang		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dinkes
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	-	Dinkes	Kab/Kot	0	10	10	10	10	10	10	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) filariasis dan (b) Kusta.	-	Dinkes	orang	0	0	0	0	0	0	0	Dinkes
		-	Dinkes		7	21	21	21	21	21	21	Dinkes
3.3.5. (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	-	Dinkes	Kab/Kot	0	10	10	10	10	10	10	Dinkes
3.3.5. (b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	-	Dinkes	Kab/Kot	1	1	1	1	1	1	1	Dinkes
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.												
3.4.1. (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	-	Renstra Dinkes	%	15	100	100	100	100	100	100	Dinkes
3.4.1 (c)	prevalansi obesitas pada penduduk lebih dari 18	-	Renstra Dinkes	%	19,4	19	18,4	18,4	18,4	17,4	17,4	Dinkes
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	-	RSKJ Soeprapto	orang	90	150	160	170	180	190	200	RSKJ Soeprapto
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	-	RSKJ Soeprapto	orang	0	150	160	170	180	190	200	RSKJ Soeprapto
Target Global : Pada tahun 2030 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.												
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	-	BKKBN, BPS	%	82.54	82.46	82.38	82.30	82.22	82.14	82.06	Dinkes

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	-	BKKBN, BPS	Kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	38	34.00	33.39	32.84	32.35	31.90	31.49	Dinkes
3.7.2 (a)	Angka Kelahiran Total Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	-	RPJMD	%	2,26	2,12	2,12	2,11	2,11	2,10	2,10	Dinkes
Target Global : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.												
3.8.1 (a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	-	BPS	%	6.35	6.10	6.15	6.20	6.25	6.29	6.34	Dinkes
3.8.2	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	-	BPS	%	1.27	1.18	1.11	1.04	0.98	0.92	0.87	Dinkes
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	-	Renstra Dinkes	%	99	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	100.00	Dinkes
Target Global : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.												
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun / Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Proxi)	-	Renstra Dinkes	%	12	11	11	11	10	10	10	Dinkes
Target Global : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.												
3.b.1	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	-	Renstra Dinkes	%	98	75.40	79.8	84.20	88.40	92.00	97.00	Dinkes
3.b.3	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Renstra Dinkes	%	75	77	79	81	83	85	87	Dinkes

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)										
Target Global : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.												
3.c.1	Kepadatan tenaga kesehatan.	-	Dinkes	Nakes/Km ²	0,71	0,80	0,82	0,90	0,95	0,98	0,98	Dinkes
	distribusi tenaga kesehatan.	-	Dinkes	Per 1000 penduduk	6.8	7.5	7.8	7.8	7.9	8	8	Dinkes

3.4 Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di Provinsi Bengkulu, upaya untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu terus diperkuat melalui peningkatan akses, mutu, serta pemerataan layanan pendidikan di semua jenjang. Pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan berfokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah, pengurangan angka putus sekolah, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang layak, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Selain itu, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas guna memastikan proses belajar mengajar yang efektif, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

Di sisi lain, Provinsi Bengkulu juga berkomitmen memperluas akses pendidikan nonformal dan pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, serta masyarakat marginal. Program literasi, vokasional, dan pendidikan berbasis keterampilan diupayakan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di era digital. Dengan memperkuat sinergi antarinstansi, dunia usaha, dan masyarakat, Tujuan 4 SDGs diharapkan dapat mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga setiap warga Bengkulu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.6, berdasarkan data bahwa arah kebijakan pendidikan menunjukkan tren peningkatan yang positif di berbagai indikator. Pada aspek pendidikan dasar dan menengah, capaian kemampuan literasi dan numerasi yang pada tahun 2024 berada di kisaran 70–75 persen diproyeksikan meningkat hingga sekitar 80 persen pada tahun 2030. Begitu pula dengan angka penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang naik dari 87–88 persen menjadi 91–92 persen. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas pendidik serta pemerataan sarana di wilayah terpencil agar kualitas hasil belajar lebih merata.

Pada tingkat pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi, indikator menunjukkan peningkatan bertahap meski relatif moderat. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia dewasa naik dari 79,07 persen pada 2024 menjadi 80,87 persen pada 2030, sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi meningkat dari 38,44

persen menjadi 39,54 persen. Sementara itu, indikator keterampilan teknis dan vokasional memperlihatkan perkembangan signifikan, dengan proporsi penduduk usia 15–64 tahun yang memiliki keterampilan TIK meningkat dari sekitar 99–101 persen pada 2024 menjadi 117–118 persen pada 2030. Hal ini menunjukkan upaya Provinsi Bengkulu dalam memperkuat kompetensi masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan pasar kerja yang semakin kompetitif.

Dari sisi kesetaraan dan lingkungan belajar, rasio gender pada pendidikan menengah hingga tinggi mendekati seimbang, dari 99,6 pada 2024 menjadi 100,1 pada 2030, menandakan kemajuan signifikan dalam pemerataan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Fasilitas sekolah juga diarahkan semakin inklusif dan ramah anak, dengan peningkatan ketersediaan sarana belajar, akses TIK, sanitasi, dan lingkungan aman dari 90 persen menjadi 95 persen. Sementara itu, proporsi guru berkualifikasi profesional naik dari 96–97 persen menjadi 97–98 persen. Secara keseluruhan, arah pencapaian Tujuan 4 SDGs di Provinsi Bengkulu memperlihatkan kemajuan yang konsisten menuju sistem pendidikan yang lebih berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Namun, tantangan utama masih terletak pada peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas guru, serta perluasan akses pendidikan tinggi dan vokasi bagi kelompok rentan di seluruh wilayah provinsi.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 4 di Provinsi Bengkulu mencakup:

1. Memperluas akses pendidikan dasar hingga menengah yang gratis, inklusif, dan merata di seluruh wilayah.
2. Meningkatkan mutu pembelajaran melalui penguatan literasi, numerasi, serta keterampilan vokasi dan abad 21.
3. Memastikan kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pendidikan, terutama bagi anak miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.
4. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan guru agar mampu memberikan pembelajaran berkualitas.
5. Membangun serta merehabilitasi fasilitas pendidikan yang aman, ramah anak, dan mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Tujuan 4 SDGs sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman. Pendidikan ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk meningkatkan kualitas SDM.

Tujuan 4 terkait langsung dengan prioritas mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas.

Beberapa program unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 yang mendukung pencapaian Tujuan 4 antara lain:

- 1. Merdeka Ijazah bagi Anak Bangsa, memastikan akses pendidikan tanpa hambatan biaya.
- 2. Peningkatan kesejahteraan ASN (termasuk guru) melalui kenaikan TPP dan insentif, untuk menjamin mutu tenaga pendidik.
- 3. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan desa wisata melalui One Village One Product, mendukung pendidikan vokasi dan kewirausahaan.
- 4. Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam, sebagai wahana pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal.

Tabel 3.7

Matriks Keterkaitan Tujuan 4 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 4	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Memastikan pendidikan inklusif, setara, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman.	✓ Prioritas 4: Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas.	✓ Program <i>Merdeka Ijazah</i> bagi Anak Bangsa. ✓ Peningkatan kesejahteraan ASN (termasuk guru) melalui kenaikan TPP dan insentif. ✓ Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan BUMDes melalui <i>One Village-One Product (OVOP)</i> dan desa wisata, mendukung pendidikan vokasi dan kewirausahaan. ✓ Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam sebagai wahana pembelajaran kontekstual

Tujuan SDGs 4	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
			berbasis kearifan lokal.



Tabel 3.8 Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian					2030	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029		
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua												
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.												
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika											
	(i) literasi membaca	-	Dikbud	%	SMA: 70,5 SMK: 58,24	SMA: 70,5 SMK: 58,24	SMA: 72 SMK: 60	SMA: 74 SMK: 62	SMA: 76 SMK: 64	SMA: 78 SMK: 66	SMA: 80 SMK: 68	Dikbud
	(ii) numerasi	-	Dikbud	%	SMA: 68,54 SMK: 57,28	SMA: 68,54 SMK: 57,28	SMA: 70 SMK: 59	SMA: 72 SMK: 61	SMA: 74 SMK: 63	SMA: 76 SMK: 65	SMA: 78 SMK: 67	Dikbud
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	-	Dikbud	%	97.24	97.49	97.71	97.92	98.11	98.29	98.46	Dikbud

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	-	Dikbud	%	18.02	17.76	17.50	17.24	16.97	16.71	16.45	Dikbud
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan, pras sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.												
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	-	Dikbud	%	98.6	99.0	99.4	99.8	100.0	100.0	100.0	Dikbud
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.												
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur 16-18 tahun	BPS	%	79.07	79.37	79.67	79.97	80.27	80.57	80.87	Dikbud
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	-	DIKBUD/ KEMENRISTEK	%	38.44	38.62	38.81	38.99	39.17	39.35	39.54	Dikbud
Target Global : Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.												
4.4.1. (a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).											

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian					2030	Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029		
	1. Usia 15 - 24 tahun	-	BPS	%	99.1	101.44	105.53	107.35	109.04	112.11	113.51	Dikbud
	2. Usia 15 - 59 Tahun	-	BPS	%	85.08	91.77	98.46	100.00	100.00	100.00	100.00	Dikbud
Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.												
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas			%								
	SMA/SMK/ Sederajat (APM)	-	BPS	%	69.14	69.54	69.94	70.34	70.74	71.14	71.54	Dikbud
	SMA/SMK/ Sederajat (APK)	-	BPS	%	97.41	97.61	97.81	98.01	98.21	98.41	98.61	
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.												
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	-	DIKBUD/BPS	%	97.90	97.92	97.93	97.94	97.96	97.97	97.99	Dikbud
Target Global : Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua												
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik											

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).											
	(a) listrik	-	Dikbud	%	90	90	91	92	93	94	95	Dikbud
	(b) internet untuk tujuan pengajaran	-	Dikbud	%	90	90	91	92	93	94	95	Dikbud
	(c) komputer untuk tujuan pengajaran	-	Dikbud	%	90	90	91	92	93	94	95	Dikbud
	(d) air minum layak	-	Dikbud	%	90	90	91	92	93	94	95	Dikbud
	(e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	-	Dikbud	%	75	75	76	77	78	79	80	Dikbud
	(f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	-	Dikbud	%	75	75	76	77	78	79	80	Dikbud
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	-	Dikbud	%	30	29	28	27	26	25	24	Dikbud
Target Global : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.												
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	-	Dikbud	%	SMA: 99.2 SMK: 96.9 SLB: 97.5	SMA: 99.2 SMK: 96.9 SLB: 97.5	SMA: 99.4 SMK: 97 SLB: 97.7	SMA: 99.6 SMK: 97.2 SLB: 97.9	SMA: 99.8 SMK: 97.2 SLB: 98	SMA: 100 SMK: 97.4 SLB: 98.2	SMA: 100 SMK: 97.6 SLB: 97.7	Dikbud

3.5 Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Kesetaraan gender merupakan fondasi penting dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Di Provinsi Bengkulu, isu kesetaraan gender masih menghadapi tantangan seperti praktik perkawinan usia anak, rendahnya representasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan, terbatasnya akses kesehatan reproduksi, keterbatasan kepemilikan aset ekonomi, serta kesenjangan literasi digital. RAD SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 memandangi pemenuhan hak-hak perempuan bukan hanya sebagai isu keadilan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan daerah untuk memperkuat kualitas SDM, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.10, berdasarkan data bahwa terlihat adanya arah kebijakan yang progresif dalam menurunkan angka perkawinan anak serta memperkuat peran perempuan di ranah publik dan ekonomi. Proporsi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun menurun signifikan dari 4,66 persen pada 2024 menjadi hanya 2,26 persen pada 2030. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan upaya edukasi, sosialisasi, dan penegakan kebijakan perlindungan anak dan perempuan terhadap praktik perkawinan dini. Namun, pencapaian target tersebut tetap memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan layanan konseling remaja.

Dalam aspek partisipasi politik dan kepemimpinan, indikator menunjukkan tren peningkatan yang positif meskipun relatif moderat. Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan meningkat dari 22 persen pada 2024 menjadi 24 persen pada 2030, sementara proporsi perempuan yang menduduki jabatan manajerial naik dari 33,5 persen menjadi 33,8 persen pada periode yang sama. Pergerakan ini mengindikasikan adanya ruang kemajuan yang terus dibuka bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan publik, baik di tingkat pemerintahan maupun sektor swasta. Di sisi lain, perempuan usia reproduksi (15–49 tahun) yang mampu mengambil keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan meningkat dari 36,1 persen (2024) menjadi 50,85 persen (2030). Hal ini menandakan kemajuan dalam otonomi perempuan atas kesehatan reproduksinya dan keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan DP3APPKB.

Dari aspek ekonomi dan teknologi, indikator menunjukkan peningkatan kepemilikan perempuan atas sumber daya produktif dan akses digital. Jumlah rumah tangga pertanian yang memiliki hak atas lahan meningkat dari 324.371 rumah tangga pada 2024 menjadi 365.294 rumah tangga pada 2030, yang mencerminkan peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi keluarga. Selain itu, proporsi individu perempuan yang menguasai atau memiliki telepon genggam meningkat dari 66,49 persen menjadi 82,36 persen, memperlihatkan kemajuan signifikan dalam literasi digital perempuan. Peningkatan ini penting sebagai modal sosial untuk memperluas akses perempuan terhadap informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi berbasis teknologi. Secara keseluruhan, indikator Tujuan 5 SDGs menunjukkan arah yang positif dalam memperkuat kesetaraan gender di Bengkulu, meskipun masih dibutuhkan langkah strategis dalam mempercepat representasi perempuan di bidang kepemimpinan dan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun Arah Kebijakan Pencapaian SDGs Tujuan 5 sebagai berikut :

1. Menekan praktik perkawinan usia anak melalui edukasi, advokasi, dan penguatan regulasi daerah.
2. Mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, organisasi masyarakat, dan jabatan publik melalui kaderisasi, pelatihan kepemimpinan, dan afirmasi kebijakan.
3. Memperluas akses layanan kesehatan reproduksi yang aman, terjangkau, dan inklusif.
4. Memberdayakan perempuan dalam ekonomi lokal melalui kepemilikan lahan, akses kredit, UMKM, serta penguatan kelembagaan desa.
5. Meningkatkan literasi digital dan akses teknologi bagi perempuan, sehingga mampu bersaing dalam transformasi digital dan ekonomi kreatif.

Tujuan 5 SDGs sejalan dengan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 yaitu Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel, dengan membangun SDM yang berbudaya, profesional, dan religius (terkait peningkatan partisipasi politik perempuan dan kepemimpinan) dan Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman (terkait kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perlindungan anak dan perempuan).

Tujuan 5 terkait langsung dengan prioritas Prioritas Pembangunan Mewujudkan masyarakat madani yang inklusif dan berkeadilan,

menjamin kesetaraan gender, hak anak, dan hak penyandang disabilitas.

Beberapa program unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 yang mendukung pencapaian Tujuan 4 antara lain:

- 1. *Merdeka Ijazah bagi Anak Bangsa* untuk memperluas akses pendidikan perempuan, sehingga mencegah perkawinan usia dini.
- 2. *Universal Health Coverage (BPJS gratis)* yang memperluas layanan kesehatan, termasuk layanan reproduksi perempuan.
- 3. *Pengangkatan dan penyantunan anak yatim* sebagai bentuk keberpihakan pada kelompok rentan, khususnya anak perempuan.
- 4. *Penguatan UMKM dan ekonomi desa* melalui Bumdes dan desa wisata, membuka peluang pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi.

Tabel 3.9

Matriks Keterkaitan Tujuan 5 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 5	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Mewujudkan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan dan anak, serta menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan	✓ Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun SDM yang berbudaya, profesional, dan religius (terkait peningkatan partisipasi politik perempuan dan kepemimpinan). ✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja,	✓ Prioritas 4: Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas.	✓ Program <i>Merdeka Ijazah</i> bagi Anak Bangsa untuk memperluas akses pendidikan perempuan. ✓ Perwujudan <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> dengan BPJS gratis, termasuk layanan kesehatan reproduksi perempuan. ✓ Pengangkatan dan penyantunan anak yatim sebagai bentuk keberpihakan pada kelompok rentan, khususnya anak perempuan. ✓ Penguatan UMKM dan

Tujuan SDGs 5	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
	dan rasa aman (terkait kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perlindungan anak dan perempuan).		ekonomi desa melalui BUMDes dan desa wisata, membuka peluang pemberdayaan ekonomi perempuan.



Tabel 3.10 Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan												
Target Global : Menghapuskan semua praktek berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.												
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun	-	BPS	%	4.66	4.26	3.86	3.46	3.06	2.66	2.26	DP3APPKB
Target Global : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.												
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah											DP3APPKB
	(a) Parlemen tingkat pusat dan	-	BPS	%	22.00	22.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	DP3APPKB
	(b) Pemerintah daerah	-	BPS	%	22.22	22.23	22.23	22.23	22.24	22.25	22.25	DP3APPKB
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	-	BPS	%	33.5	33.5	33.60	33.70	33.70	33.80	33.80	DP3APPKB
Target Global : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.												

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	-	BPS	%	36.1	48.47	48.94	49.42	49.90	50.37	50.85	DP3APPKB
Target Global : Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional												
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian, (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Lokasi Lahan Pertanian Terluas yang Dikuasai (rumah tangga)	BPS	Rumah Tangga	324,371	330,858	337,476	344,225	351,110	358,132	365,294	Dinas TPHP, DP3APPKB
Target Global : Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan												
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	-	BPS	%	66.49	71.97	74.05	76.13	78.20	80.28	82.36	Dinas Kominfotik

3.6 Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-6 menekankan pentingnya menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua masyarakat. Di Provinsi Bengkulu, isu air bersih dan sanitasi bukan hanya menyangkut kebutuhan dasar, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan daya saing wilayah. Penyediaan layanan air minum aman, sanitasi layak, dan pengelolaan kualitas air menjadi prioritas strategis yang sejalan dengan arah pembangunan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya alam.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.12, berdasarkan data, kondisi baseline tahun 2024 menunjukkan bahwa 17,1 persen rumah tangga telah menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. Melalui intervensi program penyediaan air bersih oleh Dinas PUPR, target capaian diharapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 30 persen pada tahun 2030. Peningkatan ini menggambarkan adanya arah kebijakan yang konsisten dalam memperluas jaringan air minum layak, terutama bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dasar. Namun demikian, tantangan tetap ada, khususnya pada wilayah pedesaan dan daerah rawan air, sehingga dibutuhkan strategi penyediaan sarana air berbasis komunitas serta penguatan kapasitas pengelolaan air secara terpadu.

Dalam aspek sanitasi, capaian baseline tahun 2024 menunjukkan 4,43 persen rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang dikelola secara aman, dengan target peningkatan hingga 20 persen pada tahun 2030. Sementara itu, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun cukup tinggi, yakni 81,62 persen, dan diproyeksikan meningkat menjadi 83,60 persen pada akhir periode target. Upaya penghapusan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) juga menjadi fokus, dengan penambahan kabupaten/kota yang menerapkan program Stop BABS dari 1 wilayah pada 2024 menjadi 10 wilayah pada 2030. Di sisi lain, akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD-T) menunjukkan peningkatan signifikan dari 83,01 persen pada 2024 menuju 100 persen pada tahun 2030, menandakan komitmen kuat untuk mencapai akses sanitasi layak universal.

Sementara itu, peningkatan kualitas lingkungan juga menjadi bagian penting dari target SDGs 6. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan tren peningkatan yang positif sebagai dampak dari kebijakan pengendalian pencemaran air dan

pengelolaan limbah berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). IKA meningkat dari 51,99 poin pada 2024 menjadi 64,99 poin pada 2030, sedangkan IKL naik dari 55,80 menjadi 76,32 poin pada periode yang sama. Peningkatan kedua indeks ini menggambarkan perbaikan kualitas ekosistem air dan lahan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan lingkungan. Secara keseluruhan, target SDGs 6 di Provinsi Bengkulu menggambarkan arah pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, inklusivitas, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang lebih baik.

Berdasarkan capaian indikator, Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 telah memiliki akses air minum aman sebesar 80,49% dan ditargetkan meningkat hingga 96,98% pada tahun 2030. Sementara itu, akses sanitasi aman baru mencapai 80,81% dengan target 84,00% pada tahun 2030, dan fasilitas cuci tangan dengan sabun di rumah tangga berada pada level 81,62% menuju 83,60%. Di sisi lain, tantangan besar terdapat pada kualitas air, di mana Indeks Kualitas Air (IKA) masih berada di angka 45,24 dan ditargetkan membaik menjadi 43,96 pada tahun 2030. Indeks Kualitas Lahan juga perlu mendapat perhatian dengan baseline 55,80 yang mencerminkan masih perlunya konservasi sumber daya air dan tanah.

Dengan demikian, arah kebijakan Tujuan 6 diarahkan pada:

1. Perluasan akses air minum aman melalui pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum perpipaan, pengelolaan sumber air baku, dan teknologi tepat guna untuk wilayah sulit dijangkau.
2. Peningkatan kualitas sanitasi dan pengelolaan limbah domestik dengan memperluas layanan SPALD-T dan sistem pengelolaan lumpur tinja.
3. Penguatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui edukasi, penyediaan sarana cuci tangan, dan sanitasi berbasis masyarakat.
4. Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas air dengan memperkuat pengawasan limbah, rehabilitasi daerah aliran sungai, serta peningkatan peran industri ramah lingkungan.
5. Konservasi sumber daya air dan lahan dengan melindungi daerah resapan, konservasi hutan, dan pengelolaan lahan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Tujuan 6 mendukung langsung Misi ke-2 tentang percepatan ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah melalui pembangunan sistem air minum dan sanitasi, Misi ke-3 tentang pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat terutama di bidang kesehatan dengan sanitasi yang layak, serta Misi ke-4 yang menekankan keselarasan pembangunan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan termasuk pengelolaan air dan lahan.

Lebih jauh, Tujuan 6 juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu, khususnya prioritas peningkatan pembangunan wilayah berkelanjutan dengan mempercepat infrastruktur dasar, mewujudkan masyarakat madani dengan akses setara layanan kesehatan, serta mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Dukungan nyata juga tampak pada Program Unggulan RPJMD, antara lain Universal Health Coverage (UHC) dengan BPJS gratis yang bersinergi dengan kesehatan dan sanitasi, Cetak Sawah Baru dan perbaikan irigasi yang berkaitan dengan pengelolaan air dan lahan, serta program Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia yang mendukung konservasi sumber daya air.

Dengan sinergi antara indikator SDGs dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029, Tujuan 6 diharapkan dapat tercapai secara bertahap sehingga masyarakat Bengkulu memperoleh akses air bersih dan sanitasi layak secara merata, kualitas lingkungan hidup terjaga, serta tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.11
Matriks Keterkaitan Tujuan 6 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 6	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi layak yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat	✓ Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah (terkait pembangunan sistem air minum dan sanitasi). ✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terutama di	✓ Prioritas 3: Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. ✓ Prioritas 4: Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan akses setara pada layanan kesehatan. ✓ Prioritas 7: Mendorong pengembangan	✓ Perwujudan <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> dengan BPJS gratis, mendukung kesehatan berbasis sanitasi layak. ✓ Program <i>Cetak Sawah Baru (CSB)</i> dan perbaikan serta peningkatan irigasi, mendukung pengelolaan air dan lahan. ✓ Program <i>Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung</i>

Tujuan SDGs 6	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
	bidang kesehatan. ✓ Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor berbasis sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan, termasuk pengelolaan air dan lahan.	wisata hijau sebagai langkah strategis pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	<i>Dunia</i> untuk menjaga sumber daya air dan ekosistem lingkungan.



Tabel 3.12 Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua												
Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.												
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	-	Renstra Dinas PUPR	%	17.1	19.25	21.40	23.55	25.70	27.85	30.00	Dinas PUPR
Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.												
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun											
	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman	-	Renstra Dinas PUPR	%	4.43	7.54	10.65	13.76	16.87	20.00	20.00	Dinas PUPR
	2. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	-	BPS	%	81.62	81.94	82.27	82.60	82.93	83.26	83.60	Dinkes
	3. Persentase rumah tangga yang masih mempraktekan buang air besar sembarangan(BABS) ditempat terbuka	Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang mencapai Stop Buang Air Besar Sembarangan	Renstra Dinkes	Kab/Kota	1	2	4	6	8	10	10	Dinkes

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALD-T	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Renstra Dinas PUPR	%	83.01	86.4	89.79	93.18	96.57	100	100	Dinas PUPR
	5. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja	Kapasitas instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT terbangun)	Dinas PUPR	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUPR
Target Global : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.												
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	DLHK	%	51.99	64.19	64.19	64.39	64.59	64.79	64.99	DLHK
6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan	-	DLHK	%	55.80	64,16	76,05	76,12	76,18	76,25	76,32	DLHK

3.7 Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-7 menekankan pentingnya menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Energi merupakan penopang utama pembangunan daerah, tidak hanya sebagai kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi, layanan publik, dan konektivitas wilayah. Di Provinsi Bengkulu, ketersediaan energi listrik dan bahan bakar rumah tangga telah mengalami kemajuan signifikan, namun tantangan yang masih dihadapi adalah peningkatan kualitas layanan, keandalan pasokan, dan diversifikasi sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.14, berdasarkan data, kondisi rasio elektrifikasi pada tahun 2024 telah mencapai 99,09 persen, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di wilayah ini telah menikmati layanan listrik. Target capaian dari tahun 2025 hingga 2030 mengalami peningkatan sangat kecil secara bertahap hingga mencapai 99,9906 persen pada tahun 2030, yang menandakan fokus kebijakan pemerintah daerah tidak lagi pada perluasan jaringan secara masif, melainkan pada peningkatan keandalan pasokan listrik, efisiensi energi, serta pelayanan yang berkelanjutan di wilayah terpencil. Dinas ESDM diharapkan memperkuat upaya peningkatan infrastruktur energi terbarukan dan memperluas jaringan listrik berbasis sumber energi ramah lingkungan.

Selain itu, indikator rasio penggunaan gas rumah tangga juga menunjukkan perkembangan positif. Pada baseline tahun 2024, proporsi rumah tangga yang menggunakan gas untuk kebutuhan sehari-hari tercatat sebesar 95,63 persen, dengan target meningkat secara konsisten menjadi 99 persen pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan adanya pergeseran perilaku konsumsi energi masyarakat dari penggunaan bahan bakar padat seperti kayu atau minyak tanah menuju energi bersih dan efisien, sejalan dengan kebijakan transisi energi nasional. Implementasi program konversi energi bersih dan distribusi gas rumah tangga yang merata menjadi faktor penting dalam mendukung capaian ini, terutama di daerah yang masih bergantung pada bahan bakar konvensional.

Secara keseluruhan, capaian dan target SDGs 7 menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu berada pada jalur yang positif menuju akses energi universal. Fokus pembangunan energi ke depan perlu diarahkan pada aspek keberlanjutan dan modernisasi sistem energi, termasuk diversifikasi sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan

biomassa, penguatan infrastruktur distribusi, serta edukasi masyarakat mengenai efisiensi dan konservasi energi. Dengan upaya tersebut, diharapkan Provinsi Bengkulu tidak hanya mencapai target kuantitatif elektrifikasi dan penggunaan gas, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan target tersebut, arah kebijakan Tujuan 7 di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Menjaga rasio elektrifikasi 100% dengan memastikan keandalan pasokan listrik hingga ke pelosok, memperkuat jaringan distribusi, dan menekan potensi gangguan kelistrikan.
2. Meningkatkan akses energi bersih rumah tangga melalui perluasan konversi LPG, pembangunan infrastruktur pendukung, serta sosialisasi penggunaan energi ramah lingkungan.
3. Mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa untuk memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mendukung komitmen pengurangan emisi.
4. Mendorong diversifikasi dan efisiensi energi dengan pemanfaatan potensi energi lokal, penerapan teknologi hemat energi, serta kolaborasi dengan BUMD, swasta, dan masyarakat.

Arah kebijakan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Tujuan 7 secara langsung mendukung Misi ke-2, yaitu mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah, khususnya melalui penyediaan energi listrik yang andal dan peningkatan akses energi bersih. Selain itu, Tujuan 7 juga sejalan dengan Misi ke-4, yaitu menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor-sektor strategis dengan prinsip keberlanjutan, karena transisi energi bersih akan mendorong pembangunan ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya.

Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 7 relevan dengan agenda percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan energi sebagai bagian dari kemandirian ekonomi, serta mendorong pembangunan ramah lingkungan. Sementara itu, beberapa program unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 yang terkait antara lain stabilisasi harga BBM subsidi di wilayah terluar sebagai bentuk jaminan energi terjangkau, optimalisasi BUMD dalam mendukung penyediaan energi daerah, serta program Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia yang mendukung pemanfaatan energi ramah lingkungan dan konservasi sumber daya energi berbasis ekosistem.

Dengan sinergi antara indikator Tujuan 7 dan arah pembangunan dalam RPJMD, Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menjaga capaian elektrifikasi 100%, memperluas pemanfaatan energi bersih, serta memperkuat ketahanan energi daerah. Hal ini sekaligus menjadi fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Tabel 3.13
Matriks Keterkaitan Tujuan 7 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 7	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Memastikan akses energi yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau bagi semua	✓ Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah. ✓ Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor strategis dengan mengutamakan hilirisasi berbasis pembangunan berkelanjutan.	✓ Prioritas 3: Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan percepatan infrastruktur dasar & strategis. ✓ Prioritas 5: Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi & industrialisasi produk unggulan. ✓ Prioritas 7: Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai pembangunan ramah lingkungan & inklusif.	✓ Stabilisasi harga BBM subsidi di wilayah terluar. ✓ Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk peningkatan lapangan kerja dan pendapatan daerah (termasuk sektor energi). ✓ Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia (mendukung konservasi energi berbasis ekosistem & pembangunan ramah lingkungan).



Tabel 3.14 Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua												
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.												
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	-	Dinas ESDM	%	99.09	99.9901	99.9902	99.9903	99.9904	99.9905	99.9906	Dinas ESDM
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	-	BPS	Rumah Tangga	95.63	96.19	96.75	97.31	97.87	98.43	99	Dinas ESDM

3.8 Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-8 menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, serta menyediakan pekerjaan layak bagi seluruh masyarakat. Di Provinsi Bengkulu, pencapaian tujuan ini menjadi sangat relevan karena struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan produktivitas dan nilai tambah.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.16, berdasarkan data, baseline tahun 2024 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 4,62 persen dan nilai PDRB per kapita Rp49.230 ribu. Target capaian dari tahun 2025 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan bertahap, yaitu pertumbuhan ekonomi diarahkan mencapai 7,4–7,6 persen pada tahun 2030, dengan nilai PDRB per kapita meningkat hingga Rp85.825 ribu. Kenaikan ini menggambarkan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendorong produktivitas ekonomi melalui diversifikasi sektor, peningkatan investasi, serta penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata. Selain itu, pertumbuhan PDRB per tenaga kerja juga ditargetkan meningkat dari 2,14 persen (2024) menjadi 3,06 persen (2030), menandakan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Dari sisi ketenagakerjaan, arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk memperluas lapangan kerja layak dan mengurangi tingkat pengangguran. Proporsi lapangan kerja informal pada baseline 2024 sebesar 71,55 persen, ditargetkan menurun secara bertahap hingga mencapai 77,70 persen pekerjaan formal pada tahun 2030, melalui peningkatan akses terhadap pelatihan kerja dan kebijakan formalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Indikator upah rata-rata per jam kerja juga memperlihatkan tren kenaikan signifikan, dari Rp18.781 (2024) menjadi Rp25.241 (2030), yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan pekerja seiring peningkatan produktivitas dan efisiensi pasar tenaga kerja. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun dari 3,11 persen menjadi 2,75 persen pada tahun 2030, dan persentase setengah pengangguran juga mengalami penurunan, menunjukkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pekerjaan yang lebih stabil dan layak.

Dari aspek sosial dan inklusivitas tenaga kerja, persentase pemuda usia 15–24 tahun yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak dalam

pelatihan (NEET) berada di baseline 20,64 persen, dengan target mempertahankan atau menurunkannya melalui perluasan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta program kewirausahaan muda. Persentase pekerja anak usia 5–17 tahun dijaga tetap rendah di sekitar 2,05–2,11 persen hingga 2030, mencerminkan komitmen daerah terhadap penghapusan pekerja anak. Selain itu, sektor pariwisata menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat sebagai penggerak ekonomi daerah, dengan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dari 3.742 orang pada 2024 menjadi 4.350 orang pada 2030, serta wisatawan nusantara dari 4,31 juta menjadi 4,45 juta perjalanan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Bengkulu diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada keberlanjutan, pemerataan, dan penciptaan lapangan kerja produktif berbasis sumber daya lokal.

Untuk mencapai target-target tersebut, arah kebijakan Tujuan 8 di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan hilirisasi sektor unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata) agar memiliki nilai tambah.
2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan digitalisasi UMKM.
3. Memperluas lapangan kerja layak dengan mendorong formalisasi sektor informal, penguatan UMKM, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan kebijakan upah yang adil, lingkungan kerja yang sehat, serta perlindungan bagi kelompok rentan (perempuan, pemuda, penyandang disabilitas).
5. Mengurangi pekerja anak dan NEET melalui pendidikan inklusif, penegakan regulasi ketenagakerjaan, serta pemberdayaan generasi muda.
6. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang berbasis budaya dan lingkungan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.

Arah kebijakan Tujuan 8 ini memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Tujuan ini mendukung langsung Misi ke-3, yaitu terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja, serta Misi ke-4, yaitu menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan berbasis hilirisasi dan berkelanjutan. Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 8 sejalan dengan agenda memperkuat sektor ekonomi lokal, meningkatkan kewirausahaan dan inovasi berkelanjutan, serta mendorong wisata hijau sebagai strategi pembangunan ramah lingkungan. Beberapa program unggulan

RPJMD 2025–2029 yang mendukung antara lain penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan BUMDes, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui bantuan bibit, peralatan, dan stabilisasi harga, Cetak Sawah Baru dan peningkatan irigasi untuk ketahanan pangan, serta pengembangan desa wisata berbasis alam dan hutan yang memperkuat pariwisata berkelanjutan.

Dengan sinergi antara indikator Tujuan 8 dan arah kebijakan RPJMD 2025–2029, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus memperluas kesempatan kerja layak yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.15
 Matriks Keterkaitan Tujuan 8 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 8	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan serta memperluas kesempatan kerja layak bagi semua	✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman. ✓ Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.	✓ Prioritas 5: Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan. ✓ Prioritas 6: Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi berkelanjutan. ✓ Prioritas 7: Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai strategi pembangunan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif.	✓ Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan BUMDes melalui <i>One Village-One Product</i> dan desa wisata. ✓ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui bantuan bibit, peralatan, alat tangkap, serta pengembangan pusat pengolahan agropolitan. ✓ <i>Cetak Sawah Baru (CSB)</i> dan peningkatan/perbaikan irigasi dalam rangka ketahanan pangan. ✓ Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam (Taman Berburu & Taman Safari) untuk pariwisata berkelanjutan.
	✓	✓	✓



Tabel 3.16 Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua												
Target Global : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.												
8.1.1*	Laju Pertumbuhan PDRB perkapita	-	BPS	%	4.62	5,1 - 5,5	5,2 - 5,8	6,2 - 6,5	6,6 - 6,9	7,2 - 7,4	7,4 - 7,6	BPS
8.1.1.(a)	PDRB Perkapita	-	BPS, RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029	Ribu Rupiah	49,230	49,230 - 53,200	54,536 - 59,725	60,480 - 66,250	64,358 - 72,775	68,406 - 79,300	72,591 - 85,825	BPS
Target Global : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya												
8.2.1*	Laju Pertumbuhan PRDB Per Tenaga Kerja/ Tingkat Pertumbuhan PRDB Rill Per Orang Bekerja Per tahun	-	BPS	%	2.14	2.29	2.45	2.60	2.75	2.91	3.06	BPS
Target Global : Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.												
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin.	-	RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029	%	71.55	72.80	73.93	74.98	75.95	76.86	77.70	Dinas Nakertrans
Target Global : Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya												
8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	-	BPS	Rupiah	18,781	19,717	20,705	21,748	22,850	24,013	25,241	BPS/Disnaker

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	-	RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029	Persentase	3.11	9.56	9.80	10.04	10.28	10.51	10.75	BPS/Disnaker
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	-	BPS	Persentase	10.05	9.56	9.80	10.04	10.28	10.51	10.75	BPS/Disnaker
Target Global : Pada tahun 2020, mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja dan tidak dalam pelatihan dan tidak sekolah												
8.6.1*	Jumlah usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET).	-	BPS	Persentase	20.64	20.64	20.64	20.64	20.64	20.64	20.64	BPS/Disnaker
Target Global : Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya												
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	-	BPS	Persentase	2.05	2.06	2.08	2.09	2.09	2.10	2.11	BPS/Disnaker
Target Global : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal												
8.9.1.a	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	-	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Orang	3,742	3,850	3,950	4,050	4,150	4,250	4,350	Dinas Pariwisata
8.9.1.b	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	-	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Orang	4,311,497	4,321,150	4,346,050	4,370,950	4,395,850	4,420,750	4,445,650	Dinas Pariwisata

3.9 Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-9 berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tangguh, peningkatan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas inovasi. Di Provinsi Bengkulu, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor industri, dan penguatan inovasi merupakan prasyarat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing wilayah. Infrastruktur jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa, membuka akses pasar, serta mendorong investasi yang produktif.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.18, pada tahun 2024, kondisi infrastruktur dasar Provinsi Bengkulu menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 62,84%. Target hingga tahun 2030 diarahkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 100%, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan konektivitas wilayah yang andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sektor transportasi mencatat jumlah penumpang dan barang yang masih berfluktuasi. Dari baseline tahun 2024 yang belum tersedia (N/A), target pergerakan penumpang dan barang terus menurun dari 665.769 orang/barang pada 2025 menjadi 372.858 pada 2030, menggambarkan upaya peningkatan efisiensi transportasi dan pergeseran menuju moda transportasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Jumlah bandara tetap stabil pada tiga unit hingga tahun 2030, yang menandakan fokus kebijakan bukan pada penambahan jumlah bandara, melainkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerbangan yang ada.

Pada aspek industrialisasi, indikator rasio PDRB industri pengolahan dan nilai tambah per kapita mengalami peningkatan dari 5,74% (2024) menjadi 7,21% pada 2030. Tren serupa juga terlihat pada pertumbuhan PDRB industri pengolahan, yang naik dari 3,08% menjadi 4,86% selama periode 2024–2030, menunjukkan arah kebijakan yang mendukung penguatan sektor industri berbasis potensi lokal. Selain itu, proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan meningkat dari 5,60% menjadi 5,51%, yang meskipun relatif stabil, mencerminkan tantangan dalam memperluas lapangan kerja di sektor industri di tengah perubahan struktur ekonomi.

Sementara itu, pada dimensi akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, indikator proporsi penduduk terlayani mobile broadband menunjukkan capaian sangat tinggi sejak baseline 2024 sebesar 96,65%, dan ditargetkan mencapai 100% pada 2026 serta

dipertahankan hingga 2030. Hal ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam perluasan akses digital di Bengkulu, yang menjadi prasyarat penting bagi transformasi ekonomi digital dan inovasi daerah.

Secara keseluruhan, arah pembangunan SDGs 9 Provinsi Bengkulu 2025–2030 menekankan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan konektivitas wilayah, penguatan sektor industri pengolahan yang berdaya saing, serta pemerataan akses teknologi informasi. Keterpaduan ketiga aspek ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat produktivitas daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan Tujuan 9 di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan untuk memperkuat konektivitas wilayah.
2. Penguatan sektor industri manufaktur melalui hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.
3. Mendorong inovasi dan teknologi lokal dengan memperkuat ekosistem riset, kolaborasi universitas-industri, serta dukungan inkubasi UMKM dan startup.
4. Digitalisasi dan konektivitas inklusif dengan memastikan akses internet merata, mendukung industri berbasis teknologi, serta memperluas layanan e-commerce dan ekonomi digital.
5. Pengembangan ekspor berbasis produk unggulan daerah dengan mendorong daya saing komoditas olahan dan memperluas pasar internasional.

Kebijakan ini memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Tujuan 9 sejalan dengan Misi ke-2, yaitu mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta memperkuat konektivitas wilayah, yang diwujudkan melalui program Seribu Jalan Mulus, pembangunan bandara, dan peningkatan infrastruktur pelabuhan serta transportasi. Tujuan ini juga mendukung Misi ke-4, yakni menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan hilirisasi berkelanjutan, karena industrialisasi inklusif merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 9 mendukung agenda percepatan infrastruktur dasar, memperkuat sektor ekonomi lokal

melalui industrialisasi produk unggulan, serta mendorong kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi. Beberapa program unggulan RPJMD yang terkait antara lain Program Seribu Jalan Mulus, Peningkatan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan kereta api, Optimalisasi BUMD untuk peningkatan ekonomi daerah, serta pengembangan desa wisata berbasis alam dan budaya yang juga membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.

Dengan integrasi kebijakan SDGs dan RPJMD, pencapaian Tujuan 9 di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat memperkuat infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi berkelanjutan, serta memperluas inovasi dan teknologi. Hal ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.17
Matriks Keterkaitan Tujuan 9 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 9	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Membangun infrastruktur tangguh, mendukung industrialisasi inklusif, serta mendorong inovasi	✓ Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah. ✓ Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi berbasis pembangunan berkelanjutan.	✓ Prioritas 3: Meningkatkan pembangunan wilayah berkelanjutan dengan percepatan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas antarwilayah. ✓ Prioritas 5: Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi & industrialisasi produk unggulan. ✓ Prioritas 6: Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal & inovasi berkelanjutan.	✓ Program <i>Seribu Jalan Mulus</i>. ✓ Peningkatan infrastruktur Pelabuhan Pulau Baai, Bandara Fatmawati, dan Kereta Api Lubuk Linggau–Kota Bengkulu. ✓ Optimalisasi BUMD untuk peningkatan lapangan kerja & pendapatan daerah. ✓ Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam (Taman Berburu & Taman Safari) yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.



Tabel 3.18 Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi												
Target Global : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.												
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Provinsi	-	Renstra Dinas PUPR	%	62.84	63.58	71.55	88.65	90.03	100.00	100.00	PUPR
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	-	Dishub	Orang dan Barang	N/A	665,769	574,502	505,620	451,751	408,445	372,858	Dishub
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	-	Dishub	Bandara	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Dishub
Target Global : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.												
9.2.1*	Rasio PDRB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita	-	BPS	%	5.74	5.80	5.87	6.08	6.37	6.74	7.21	Dinas Perindag
9.2.1.(a)	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan	-	BPS	%	3.08	3.11	3.16	3.59	4.01	4.44	4.86	Dinas Perindag
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan	-	BPS	%	5.60	5.58	5.56	5.55	5.53	5.52	5.51	Dinas Perindag
Target Global : Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030												
9.c.1*	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	-	BPS	%	96.65	98.55	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Diskominfo

3.10 Tujuan 10 : Mengurangi Ketimpangan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-10 berfokus pada upaya mengurangi kesenjangan intra dan antarl wilayah, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Di Provinsi Bengkulu, isu ketimpangan masih menjadi tantangan, terlihat dari rasio gini, tingkat kemiskinan, serta disparitas pembangunan desa. Peningkatan inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.20, pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Bengkulu yang tercermin dari rasio Gini sebesar 0,343 menunjukkan kondisi kesenjangan yang relatif moderat. Pemerintah Provinsi menargetkan penurunan rasio ini secara bertahap hingga mencapai sekitar 0,311–0,305 pada tahun 2030, sejalan dengan upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Tren penurunan ini menunjukkan arah kebijakan pembangunan inklusif yang berfokus pada pemerataan hasil pembangunan lintas wilayah dan kelompok sosial.

Sementara itu, persentase penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,52%, dengan target penurunan signifikan hingga berada di kisaran 9,48–8,87% pada tahun 2030. Penurunan ini menggambarkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin melalui berbagai intervensi seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan sosial adaptif. Dalam konteks spasial, jumlah desa tertinggal di Bengkulu yang sebanyak 31 desa pada 2024 ditargetkan menurun menjadi 20 desa pada 2030, sedangkan desa mandiri meningkat dari 118 menjadi 130 desa. Perkembangan ini mencerminkan komitmen kuat terhadap pembangunan wilayah perdesaan secara berkeadilan dan berkelanjutan, terutama melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan penguatan ekonomi lokal.

Dari sisi inklusi sosial, indikator proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan turun tajam dari 5,07% pada 2024 menjadi 1,21% pada 2030. Penurunan ini menandakan keberhasilan program yang memperkuat daya saing kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin, dalam memperoleh kesempatan ekonomi yang setara.

Sementara itu, indeks aspek kebebasan, yang mencerminkan jaminan kesempatan yang sama dalam hukum, kebijakan, dan

praktik nondiskriminatif, meningkat dari 74,78 (2024) menjadi 75,71 pada 2030. Kenaikan ini menggambarkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penegakan hak asasi manusia yang semakin kuat di tingkat daerah, termasuk dalam mendorong partisipasi masyarakat dan perlindungan hak-hak sipil.

Secara keseluruhan, arah pembangunan Tujuan SDGs 10 Provinsi Bengkulu 2025–2030 menitikberatkan pada pengurangan kesenjangan ekonomi, sosial, dan spasial melalui strategi peningkatan kesejahteraan kelompok rentan, penguatan desa, serta penciptaan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kohesi sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkeadilan di seluruh wilayah provinsi.

Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan Tujuan 10 di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
2. Mendorong pembangunan desa berkelanjutan dengan mempercepat pengentasan desa tertinggal, memperkuat kapasitas pemerintahan desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri.
3. Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, pemuda, penyandang disabilitas) melalui akses pekerjaan layak, perlindungan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi.
4. Meningkatkan inklusi sosial, politik, dan kebebasan sipil dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan kelembagaan lokal, dan jaminan kebebasan berpendapat.
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, serta pemerataan akses pelayanan publik.

Kebijakan ini sangat erat kaitannya dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Tujuan 10 mendukung langsung Misi ke-3, yaitu terciptanya kesejahteraan berkeadilan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, lapangan kerja, dan rasa aman, serta Misi ke-1, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat, transparan, berkeadilan, dan religius. Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 10 selaras dengan agenda membangun masyarakat madani yang berkeadilan sosial, memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta menjamin kesetaraan gender dan hak penyandang disabilitas.

Adapun program unggulan RPJMD yang mendukung pencapaian Tujuan 10 antara lain penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan BUMDes, pengangkatan dan penyantunan anak yatim, pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam, serta perwujudan Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia yang mendukung pemerataan pembangunan berbasis lingkungan.

Dengan sinergi kebijakan SDGs dan RPJMD, pencapaian Tujuan 10 di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menurunkan ketimpangan sosial-ekonomi, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan inklusi sosial, serta memperkuat pemerataan pembangunan wilayah. Hal ini akan membawa Bengkulu menuju masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.

Tabel 3.19
Matriks Keterkaitan Tujuan 10 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 10	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Mengurangi ketimpangan dalam berbagai dimensi, termasuk ekonomi, sosial, dan wilayah	✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman. ✓ Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun SDM yang berbudaya, profesional, serta religius.	✓ Prioritas 4: Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas. ✓ Prioritas 1: Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan tata kelola transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius.	✓ Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan pemberdayaan desa melalui BUMDes & <i>One Village-One Product</i>. ✓ Pengangkatan dan penyantunan anak yatim. ✓ Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam (Taman Safari & Taman Berburu). ✓ Perwujudan Bengkulu sebagai <i>Konservasi Hutan Lindung Dunia</i> untuk mendukung pemerataan pembangunan berbasis lingkungan.



Tabel 3.20 Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara												
Target Global : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.												
10.1.1.(a)	Rasio Gini	-	BPS	Nilai	0.343	0.34	0,324-0,322	0,321-0,319	0,318-0,316	0,315-0,309	0,311-0,305	BPS
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	BPS	%	12.52	12.08 - 11,20	11,91 - 11,00	11,30 - 10,69	11,07 - 10,08	10,08 - 8,99	9,48 - 8,87	BPS
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	-	Dinas PMD	\Desa	31	30	28	26	24	22	20	PMD
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	-	Dinas PMD	\Desa	118	120	122	124	126	128	130	PMD
Target Global : Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya												
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	-	BPS	%	5.07	4.42	3.78	3.14	2.50	1.85	1.21	BPS
Target Global : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.												

3.11 Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-11 bertujuan untuk mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, serta berkelanjutan. Di Provinsi Bengkulu, isu perumahan layak, sistem transportasi, mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan perkotaan, serta penyediaan ruang publik yang aman dan ramah menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah rawan bencana.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.6, pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Provinsi Bengkulu baru mencapai 57,81%. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan hingga 74,21% pada tahun 2030, yang mencerminkan komitmen kuat dalam memperluas akses terhadap perumahan layak, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Peningkatan ini akan didukung oleh program penataan kawasan kumuh, pembangunan rumah layak huni, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dan swasta di bidang perumahan dan permukiman.

Dalam aspek transportasi perkotaan, kondisi mantap jalan provinsi menjadi salah satu indikator penting yang juga berkontribusi pada aksesibilitas penduduk terhadap transportasi publik. Dari 62,84% pada tahun 2024, kondisi jalan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 100% pada tahun 2029 dan 2030, sejalan dengan upaya peningkatan konektivitas antarwilayah serta keselamatan lalu lintas. Persentase penduduk yang terlayani transportasi umum juga ditargetkan meningkat dari 40% menjadi 100% pada 2030, menunjukkan upaya memperluas jangkauan layanan transportasi publik yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Perhubungan dan BPS.

Pada aspek ketangguhan terhadap bencana, indikator jumlah korban meninggal akibat bencana per 100.000 penduduk tercatat 1 orang pada tahun 2024, dengan target nihil (0 korban) mulai tahun 2026 hingga 2030. Hal ini menggambarkan upaya mitigasi risiko bencana yang semakin baik melalui peningkatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan infrastruktur tangguh bencana. Sementara itu, proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB ditargetkan menurun dari 13% menjadi 12,5% pada 2030, menunjukkan peningkatan kapasitas daerah dalam mengurangi dampak ekonomi dari kejadian bencana.

Dari sisi pengelolaan lingkungan perkotaan, persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah meningkat signifikan dari 19,37% pada tahun 2024 menjadi 44,5% pada 2030, mencerminkan peningkatan kualitas layanan kebersihan dan sistem pengelolaan sampah terpadu. Di sisi lain, Indeks Kualitas Udara yang sudah tinggi pada baseline 2024 (94,13) cenderung menurun ke angka stabil di kisaran 73-an pada periode 2026–2030, mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan pengendalian polusi udara dan efisiensi energi di wilayah perkotaan.

Sementara itu, indikator sosial proporsi penduduk yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir menunjukkan tren penurunan signifikan dari 2,25% (2024) menjadi 0,60% (2030). Penurunan ini menjadi indikator penting meningkatnya rasa aman di wilayah perkotaan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, manula, dan penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, arah pembangunan Tujuan SDGs 11 Provinsi Bengkulu 2025–2030 menekankan pada pembangunan kota dan permukiman yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada penyediaan perumahan layak, peningkatan akses transportasi publik, penguatan ketangguhan terhadap bencana, pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih baik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Sinergi antarperangkat daerah seperti BPS, PUPR, BPBD, DLHK, dan Perkim menjadi kunci utama untuk mewujudkan kota dan permukiman yang aman, sehat, serta berdaya saing di Provinsi Bengkulu.

Untuk mencapai target-target tersebut, arah kebijakan Tujuan 11 di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, melalui program perumahan rakyat dan penataan kawasan kumuh.
2. Penguatan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau dengan memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas armada, serta aksesibilitas bagi kelompok rentan.
3. Pengurangan risiko bencana dengan memperkuat sistem mitigasi, peringatan dini, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana alam.
4. Pengelolaan lingkungan perkotaan melalui peningkatan layanan pengumpulan sampah, pengendalian pencemaran, dan perbaikan kualitas udara.
5. Penyediaan ruang publik yang aman dan inklusif dengan mengutamakan kebutuhan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, untuk memperkuat kohesi sosial dan kualitas hidup masyarakat.

Kebijakan ini sangat relevan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Tujuan 11 mendukung Misi ke-2, yaitu mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah, melalui pembangunan perumahan, transportasi publik, dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Tujuan ini juga terkait dengan Misi ke-3, yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk perumahan layak dan lingkungan yang sehat, serta Misi ke-1, yaitu tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat dalam memberikan pelayanan publik berkualitas.

Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 11 sejalan dengan peningkatan pembangunan wilayah berkelanjutan, percepatan infrastruktur dasar, dan pembangunan ramah lingkungan. Beberapa program unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 yang terkait antara lain Program Seribu Jalan Mulus untuk mendukung aksesibilitas kota dan desa, penyediaan transportasi publik gratis, pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam yang membutuhkan tata kelola lingkungan perkotaan dan pedesaan yang baik, serta perwujudan Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia yang memperkuat kualitas lingkungan hidup.

Dengan integrasi arah kebijakan SDGs dan RPJMD, pencapaian Tujuan 11 di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mewujudkan kota dan permukiman yang lebih layak huni, inklusif, aman, tangguh terhadap bencana, serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3.21
Matriks Keterkaitan Tujuan 11 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 11	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	✓ Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah. ✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya	✓ Prioritas 3: Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis serta memperkuat konektivitas antarwilayah. ✓ Prioritas 7: Mendorong pengembangan	✓ Program Seribu Jalan Mulus (percepatan peningkatan kualitas jalan & jembatan). ✓ Penyediaan moda angkutan darat perkotaan gratis. ✓ Peningkatan infrastruktur Pelabuhan Pulau Baai, Bandara Fatmawati, dan Kereta Api

Tujuan SDGs 11	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
	kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman.	wisata hijau sebagai langkah strategis dalam pembangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif.	Lubuk Linggau– Kota Bengkulu. ✓ Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam (Taman Berburu & Taman Safari di Bengkulu Tengah, Seluma, dan Kepahiang). ✓ Perwujudan Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia.



Tabel 3.22 Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan												
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh												
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	-	BPS	%	57.81	60.55	63.28	66.01	68.74	71.47	74.21	Perkim
Target Global : Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua												
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik	Kondisi mantap jalan Provinsi	Renstra Dinas PUPR	%	62.84	63.58	71.55	88.65	90.03	100.00	100.00	PUPR
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	-	BPS	%	40	50	60	70	80	90	100	BPS, Dishub
Target Global : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan												
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang											
	a. Korban meninggal	-	BPBD	Orang	1	8	0	0	0	0	0	BPBD
	b. Korban hilang	-	BPBD	Orang	N/A	0	0	0	0	0		
	c. Korban terluka	-	BPBD	Orang	N/A	3	0	0	0	0		
	d. Korban mengungsi	-	BPBD	Orang	956	0	0	0	0	0		

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap pendapatan domestik bruto.	-	BPBD	%	13	12.9	12.8	12.7	12.6	12.6	12.5	BPBD
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota												
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	-	BPS	%	19,374	26.00	29,7	33,4	37,1	40,8	44,5	BPS
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	-	BPS	Indek	94.13	0.00	72.34	72.94	73.24	73.54	73.84	DLHK
Target Global : Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas												
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	-	BPS	%	2.25	0.15	0.12	0.10	0.90	0.70	0.60	BPS

3.12 Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-12 menekankan pentingnya mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pembangunan. Bagi Provinsi Bengkulu, pengelolaan sampah, pengurangan food loss and waste, serta peningkatan daur ulang menjadi agenda penting mengingat pertumbuhan populasi, aktivitas ekonomi, dan urbanisasi yang cenderung meningkatkan timbulan sampah.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.6, pada tahun 2024, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 69,9, yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan daerah berada pada tingkat cukup baik namun masih perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan produksi dan konsumsi pangan. Target hingga tahun 2030 menunjukkan peningkatan bertahap dan stabil, mencapai 70,05. Walaupun peningkatannya relatif kecil, arah kebijakan ini menunjukkan upaya konsisten dalam mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan (food loss and waste) di sepanjang rantai pasok mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga. Upaya ini didukung melalui penguatan sistem logistik pangan daerah, peningkatan efisiensi penyimpanan hasil pertanian, serta promosi konsumsi pangan lokal yang berkelanjutan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, dalam konteks pengelolaan limbah, indikator persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah menjadi fokus penting dalam mewujudkan ekonomi sirkular di daerah. Meski data baseline tahun 2024 belum tersedia (N/A), target peningkatan yang signifikan ditetapkan, dari 2% pada 2025 hingga mencapai 22,5% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah, memperluas fasilitas daur ulang, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan serta pengolahan sampah berbasis sumber.

Secara keseluruhan, arah pembangunan SDGs 12 Provinsi Bengkulu tahun 2025–2030 menitikberatkan pada dua strategi utama: pertama, meningkatkan efisiensi sistem pangan untuk mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan; dan kedua, memperkuat tata kelola limbah padat melalui pendekatan daur ulang dan pengelolaan berbasis masyarakat. Dengan sinergi lintas sektor dan penerapan prinsip produksi serta konsumsi berkelanjutan, Provinsi Bengkulu

diharapkan dapat mewujudkan sistem ekonomi yang lebih hijau, efisien sumber daya, dan berdaya tahan terhadap perubahan lingkungan.

Untuk mencapai target-target tersebut, arah kebijakan Tujuan 12 di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan memperluas fasilitas daur ulang, memperkuat bank sampah, dan mengembangkan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan.
2. Pengurangan sampah pangan (food loss and waste) melalui kampanye konsumsi bijak, edukasi rumah tangga, serta efisiensi distribusi dan penyimpanan bahan pangan.
3. Penerapan prinsip ekonomi sirkular dengan mendorong industri daur ulang, penggunaan kembali material, serta inovasi produk ramah lingkungan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah melalui insentif, regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas.
5. Integrasi pengelolaan limbah dalam perencanaan pembangunan daerah agar mendukung target lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Kebijakan ini memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Tujuan 12 mendukung Misi ke-2, yaitu mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dengan memperkuat fasilitas pengelolaan sampah, serta Misi ke-4, yang menekankan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 12 selaras dengan agenda pembangunan wilayah berkelanjutan, pengembangan wisata hijau, serta mendorong inovasi berbasis lingkungan.

Sejumlah program unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 yang mendukung pencapaian Tujuan 12 antara lain Perwujudan Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia, Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam, serta Optimalisasi pemanfaatan aset terbengkalai dan BUMD yang dapat diarahkan pada pengelolaan limbah dan daur ulang.

Dengan sinergi antara arah kebijakan SDGs dan RPJMD, pencapaian Tujuan 12 di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan kapasitas daur ulang, dan membangun pola konsumsi-produksi yang bertanggung jawab. Hal ini akan mendukung terwujudnya pembangunan hijau, berkelanjutan, serta masyarakat yang lebih sadar lingkungan.

Tabel 3.23
Matriks Keterkaitan Tujuan 12 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 12	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Mewujudkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan melalui pengurangan limbah, peningkatan daur ulang, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien	✓ Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah. ✓ Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor strategis dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.	✓ Prioritas 3: Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan percepatan infrastruktur dasar & strategis. ✓ Prioritas 7: Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis dalam pembangunan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif. ✓ Prioritas 6: Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi berkelanjutan.	✓ Perwujudan <i>Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia</i>. ✓ Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam (Taman Berburu & Taman Safari di Bengkulu Tengah, Seluma, dan Kepahiang). ✓ Optimalisasi pemanfaatan aset terbengkalai. ✓ Optimalisasi BUMD untuk peningkatan lapangan kerja & pendapatan daerah (dapat diarahkan mendukung pengelolaan limbah dan daur ulang).



Tabel 3.24 Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan												
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah dari sampah pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi kerugian makanan sepanjang produksi dan rantai penawaran, termasuk kerugian paska panen												
12.3.1.(a)	Persentase penurunan susut dan sisa pangan (food loss and waste)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029	%	69,9	70,00	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05	Dinas Ketahanan Pangan
Target Global : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali												
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	-	DLHK	%	n/a	2.0	6,1	10,2	14,3	18,40	22,50	DLHK

3.13 Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-13 menekankan pentingnya tindakan nyata dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK), adaptasi terhadap bencana alam, serta integrasi strategi iklim ke dalam perencanaan pembangunan. Bagi Provinsi Bengkulu, isu perubahan iklim sangat relevan karena wilayah ini rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan abrasi pantai, yang semakin meningkat akibat perubahan iklim global.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.26, pada tahun 2024, data terkait persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah selaras dengan strategi nasional belum tersedia (N/A). Namun, mulai tahun 2025 ditargetkan sebesar 22,76%, dengan tren menurun sedikit hingga 19% pada tahun 2030. Pola target ini menunjukkan bahwa capaian bukan hanya diukur dari jumlah dokumen atau strategi yang diadopsi, tetapi juga efektivitas implementasi dan keselarasan dengan kebijakan nasional. Penurunan angka target di akhir periode mencerminkan pergeseran fokus dari aspek penyusunan dokumen menuju penguatan kualitas pelaksanaan, integrasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim di tingkat daerah. BPBD Provinsi Bengkulu menjadi instansi utama yang berperan dalam memastikan sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana dengan strategi nasional serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memiliki rencana kontinjensi yang komprehensif.

Sementara itu, indikator potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari baseline 56,59 MtCO₂e pada tahun 2024 menjadi 70,35 MtCO₂e pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan upaya Provinsi Bengkulu dalam memperkuat kebijakan mitigasi perubahan iklim melalui berbagai langkah, seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengurangan emisi dari sektor transportasi dan limbah. Bapperida dan DLHK berperan penting dalam integrasi kebijakan penurunan emisi ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap sejalan dengan komitmen penurunan emisi nasional dan target *net zero emission*.

Secara keseluruhan, arah kebijakan SDGs 13 Provinsi Bengkulu 2025–2030 menekankan dua aspek utama: adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim melalui penguatan kapasitas daerah, serta mitigasi melalui pengendalian emisi gas rumah kaca dan

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui sinergi antara BPBD, DLHK, dan Bapperida, Provinsi Bengkulu diharapkan mampu meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim sekaligus berkontribusi pada pencapaian target nasional penurunan emisi secara berkelanjutan.

Untuk mencapai target-target tersebut, arah kebijakan Tujuan 13 di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam, melalui perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana.
2. Mitigasi perubahan iklim dengan menurunkan emisi GRK melalui peningkatan energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah yang berorientasi rendah karbon.
3. Rehabilitasi ekosistem dan konservasi hutan untuk menjaga fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan sekaligus penyerap karbon.
4. Integrasi kebijakan iklim ke dalam pembangunan daerah, dengan memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan resiliensi iklim.
5. Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendukung aksi iklim, baik pada aspek adaptasi maupun mitigasi.

Kebijakan ini memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Tujuan 13 mendukung Misi ke-2, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, serta Misi ke-4, yaitu menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 13 selaras dengan agenda meningkatkan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta mendorong pembangunan ramah lingkungan.

Beberapa program unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 yang mendukung pencapaian Tujuan 13 antara lain Perwujudan Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia, Cetak Sawah Baru dan peningkatan irigasi yang harus adaptif terhadap iklim, serta Pengembangan wisata hijau yang berbasis konservasi lingkungan. Program-program ini sejalan dengan mitigasi dan adaptasi iklim melalui konservasi ekosistem, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam, serta transisi menuju pembangunan hijau.

Dengan sinergi antara arah kebijakan SDGs dan RPJMD, pencapaian Tujuan 13 di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu memperkuat kapasitas adaptasi daerah terhadap risiko iklim, menekan emisi GRK secara signifikan, serta mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 3.25
Matriks Keterkaitan Tujuan 13 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 13	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya melalui pembangunan tangguh dan berkelanjutan	✓ Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah (termasuk infrastruktur tangguh bencana & iklim). ✓ Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor strategis dengan mengutamakan hilirisasi berbasis pembangunan berkelanjutan.	✓ Prioritas 2: Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antarumat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. ✓ Prioritas 7: Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis pembangunan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif. ✓ Prioritas 3: Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis.	✓ Perwujudan <i>Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia</i>. ✓ Program <i>Cetak Sawah Baru (CSB)</i> dan perbaikan/peningkatan irigasi (adaptif iklim). ✓ Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam (Taman Berburu & Taman Safari) sebagai wisata hijau berbasis konservasi lingkungan.



Tabel 3.26 Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 13 : Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan Dampaknya												
Target Global : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.												
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	-	BPBD	%	N/A	22.76	22.50	22.00	20.00	19.50	19.00	BPBD
Target Global : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.												
13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	-	RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029	Mton CO2e	56.59	57.74	60.07	63.07	66.11	67.60	70.35	Bapperida, DLHK

3.14 Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-14 berfokus pada pelestarian ekosistem laut, pesisir, dan samudera, serta pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Provinsi Bengkulu yang memiliki garis pantai panjang di pesisir barat Sumatra sangat bergantung pada ekosistem laut untuk mendukung perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, serta perlindungan wilayah pesisir. Namun, potensi besar ini juga dihadapkan pada tantangan degradasi ekosistem laut, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.28, pada tahun 2024, luas kawasan konservasi perairan laut di Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 912.031 hektare. Luasan ini menjadi titik awal (baseline) dalam upaya menjaga ekosistem laut dan pesisir agar tetap lestari. Target ke depan menunjukkan tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya, yakni mencapai 916.591 hektare pada tahun 2025, 921.174 hektare pada tahun 2026, hingga meningkat menjadi 939.736 hektare pada tahun 2030. Kenaikan luas kawasan konservasi tersebut menggambarkan komitmen Provinsi Bengkulu dalam mendukung target global SDGs 14, yaitu melestarikan sedikitnya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan sesuai dengan hukum nasional dan standar ilmiah internasional.

Peningkatan luasan konservasi ini diharapkan tidak hanya menambah area lindung secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat kualitas pengelolaan ekosistem laut dan pesisir melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, pelibatan masyarakat pesisir, serta pengawasan yang efektif terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya laut. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu berperan sebagai instansi pelaksana utama, dengan fokus pada pengembangan kawasan konservasi berbasis ekosistem, penguatan kelembagaan pengelola kawasan, serta sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, arah kebijakan SDGs 14 di Provinsi Bengkulu 2025–2030 menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan sejalan dengan pelestarian ekosistem pesisir. Upaya ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, meningkatkan ketahanan ekologi wilayah pesisir, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan.

Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan Tujuan 14 di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Memperluas dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi laut, termasuk rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.
2. Mendorong pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan, dengan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya yang berwawasan lingkungan.
3. Mengendalikan pencemaran laut dan pesisir, terutama dari limbah plastik, aktivitas industri, dan kegiatan pertambangan.
4. Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan promosi wisata hijau.
5. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui diversifikasi mata pencaharian, peningkatan kapasitas nelayan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Kebijakan ini sangat relevan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Tujuan 14 mendukung Misi ke-4, yaitu menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi di sektor perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berkelanjutan. Selain itu, Tujuan 14 juga terkait dengan Misi ke-3, yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan kelompok pesisir sebagai bagian dari masyarakat madani.

Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 14 sejalan dengan agenda memperkuat sektor ekonomi lokal berbasis ketahanan pangan dan kelautan, serta mendorong pengembangan wisata hijau yang ramah lingkungan. Beberapa program unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 yang mendukung pencapaian Tujuan 14 antara lain peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui bantuan alat tangkap dan pusat pengolahan hasil perikanan, pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam termasuk wisata bahari, serta perwujudan Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia yang turut memperkuat perlindungan ekosistem pesisir dan laut.

Dengan sinergi antara arah kebijakan SDGs dan RPJMD, pencapaian Tujuan 14 di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir, memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Tabel 3.27
Matriks Keterkaitan Tujuan 14 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

Tujuan SDGs 14	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan pesisir untuk pembangunan berkelanjutan	✓ Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. ✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman.	✓ Prioritas 5: Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan. ✓ Prioritas 7: Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis dalam pembangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif.	✓ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui bantuan bibit, peralatan pertanian, alat tangkap, serta pengembangan pusat-pusat pengolahan agropolitan. ✓ Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam (termasuk wisata bahari: Taman Berburu & Taman Safari). ✓ Perwujudan <i>Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia</i> untuk memperkuat perlindungan ekosistem darat, pesisir, dan laut.



Tabel 3.28 Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Laut

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan												
Target Global : Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia pada tahun 2020.												
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan	BPS	Hektare	912,031	916,591.16	921,174.11	925,779.98	930,408.88	935,060.93	939,736.23	DKP

3.15 Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-15 menekankan pentingnya perlindungan ekosistem daratan, termasuk hutan, lahan basah, ekosistem pegunungan, dan lahan kering. Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi serta kawasan hutan yang luas, namun menghadapi tantangan berupa degradasi lahan, alih fungsi hutan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta ancaman kepunahan spesies endemik. Upaya pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.30, pada tahun 2024, kondisi awal atau baseline untuk indikator terkait ekosistem daratan di Provinsi Bengkulu menunjukkan beberapa capaian penting. Untuk indikator proporsi tutupan hutan terhadap luas daratan (15.1.1), data awal belum tersedia (n/a), namun mulai tahun 2025 ditargetkan sebesar 35,50% dan terus meningkat secara bertahap hingga 35,65% pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam menjaga tutupan hutan sebagai penopang utama keseimbangan ekosistem dan pengendali perubahan iklim. Peningkatan kecil namun konsisten tersebut menandakan arah kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis, reboisasi, dan pengawasan terhadap deforestasi.

Selanjutnya, indikator proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan (15.3.1) menunjukkan upaya pemulihan lahan yang cukup signifikan. Dari baseline tahun 2024 seluas 4.885 hektare, ditargetkan penurunan bertahap hingga hanya 1.838 hektare pada tahun 2030. Penurunan ini menggambarkan upaya intensif dalam menghentikan degradasi lahan akibat aktivitas pertanian tidak berkelanjutan, pertambangan, serta perubahan tata guna lahan. Melalui program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta pengendalian erosi dan sedimentasi, Bengkulu diharapkan dapat memulihkan ekosistem daratan menuju kondisi yang lebih sehat dan produktif.

Sementara itu, indikator indeks tutupan hijau pegunungan (15.4.2) menunjukkan peningkatan kualitas ekosistem pegunungan yang cukup signifikan dari 55,80% pada tahun 2024 menjadi 76,32% pada tahun 2030. Capaian ini menegaskan keberhasilan dalam menjaga

keanekaragaman hayati serta fungsi ekosistem pegunungan sebagai penyedia air, pengendali iklim mikro, dan habitat satwa endemik.

Secara keseluruhan, arah kebijakan SDGs 15 Provinsi Bengkulu tahun 2025–2030 menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan ekosistem daratan dan pengendalian degradasi lingkungan. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekosistem darat yang menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 15 di Provinsi Bengkulu difokuskan pada:

1. Rehabilitasi dan restorasi hutan serta lahan terdegradasi, termasuk program penghijauan, reboisasi, dan pengendalian kebakaran hutan.
2. Penguatan tata kelola kawasan konservasi darat untuk melindungi keanekaragaman hayati, termasuk spesies endemik seperti bunga *Rafflesia* dan satwa langka.
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan agar pemanfaatan ruang tetap sejalan dengan daya dukung lingkungan.
4. Pengembangan ekonomi berbasis hutan berkelanjutan, seperti ekowisata, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pemanfaatan jasa lingkungan.
5. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, agar berperan aktif dalam pelestarian hutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara adil.

Kebijakan ini sangat sejalan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Tujuan 15 mendukung Misi ke-4, yakni 4. Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, juga berkaitan dengan Misi ke-2 Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah.

Dari sisi prioritas pembangunan, Tujuan 15 terintegrasi dalam agenda peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian deforestasi, dan adaptasi perubahan iklim. Sedangkan dalam program unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, arah ini diwujudkan melalui program “Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia”, rehabilitasi lahan kritis dan kawasan rawan bencana, serta pengembangan desa wisata berbasis hutan dan keanekaragaman hayati.

Dengan pendekatan tersebut, pencapaian Tujuan 15 diharapkan dapat menjaga keseimbangan ekologi, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dan ekosistem daratan secara berkelanjutan.

Tabel 3.29

Matriks Keterkaitan Tujuan 15 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 15	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, hutan, serta keanekaragaman hayati	✓ Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan. ✓ Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah.	✓ Prioritas 2: Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya. ✓ Prioritas 7: Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis pembangunan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif. ✓ Prioritas 3: Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis.	✓ Perwujudan <i>Bengkulu sebagai Konservasi Hutan Lindung Dunia</i>. ✓ Pengembangan desa wisata berbasis hutan dan alam (Taman Berburu & Taman Safari di Bengkulu Tengah, Seluma, dan Kepahiang). ✓ Program <i>Cetak Sawah Baru (CSB)</i> dan peningkatan/perbaikan irigasi yang berwawasan lingkungan.



Tabel 3.30 Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan,mengelola Bhutan Secara lestari, Menghentikan Penggurunan, memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keragaman Hayati												
Target Global : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.												
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap luas daratan.	Proporsi tutupan hutan	DLHK	%	n/a	35.50	35,57	35,59	35,61	35,63	35,65	DLHK
Target Global : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.												
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan lahan	DLHK	Ha	4,885	4,388	3,838	3,338	2,838	2,338	1,838	DLHK
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan												
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan	Indeks kualitas lahan	DLHK	%	55.80	64,16	76,05	76,12	76,18	76,25	76,32	DLHK

3.16 Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-16 menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang damai, inklusif, serta didukung kelembagaan publik yang efektif dan akuntabel. Provinsi Bengkulu, sebagai daerah dengan keragaman budaya dan sosial, menghadapi tantangan terkait kekerasan, akses keadilan, kualitas pelayanan publik, serta representasi kelompok rentan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.32, pada tahun 2024, kondisi awal menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu telah memiliki fondasi yang cukup baik dalam mewujudkan masyarakat yang damai, inklusif, serta lembaga pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Berdasarkan indikator, terlihat arah kebijakan yang menitikberatkan pada pengurangan kekerasan, peningkatan akuntabilitas lembaga publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Untuk indikator 16.1.3(a), proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir sebesar 2,25% pada 2024, dengan target menurun hingga 0,60% pada tahun 2030. Penurunan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan melalui peningkatan layanan perlindungan sosial, penguatan aparat penegak hukum, dan edukasi masyarakat. Sementara itu, indikator 16.1.4* menunjukkan peningkatan proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, dari 67,42% pada 2024 menjadi 70,33% pada 2030, menandakan peningkatan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lingkungan sosialnya.

Indikator 16.2.1(a) yang mengukur proporsi rumah tangga dengan anak yang memiliki anggota mengalami hukuman fisik, menurun dari 48,80% pada tahun 2024 ditargetkan menjadi 42,70% pada tahun 2030. Tren ini menunjukkan kemajuan dalam perlindungan anak dan penghapusan kekerasan di lingkungan keluarga melalui sosialisasi dan penerapan regulasi perlindungan anak. Sementara itu, indikator 16.3.1(a), yaitu proporsi korban kekerasan yang melapor kepada polisi, meningkat dari 87,37% (2024) hingga mencapai 100% pada 2029–2030, menggambarkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, indikator 16.6.1(a) menunjukkan bahwa opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tetap mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sepanjang 2025–2030. Selain itu, indikator 16.6.1(b) dan 16.6.1(c) memperlihatkan peningkatan kinerja birokrasi, di mana nilai SAKIP naik dari 68,05% pada tahun 2024 ditargetkan menjadi 82% pada tahun 2030 dan indeks reformasi birokrasi meningkat dari 76,35% pada tahun 2024 ditargetkan menjadi 80% pada tahun 2030. Kondisi ini menandakan peningkatan efektivitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah daerah.

Pada aspek partisipasi publik dan representasi, indikator 16.7.1(a) memperlihatkan peningkatan keterwakilan masyarakat dalam lembaga perwakilan rakyat dari 72,22% pada tahun 2024 ditargetkan menjadi 73,50% pada tahun 2030, disertai dengan peningkatan indeks aspek kapasitas kelembagaan dan kebebasan politik yang menunjukkan tren positif hingga 77,26% dan 83,44% pada 2030. Hal ini menegaskan arah kebijakan yang mendukung demokrasi inklusif dan partisipatif di tingkat lokal.

Sementara itu, dalam konteks identitas hukum dan pencatatan sipil, indikator 16.9.1* dan 16.9.1(a–b) menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase anak di bawah lima tahun dan anak 0–17 tahun yang memiliki akta kelahiran serta cakupan kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk berada di kisaran 96–99% sejak 2024 hingga 2030. Hal ini menandakan akses layanan administrasi kependudukan yang merata dan berkualitas di Provinsi Bengkulu.

Secara keseluruhan, arah kebijakan SDGs 16 Provinsi Bengkulu tahun 2025–2030 menunjukkan peningkatan signifikan dalam keamanan publik, efektivitas pemerintahan, dan inklusivitas sosial-politik. Peningkatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak-hak dasar menjadi kunci utama dalam mewujudkan masyarakat damai, adil, dan berdaya yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan pencapaian Tujuan 16 di Provinsi Bengkulu diarahkan pada:

1. Pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.
2. Penguatan akses terhadap keadilan melalui bantuan hukum, peningkatan kepercayaan terhadap aparat, serta pelayanan hukum yang terjangkau.
3. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kinerja pelayanan publik.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk keterwakilan perempuan dan kelompok rentan dalam politik lokal.
5. Penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi, guna memastikan prinsip kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi publik berjalan efektif.
6. Peningkatan layanan administrasi kependudukan agar seluruh warga negara memperoleh identitas hukum yang sah.

Tujuan 16 memiliki relevansi kuat dengan arah pembangunan Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam Misi RPJMD ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius. dan Misi ke-3 : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.

Misi ini sejalan dengan Tujuan 16 yang menekankan tata kelola pemerintahan yang baik, pemenuhan rasa aman, serta keadilan sosial.

Selain itu, Prioritas Pembangunan Bengkulu tahun 2025–2029 juga mendukung Tujuan 16, khususnya:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius.
2. Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi, peningkatan tata kelola, serta penguatan nilai religius dan sosial menjadi instrumen penting dalam pencapaian Tujuan 16.

Adapun dari Program Unggulan Provinsi Bengkulu 2025–2029, terdapat beberapa yang mendukung Tujuan 16, antara lain:

1. Perwujudan Universal Health Coverage (UHC) dengan menjamin seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu mendapat BPJS gratis.
2. Pengangkatan dan penyaluran anak yatim.
3. Peningkatan kerukunan antar umat beragama.
4. Evaluasi kasus agraria dan pertambangan.

Program-program ini memperkuat aspek perlindungan sosial, keadilan, dan kerukunan masyarakat, yang menjadi inti dari Tujuan 16.

Tabel 3.31
Matriks Keterkaitan Tujuan 16 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

Tujuan SDGs 16	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, menjamin akses keadilan bagi semua, serta membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	✓ Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun SDM yang berilmu, berbudaya, profesional, dan religius. ✓ Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman.	✓ Prioritas 1: Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat dengan tata kelola transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius. ✓ Prioritas 2: Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.	✓ Perwujudan <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> dengan BPJS gratis. ✓ Pengangkatan dan penyantunan anak yatim. ✓ Peningkatan kerukunan antar umat beragama. ✓ Evaluasi kasus agraria dan pertambangan.



Tabel 3.32 Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan												
Target Global : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun												
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	-	BPS	%	2.25	0.15	0.12	0.10	0.90	0.70	0.60	BPS
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	-	BPS	%	67.42	68.88	69.17	69.46	69.75	70.04	70.33	BPS
Target Global : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.												
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik	-	BPS	%	48.80	47.70	46.70	45.70	44.70	43.70	42.70	BPS
Target Global : Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.												
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	-	BPS	%	87.37	90.49	93.33	95.95	98.37	100.00	100.00	BPS
Target Global : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.												

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	-	BPK RI	%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq$ B	-	Biro Organisasi	%	68.05	70	70	72	75	80	82	Biro Organisasi
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B	-	Biro Organisasi	%	76.35	76.4	76.45	76.5	76.8	76.9	80	Biro Organisasi
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	-	Biro Organisasi	OPD	5	5	5	5	5	5	5	Biro Organisasi
Target Global : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.												
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	-	BPS/Kesbangpol	%	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	72.22	73.50	KPU/BPS
16.7.2.(a)	Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	-	BPS/Kesbangpol	Indek	74.26	74.76	75.26	75.76	76.26	76.76	77.26	Kesbangpol/BPS
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	-	BPS/Kesbangpol	Indek	74.62	74.84	74.97	75.11	75.28	75.47	75.70	Kesbangpol/BPS
16.7.2.(c)	Indeks Aspek Kesenjangan	-	BPS/Kesbangpol	Indek	79.27	80.66	81.39	82.01	82.55	83.02	83.44	Kesbangpol/BPS
Target Global : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.												

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	-	BPS/Dukcapil	%	96.00	96.00	97.00	98.00	99.00	99.80	99.80	Dukcapil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun	BPS/Dukcapil	%	93.69	94.53	95.35	96.04	96.61	97.06	97.37	Dukcapil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	-	BPS/Dukcapil	%	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	Dukcapil

3.17 Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 17 SDGs menekankan pentingnya memperkuat sarana pelaksanaan pembangunan dan merevitalisasi kemitraan global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama dari tujuan ini adalah mobilisasi sumber daya domestik, peningkatan kapasitas fiskal, transparansi tata kelola, serta optimalisasi dukungan internasional untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.

Target dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3.34, pada tahun 2024, Provinsi Bengkulu memiliki tingkat pendapatan pemerintah terhadap PDRB sebesar 1,35%, yang menjadi baseline bagi upaya peningkatan mobilisasi sumber daya domestik. Dalam kurun waktu 2025–2030, target indikator ini menunjukkan tren penurunan tipis hingga mencapai 1,15% pada tahun 2030. Penurunan ini dapat mencerminkan stabilitas ekonomi daerah yang diiringi dengan peningkatan PDRB, sehingga rasio pendapatan terhadap PDRB menjadi lebih kecil meskipun nominal penerimaan bisa tetap meningkat.

Sementara itu, rasio penerimaan pajak terhadap PDRB menunjukkan arah peningkatan yang konsisten, dari 0,86% pada tahun 2024 menjadi 1,42% pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Peningkatan ini juga menjadi indikasi adanya penguatan kemandirian fiskal daerah yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Adapun proporsi anggaran domestik yang dibiayai oleh pajak domestik juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 33,28% pada baseline 2024 menjadi 34,48% pada tahun 2030. Hal ini menandakan semakin kuatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Peningkatan kapasitas fiskal ini menjadi faktor kunci dalam memperkuat kemandirian daerah dan mendukung implementasi program-program prioritas SDGs di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, arah kebijakan pada Tujuan SDGs 17 di Provinsi Bengkulu tahun 2025–2030 menggambarkan komitmen untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan mobilisasi pendapatan daerah, dan memperbaiki tata kelola pajak. Meskipun

rasio pendapatan terhadap PDRB mengalami penyesuaian, peningkatan rasio pajak dan proporsi pembiayaan domestik menunjukkan arah positif menuju sistem pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis sumber daya lokal.

Analisis indikator tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu perlu mengoptimalkan kapasitas perpajakan, memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi belanja, serta mendorong kolaborasi lintas aktor dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam konteks daerah, arah kebijakan Tujuan 17 di Provinsi Bengkulu meliputi:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, bersih, dan berorientasi pada hasil.
2. Optimalisasi penerimaan daerah dengan penguatan kapasitas pajak, retribusi, dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
3. Pemanfaatan kemitraan dengan BUMD, swasta, UMKM, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan internasional.
4. Penguatan kapasitas fiskal melalui inovasi pembiayaan pembangunan dan pemanfaatan teknologi.

Tujuan 17 memiliki keterkaitan langsung dengan arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Hal ini tercermin dalam Misi ke-1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius. Misi tersebut menguatkan agenda Tujuan 17 dalam hal tata kelola yang bersih dan akuntabel, sekaligus menekankan pembangunan SDM yang berdaya saing untuk menopang kemandirian fiskal dan kemitraan pembangunan.

Keterkaitan lebih lanjut juga tampak pada Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, khususnya :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius.
2. Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah.

Kedua prioritas ini mendukung pencapaian Tujuan 17 dengan memastikan tata kelola yang baik dan penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang membutuhkan mobilisasi sumber daya fiskal.

Adapun pada Program Unggulan Provinsi Bengkulu tahun 2025–2029, keterkaitan dengan Tujuan 17 dapat dilihat dari:

1. Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk peningkatan lapangan kerja dan pendapatan daerah.
2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan pemberdayaan pemerintahan desa dengan penguatan Bumdes, Desa Wisata melalui *One Village-One Product*.

Program-program unggulan ini mendukung target Tujuan 17 dengan mendorong mobilisasi sumber daya domestik, memperluas basis penerimaan, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, BUMD, dan masyarakat.

Dengan demikian, integrasi antara Tujuan 17 SDGs dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 bukan hanya memperkuat tata kelola dan kemandirian fiskal, tetapi juga menjadi dasar strategis untuk menggerakkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Tabel 3.33
 Matriks Keterkaitan Tujuan 17 dengan Misi, Prioritas Pembangunan Daerah, dan Program Unggulan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029

Tujuan SDGs 17	Misi RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan
Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	✓ Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun SDM yang berilmu, berbudaya, profesional, dan religius.	✓ Prioritas 1: Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat dengan prinsip tata kelola transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius. ✓ Prioritas 3: Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis serta memperkuat konektivitas antarwilayah.	✓ Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk peningkatan lapangan kerja & pendapatan daerah. ✓ Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan pemberdayaan desa melalui BUMDes & <i>One Village-One Product</i> .



Tabel 3.34 Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Target/Indikator	Indikator Proxi	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan												
Target Global : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.												
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	-	BPS/Bapenda	%	1.35	1.18	1.17	1.16	1.16	1.15	1.15	BPS/Bapenda
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	-	RPJMD	%	0.86	1.32	1.34	1.36	1.38	1.40	1.42	BPS/Bapenda
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	-	BPS/Bapenda	%	33.28	33.58	33.78	33.98	34.16	34.33	34.48	BPS/Bapenda

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG



BAB IV

KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

4.1 Peran Non-State Actor di Provinsi Bengkulu

Framework / Kerangka Kerja Peran NSA dalam Mendukung Pencapaian SDGs 2030

Non-State Actor (NSA) di Provinsi Bengkulu memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Keberadaan NSA, yang meliputi organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi keagamaan, komunitas lokal, media, serta lembaga filantropi, merupakan bagian integral dari prinsip *multi-stakeholder partnership*. Peran NSA diarahkan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui kolaborasi, inovasi, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kerangka kerja peran NSA dalam RAD SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 mencakup empat dimensi utama:

1. Penyelarasan Program NSA dengan SDGs

NSA didorong untuk menyusun dan melaksanakan program yang sejalan dengan target dan indikator SDGs, baik dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola. Penyelarasan ini memastikan bahwa kontribusi NSA tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap inisiatif NSA dapat mendukung pencapaian target SDGs di tingkat lokal.

2. Kolaborasi Lintas Sektor

Peran NSA diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat luas (pentahelix). Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk kemitraan program, pertukaran data dan pengetahuan, serta aksi bersama dalam menghadapi isu-isu pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, penguatan pendidikan, kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, dan ketahanan lingkungan.

3. Pelokalan Program SDGs

NSA berperan dalam menerjemahkan agenda global SDGs ke dalam konteks lokal (SDGs localization) sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini mencakup pengembangan model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa, penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup dan ketahanan sosial. Dengan pendekatan pelokalan, pencapaian SDGs di Provinsi Bengkulu dapat lebih kontekstual, relevan, dan berkelanjutan.

4. Monitoring dan Evaluasi

NSA berkontribusi dalam proses pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs, baik melalui penyediaan data alternatif, partisipasi dalam forum multipihak, maupun evaluasi independen terhadap implementasi

program pembangunan. Peran ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. NSA juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun laporan capaian SDGs yang lebih inklusif dan berbasis bukti (*evidence-based*).

Dengan kerangka kerja tersebut, NSA di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan aktif mereka akan memperkuat integrasi SDGs dalam kebijakan daerah, memperluas jangkauan program pembangunan, serta memastikan bahwa prinsip *no one left behind* benar-benar terwujud dalam pelaksanaan RAD SDGs Provinsi Bengkulu 2025–2030.

4.1.1 Strategi dan Rencana Aksi Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu

(a) Framework / Kerangka Kerja

Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Provinsi Bengkulu. Keberadaan mereka tidak hanya sebagai mitra pemerintah, tetapi juga sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat, penyedia advokasi kebijakan, dan fasilitator pemberdayaan di tingkat akar rumput. Melalui jaringan yang luas serta kedekatan dengan komunitas, organisasi ini mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah.

Dalam kerangka kerja RAD SDGs, organisasi kemasyarakatan seperti IAKMI Provinsi Bengkulu, Pimpinan Wilayah Aisyiyah, WALHI Bengkulu, WCC Provinsi Bengkulu, dan Yayasan Al Fida Bengkulu berperan penting pada aspek penguatan kapasitas, advokasi, serta pemberdayaan masyarakat. Peran mereka mencakup peningkatan kesadaran publik, pendampingan kelompok rentan, penguatan literasi kesehatan, perlindungan lingkungan, hingga advokasi hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, ormas dan LSM berkontribusi signifikan dalam memastikan prinsip inklusivitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan dapat terintegrasi dalam implementasi SDGs di Provinsi Bengkulu.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan juga berfungsi sebagai pengawas sosial (*social accountability*) yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Mereka mampu memberikan masukan berbasis data lapangan, mengidentifikasi isu-isu yang belum terjangkau oleh kebijakan, serta menjadi ruang partisipasi aktif bagi kelompok masyarakat yang seringkali tidak terdengar suaranya. Hal ini sejalan dengan prinsip *no one left behind* yang menjadi roh utama dalam implementasi SDGs.

Oleh karena itu, dalam kerangka kerja RAD SDGs Provinsi Bengkulu, keterlibatan organisasi kemasyarakatan/LSM perlu diperkuat melalui mekanisme kolaborasi multi pihak. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan

masyarakat sipil harus diposisikan sebagai satu ekosistem pembangunan berkelanjutan yang saling melengkapi. Penguatan kapasitas, penyediaan ruang dialog kebijakan, serta dukungan terhadap inisiatif berbasis komunitas akan menjadi fondasi penting agar SDGs tidak hanya menjadi agenda formal pemerintah, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Dalam konteks RAD SDGs, organisasi kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu memiliki fungsi:

- 1. Penggerak Partisipasi Masyarakat, terutama kelompok rentan, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- 2. Pemberdaya Sosial-Ekonomi, melalui pendampingan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas masyarakat.
- 3. Advokasi Kebijakan dan Pengawasan, untuk memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
- 4. Penguatan Modal Sosial, dengan menghidupkan kembali nilai gotong royong, solidaritas, dan kearifan lokal.

(b) Strategi

Untuk mengoptimalkan kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam pencapaian SDGs di Provinsi Bengkulu, ditetapkan strategi sebagai berikut:

- 1. Memperkuat kapasitas kelembagaan Ormas melalui peningkatan sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta akses terhadap sumber pendanaan.
- 2. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi Ormas dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan.
- 3. Mendorong inovasi dan praktik baik berbasis komunitas, terutama dalam isu pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan hidup.
- 4. Mewujudkan mekanisme komunikasi, koordinasi, dan jaringan kerja Ormas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memperkuat advokasi kebijakan dan aksi lapangan.
- 5. Mengintegrasikan perspektif inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat ke dalam setiap program kerja Ormas, sehingga mendukung pencapaian target SDGs secara menyeluruh.

(c) Rencana Aksi

Rencana aksi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung RAD SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 antara lain:

Fokus Aksi	Rencana Aksi Ormas	Kontribusi terhadap SDGs
Pemberdayaan Masyarakat	Melaksanakan pelatihan kewirausahaan, UMKM, dan pertanian berkelanjutan berbasis komunitas	Goal 1 (Tanpa Kemiskinan), Goal 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi)
Kesehatan dan	Menyelenggarakan program penyuluhan	Goal 3 (Kehidupan Sehat

Fokus Aksi	Rencana Aksi Ormas	Kontribusi terhadap SDGs
Pendidikan	kesehatan masyarakat, gerakan hidup bersih dan sehat, serta peningkatan literasi anak dan perempuan	& Sejahtera), Goal 4 (Pendidikan Berkualitas)
Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial	Advokasi perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan kelompok rentan, serta penyediaan ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas	Goal 5 (Kesetaraan Gender), Goal 10 (Berkurangnya Kesenjangan)
Lingkungan dan Ketahanan Iklim	Gerakan penghijauan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, kampanye energi terbarukan, dan pelestarian sumber daya alam	Goal 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Goal 15 (Ekosistem Darat)
Advokasi dan Tata Kelola	Mendorong transparansi pembangunan daerah, partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, serta penguatan kapasitas demokrasi lokal	Goal 16 (Institusi yang Kuat), Goal 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Dengan kerangka kerja, strategi, dan rencana aksi tersebut, organisasi kemasyarakatan di Provinsi Bengkulu diharapkan mampu memperkuat kontribusinya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai arah RAD SDGs 2025–2030.

4.1.2 Strategi dan Rencana Aksi Filantropi di Provinsi Bengkulu

(a) Framework / Kerangka Kerja

Lembaga filantropi memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Provinsi Bengkulu. Sebagai institusi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, filantropi berkontribusi dalam memperkuat sumber daya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kehadiran lembaga seperti Lazismu, BAZNAS, dan Human Initiative Bengkulu tidak hanya fokus pada bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga pada upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Dalam kerangka kerja RAD SDGs, peran filantropi diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta penanganan bencana dan kebencanaan. Melalui dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, lembaga filantropi mampu menggerakkan solidaritas sosial yang menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dengan pendekatan ini, filantropi berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengurangi kesenjangan dan memastikan prinsip *no one left behind* dapat terwujud.

Selain itu, lembaga filantropi juga berfungsi sebagai inovator dalam menciptakan model-model intervensi pembangunan yang adaptif dan berbasis komunitas. Mereka sering menjadi pihak pertama yang hadir dalam situasi darurat, serta mampu mengisi celah di mana program pemerintah belum menjangkau. Peran ini menjadikan filantropi sebagai pilar penting dalam memperkuat ekosistem kolaborasi multi pihak untuk pencapaian SDGs di Bengkulu.

Oleh karena itu, dalam kerangka kerja RAD SDGs Provinsi Bengkulu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga filantropi perlu menjadi perhatian utama. Hal ini mencakup penyediaan ruang kolaborasi, peningkatan transparansi pengelolaan dana, serta pengembangan program bersama yang lebih terarah. Dengan demikian, kontribusi filantropi dapat terintegrasi secara optimal untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan dan mempercepat pencapaian target SDGs di Provinsi Bengkulu.

Kerangka kerja filantropi diarahkan pada:

- 1. Penguatan solidaritas sosial untuk mendukung masyarakat miskin dan rentan.
- 2. Pengembangan sumber daya lokal melalui pemanfaatan dana sosial yang produktif.
- 3. Kemitraan inklusif antara lembaga filantropi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- 4. Integrasi program filantropi dengan prioritas SDGs sehingga setiap inisiatif berkontribusi langsung terhadap target pembangunan berkelanjutan.

(b) Strategi

Untuk memperkuat kontribusi filantropi dalam pembangunan daerah berkelanjutan, ditetapkan strategi sebagai berikut:

- 1. Memperluas basis penghimpunan dana sosial melalui inovasi digital, literasi zakat/infaq/sedekah/wakaf, serta peningkatan kesadaran masyarakat.
- 2. Meningkatkan efektivitas penyaluran dana filantropi dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.
- 3. Mengintegrasikan program filantropi dengan prioritas pembangunan daerah terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi.
- 4. Mendorong sinergi multi-pihak dengan memperkuat kolaborasi antara lembaga filantropi, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media.
- 5. Mengembangkan model filantropi produktif yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

(c) Rencana Aksi

Rencana aksi filantropi dalam mendukung pencapaian RAD SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 meliputi:

Fokus Aksi	Rencana Aksi Filantropi	Kontribusi terhadap SDGs
Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi	Penyaluran zakat produktif untuk pengembangan usaha mikro, pemberian modal usaha, serta pendampingan UMKM berbasis komunitas	Goal 1 (Tanpa Kemiskinan), Goal 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan

Fokus Aksi	Rencana Aksi Filantropi	Kontribusi terhadap SDGs
		Ekonomi)
Pendidikan dan Literasi	Beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu, program sekolah gratis/ramah anak, peningkatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat	Goal 4 (Pendidikan Berkualitas), Goal 10 (Berkurangnya Kesenjangan)
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Bantuan layanan kesehatan, rumah singgah pasien, program gizi untuk anak dan ibu, serta layanan sosial kemanusiaan	Goal 2 (Tanpa Kelaparan), Goal 3 (Kehidupan Sehat & Sejahtera)
Lingkungan dan Ketahanan Iklim	Program wakaf hijau, penghijauan, pengelolaan sampah terpadu, serta penyediaan energi terbarukan berbasis komunitas	Goal 7 (Energi Bersih), Goal 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Goal 15 (Ekosistem Darat)
Advokasi dan Kemitraan	Mendorong regulasi pendukung filantropi, memperkuat forum koordinasi lembaga filantropi dengan pemerintah, serta memperluas kampanye publik untuk partisipasi masyarakat	Goal 16 (Institusi yang Kuat), Goal 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Dengan kerangka kerja, strategi, dan rencana aksi tersebut, filantropi di Provinsi Bengkulu diharapkan tidak hanya menjadi instrumen bantuan sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Peran filantropi yang terintegrasi dalam RAD SDGs akan mempercepat pencapaian target-target pembangunan, memperkuat kemandirian masyarakat, serta memastikan terwujudnya Provinsi Bengkulu yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan pada tahun 2030.

4.1.3 Strategi dan Rencana Aksi SDGs dan Renper Universitas Bengkulu

(a) Framework / Kerangka Kerja

SDGs dan Renper Universitas Bengkulu merupakan lembaga penghubung (*hub institution*) yang berfungsi sebagai motor penggerak, koordinator, sekaligus pusat pengetahuan (*knowledge center*) dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keberadaannya menjadi jembatan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, filantropi, serta komunitas lokal dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerangka kerja SDGs dan Renper Universitas Bengkulu dibangun berdasarkan prinsip:

1. Integrasi, memastikan tujuan dan target SDGs masuk dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
2. Kolaborasi, memperkuat sinergi multipihak (pentahelix: pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media).
3. Inovasi, mendorong lahirnya gagasan, riset, serta praktik baik untuk mempercepat pencapaian SDGs.
4. Monitoring dan Akuntabilitas, menyediakan data, analisis, serta laporan capaian SDGs secara transparan dan berbasis bukti (*evidence-based*).

(b) Strategi

Untuk memperkuat peran SDGs dan Renper Universitas Bengkulu dalam mendukung pencapaian RAD SDGs Provinsi Bengkulu 2025–2030, ditetapkan strategi sebagai berikut:

- 1. Penguatan kapasitas kelembagaan SDGs Center, melalui peningkatan sumber daya manusia, tata kelola, dan dukungan regulasi.
- 2. Penyediaan basis data dan riset pembangunan berkelanjutan, yang dapat diakses oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
- 3. Fasilitasi koordinasi multipihak dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 4. Pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan literasi SDGs untuk meningkatkan kesadaran publik, terutama generasi muda dan komunitas lokal.
- 5. Mendorong inovasi pembangunan berkelanjutan melalui penelitian, pilot project, dan replikasi praktik baik.
- 6. Memastikan keterhubungan antara pusat dan daerah dalam implementasi SDGs melalui jaringan nasional SDGs Center.

(c) Rencana Aksi

Rencana aksi SDGs dan Renper Universitas Bengkulu dalam mendukung pencapaian RAD SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 antara lain:

Fokus Aksi	Rencana Aksi SDGs dan Renper Universitas Bengkulu	Kontribusi terhadap SDGs
Penguatan Data dan Kajian	Mengembangkan dashboard data SDGs daerah, melakukan riset tematik SDGs, serta menyusun laporan capaian SDGs tahunan	Goal 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)
Koordinasi dan Kolaborasi Multipihak	Menyelenggarakan forum multipihak SDGs, fasilitasi kemitraan pemerintah–ormas–dunia usaha, serta memperkuat jaringan SDGs di kabupaten/kota	Goal 16 (Institusi yang Kuat), Goal 17 (Kemitraan)
Pendidikan dan Literasi SDGs	Menyelenggarakan seminar, workshop, dan kurikulum SDGs di perguruan tinggi serta kampanye publik di masyarakat, Beasiswa mahasiswa asing Universitas Bengkulu	Goal 4 (Pendidikan Berkualitas), Goal 17 (Kemitraan)
Inovasi dan Pilot Project	Menginisiasi program percontohan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan, lingkungan, energi, dan ketahanan pangan	Goal 1 (Tanpa Kemiskinan), Goal 7 (Energi Bersih), Goal 13 (Iklim), Goal 15 (Ekosistem Darat)
Monitoring dan Evaluasi SDGs	Mengembangkan metodologi pemantauan berbasis indikator lokal, melaksanakan evaluasi berkala, dan menyusun rekomendasi kebijakan	Goal 17 (Kemitraan dan Data)

Dengan kerangka kerja, strategi, dan rencana aksi tersebut, SDGs dan Renper Universitas Bengkulu diharapkan mampu memperkuat fungsi koordinasi, riset, inovasi, serta monitoring pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Keberadaannya akan memastikan bahwa implementasi RAD SDGs 2025–2030 berjalan terarah, inklusif, berbasis data, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu menuju pembangunan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

4.1.4 Strategi dan Rencana Aksi Pelaku Usaha di Provinsi Bengkulu

(a) Framework / Kerangka Kerja

Pelaku usaha merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Provinsi Bengkulu. Sektor swasta, baik yang berbentuk perusahaan daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), maupun lembaga keuangan, berperan strategis dalam menyediakan sumber daya ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan investasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kehadiran pelaku usaha seperti PD. Bimex dan Bank Bengkulu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mitra pemerintah dalam mendukung tercapainya target SDGs.

Dalam kerangka kerja RAD SDGs, pelaku usaha tidak hanya dilihat sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang memiliki tanggung jawab sosial. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pelaku usaha dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat. CSR yang selaras dengan prinsip SDGs akan memperkuat daya saing perusahaan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain kontribusi finansial, pelaku usaha juga berperan dalam mendorong inovasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Penguatan rantai pasok yang berkelanjutan, praktik bisnis yang etis, serta komitmen pada inklusivitas menjadi bagian dari transformasi dunia usaha menuju pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, filantropi, dan masyarakat sipil akan memperluas dampak positif sektor usaha dalam mendukung agenda SDGs.

Oleh karena itu, dalam kerangka kerja RAD SDGs Provinsi Bengkulu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dan kemitraan dengan pelaku usaha. Penyusunan regulasi yang mendukung, penyediaan insentif, serta forum dialog multipihak menjadi kunci untuk memastikan kontribusi sektor swasta terarah, transparan, dan berkesinambungan. Dengan peran aktif pelaku usaha, pembangunan berkelanjutan di Bengkulu dapat tercapai secara lebih inklusif, produktif, dan berkeadilan.

Kerangka kerja peran pelaku usaha diarahkan pada:

1. Integrasi prinsip SDGs dalam aktivitas bisnis, termasuk tata kelola perusahaan yang transparan dan beretika.
2. Mendorong inovasi usaha berkelanjutan yang ramah lingkungan, efisien sumber daya, dan berorientasi pada nilai tambah lokal.

3. Kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja layak.
4. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target SDGs.

(b) Strategi

Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi pelaku usaha terhadap RAD SDGs Provinsi Bengkulu 2025–2030, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan praktik bisnis berkelanjutan, termasuk penerapan ekonomi hijau, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi.
2. Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam penciptaan lapangan kerja layak dan inklusif, terutama bagi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.
3. Mengembangkan rantai pasok lokal berbasis potensi daerah, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, dan pariwisata.
4. Mengoptimalkan program CSR/PSR (Program Sosial Perusahaan) untuk mendukung bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan.
5. Membangun ekosistem inovasi usaha, termasuk *start-up* lokal, wirausaha sosial, dan UMKM berbasis teknologi.
6. Meningkatkan sinergi multipihak antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat sipil.

(c) Rencana Aksi

Rencana aksi pelaku usaha dalam mendukung pencapaian RAD SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 meliputi:

Fokus Aksi	Rencana Aksi Pelaku Usaha	Kontribusi terhadap SDGs
Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja	Investasi pada sektor unggulan daerah (pertanian berkelanjutan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata), serta penciptaan lapangan kerja layak dan inklusif	Goal 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi), Goal 1 (Tanpa Kemiskinan)
Pemberdayaan UMKM dan Rantai Pasok Lokal	Kemitraan pelaku usaha besar dengan UMKM, pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan digitalisasi UMKM	Goal 9 (Industri, Inovasi & Infrastruktur), Goal 10 (Berkurangnya Kesenjangan)
Lingkungan dan Keberlanjutan	Pengelolaan limbah dan emisi, konservasi sumber daya alam, penerapan energi terbarukan, serta program penghijauan	Goal 7 (Energi Bersih), Goal 12 (Konsumsi & Produksi Berkelanjutan), Goal 13 (Iklim), Goal 15 (Ekosistem Darat)
CSR/PSR untuk Sosial dan Pendidikan	Program CSR yang fokus pada beasiswa, peningkatan keterampilan tenaga kerja, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan	Goal 3 (Kesehatan), Goal 4 (Pendidikan Berkualitas), Goal 5 (Kesetaraan Gender)
Inovasi dan	Pengembangan <i>start-up</i> berbasis	Goal 8 (Pekerjaan

Fokus Aksi	Rencana Aksi Pelaku Usaha	Kontribusi terhadap SDGs
Digitalisasi	teknologi, e-commerce untuk produk lokal, serta digitalisasi layanan usaha dan pemasaran	Layak), Goal 9 (Industri & Inovasi), Goal 17 (Kemitraan)
Kemitraan Multipihak	Keterlibatan dunia usaha dalam forum multipihak SDGs, dukungan terhadap program daerah, serta kolaborasi dengan lembaga riset dan pendidikan	Goal 16 (Institusi yang Kuat), Goal 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Dengan kerangka kerja, strategi, dan rencana aksi tersebut, pelaku usaha di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Peran aktif dunia usaha akan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pencapaian RAD SDGs Provinsi Bengkulu 2025–2030 menuju pembangunan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

4.2 Pendanaan TPB/SDGs di Provinsi Bengkulu

Pendanaan merupakan aspek yang sangat krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030. Ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, terkelola secara efektif, serta berkelanjutan akan menjadi fondasi utama dalam percepatan pencapaian target SDGs di daerah.

Sumber pembiayaan pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Bengkulu berasal dari berbagai instrumen, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Dari sisi pemerintah daerah, pendanaan dilakukan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan berkelanjutan, serta dukungan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Alokasi pendanaan ini diarahkan untuk membiayai program-program strategis seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Selain dari APBD, pendanaan TPB/SDGs juga diperkuat melalui kontribusi non-pemerintah. Peran dunia usaha diwujudkan melalui investasi berkelanjutan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diarahkan secara lebih terukur untuk mendukung pencapaian SDGs. Sektor keuangan turut memberikan kontribusi melalui penyediaan instrumen pembiayaan inovatif, seperti kredit inklusif, pembiayaan hijau, maupun instrumen keuangan berkelanjutan lainnya. Lembaga filantropi dan organisasi keagamaan berperan melalui pemanfaatan dana sosial keagamaan (zakat, infaq, sedekah, wakaf), yang dikelola secara produktif untuk mendukung agenda pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan sosial dasar.

Selanjutnya, lembaga mitra pembangunan dan donor, baik internasional maupun nasional, berkontribusi dalam bentuk dukungan teknis, bantuan program, maupun hibah pendanaan yang bersifat tematik sesuai kebutuhan daerah. Masyarakat sipil dan komunitas lokal juga memiliki peran penting melalui mobilisasi partisipasi, swadaya, serta inisiatif berbasis komunitas yang memperkuat keberlanjutan implementasi SDGs di tingkat akar rumput.

Pendanaan TPB/SDGs di Provinsi Bengkulu mengedepankan pendekatan kolaboratif dan kemitraan multipihak. Hal ini berarti seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, perlu terlibat tidak hanya dalam penyediaan dana, tetapi juga dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program. Dengan demikian, mekanisme tata kelola pendanaan SDGs di daerah harus menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Selain mengoptimalkan sumber pembiayaan yang ada, RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu juga mendorong pemanfaatan pendanaan inovatif. Skema pembiayaan baru seperti *blended finance*, *public-private partnership*, obligasi sosial, dan pembiayaan hijau menjadi alternatif strategis untuk memperkuat kapasitas pendanaan daerah. Pemanfaatan instrumen-instrumen ini diharapkan dapat memperluas basis sumber daya pembangunan, mengurangi ketergantungan pada APBD, sekaligus mendorong partisipasi aktif berbagai pihak.

Dengan pengelolaan pendanaan yang terarah, transparan, inklusif, dan berkelanjutan, seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu dapat bergerak lebih efisien dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip *no one left behind* menjadi landasan, sehingga seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh manfaat nyata dari pembangunan yang berkeadilan, sejahtera, dan berkelanjutan.

4.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi (Monev) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 disusun untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan berjalan sesuai dengan arah, sasaran, serta target yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan guna memperoleh gambaran capaian pelaksanaan SDGs di daerah, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan kebijakan pembangunan daerah.

a. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan secara periodik dengan mengacu pada indikator-indikator kinerja SDGs yang telah ditetapkan pada RAD TPB/SDGs. Setiap perangkat daerah, lembaga non-pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait bertanggung jawab melaporkan capaian pelaksanaan program sesuai kewenangan masing-masing. Data dan informasi capaian dikompilasi melalui

sistem pelaporan terintegrasi yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Bengkulu selaku koordinator pelaksanaan SDGs di daerah.

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan mendukung pencapaian target SDGs, serta mengidentifikasi hambatan, tantangan, dan praktik baik. Proses evaluasi dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan multipihak, termasuk unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, dan filantropi. Evaluasi ini bersifat formatif maupun sumatif, sesuai dengan kebutuhan kebijakan pembangunan daerah.

b. Mekanisme Pelaporan

Hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan capaian pelaksanaan RAD TPB/SDGs secara berkala. Laporan ini mencakup analisis perkembangan indikator, capaian program, serta rekomendasi kebijakan untuk percepatan pencapaian SDGs. Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari perangkat daerah, forum multipihak, hingga Pemerintah Provinsi, yang selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Pelaporan capaian SDGs Provinsi Bengkulu disusun dalam format yang selaras dengan Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SDGs edisi termutakhir, sehingga konsistensi data dan keterbandingan capaian dengan daerah lain maupun capaian nasional dapat terjaga.

c. Waktu Pelaksanaan

Pemantauan dilakukan secara tahunan untuk memastikan keberlanjutan implementasi program, dengan laporan capaian disusun setiap tahun anggaran. Evaluasi dilakukan secara periodik setiap dua tahun untuk menilai efektivitas implementasi RAD TPB/SDGs, serta evaluasi menyeluruh pada akhir periode tahun 2030 sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berikutnya.

Dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terencana, transparan, dan berbasis data, pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 diharapkan dapat terukur secara jelas, sehingga arah pembangunan berkelanjutan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 disusun sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penyusunan RAD ini melalui proses yang partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, lembaga legislatif, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, filantropi, media, serta kelompok *Non-State Actor* lainnya. Pendekatan multipihak ini menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa dokumen RAD TPB/SDGs benar-benar mencerminkan kebutuhan, potensi, serta tantangan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Penyusunan RAD TPB/SDGs memberikan manfaat strategis, antara lain:

1. Menjadi pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sejalan dengan target SDGs;
2. Memastikan sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional dan global;
3. Mendorong konsolidasi pendanaan pembangunan dari berbagai sumber baik APBD, APBN, maupun non-pemerintah; serta
4. Memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas implementasi pembangunan daerah melalui mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang terukur.

Sasaran utama dari Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2030 adalah tercapainya percepatan pembangunan berkelanjutan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat. Dengan demikian, pelaksanaan RAD ini diharapkan mampu mewujudkan visi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 yaitu Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan adanya RAD TPB/SDGs ini, seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat berperan aktif, berkolaborasi, serta memastikan keberlanjutan implementasi pembangunan berkelanjutan di daerah. Komitmen bersama ini akan menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian SDGs tahun 2030 di Provinsi

Bengkulu, sehingga pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dapat terwujud bagi generasi masa kini dan mendatang.

GUBERNUR BENGKULU

H. HELMI HASAN



LAMPIRAN 1

- MATRIKS 2B PROVINSI BENGKULU
- MATRIKS 2B KABUPATEN/KOTA





MATRIKS 2B

PROVINSI BENGKULU



**MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU**

Tujuan SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
INDIKATOR SDGs: 1.1.1 Tingkat Kemiskinan Ekstrem														
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											APBD		
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	35	35	100	120	130	140	1,860	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang	35	261	261	261	261	261	428	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Orang	12	12	25	35	45	55	210	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Orang	35	35	40	45	50	55	270	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	35	35	40	45	50	55	135	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang	35	35	40	45	50	55	115	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Orang	0	0	10	20	30	40	50	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	0	0	10	15	15	15	150	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	0	0	2	2	2	2	120	APBD		Dinas Sosial
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Makanan	Orang	23	23	25	27	30	35	2,134	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Orang	23	23	25	27	30	35	440	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	23	23	25	27	30	35	1,250	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Orang	23	23	25	27	30	35	155	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	23	23	25	27	30	35	160	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang	23	23	25	27	30	35	110	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	5	5	5	5	5	5	40	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	2	2	2	2	2	2	40	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	5	5	5	5	5	5	45	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	23	23	25	27	30	35	63	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar anak Terlantar	Dokumen	1	1	1	1	1	1	60	APBD		Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	70	70	80	80	80	80	6,078	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Orang	70	70	80	80	80	80	320	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	70	70	80	80	80	80	810	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Orang	10	10	15	15	15	15	175	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Orang	70	70	80	80	80	80	210	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	70	70	80	80	80	80	180	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang	70	70	80	80	80	80	80	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Orang	0	10	10	10	10	10	40	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	70	70	80	80	80	80	170	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	0	10	10	10	10	10	85	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	20	20	20	20	20	20	80	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Orang	12	12	12	12	12	15	135	APBD		Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											APBD		
	Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal		Pengangkatan anak antar WNI	Orang	15	15	20	25	30	30	385	APBD		Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	150	1500	1500	1500	1500	2000	7,100	APBD		Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											APBD		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Penyediaan Permakanan	Orang	51	51	100	100	100	100	430	APBD		Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Orang	51	51	100	100	100	100	425	APBD		Dinas Sosial
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Orang	51	51	100	100	100	100	870	APBD		Dinas Sosial
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	51	51	100	100	100	100	430	APBD		Dinas Sosial
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	51	51	100	100	100	100	226	APBD		Dinas Sosial
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Layanan	3	3	3	3	3	3	3.3 M	APBD		Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	35	35	35	35	35	35	4,000	APBD Dan DAK		Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	17	17	17	17	17	17	3,644	APBD		Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	10	10	10	10	10	2,550	APBD		Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	3	3	3	3	3	3	2,550	APBD		Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	630	APBD Dan DAK		Dinas Kesehatan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas	Unit	0	0	1	2	3	4	4,000	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1	1	1	1	1	4,650	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	1	1	1	1	1	4,000	APBD/APBN	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	154	154	154	154	154	154	750	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	0	100	100	100	100	100	2,000	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	0	154	154	154	154	154	2,500	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Atas	Sekolah	154	154	154	154	154	154	498,000	APBN	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Atas	Sekolah	154	154	154	154	154	154	1,500	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1	1	1	1	1	4,000	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	1	1	1	1	1	24,000	APBD/APBN	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	101	101	101	101	101	101	750	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	0	100	100	100	100	100	2,000	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kejuruan	Sekolah	101	101	101	101	101	101	1,000	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah	101		101	101	101	101	245,000	APBD/APBN	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah	101	101	101	101	101	101	1,500	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	18	18	18	18	18	18	900	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	0	100	100	100	100	100	750	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Sekolah	18	18	18	18	18	18	36,000	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
		1.01.02.1.03.0053	Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Sekolah	18	18	18	18	18	18	900	APBD	Provinsi Bengkulu	Dikbud
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	30	40	40	40	40	45	140	APBD		Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kode Sub Kegiatan	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	100	100	100	100	120	310	APBD		Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Kode Sub Kegiatan	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Surat Keputusan (SK)	1	1	1	1	1	1	210	APBD		Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
		Kode Sub Kegiatan	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Surat Keputusan (SK)	1	1	1	1	1	1	100	APBD		Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	7,500	8,000	8,000	8,500	9,000	9,500	100	APBD		Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN													
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kode Sub Kegiatan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Perusahaan	40	80	80	100	110	110	175	APBD		Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											APBD		
	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	16	16	32	48	90	120	940	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	1	1	1	1	240	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	LPK	8	10	12	15	17	24	415	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											APBD		
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.0004	Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	15	15	30	50	60	100	385	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang	0	0	15	15	20	30	325	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	30	30	40	40	40	45	290	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	100	100	100	100	120	310	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Orang	16	16	16	32	32	48	965	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Laporan	2	2	2	2	2	2	114	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Surat Keputusan (SK)	1	1	1	1	1	1	210	APBD		Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
		2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	15000	15000	6500	7000	7200	8500	4,550	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA													
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10	10	10	10	10	125	APBD		Dinas Koperasi dan UKM
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Orang	20	20	30	40	50	60	405	APBD		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	50	50	50	50	50	50	250	APBD		Dinas Koperasi dan UKM
			Pengembangan Usaha Kecil	Unit Usaha	10	10	10	10	10	10	250	APBD		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2	2	2	2	3	2,272	APBD		Bapperida
INDIKATOR SDGs: 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas	Unit	0	0	1	2	3	4	4,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1	1	1	1	1	4,650	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	1	1	1	1	1	4,000	APBD/APBN		Dikbud
		1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	154	154	154	154	154	154	750	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	0	100	100	100	100	100	2,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	0	154	154	154	154	154	2,500	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Atas	Sekolah	154	154	154	154	154	154	498,000	APBN		Dikbud
		1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Atas	Sekolah	154	154	154	154	154	154	1,500	APBD		Dikbud
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1	1	1	1	1	4,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	1	1	1	1	1	24,000	APBD/APBN		Dikbud
		1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	101	101	101	101	101	101	750	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	0	100	100	100	100	100	2,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kejuruan	Sekolah	101	101	101	101	101	101	1,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah	101	-	101	101	101	101	245,000	APBD/APBN		Dikbud
		1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah	101	101	101	101	101	101	1,500	APBD		Dikbud
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	18	18	18	18	18	18	900	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	0	100	100	100	100	100	750	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Sekolah	18	18	18	18	18	18	36,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.03.0053	Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Sekolah	18	18	18	18	18	18	900	APBD		Dikbud
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Sekolah	153	153	153	153	153	153	150	APBD		Dikbud
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL											APBD		

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Orang	5	5	5	5	5	5	200	APBD		Dikbud
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	278,100	APBD		Dinas Kesehatan
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Km	0.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	20561.922	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Km	0.2	1	1	1	1	1	5288.74	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	24	70	164	164	164	164	58109	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Km	8	10	60	60	60	60	15392.304	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	287	400	400	400	400	1	9230	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	1	1	1	1	1	1	37,651	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	3	3	3	3	3	3	475	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											APBD		
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	35	35	100	120	130	140	1,860	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang	35	261	261	261	261	261	428	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Orang	12	12	25	35	45	55	210	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Orang	35	35	40	45	50	55	270	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	35	35	40	45	50	55	135	APBD		Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang	35	35	40	45	50	55	115	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Orang	0	0	10	20	30	40	50	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	0	0	10	15	15	15	150	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen	0	0	2	2	2	2	120	APBD		Dinas Sosial
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Makanan	Orang	23	23	25	27	30	35	2,134	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Orang	23	23	25	27	30	35	440	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	23	23	25	27	30	35	1,250	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Orang	23	23	25	27	30	35	155	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	23	23	25	27	30	35	160	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang	23	23	25	27	30	35	110	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	5	5	5	5	5	5	40	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	2	2	2	2	2	2	40	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	5	5	5	5	5	5	45	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	23	23	25	27	30	35	63	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.02.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar anak Terlantar	Dokumen	1	1	1	1	1	1	60	APBD		Dinas Sosial
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	70	70	80	80	80	80	6,078	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Orang	70	70	80	80	80	80	320	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang	70	70	80	80	80	80	810	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Orang	10	10	15	15	15	15	175	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Orang	70	70	80	80	80	80	210	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	70	70	80	80	80	80	180	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang	70	70	80	80	80	80	80	APBD		Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Orang	0	10	10	10	10	10	40	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	70	70	80	80	80	80	170	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	0	10	10	10	10	10	85	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	20	20	20	20	20	20	80	APBD		Dinas Sosial
		1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Orang	12	12	12	12	12	15	135	APBD		Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											APBD		
	Pengangkatan anak antar WNI dan Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal		Pengangkatan anak antar WNI	Orang	15	15	20	25	30	30	385	APBD		Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	150	1500	1500	1500	1500	2000	7,100	APBD		Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											APBD		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Penyediaan Permakanan	Orang	51	51	100	100	100	100	430	APBD		Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Orang	51	51	100	100	100	100	425	APBD		Dinas Sosial
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Orang	51	51	100	100	100	100	870	APBD		Dinas Sosial
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	51	51	100	100	100	100	430	APBD		Dinas Sosial
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	51	51	100	100	100	100	226	APBD		Dinas Sosial
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											APBD		
2.08.02.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.2.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Lembaga	1	1	1	1	1	1	2,280	APBD		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN													
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.1.01.0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	18	18	18	18	18	18	1,120	APBD		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											APBD		
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	135	APBD		Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											APBD		
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	1	400	APBD		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	30	40	40	40	40	45	140	APBD		Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kode Sub Kegiatan	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	100	100	100	100	120	310	APBD		Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Kode Sub Kegiatan	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Surat Keputusan (SK)	1	1	1	1	1	1	210	APBD		Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
		Kode Sub Kegiatan	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Surat Keputusan (SK)	1	1	1	1	1	1	100	APBD		Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	7,500	8,000	8,000	8,500	9,000	9,500	100	APBD		Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN													

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kode Sub Kegiatan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Perusahaan	40	80	80	100	110	110	175	APBD		Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											APBD		
	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	16	16	32	48	90	120	940	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	1	1	1	1	240	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	LPK	8	10	12	15	17	24	415	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											APBD		
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.0004	Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	15	15	30	50	60	100	385	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang	0	0	15	15	20	30	325	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	30	30	40	40	40	45	290	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	100	100	100	100	120	310	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Orang	16	16	16	32	32	48	965			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Laporan	2	2	2	2	2	2	114			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Surat Keputusan (SK)	1	1	1	1	1	1	210	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
		2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	15000	15000	6500	7000	7200	8500	4,550	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Perkara	10	10	15	15	15	15	151	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI												APBD		
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Paket	2	2	3	3	3	3	276.5	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												APBD		
	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang	16	16	32	48	90	120	940	APBD		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												APBD		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provins		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	300	300	300	300	300	300	1,385.2			Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												APBD		
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Poktan	13013	13013	13013	13013	13013	13013	2,426.8	APBD		Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL												APBD		

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	6	6	6	8	10	10	220.9	APBD		Dinas Kelautan dan Perikanan
			Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	100	100	100	150	120	120	205.9	APBD		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	3	3	3	3	3	3	120.0	APBD		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	7	7	7	20	20	10	4,461.2	APBD		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	3	3	3	3	3	3	525.6	APBD		Dinas Kelautan dan Perikanan
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA											APBD		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	295.3	APBD		DPMD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT											APBD		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	672.6	APBD		DPMD
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1	1	1	1	1	10,000	APBD		DPMD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA													
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10	10	10	10	10	125	APBD		Dinas Koperasi dan UKM
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Orang	20	20	30	40	50	60	405	APBD		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	50	50	50	50	50	50	250	APBD		Dinas Koperasi dan UKM
			Pengembangan Usaha Kecil	Unit Usaha	10	10	10	10	10	10	250	APBD		
INDIKATOR SDGs: 1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial,														
PROGRAM 1:														

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Kegiatan 1											APBD		Dinsos
	Sub Kegiatan 1													
	dst													
INDIKATOR SDGs: 1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang														
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	180	APBD		Dinkes
		1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	180	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang														
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Perusahaan	15	15	20	30	50	70	260.3	APBD		Disnaker
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Laporan	0	0	2	2	2	2	144.2	APBD		
INDIKATOR SDGs: 1.4.1 Propersi Penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan:														
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR													
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Kabupaten / Kota		10	10	10	10	1,141	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1	1	1	1	1	1,499	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	400	400	400	400	1	9,230	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik		450	450	500	550	8,745	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT											APBD		
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota		Fasilitasi penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	170	APBD		Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs: 1.4.2.Propersi dari penduduk dewasa yang mendapat hak atas tanah														
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
	Kegiatan: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Sub kegiatan :Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi Tora dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	670	APBD		Perkim
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.Jumlah Korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana														
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	0	0	0	1	0	100	APBD		BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	200	200	200	200	200	200	1,250	APBD		BPBD
INDIKATOR SDGs: 1.5.3*.Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko														
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	0	0	0	1	0	100	APBD		BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	200	200	200	200	200	200	1,250	APBD		BPBD
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Orang	30	30	30	30	30	30	750	APBD		
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Unit	20	20	20	20	20	20	950	APBD		
INDIKATOR SDGs: 1.5.4 .Presentase Pemerintah Daerah yang mengadopsi dan														
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	0	0	0	1	0	100	APBD		BPBD
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	1	0	0	1	0	360	APBD		
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	0	50	50	50	50	50	800	APBD		
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1,000	APBD		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Orang	30	30	30	30	30	30	750	APBD		
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Unit	20	20	20	20	20	20	950	APBD		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Orang	30	30	30	30	30	30	750	APBD		
			Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	750	APBD		

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.Prevalensi ketidakcakupan konsumsi pangan (Prevalence of														
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN													
	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi		1	1	1	1	1	1	95	APBD		DTP
INDIKATOR SDGs: 2.1.2.Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau														
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN													
	Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kewenangan provinsi		Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	135	APBD		DTP
	Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi		Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah		7	7	7	7	7	7	975	APBD		
INDIKATOR SDGs: 2.2.1.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	17	17	17	17	17	17	500	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	1	1	1	1	500	APBD		Dinkes
		1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	17	17	17	17	17	17	550	APBD		
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diidentifikasi oleh skor														
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN													
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		2	2	2	2	2	2	110	APBD		
			Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)		1	1	1	1	1	1	80	APBD		
INDIKATOR SDGs: 2.3.1. Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani														
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD Pelatihan kerja Bengkulu Selatan)	Orang	16	16	32	32	48	48	780	APBD		Disnaker
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD Pelatihan Kerja Kepahiang)	Orang	16	16	32	48	48	64	850	APBD		Disnaker
INDIKATOR SDGs: 2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian pertenaga kerja menurut kelas usaha														
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Orang	60	60	60	60	60	60	763.1	APBD		DTPHP
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	305.2	APBD		
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Poktan	13013	13013	13013	13013	13013	13013	305.2	APBD		
INDIKATOR SDGs: 2.3.2.Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut														
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	1	1	1	1	13,812	APBD		DTPHP
	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sertifikat	89	89	89	89	89	89	1,258	APBD		DTPHP
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Laporan	1	1	1	1	1	1	210	APBD		DTPHP
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	1	1	1	1	1	210	APBD		DTPHP
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	1	1	1	1	1	1	210	APBD		DTPHP
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Ha	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1,875	APBD		DTPHP
INDIKATOR SDGs: 2.4.1 Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.														
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Ha	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1,875	APBD		DTPHP
INDIKATOR SDGs: 2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai														
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
	Kegiatan 1 : Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Ha	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1,875	APBD		DTPHP
INDIKATOR SDGs: 2.5.1. Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan														

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Kegiatan 1 : Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Ha	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1,875	APBD		DTPHP
INDIKATOR SDGs: 2.5.2. Proporsi ras ternak lokal yang beresiko punah														
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih /Bibt Terak dan Tanaman Pakan ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Pengembangan dan Pelaksanaan sitem Manajemen Mutu Benih/ternak dan Tanaman Pakan ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	2,325	APBD		DTPHP
INDIKATOR SDGs: 2.a.1. Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.														
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	1	1	1	1	13,812	APBD		DTPHP
	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Sertifikat	89	89	89	89	89	89	1,258	APBD		DTPHP
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Laporan	1	1	1	1	1	1	210	APBD		DTPHP
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	1	1	1	1	1	210	APBD		DTPHP
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	1	1	1	1	1	1	210	APBD		DTPHP
INDIKATOR SDGs: 2.c.1. Indikator anomali harga pangan														
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN													
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dokumen	12	12	12	12	12	12	1,128.2	APBD		DTP
INDIKATOR SDGs: 2.c.1 Indikator anomali harga pangan														

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka kematian ibu (AKI)														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250	APBD		Dinkes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250	APBD		

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs: 3.1.2* Indikator proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100	APBD		Dinkes
		1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1	1	1	1	1	1	75	APBD		Dinkes
		1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250	APBD		
		1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	50	APBD		
INDIKATOR SDGs: 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB)														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	2	2	2	2	2	100	APBD		Dinkes
		1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1	1	1	1	1	1	75	APBD		Dinkes
		1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250	APBD		
		1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	50	APBD		
INDIKATOR SDGs: 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	1	1	1	1	500	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	10	10	10	10	10	500	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	10	10	10	10	10	500	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.4. Insiden Hepatitis B per 100 ribu penduduk.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	10	10	10	10	10	500	APBD		Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs: 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA												
1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	10	10	10	10	10	500	APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.5.(a) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA												
1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	10	10	10	10	10	500	APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.5. (b) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA												
1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	10	10	10	10	10	500	APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.4.1. (a) presentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA												
1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	50	APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.4.1. (b) Prevalensi tekanan darah tinggi.													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA												
1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	10	10	10	10	10	500	APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.4.1. (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	17	17	17	17	17	17	550	APBD	
INDIKATOR SDGs: 3.5.1. (a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA												
1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	50	APBD	Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.5.1. (b) Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.													
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA												
1.02.02.1.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	50	APBD	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs: 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang														
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
2.14.02.2.02	Kegiatan 1 : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	350	APBD		DP3APPKB
INDIKATOR SDGs: 3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun)														
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
2.14.02.2.01	Kegiatan 1 : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	350	APBD		DP3APPKB
INDIKATOR SDGs: 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).														
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	430	APBD		DP3APPKB
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah provinsi	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	350	APBD		
INDIKATOR SDGs: 3.8.1. Cakupan pelayanan kesehatan essensial.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	1	1	1	1	500	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi alat kesehatan, obat, bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minumam ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	600	APBD		DP3APPKB
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	322,650	APBD		
INDIKATOR SDGs: 3.8.2. Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	322,650	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).														

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2025		2026	2027	2028	2029	2030					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	322,650	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	50	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.b.1 Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	1	1	1	1	500	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.b.3 Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang														
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA													
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	1	1	1	1	1	1	750	APBD		Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan														
1.02.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
1.02.03.1.02	1.02.03.1.02 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	300	APBD		Dinkes

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan														
INDIKATOR SDGs: 4.1.2*. Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/														
INDIKATOR SDGs: 4.1.2 (a). Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat,														
INDIKATOR SDGs: 4.2.2*. Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu														
INDIKATOR SDGs: 4.3.1* (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)														
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas	Unit	0	0	1	2	3	4	4,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1	1	1	1	1	4,650	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	1	1	1	1	1	4,000	APBD/APBN		Dikbud

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	154	154	154	154	154	154	750	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	100	100	100	100	100	100	2,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	154	154	154	154	154	154	2,500	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Atas	Sekolah	154	154	154	154	154	154	498,000	APBN		Dikbud
		1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Atas	Sekolah	154	154	154	154	154	154	1,500	APBD		Dikbud
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1	1	1	1	1	4,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	1	1	1	1	1	24,000	APBD/APBN		Dikbud
		1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	101	101	101	101	101	101	750	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	100	100	100	100	100	100	2,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kejuruan	Sekolah	101	101	101	101	101	101	1,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah	-	-	101	101	101	101	245,000	APBD/APBN		Dikbud
		1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah	101	101	101	101	101	101	1,500	APBD		Dikbud
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	18	18	18	18	18	18	900	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	100	100	100	100	100	100	750	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Sekolah	18	18	18	18	18	18	36,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.03.0053	Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Sekolah	18	18	18	18	18	18	900	APBD		Dikbud
INDIKATOR SDGs: 4.4.1. (a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59)														
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250	APBD		KOMINFO
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250	APBD		
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat,														
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.														
INDIKATOR SDGs: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet														
INDIKATOR SDGs: 4.a.1 (a) Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12														
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas	Unit	0	0	1	2	3	4	4,000	APBD		Dikbud

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1	1	1	1	1	4,650	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	1	1	1	1	1	4,000	APBD/APBN		Dikbud
		1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	154	154	154	154	154	154	750	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	100	100	100	100	100	100	2,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	154	154	154	154	154	154	2,500	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Atas	Sekolah	154	154	154	154	154	154	498,000	APBN		Dikbud
		1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Atas	Sekolah	154	154	154	154	154	154	1,500	APBD		Dikbud
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1	1	1	1	1	1	4,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1	1	1	1	1	1	24,000	APBD/APBN		Dikbud
		1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	101	101	101	101	101	101	750	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	100	100	100	100	100	100	2,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Kejuruan	Sekolah	101	101	101	101	101	101	1,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah	-	-	101	101	101	101	245,000	APBD/APBN		Dikbud
		1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Sekolah	101	101	101	101	101	101	1,500	APBD		Dikbud
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Sekolah	18	18	18	18	18	18	900	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	100	100	100	100	100	100	750	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Sekolah	18	18	18	18	18	18	36,000	APBD		Dikbud
		1.01.02.1.03.0053	Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Sekolah	18	18	18	18	18	18	900	APBD		Dikbud
INDIKATOR SDGs: 4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan														
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga kependidikan Pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	2631	2631	2631	2631	2631	2631	175,000	APBD		Dikbud
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga kependidikan Pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	5	5	5	5	5	5	300	APBD		Dikbud
	Pengelolaan Pendidikan Khusus		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga kependidikan Pada satuan Pendidikan Khusus	Orang	5	5	5	5	5	5	300	APBD		Dikbud

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
INDIKATOR SDGs: 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.2.02.0004	Advokasi kebijakan dan Peningkatan Partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	Persentase	100	100	100	100	100	100	2,280	APBD		DP3APPKB
		2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase	100	100	100	100	100	100	2,280			
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Orang	25	30	50	75	100	125	400	APBD		DP3APPKB
INDIKATOR SDGs: 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.2.02.0004	Advokasi kebijakan dan Peningkatan Partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	Persentase	100	100	100	100	100	100	2,280	APBD		DP3APPKB
INDIKATOR SDGs: 5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat														
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.2.02.0004	Advokasi kebijakan dan Peningkatan Partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	Persentase	100	100	100	100	100	100	2,280	APBD		DP3APPKB
INDIKATOR SDGs: 5.a.1* Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah														
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN													
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dokumen	12	12	12	12	12	12	1,128.2	APBD		DTPHP
INDIKATOR SDGs: 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.														
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250	APBD		KOMINFO
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250	APBD		

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				

PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI

INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(1) Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi aman

01.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.010	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Kabupaten / Kota	10.00		10.00	10.00	10.00	10.00	1,141	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05.1.01.011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M³/Hari	-			500.00	500.00		107.5	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05.1.01.012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Unit	-		1.00		1.00		107.5	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05.1.01.013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M³/Hari	-		500.00	500.00	500.00		1,200,000	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05.1.01.015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1.00	1.00	1.00				17,173	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05.1.01.016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten / Kota			2.00	2.00	2.00	2.00	2871.191	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05.1.01.018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	-			-	1.00	1.00	200	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05.1.01.017	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	SR	-			-		N/a	100	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05.2.01.036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	-			-		N/a	100	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD	Lembaga	-	-	-	-	1.00	1.00	107.5	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				

PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI

INDIKATOR SDGs: 7.1.1 Rasio Elektrifikasi

3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.29.06.1.06	Kegiatan : Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil, dan perdesaan	3.29.06.1.06.0003	Sub.kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan	1	1	1	1	1	1	3,150	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas ESDM Provinsi Bengkulu
INDIKATOR SDGs: 7.1.1 (a) Konsumsi listrik per kapita.														
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN														
3.29.06.1.06	Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	3.29.06.1.06.0005	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkmebang, daerah terpencil dan perdesaan	Laporan	1	1	1	1	1	1	3,150	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas ESDM Provinsi Bengkulu

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
INDIKATOR SDGs: 8.2.1 Laju Pertumbuhan PRDB Per Tenaga Kerja/ Tingkat Pertumbuhan PRDB Rill Per Orang Bekerja Per tahun														
PROGRAM 1: PENEMPATAN TENAGA KERJA														
Kode Kegiatan :	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	30	30	40	40	40	45	140	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Kode Kegiatan :	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kode Sub Kegiatan	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	100	100	100	100	120	310	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
INDIKATOR SDGs: 8.3.1 Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin.														
PROGRAM 1: PENEMPATAN TENAGA KERJA														

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan :	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	30	30	40	40	40	45	140	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Kode Kegiatan :	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kode Sub Kegiatan	Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	100	100	100	100	120	310	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
INDIKATOR SDGs: 8.5.1 Upah rata-rata per jam kerja														
PROGRAM 1 : HUBUNGAN INDUSTRIAL														
Kode Kegiatan :	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Kode Sub Kegiatan	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Surat Keputusan (SK)	1	1	1	1	1	1	210	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
Kode Kegiatan :		Kode Sub Kegiatan	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Surat Keputusan (SK)	1	1	1	1	1	1	100	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000	9,500	100	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
INDIKATOR SDGs: 8.7.1 (a) Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja,														
PROGRAM 1. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan :	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kode Sub Kegiatan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Perusahaan	30	40	80	100	110	110	175	APBD	Kota Bengkulu	Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Dinas Ketekagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu
INDIKATOR 8.9.1.(a) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara														
3.26.02.PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
3.26..02.1.01	Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3.26.02.1.01	Jumlah SK Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan yg diterbitkan	SK	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	8.00	5,200	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
3.26..02.1.01.0001	Subkegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3.26..02.1.01.0001	Jumlah Lokasi daya tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	8.00	5,200	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
3.26.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03	Jumlah SK Destinasi Pariwisata provinsi yg ditetapkan	SK	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	8.00	5,200	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
3.26.02.1.03.0001	Subkegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.0001	Jumlah Lokasi Destinasi Pariwisata provinsi yg ditetapkan	Lokasi	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	8.00	5,200	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
INDIKATOR 8.9.1.(b) Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara														
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
3.26.03.1.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis parawisata provinsi	3.26.03.1.01	Jumlah Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Dokumen	5.00	1.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11,550	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
3.26.03.1.01.0001	Subkegiatan Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	3.26.03.1.01.0001	Jumlah Dokumen penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Dokumen	2.00	1.00	5.00	6.00	7.00	8.00	2,175.0	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
3.26.03.1.01.0002	Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.26.03.1.01.0002	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	475.0	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata
3.26.03.1.01.0003	Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri	3.26.03.1.01.0003	Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Kegiatan	2.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11,400	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi untuk Semua

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI											
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan Provinsi											
01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	dokumen	25.00	15.00	17.00	25.00	25.00	30.00	15,800	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	km	1,330.12	1,330.12	1,330.12	1,330.12	1,330.12	1,330.12	6,100	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan	km	2.00	1.00	1.00	-	-	-	129,500	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	km	92.84	100.15	82.00	89.90	40.91	29.17	2,127,951	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	km	1.90	1.30	1.50	-	-	-	23,500	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0040	Pelebaran jalan menuju standar	km		-	-	20.00	40.00	41.00	505,000	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0035	Pelebaran jalan menambah lajur	km	-	-	-	30.00	71.00	83.00	920,000	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	km	16.69	7.35	7.37	16.19	19.23	20.78	438,018	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	km	34.0	30.00	36.74	40.00	40.00	40.00	110,368	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	m	-	5.00	4.00	4.00	-	-	183,775	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	m	8.00	8.00	14.00	25.00	31.00	91.00	62,744	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	km	21.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	77254.01	APBD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
INDIKATOR SDGs: 9.1.2. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi														
PROGRAM (1): 2.1.1 Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)														
2.1.1.1	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.1.1.1.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	432.1	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2.1.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.1.1.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	1	5	5	5	4	5	132.8	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
		2.1.1.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Meter	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	821.4	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		2.1.1.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	435.2	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2.1.1.4	Kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2.1.1.4.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,680.0	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2.1.1.5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.1.1.5.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	1	2	2	4	4	13	1,169.0	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
2.1.2.1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.1.2.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	70	70	70	70	70	70	1,070	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2.1.2.2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	2.1.2.2.1	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan	90	90	90	90	90	90	820	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2.1.2.3	Kegiatan: Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2.1.2.3.1	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan	90	90	90	90	90	90	727	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2.1.2.4	Kegiatan: Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.1.2.4.1	Sub Kegiatan: Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	70	70	70	70	70	70	1,070	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2.1.3	Program: PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN													

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.1.3.1	Kegiatan: Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.1.3.1.1	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	2	2	2	2		Rp.6.630.484.000	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
9.c.1* Proporsi penduduk terlayani mobile broadband														
2.16.03. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														
2.1.03.1.01	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah	2.1.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen							1,227	Dana Alokasi Umum(DAU)	Semua ota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.1.03.1.02	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi	2.1.03.1.02.0030	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah	Perangkat Daerah								Dana Alokasi Umum(DAU)	Semua ota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2.1.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan							1,105	Dana Alokasi Umum(DAU)	Semua ota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2.1.03.1.02.0029	Penyelenggara pusat kendali Pemerintah Daerah	Kegiatan							558	Dana Alokasi Umum(DAU)	Semua ota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2.1.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Layanan							1,038	Dana Alokasi Umum(DAU)	Semua ota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		2.1.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Layanan							1,097	Dana Alokasi Umum(DAU)	Semua ota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 10: Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antar Negara

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030					
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI															
10.1.1 (c) : Jumlah desa tertinggal															
2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat															
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	550	APBD	Kabupaten / Kota	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	1	1		830	APBD	Kabupaten / Kota	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	1	1	1	1		740	APBD	Kabupaten / Kota	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1	1	1	1	1		11,877	APBD	Kabupaten / Kota	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1 (d) : Jumlah Desa Mandiri															
2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat															
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	550	APBD	Kabupaten / Kota	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	1	1		830	APBD	Kabupaten / Kota	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	1	1	1	1		740	APBD	Kabupaten / Kota	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	1	1	1	1	1	1	11,877	APBD	Kabupaten / Kota	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
10.3.1 (a) : Indeks Aspek kebebasan														
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8:01:03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8:01:03	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50	50	50	50	50	50	760	APBD	Kabupaten / Kota	Kesbangpol

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs : 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
INDIKATOR SDGs: 11.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau														
PROGRAM (1) : KAWASAN PERMUKIMAN														
	Peningkatan Kulaitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d dibawah 15 Ha		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 Ha s.d dibawah 15 Ha	unit	80	100	100	100	100	100	5,200	APBD	Provinsi Bengkulu	Perkim
INDIKATOR SDGs: 11.2.1 (b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum														
PROGRAM (1) : Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)														
2.1.1.1	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.1.1.1.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	432	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2.1.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.1.1.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	1	5	5	5	4	5	132,835	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
		2.1.1.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Meter	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	821	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
		2.1.1.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	435	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
2.1.1.4	Kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2.1.1.4.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,680	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.1.1.5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.1.1.5.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	1	2	2	4	4	13	1,169	APBD	Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu
INDIKATOR SDGs: 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang														
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
1.05.03.1.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Resiko Bencana	Kegiatan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,6	APBD	Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi Bengkulu
		1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Orang	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,5	APBD	Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi Bengkulu
		1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Keluarga	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0,4	APBD	Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi Bengkulu
		1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,5	APBD	Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi Bengkulu
INDIKATOR SDGs: 11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung														
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Kabupaten / Kota	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	183	APBD	Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi Bengkulu
11.6.1.(a)* Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah														
2.11.11. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.11.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	2.11.11.1.01.0013	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (SPH)	Ton	-	8000	8000	8000	8000	8000	1,945	APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
12.5.1.(a)* Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan														
2.11.11. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.11.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	2.11.11.1.01.0013	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (SPH)	Ton	-	8000	8000	8000	8000	8000	1,945	APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			

Tujuan SDGs 13 : Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan Dampaknya

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana														
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.02.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	6,6	APBD	Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi Bengkulu
		1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Logistik , Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0,26	APBD	Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi Bengkulu
		1.05.03.1.02.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,0	APBD	Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi Bengkulu

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs : 14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut														
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL														
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Ha	6.00	22,895	22,890	22,890	22,000	18,000	142	APBD	Kabupaten/Kota	DKP

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs : 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
15.1.1 * Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari														
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	-	1	1	1	1	1	685	APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	-	10	10	10	10	10	1,850	APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	-	100	100	100	100	100		APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan (PSS)	Ha	-	-	5	5	5	5		APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Dokumen	-	1	1	1	1	1		APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan sumur resapan (AR)	Unit	-	-	5	5	5	5		APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Laporan	-	1	1	1	1	1	1,665,000,000	APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan DLHK	Ha	-	500	500	500	500	500		APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan Kabupaten	Ha	-	56	56	56	56	56		APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Kabupaten	Dokumen	-	14	14	14	14	14	1,820	APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.28.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	-	1	1	1	1	1	685	APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P	Laporan	-	-	1	1	1	1		APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	5,500	APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Dokumen	-	-	1	1	1	1		APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Unit	-	-	11	11	11	11		APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Unit	-	21	21	21	21	21		APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 16 : Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua														
Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)														
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,538	APBD	Kota Bengkulu	BKAD	
		5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,240	APBD	Kota Bengkulu	BKAD	
		5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,480	APBD	Kota Bengkulu	BKAD	
		5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,245	APBD	Kota Bengkulu	BKAD	
		5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,360	APBD	Kota Bengkulu	BKAD	
		5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	7,360	APBD	Kota Bengkulu	BKAD	

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	2,813	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1,357	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1,003	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,425	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1,298	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		12 Dokume	2 Dokume	2 Dokume	2 Dokume	2 Dokume	2 Dokume	590	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		10 Dokume	0 Dokume	0 Dokume	0 Dokume	0 Dokume	0 Dokume	2,065	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1,140	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	486	APBD	Kota Bengkulu	BKAD

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		41 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,431	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	684	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	741	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	940,5	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,140	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	431	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	520,5	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26,117	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,313,724.00	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,995	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi		41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	1,995	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1,550,761,800	APBD	Kota Bengkulu	BKAD

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		3 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	297,062,400	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	400,468,800	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,109,690,620	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6,378,800,000	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000,000	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah		5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2,231,522,400	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	428,466,000	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	295,392,000	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	922,426,380	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
		5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	262,080,000	APBD	Kota Bengkulu	BKAD
16.7.1.(a) Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi														
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8:01:03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8:01:03	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50	50	50	50	50	50	760,000,000	APBD	Kabupaten / Kota	Kesbangpol
16.7.2.(a)Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi														
8:01:03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8:01:03	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50	50	50	50	50	50	760,000,000	APBD	Kabupaten / Kota	Kesbangpol

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
16.7.2.(b)Indeks Aspek Kebebasan														
8:01:03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8:01:03	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50	50	50	50	50	50	760,000,000	APBD	Kabupaten / Kota	Kesbangpol
16.7.2.(c) Indeks Aspek Kesenjangan														
8:01:03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8:01:03	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50	50	50	50	50	50	760,000,000	APBD	Kabupaten / Kota	Kesbangpol
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur														
Kode dan Program Pencatatan Sipil														
Kode Kegiatan :	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kode Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	1	1	1	1	250	APBD	Kab/Kota dalam Provinsi Bengkulu	Dukcapil
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.														
Kode dan Program Pendaftaran Penduduk														
Kode Kegiatan :	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kode Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	1	1	1	1	250	APBD	Kab/Kota dalam Provinsi Bengkulu	Dukcapil

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Tujuan SDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI														
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.														
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah														
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Penyediaan Sarana dan PraSarana Pengelolaan Pajak Daerah	Saranan dan Prasarana	10	10	10	10	10	10	3,261,570,625	APBD	Kab/Kota dalam Provinsi Bengkulu	Badan Pendapatan Daerah
17.1.1 (a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.														
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah														

Program/Kegiatan/Subkegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	2	2	2	2	2	2	5,919,056,156	APBD	Kab/Kota dalam Provinsi Bengkulu	Badan Pendapatan Daerah
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang														
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah														
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	2	2	2	2	2	2	502,098,606	APBD	Kab/Kota dalam Provinsi Bengkulu	Badan Pendapatan Daerah



MATRIKS 1 DAN MATRIKS 2B KABUPATEN/KOTA





MATRIKS 1 DAN MATRIKS 2B KABUPATEN BENGKULU UTARA



**MATRIK 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025-2030**

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrem		%								BPS
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.											
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi,											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Tingkat Kemiskinan)	RPJMD	%	10.96	10,95-10,90	10,89-10,85	10,84-10,81	10,80-10,76	10,75-10,68	10,67-10,53	Badan Pusat Statistik
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai											
1.3.1.[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	RPJMD	%	0	68.94	69.87	70.79	71.71	72.63	73.55	BPJS Ketenagakerjaan
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya											
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar										
	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	RPJMD	%	80.85	82.16	82.45	82.69	82.97	83.29	83.31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Rumah tangga dengan Akses Sanitasi/ Air Limbah Aman	RPJMD	%	4.19	4.91	5.62	6.31	6.99	7.97	8.62	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Timbulan Sampah Tertangani di Fasilitas Pengolahan Sampah	RPJMD	%	28.56	30.37	32.3	34.38	36.59	38.97	41.5	Dinas Lingkungan Hidup
	Layanan Pendidikan (SPM Pendidikan)	RPJMD	%	64.22	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Layanan Kesehatan (SPM Kesehatan)	RPJMD	%	84.79	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak)	RPJMD	%	88.53	88.54	88.97	89.44	89.92	90.42	90.94	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian											
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan resiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan resiko bencana (Indeks Resiko Bencana)	RPJMD	indeks	188.03	186.87	185.73	184.59	183.45	182.33	181.21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan											
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	RPJMD	%	20.7	18.8	17.5	16.3	15.2	14.2	14	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	RPJMD	%	8.5	8	7.5	7	6.5	6	5.5	Dinas Kesehatan
2.2.2.[a]	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	RPJMD	Poin	89.5	89.7	89.9	90.1	90.3	90.5	90.7	Dinas Ketahanan Pangan
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan (Indeks Ketahanan Pangan)	RPJMD	angka	89.5	89.7	89.9	90.1	90.3	90.5	90.7	Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	RPJMD	per 100.000 kelahiran hidup	115	109	104	94	85	77	70	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	SKI	%	89,9(SKI, 2023)	88	89	91	93	95	95	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian											
3.2.1*	a) Angka Kematian Balita (AKBa); b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	RPJMD	per 1.000 kelahiran hidup	a)19,83 b)16,85	a)15 b)12,62	a)13,8 b)11,63	a) 13,1 b)10,97	a) 12,5 b)10,46	a) 11,9 b)9,96	a) 11,2 b)9,50	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Renstra	per 1.000 kelahiran hidup	9.3	9.2	8.4	8	7.6	7.2	6.6	Dinas Kesehatan

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit											
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	RPJMD	per 100.000 pendudu k	295	291	248	211	186	166	151	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Renstra	orang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	Renstra	orang	25	23	20	15	10	6	2	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Renstra	orang	a) 1 b) 0	a) 1 b) 0	a) 1 b) 0	a) 1 b) 0	a) 1 b) 0	a) 1 b) 0	a) 1 b) 0	Dinas Kesehatan
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan											
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR)	RPJMD	%	2.26	2.24	2.23	2.22	2.21	2.21	2.20	Dina Pngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses											
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatar	RPJMD	%	6.34	6.20	06.05	5.85	5.65	5.45	5.20	Dina Pngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	RPJMD	%	98	98.2	98.4	98.6	98.8	99	99.2	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun (Persentase merokok penduduk 10-21 tahun)	Renstra	%	12.27	12	11.5	11	11	10.5	10.5	Dinas Kesehatan
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua											
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan											
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang a).SD/ sederajat dan b). SMP/ sederajat	Renstra	tahun	a) 99,32 b) 96,52	a) 99,26 b) 96,86	a) 99,48 b) 96,90	a) 99,54 b) 97,12	a) 99,68 b) 97,26	a) 99,82 b) 97,40	a) 99,96 b) 97,54	Dinas Pendidikan
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah usia a). 7-12 tahun; dan b). 13-15 tahun;	Renstra	tahun	a) 0,01 b) 0,01	a) 0,01 b) 0,01	a) 0,01 b) 0,01	a) 0,01 b) 0,01	a) 0,01 b) 0,01	a) 0,01 b) 0,01	a) 0,01 b) 0,01	Dinas Pendidikan
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	-	na	na	na	na	na	na	na	na	-

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.5 Pada tahun 2030, disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas										
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A (%)	RPJMD	%	91.74	91.93	92.13	92.32	92.51	92.71	92.9	Dinas Pendidikan
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B (%)	RPJMD	%	81.11	81.26	81.41	81.55	81.7	81.85	82	Dinas Pendidikan
	- Angka partisipasi kasar SD (%)	RPJMD	%	102.68	102.95	103.22	103.49	103.76	104.03	104.3	Dinas Pendidikan
	- Angka partisipasi kasar SLTP (%)	RPJMD	%	100.00	101.68	103.37	105.05	106.73	108.42	110.1	Dinas Pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	RPJMD	%	96.73	96.78	96.82	96.87	96.91	96.96	97	Dinas Pendidikan
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti											
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	Renstra	%	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	RPJMD	%	73.47	71.9	74.48	76.86	79.15	80.57	81.91	Dinas Pendidikan
Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan											
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai											
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Renstra dan Data Kasus UPTD PPPA	Orang	1	5	4	3	3	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Renstra dan Data Kasus UPTD PPPA	Orang	51	26	24	16	14	12	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan											
5.5.2001	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	KPU	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	6.67	KPU
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	-	na	na	na	na	na	na	na	na	
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua											
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum)	RPJMD	%	80.85	82.16	82.45	82.69	82.97	83.29	83.31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat											
6.2.1*	Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (Rumah tangga dengan Akses Sanitasi/ Air Limbah Aman)	RPJMD	%	4.19	4.91	5.62	6.31	6.99	7.97	8.62	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia											
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air (IKA)	RPJMD	Indeks	70	58.99-70.20	59.19-70.40	59.39-70.60	59.59-70.80	59.79-71.00	59.99-71.20	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern											
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	-	-	na	na	na	na	na	na	na	
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	BPS	%	4.43	4,43-4,46	4,46-4,50	4,50-4,53	4,53-4,57	4,57-4,60	4,60-4,64	Badan Pusat Statistik

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	BPS	Rp. juta	41.21	41,21-41,98	41,99-42,76	42,76-43,53	43,53-44,30	44,30-45,07	45,07-45,84	Badan Pusat Statistik
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang											
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS	%	2.89	2,89-2,84	2,84-2,80	2,80-2,75	2,75-2,70	2,70-2,67	2,67-2,63	Badan Pusat Statistik
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan											
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB. {Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum)}	RPJMD	%	0.57	0.59	0.62	0.64	0.66	0.69	0.71	Dinas Pariwisata
8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawanma	RPJMD	orang	426,920	428,420	431,632	435,954	441,386	448,028	455,780	Dinas Pariwisata
Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi											
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional (Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota)	RPJMD	%	57.64	60.09	62.57	65.62	68.66	72.05	75.09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk											
9.2.1.(a)	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (Kontribusi sektor industri terhadap PDRB)	RPJMD	%	6.84	6.93	7.14	7.35	7.56	7.77	7.98	Badan Pusat Statistik
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband (Persentase Rumah Tangga Dengan akses Internet)	RPJMD	%	68.42	68.92	69.92	70.42	71.42	72.42	73.42	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra-dan antar Negara											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang											
10.1.1.(a)	Rasio Gini	RPJMD	%	0.28	0,2800-0,2755	0,2755-0,2710	0,2710-0,2665	0,2655-0,2620	0,2620-0,2575	0,2575-0,2530	Badan Pusat Statistik
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Tingkat Kemiskinan)	RPJMD	%	10.96	10,95-10,90	10,89-10,85	10,84-10,81	10,80-10,76	10,75-10,68	10,67-10,53	Badan Pusat Statistik
10.1.1.(d)	Jumlah desa Mandiri(persentase d	IDM	%	0	20	25.12	30.23	35.35	40.47	45.58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (Tingkat Kemiskinan)	RPJMD	%	10.96	10,95-10,90	10,89-10,85	10,84-10,81	10,80-10,76	10,75-10,68	10,67-10,53	Badan Pusat Statistik
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	RPJMD	%	na	68.94	69.87	70.79	71.71	72.63	73.55	BPJS Ketenagakerjaan
Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak)	RPJMD	%	88.53	88.54	88.97	89.44	89.92	90.42	90.94	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative											
11.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	Renstra	%	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang											
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat											
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP (Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah)	RPJMD	-	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B (Nilai AKIP SKPD)	RPJMD	poin	A	AA	AA	AA	AA	AA	AA	Inspektorat Daerah
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B (Nilai SAKIP)	RPJMD	poin	89.71	90.02	90.42	90.54	90.63	90.71	90.86	Sekretariat Daerah
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N)	RPJMD	nilai	95	95	95	95	95	95	95	Sekretariat Daerah
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	RPJMD	(%)	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	6.67	KPU/BPS

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	RPJMD	(%)	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	BKPSDM
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran)	RPJMD	%	94.03	96	97	98	99	99.8	99.9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah (Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun)	RPJMD	%	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	RPJMD	%	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TujuanSDGs 17 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi											
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya (Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah)	RPJMD	%	4.91	4.91	4.95	4.97	4.97	4.98	4.99	Badan Pusat Statistik
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	RPJMD	%	0.3224	0.3224-0.5595	0.5595-0.5600	0.5600-0.5604	0.5604-0.5609	0.5609-0.5613	0.5613-0.5617	Badan Pusat Statistik
	Laju pertumbuhan PDRB	RPJMD	%	41.21	0.3224-0.5595	4,46-4,50	4,50-4,53	4,53-4,57	4,57-4,60	4,60-4,64	Badan Pusat Statistik
	Pajak daerah	RPJMD	rupiah	27,000,000,000	#####	40,317,189,034	46,349,464,830	53,284,292,420	#####	#####	Dinas Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	RPJMD	%	6.16	7.96	8.26	8.78	9.3	9.85	10.44	Badan Pusat Statistik

MATRIKS 2b RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025-2030

Tujuan SDGs : 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
1.2.1* Peresentase Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	0	1	1	1	1	1	100,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	unit	0	69	69	69	69	69	183,200,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	60	60	60	60	60	125,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	orang	0	19	19	19	19	19	396,400,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	orang	10	1500	1800	1800	2000	2000	3,200,130,848	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	orang	10	10	10	10	10	10	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	orang	0	25	25	25	35	35	720,854,680	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang	0	10	15	10	10	10	500,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	orang	20	60	60	60	60	60	250,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	10	60	60	60	60	60	599,882,240	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	orang	0	500	500	500	500	500	125,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	orang	5	25	25	25	25	25	125,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	orang	60	100	100	100	100	100	3,550,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	orang	0	15	15	15	15	20	189,760,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	0	30	30	30	30	30	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanaan	orang	10	500	500	500	500	1000	867,010,685	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	orang	8	8	8	8	8	8	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang	10	10	10	10	10	10	480,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	dokumen	7	7	7	7	7	7	1,775,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	usulan	0	1,000	1000	1000	1000	1000	1,654,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	orang	0	40	40	40	40	40	1,663,492,648	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaku usaha	17	28	28	28	28	28	190,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	1	5	5	5	5	5	740,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	paket	5	1	2	2	2	2	3,500,786,364	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok usaha	25	15	20	25	30	35	450,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	nelayan	220	200	250	300	350	400	670,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	kelompok nelayan	25	80	82	84	86	88	251,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	paket	2	2	2	2	2	2	620,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	paket	10	10	7	8	9	6	13,078,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar														
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	unit	5	60	65	63	50	47	6,840,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	orang/kelompok	3	4	4	4	4	4	284,500,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	paket	5	43	36	15	9	13	4,915,082,381	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	dokumen	0	3	3				600,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	jumlah sampah/ton	51	16	16	18	20	24	17,908,963,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Lingkungan Hidup
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	satuan pendidikan	240	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	476	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang	240	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	4	4	4	4	4	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	dokumen	2	4	4	4	4	4	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	2	2	2	2	2	2	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	1500	5900	6000	6010	6030	6050	19,569,845,139	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	satuan pendidikan	240	240	240	240	240	240	1,632,099,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	peserta didik	42	44	48	52	56	60	1,657,522,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket	42	1000	1250	1500	2000	2500	1,657,522,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	peserta didik	35	42	42	46	50	54	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	satuan pendidikan	75	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	150	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang	150	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	4	4	4	4	4	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	dokumen	4	4	4	4	4	4	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	0	2	2	2	2	2	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	800	900	4900	50000	5050	5200	12,893,638,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	satuan pendidikan	281	281	281	281	281	281	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang	281	281	281	281	281	281	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	3	3	3	3	3	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	dokumen	1	3	3	3	3	3	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	45	55	65	66	68	70	11,011,170,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	satuan pendidikan	0	10	15	15	20	28	11,411,354,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	peserta didik	0	40	40	44	50	60	2,323,795,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	satuan pendidikan	9	9	9	9	9	9	136,695,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang	27	27	27	27	27	27	136,695,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	1	1	1	1	1	1	136,695,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	4223	4223	4223	4223	4223	4223	214,405,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	3803	3803	3813	3823	3833	3843	3,122,005,000	APBD/ DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	3812	3812	3822	3832	3842	3852	1,995,231,600	APBD/ DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	14605	14615	14625	14635	14645	14655	171,524,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang	47973	47973	47983	47993	48003	48013	171,524,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	orang	168256	168256	168266	168276	168286	168296	381,560,900	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	orang	21317	21317	21387	21397	21407	21417	203,872,700	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang	6493	6493	6493	6493	6493	6493	1,573,229,000	APBD/ DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	orang	2681	2681	2691	2711	2721	2731	1,098,863,500	APBD/ DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	orang	451	451	456	460	465	470	144,723,400	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang	4235	4235	4245	4255	4265	4275	176,884,200	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang	6898	6898	6900	6902	6904	6906	171,524,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan														
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen	0	0	1	3	3	3	560,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas PRKP
		1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	laporan	0	0	1	1	1	1	80,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas PRKP
		1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	lokasi	1	10	11	12	12	15	18,767,664,067	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas PRKP
1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan resiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan resiko bencana (Indeks Resiko Bencana)														
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	orang	155	5000	5500	5800	6000	6200	315,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	kegiatan	0	3	3	3	3	3	150,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	unit	3	3	3	3	3	3	250,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	orang	0	300	300	300	300	300	325,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	50	50	50	50	50	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan	1	1	1	1	1	1	210,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	orang	27	30	30	30	30	30	200,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	dokumen	0	1	1	1	1	1	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	dokumen	0	1	1	1	1	1	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	laporan	2	2	2	2	2	2	200,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	545,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	0	1	1	1	1	1	200,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	0	600	620	620	800	800	528,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	699	280	620	620	800	800	860,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	0	1	1	1	1	1	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	75,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	dokumen	0	1	1	1	1	1	75,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	orang	0	15	15	15	15	15	75,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	kegiatan	0	1	1	1	1	1	75,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	100,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	dokumen	3	3	3	3	3	3	536,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	4223	4223	4223	4223	4223	4223	214,405,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	3803	3803	3813	3823	3833	3843	3,122,005,000	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	3812	3812	3822	3832	3842	3852	1,564,321,800	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	14605	14605	14625	14635	14645	14655	134,480,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	1	1	1	1	630,375,000	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1,837,928,200	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	593,633,900	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	unit	19	19	19	19	19	19	1,794,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	orang	114	114	114	114	114	114	69,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	1	1	1	1	1	1	4,394,000,000	DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	1	1	1	1	1	1	5,264,000,000	DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	4223	4223	4223	4223	4223	4223	214,405,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	3803	3803	3813	3823	3833	3843	3,122,005,000	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	3812	3812	3822	3832	3842	3852	1,564,321,800	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	14605	14605	14625	14635	14645	14655	134,480,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	1	1	1	1	630,375,000	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1,837,928,200	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1	1	1	1	1	593,633,900	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
2.2.2.[a] Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)														
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	1	1	1	1	1	1	470,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	1	1	1	1	1	1	100,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	laporan	1	1	1	1	1	1	13,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	dokumen	1	1	1	1	1	1	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	25,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	laporan	1	1	1	1	1	1	255,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
2.c.1* Indikator anomali harga pangan														
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	1	1	1	1	1	1	470,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	1	1	1	1	1	1	100,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	laporan	1	1	1	1	1	1	13,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	dokumen	1	1	1	1	1	1	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	25,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	laporan	1	1	1	1	1	1	255,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	orang	4223	4223	4223	4223	4223	4223	214,405,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	3803	3803	3813	3823	3833	3843	3,122,005,000	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	3803	3803	3813	3823	3833	3843	3,122,005,000	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.2.1* a) Angka Kematian Balita (AKBa); b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	3812	3812	3822	3832	3842	3852	1,564,321,800	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	14605	14605	14625	14635	14645	14655	134,480,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	3812	3812	3822	3832	3842	3852	1,564,321,800	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	orang	14605	14605	14625	14635	14645	14655	134,480,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	1	1	1	1	1,132,793,000	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	orang	1	1	1	1	1	1	134,003,200	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.3.4*Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	1	1	1	1	1,132,793,000	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	1	1	1	1	1,132,793,000	APBD dan DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
3.7.2.[a] Total Fertility Rate (TFR)														
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	1,744,000,000	APBD / DAU SG	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	laporan	1	1	1	1	1	1	572,000,000	APBD / DAU SG	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	2	2	2	2	2	2	909,000,000	APBD / DAU SG	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	2	2	2	2	2	2	1,184,000,000	APBD / DAU SG	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	dokumen	1	1	1	1	1	1	294,000,000	APBD / DAU SG	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	dokumen	0	1	1	1	1	1	522,000,000	APBD / DAU SG	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8.1.[a] Unmet Need Pelayanan Kesehatan														
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	1	1	1	1	1	1	604,000,000	APBD/DAU SG	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	1150	1150	1150	1150	1150	1150	4,491,192,922	APBD/DAU SG/DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit	29	29	29	29	29	29	1,294,000,000	APBD/DAU SG/DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	1	1	1	1	1	1	4,044,000,000	APBD/DAU SG/DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	orang	24	24	24	24	24	24	1,269,000,000	APBD/DAU SG/DAK Non Fisik	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)														
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1	1	1	1	1	149,801,396,800	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	orang	88284	168256	168266	168276	168286	168296	381,560,900	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	1	1	1	1	1	1,132,793,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Kesehatan
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang a).SD/ sederajat dan b). SMP/sederajat														
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	93	75	75	70	70	70	81,488,249,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa	68	200	250	300	350	400	1,913,713,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	jumlah SD	240	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah SD	240	240	240	240	240	240	154,683,173,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	476	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	jumlah peserta	240	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	4	4	4	4	4	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	jumlah kegiatan	2	4	4	4	4	4	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	jumlah kegiatan	2	2	2	2	2	2	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	1500	5900	6000	6010	6030	6050	19,569,845,139	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	48	30	32	34	36	40	33,345,049,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	jumlah sd	240	240	240	240	240	240	1,632,099,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	orang	42	44	48	52	56	60	1,657,522,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket	42	1000	1250	1500	2000	2500	1,657,522,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	30	32	32	32	34	34	29,900,617,250	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	0	15	15	20	25	30	17,496,800,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	jumlah peserta didik SMP	35	42	42	46	50	54	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa	46	140	140	160	180	200	1,366,937,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	jumlah SMP	75	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah SMP	75	77	77	77	77	77	77,975,084,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	150	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang	150	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	4	4	4	4	4	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	laporan	4	4	4	4	4	4	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	laporan	0	2	2	2	2	2	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	peserta didik	75	77	77	77	77	77	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	800	900	4900	5000	5050	5200	12,893,638,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket	0	500	700	900	1200	1500	1,566,937,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
4.1.2.[a] Angka anak tidak sekolah usia a). 7-12 tahun; dan b). 13-15 tahun														
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	93	75	75	70	70	70	81,488,249,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa	68	200	250	300	350	400	1,913,713,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	jumlah SD	240	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah SD	240	240	240	240	240	240	154,683,173,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	476	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	jumlah peserta	240	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	4	4	4	4	4	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	jumlah kegiatan	2	4	4	4	4	4	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	jumlah kegiatan	2	2	2	2	2	2	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	1500	5900	6000	6010	6030	6050	19,569,845,139	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	48	30	32	34	36	40	33,345,049,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	jumlah sd	240	240	240	240	240	240	1,632,099,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	orang	42	44	48	52	56	60	1,657,522,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket	42	1000	1250	1500	2000	2500	1,657,522,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	30	32	32	32	34	34	29,900,617,250	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	0	15	15	20	25	30	17,496,800,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	jumlah peserta didik SMP	35	42	42	46	50	54	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa	46	140	140	160	180	200	1,366,937,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	jumlah SMP	75	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah SMP	75	77	77	77	77	77	77,975,084,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	150	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang	150	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	4	4	4	4	4	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	laporan	4	4	4	4	4	4	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	laporan	0	2	2	2	2	2	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	peserta didik	75	77	77	77	77	77	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	800	900	4900	5000	5050	5200	12,893,638,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket	0	500	700	900	1200	1500	1,566,937,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas														
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	jumlah paud	281	281	281	281	281	281	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	jumlah paud	281	281	281	281	281	281	22,975,527,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang	281	281	281	281	281	281	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	3	3	3	3	3	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	kegiatan	1	3	3	3	3	3	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	orang	0	100	100	120	150	170	437,420,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	45	55	65	66	68	70	11,011,170,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	paket	0	10	10	15	20	28	11,411,354,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	peserta didik	7586	7622	7643	7682	7789	7956	5,943,604,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	93	75	75	70	70	70	81,488,249,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa	68	200	250	300	350	400	1,913,713,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	jumlah SD	240	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah SD	240	240	240	240	240	240	154,683,173,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	476	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	jumlah peserta	240	240	240	240	240	240	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	4	4	4	4	4	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	jumlah kegiatan	2	4	4	4	4	4	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	jumlah kegiatan	2	2	2	2	2	2	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	1500	5900	6000	6010	6030	6050	19,569,845,139	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	48	30	32	34	36	40	33,345,049,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	jumlah sd	240	240	240	240	240	240	1,632,099,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	orang	42	44	48	52	56	60	1,657,522,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket	42	1000	1250	1500	2000	2500	1,657,522,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	30	32	32	32	34	34	29,900,617,250	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah sarpras	0	15	15	20	25	30	17,496,800,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	jumlah peserta didik SMP	35	42	42	46	50	54	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah siswa	46	140	140	160	180	200	1,366,937,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	jumlah SMP	75	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah SMP	75	77	77	77	77	77	77,975,084,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	150	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang	150	77	77	77	77	77	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	1	4	4	4	4	4	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	laporan	4	4	4	4	4	4	820,163,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	laporan	0	2	2	2	2	2	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	peserta didik	75	77	77	77	77	77	273,387,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	paket	800	900	4900	5000	5050	5200	12,893,638,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket	0	500	700	900	1200	1500	1,566,937,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun														
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	peserta didik	0	40	40	44	50	60	2,323,795,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	satuan pendidikan	9	9	9	9	9	9	136,695,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	satuan pendidikan	9	9	9	9	9	9	7,100,204,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	orang	27	27	27	27	27	27	136,695,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dokumen	3	1	3	3	3	3	136,695,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	0	1	1	1	1	1	136,695,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	0	2	2	2	2	2	987,695,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	paket	2	50	60	70	80	80	892,862,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan														
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dokumen	12	12	12	12	12	12	28,131,278,554	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	dokumen	4	12	12	12	12	12	1,093,550,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.														
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	1	1	1	1	1	155,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KTP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	0	1	1	1	1	1	155,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.														
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0008	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	0	1	1	1	1	1	58,500,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	0	1	1	1	1	1	155,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah														
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0005	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	1	1	1	1	1	1	15,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	10	10	10	10	10	35,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	10	10	10	10	10	15,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman														
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	liter/detik	0	0.5	0	0	0	0	496,483,431	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	289	120	0	0	0	0	503,700,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	liter/detik	0	1500	1600	1700	1800	1900	64,681,513,825	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	1600	2000	2400	2800	3300	3,916,100,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.2.1* Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun														
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	unit	275	130	115	130	150	175	10,465,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	0	1200	1400	1600	1800	2200	8,267,250,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
												APBD		
6.3.2.(a) Indeks Kualitas Air (IKA)														
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	0	7	9	10	11	13	730,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	jumlah pengujian	0	207	226	245	264	283	2,120,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Lingkungan Hidup
Page 32														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga														
1.06.04. PROGRAM														
n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita														
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	paket	0	1	1	1	1	1	786,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
		3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	paket	0	1	1	1	1	1	786,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
		3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	paket	0	1	1	1	1	1	786,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	paket	0	1				1	220,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	paket	10	10	7	8	9	6	13,078,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	paket	0					2	500,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	paket	0	1	1	1	1	1	5,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pternakan
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	paket	10	4	5	6	7	7	5,883,780,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pternakan
		3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	paket		1	1	1	1	1	5,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pternakan
		3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	paket		1	1	1	1	1	5,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pternakan
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	paket	0	1	1		1	1	1,500,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pternakan
		3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	paket		1	1	1	1	1	403,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pternakan
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi	0	5	10	15	20	25	125,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	UKM	0	10	15	20	25	30	170,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	UMKM	90	90	90	90	90	90	2,760,248,946	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah rekomendasi	2	2			2	2	53,934,679	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	paket	3	1	1	1	1	1	1,784,697,870	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah UMKM	1	1	1	1	1	1	525,632,851	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perdagangan
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	paket	1	1	2	2	3	3	2,309,354,786	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	1	1	1	1	1	1	317,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pariwisata
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaku usaha	20	28	28	28	28	28	190,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	paket	5	1	2	2	2	2	3,500,786,364	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	nelayan	220	200	250	300	350	400	670,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	rekomendasi		1	1	1	1	1	961,241,040	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas PMPTSP
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	650,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas PMPTSP
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	cagar budaya	2	2	4	4	5	6	8,080,738,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	cagar budaya	4	4	4	4	4	4	946,776,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
8.1.1.(a) PDB per kapita														
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	14	14	14	14	8	14	386,526,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	0	1	1	1	1	1	470,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga	0	1	1	1	1	1	100,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM	0	19	19	19	19	19	396,400,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	dokumen	1	1	1	1	1	1	116,536,450	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka														
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	orang	0	40	40	40	40	40	1,663,492,648	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	lembaga	1	1	1	1	1	1	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	unit	1	1	1	1	1	1	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	kesepakat an	1	1	1	1	1	1	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				

PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional (Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota)

1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	dokumen		1	1	1	1	1	2,320,755,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	km		25	45	65	85	105		4,699,350,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	km		5	8	12	14	16		6,091,600,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	km		1	1	1	1	1		2,610,700,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	km		23	25	30	38	42	267,875,604,716	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9.2.1.(a) Pertumbuhan PDB industri pengolahan														
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	1	1	0	1	1	1	1,505,373,982	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perdagangan
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	0	1	1	0	0	0	852,010,125	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perdagangan
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1	1	1	1	1	1	577,158,010	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perdagangan
9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband														
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														
2.16.03.2.02	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	aplikasi	24	25	26	26	27	28	980,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	dokumen	0	2	2	2	2	2	88,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	perangkat daerah	35	36	37	38	39	40	1,575,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Komunikasi dan Informatika

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	dokumen	2	2	2	2	2	2	360,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	dokumen	2	2	2	2	2	2	1,585,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
10.1.1.(a) Rasio Gini														
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA														
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	desa	5	5	5	5	5	5	95,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA														
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dokumen	9	9	9	9	9	9	168,975,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	dokumen	2	2	2	2	2	2	912,199,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	6	6	6	6	6	6	4,306,450,944	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN														
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	laporan	1	1	1	1	1	1	105,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	1	1	1	1	1	1	530,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	laporan	1	1	1	1	1	1	105,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	1	1	1	1	1	1	112,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	1	1	1	1	1	1	470,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	1	1	1	1	1	1	100,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketahanan Pangan
10.1.1.(b) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (Tingkat Kemiskinan)														
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	0	1	1	1	1	1	100,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	unit	0	69	69	69	69	69	183,200,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	60	60	60	60	60	125,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	orang	0	19	19	19	19	19	396,400,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	orang	10	1500	1800	1800	2000	2000	3,200,130,848	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	orang	10	10	10	10	10	10	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	orang	0	25	25	25	35	35	720,854,680	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang	0	10	15	10	10	10	500,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	orang	20	60	60	60	60	60	250,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	10	60	60	60	60	60	599,882,240	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	orang	0	500	500	500	500	500	125,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	orang	5	25	25	25	25	25	125,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	orang	60	100	100	100	100	100	3,550,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	orang	0	15	15	15	15	20	189,760,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	0	30	30	30	30	30	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	orang	10	500	500	500	500	1000	867,010,685	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	orang	8	8	8	8	8	8	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang	10	10	10	10	10	10	480,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	dokumen	7	7	7	7	7	7	1,775,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	usulan	0	1,000	1000	1000	1000	1000	1,654,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	orang	0	40	40	40	40	40	1,663,492,648	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaku usaha	17	28	28	28	28	28	190,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	1	5	5	5	5	5	740,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	paket	5	1	2	2	2	2	3,500,786,364	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok usaha	25	15	20	25	30	35	450,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	nelayan	220	200	250	300	350	400	670,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	kelompok nelayan	25	80	82	84	86	88	251,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	paket	2	2	2	2	2	2	620,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	paket	10	10	7	8	9	6	13,078,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
10.1.1.(d) Jumlah desa Mandiri (persentase desa mandiri)														
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA														
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	desa	5	5	5	5	5	5	95,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA														
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dokumen	9	9	9	9	9	9	168,975,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	6	6	6	6	6	6	95,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	14	14	14	14	8	14	386,526,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	4	4	4	4	4	4	87,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	0	1	1	1	1	1	100,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	unit	0	69	69	69	69	69	183,200,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	60	60	60	60	60	125,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	orang	0	19	19	19	19	19	396,400,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	orang	10	1500	1800	1800	2000	2000	3,200,130,848	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	orang	10	10	10	10	10	10	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	orang	0	25	25	25	35	35	720,854,680	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang	0	10	15	10	10	10	500,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	orang	20	60	60	60	60	60	250,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	orang	10	60	60	60	60	60	599,882,240	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	orang	0	500	500	500	500	500	125,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	orang	5	25	25	25	25	25	125,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	orang	60	100	100	100	100	100	3,550,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	orang	0	15	15	15	15	20	189,760,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	0	30	30	30	30	30	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanaan	orang	10	500	500	500	500	1000	867,010,685	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	orang	8	8	8	8	8	8	50,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	orang	10	10	10	10	10	10	480,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	dokumen	7	7	7	7	7	7	1,775,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	usulan	0	1,000	1000	1000	1000	1000	1,654,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Sosial
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	orang	0	40	40	40	40	40	1,663,492,648	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaku usaha	17	28	28	28	28	28	190,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	1	5	5	5	5	5	740,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	paket	5	1	2	2	2	2	3,500,786,364	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok usaha	25	15	20	25	30	35	450,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														

Page 50

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	nelayan	220	200	250	300	350	400	670,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	kelompok nelayan	25	80	82	84	86	88	251,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	paket	2	2	2	2	2	2	620,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	paket	10	10	7	8	9	6	13,078,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
10.4.1.(b) Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan														
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIA														
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	30	30	30	30	30	30	140,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau														
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah rumah	2	2	2	2	2	2	240,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	jumlah rumah	5	60	65	63	50	47	6,840,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11.5.1.* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang														
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	0	600	620	620	800	800	514,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	dokumen	3	3	3	3	3	3	536,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inkl														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP (Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah)														
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	1	1	1	1	1	1	1,955,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	52	52	52	52	52	52	3,788,021,461	APBD	Kab Bengkulu Utara	Inspektorat Daerah
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	laporan	5	5	5	5	5	5	1,166,906,339	APBD	Kab Bengkulu Utara	Inspektorat Daerah
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	laporan	42	42	42	42	42	42	2,419,236,283	APBD	Kab Bengkulu Utara	Inspektorat Daerah
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dokumen	2	2	2	2	2	2	1,114,854,580	APBD	Kab Bengkulu Utara	Inspektorat Daerah
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B (Nilai AKIP SKPD)														
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	32	32	32	32	32	32	4,604,465,268	APBD	Kab Bengkulu Utara	Inspektorat Daerah
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	32	32	32	32	32	32	1,698,702,186	APBD	Kab Bengkulu Utara	Inspektorat Daerah
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B														
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	5	5	5	5	1,150,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Sekretariat Daerah
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik														
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	5	5	5	5	1,150,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Sekretariat Daerah

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)														
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	1	1	1	1	1	1	15,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0	10	10	10	10	10	35,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).														
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan	1	1	1	1	1	1	1,780,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	BKPSDM
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur														
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah layanan	5	5	5	5	5	5	1,188,450,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah														
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah layanan	5	5	5	5	5	5	1,188,450,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun														
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah layanan	5	5	5	5	5	5	1,188,450,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TujuanSDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya														
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	paket	0	1	1	1	1	1	786,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
		3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	paket	0	1	1	1	1	1	786,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
		3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	paket	0	1	1	1	1	1	786,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	paket	0	1	0	0	0	1	220,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	paket	10	10	7	8	9	6	13,078,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	paket	0	0	0	0	0	2	500,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perkebunan
		3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	paket	0	1	1	1	1	1	5,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	paket	10	4	5	6	7	7	5,883,780,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
		3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	paket	1	1	1	1	1	1	5,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
		3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	paket	1	1	1	1	1	1	5,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	paket	1	1	1		1	1	1,500,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
		3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	paket	1	1	1	1	1	1	403,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi	0	5	10	15	20	25	125,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	UKM	0	10	15	20	25	30	170,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	UMKM	90	90	90	90	90	90	2,760,248,946	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah rekomendasi	2	2	2	2	2	2	53,934,679	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	paket	3	1	1	1	1	1	1,784,697,870	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah UMKM	1	1	1	1	1	1	525,632,851	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Perdagangan
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	paket		1	2	2	3	3	2,309,354,786	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	1	1	1	1	1	1	317,000,000	APBD	Kab Bengkulu Utara	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelaku usaha	20	28	28	28	28	28	190,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	paket	5	1	2	2	2	2	3,500,786,364	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 -	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	nelayan	220	200	250	300	350	400	670,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Perikanan
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	rekomen- da- si		1	1	1	1	1	961,241,040	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas PMPTSP
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	1	1	1	1	650,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas PMPTSP
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	cagar budaya	2	2	4	4	5	6	8,080,738,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	cagar budaya	4	4	4	4	4	4	946,776,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Dinas Pendidikan
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB, Laju pertumbuhan PDRB, Pajak daerah														
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	0	2	2	2	2	70,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	410,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	1	1	1	1	1	1	410,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	10	2	2	2	2	2	70,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	laporan	12	12	12	12	12	12	550,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	12	0	12	12	12	12	80,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	objek pajak	1000	1000	1000	1000	1000	1000	370,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	dokumen	1000	1000	1000	1000	1000	1000	600,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	1000	0	1000	1000	1000	1000	80,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	dokumen	1000	0	1000	1000	1000	1000	80,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	0	2	2	2	2	70,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	410,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan	1	1	1	1	1	1	410,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	10	2	2	2	2	2	70,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	laporan	12	12	12	12	12	12	550,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	laporan	12	0	12	12	12	12	80,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	objek pajak	1000	1000	1000	1000	1000	1000	370,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	dokumen	1000	1000	1000	1000	1000	1000	600,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	layanan	1000	0	1000	1000	1000	1000	80,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	dokumen	1000	0	1000	1000	1000	1000	80,000,000	APBD	Kabupaten Bengkulu Utara	Badan Pendapatan Daerah



MATRIKS 1 DAN MATRIKS 2B KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Matrik 1 Target Pencapaian Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Bengkulu Selatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.2 Pada Tahun 2030, Mengurangi setidaknya Setengah Proporsi Laki-laki, Perempuan dan Anak-anak dari Semua Usia,yang Hidup dalam Kemiskinan disemua, sesuai dengan Definisi Nasional											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	17,1	16.65	16	15.35	14.5	13.87	13.4	DINAS KESEHATAN, DPPKBP3A, DINAS PENCATATAN SIPIL, DISPERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN, DINAS SOSIAL, DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS PERDAGANGAN.
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompokmiskin dan rentan.											
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.										
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Proxy).	DINSOS	%	80	85	90	92	94	96	98	DINAS SOSIAL
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Proxy).	DINSOS	%	80	85	90	92	94	96	98	DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Proxy).	DINSOS	%	75	85	87	89	91	93	95	DINAS SOSIAL
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan	%	90.63	95	96	97	98	99	100	DINKES

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1 (b)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS ketenagakerjaan	%	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan											
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	BPS	%	18.3	16.9	15.9	15	14.1	13.3	13	DPPKBP3A, DINAS KESEHATAN, DINAS PENCATATAN SIPIL, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS PERDAGANGAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN, DINAS SOSIAL
2.2.2 (a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	RENSTRA	Skor	91.6	91.6	92	92.25	92.5	92.75	93	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat											
2.4.1*	Proporsi Areal Pertanian Produktif dan Berkelanjutan	RPJMD	Hektar	7630,30	7630,30	7630,30	7630,30	7630,30	7630,30	7630,30	DINAS PERTANIAN
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan										
	Persentase Stabilitas Harga Pangan Tingkat Produsen/ Konsumen (Proxy)	RENSTRA	%	80	80	81	82	83	84	85	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Proxy)	RENSTRA	%	80	80	80	80	80	80	80	DINAS PERDAGANGAN
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	renstra	(per 100.000 kelahiran hidup)	189	122	109	97	89	77	67	DINKES
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran											
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	renstra	orang	16.85	11.63	10.97	10.97	10.46	9.96	8.46	DINKES
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya											
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	renstra	orang	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	DINKES
3.3.2	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	renstra	orang	90	91	92	93	94	95	96	DINKES
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.7.2	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Renstra	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	29.9	19.5-19.3	19.1-18.9	18.7-18.5	18.3-18.0	17.9-17.5	17.3-17.0	DPPKBP3A
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Renstra	%	2.34	2.24	2.23	2.22	2.21	2.21	2.2	DPPKBP3A
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif,											
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.										
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	renstra	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	DINAS KESEHATAN
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang di berdayakan	renstra	%	60	65	70	71	72	73	74	DINAS KESEHATAN
	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	renstra	orang	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2296	DINAS KESEHATAN
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	renstra	orang	90	91	92	93	94	95	96	DINAS KESEHATAN
	jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	renstra	orang	33880	33880	33880	33880	33880	33880	33880	DINAS KESEHATAN
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	renstra	orang	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2039	DINAS KESEHATAN
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	renstra	orang	289	289	289	289	289	289	289	DINAS KESEHATAN
3.8.1.a	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	%	7.6	13	12.5	12	11.01	10.5	10.5	10	DPPKBP3A
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	renstra	%	90.63	95	96	97	98	99	100	DINAS KESEHATAN
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara											
3.C.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi (Proxy)	RENSTRA	Rasio	100	100	80	90	80	90	95	DINAS KESEHATAN
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua											
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran											
4.1.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										DIKBUD
	Literasi SD (Proxy)	RPJMD	%	60.36	71.87	73	75	77	78	80	
	Numerasi SD (Proxy)	RPJMD	%	55.96	74.28	75	76	78	79	81	
	Literasi SMP (Proxy)	RPJMD	%	66.68	67.79	68	70	72	74	75	
	Numerasi SMP (Proxy)	RPJMD	%	61.09	65.1	67	68	71	73	75	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.										DIKBUD
	Harapan Lama sekolah (Proxy)	RPJMD	Tahun	13.66	13.9	13.97	14.05	14.07	14.13	14.14	
	Rata - rata Lama sekolah (Proxy)	RPJMD	Tahun	9.42	9.6	9.78	9.96	10.14	10.32	10.5	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas,											
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	RPJMD	%	90	92	95	95,5	95,7	96	97	DIKBUD
4.5 Pada tahun 2030, disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas										DIKBUD
	Angka Partisipasi Sekolah/ APS PAUD (Proxy)	Renstra	%	95	97	98	98,5	98,7	99	99	
	Angka Partisipasi Sekolah/ APS SD (Proxy)	Renstra	%	95	97	98	98,5	98,7	99	99	
	Angka Partisipasi Sekolah/ APS SMP (Proxy)	Renstra	%	88	89	90	90,5	90,8	91	92	
	Angka Partisipasi Sekolah/ APS Kesetaraan (Proxy)	Renstra	%	62	63	63,5	64	64,5	65	66	
Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan											
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	RENSTRA	%	95	95	98	98,5	99	99,5	100	DPPKBP3A
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	RENSTRA	%	95	95	98	98,5	99	99,5	100	DPPKBP3A
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.											
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	RENSTRA	%	56,22	56,28	56,30	56,34	56,37	56,42	56,46	DPPKBP3A
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and											
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan	RENSTRA	%	72,4	67,05	67,1	68	69	70	71	DPPKBP3A

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	RENSTRA	%	0	89,4	89,9	90,3	90,8	91,2	91,7	DPPKBP3A
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua											
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	BPS	%	68.26	69.02	69.78	70.54	71.3	72.06	72.82	DPUPR
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada											
6.2.1*	Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	BPS	%	84.42	85.18	85.94	86.7	87.46	88.22	88.98	DPUPR
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air											
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air (IKA)	KLHK/RPJMD	Indeks	45.60	59.06	59.26	59.46	59.66	59.86	60.00	DLHK
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.											
6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan	KLHK	Indeks	46.95	69.85	69.92	69.99	70.06	70.13	70.20	DLHK
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita										
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	BPS	%	4.37	4,38 - 4,49	4,50 - 4,71	4,72 - 5,03	5,04 - 5,45	5,46 - 6,10	6,11 - 6,30	DINAS PERDAGANGAN
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	RPJMD	Rp. Juta Per Tahun	45.38	48.28	51.18	54.08	56.98	59.88	62.78	DINAS PERDAGANGAN
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan											
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	RPJMD	%	3.25	3.2	3.15	3.1	3.05	3	2.95	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
8.8 Melindungi hak hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja											
8.8.1.a	Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) jaminan sosial ketenagakerjaan	RPJMD	%	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi											
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Kabupaten	RPJMD	%	55.63	56.19	56.74	57.29	57.84	58.39	58.94	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional											
10.1.1.(a)	Rasio Gini	RPJMD	%	0.3	0.295	0.29	0.285	0.28	0.275	0.27	DINAS PERDAGANGAN
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang											
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	RENSTRA	%	95	95	98	98,5	99	99,5	100	DPPKBP3A
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											
10.4.1(b)	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	RPJMD	%	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	RENSTRA	%	40	70	69	70	72	75	80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana,											
11.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (Indeks Resiko Bencana)										
	Indeks resiko Bencana	RPJMD	Poin	149.84	145	143	142	141	140	139	BPBD, DINAS SOSIAL
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah		%	50	55	60	65	70	75	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
11.6.1.(b)	Persentase timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		%	50	55	60	65	70	75	80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Kementerian LHK RI/ RPJMD	Indeks	93.11	72.72	73.02	73.32	73.62	73.92	74.22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA											
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional											
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	ENDC, RPJMN	%	31.89	18.37	19.07	19.76	20.44	21.12	43,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim											
13.3.1	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.	Renstra	%	100	100	100	100	100	100	100	DIKBUD
Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan											
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat											
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP										
	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (Proxy)		PREDIKAT	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD, INSPEKTORAT
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B										
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). (Proxy)	RPJMD	NILAI	3.057	3.1	3.125	3.15	3.2	3.22	3.23	INSPEKTORAT
	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	Menteri PANRB	ANGKA	63,24 (B)	64,00 (B)	66,00 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)	82 (A)	BAGIAN ORTALA SETDA
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	Menteri PANRB	ANGKA	70,98 (BB)	71,00 (BB)	72,00 (BB)	75,00 (BB)	78,00 (BB)	80,10 (A)	80,25 (A)	BAGIAN ORTALA SETDA
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Ombudsman Republik Indonesia	ANGKA	95.27	95.27	95.5	95.8	96	96.35	96.75	BAGIAN ORTALA SETDA
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	RENSTRA	ORANG (%)	20 (56,22)	20 (56,28)	20 (56,30)	20 (56,34)	20 (56,37)	20 (56,42)	20 (56,46)	DPPKBP3A
16.9.1 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur											
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	RENSTRA	%	30	30	30	30	30	30	30	DINAS PENCATATAN SIPIL
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	DataBase Kependudukan Bersih (DKB)	%	51.41	52.07	52.75	53,25	53,50	53,75	54	DINAS PENCATATAN SIPIL
TujuanSDGs 17 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya											
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB										
	Pajak daerah (Proxy)	BAPENDA	Rp. 000	0	22,295,880	26,862,180	27,200,000	27,500,000	2,775,000	28,000,000	BAPENDA
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik										
	Dana Bagi Hasil Sawit (Proxy)	DINAS PERTANIAN	Rp.	11,000,000,000	2,986,718,000	1,806,016,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	DINAS PERTANIAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
	Cukai Rokok (Proxy)	BKD Bengkulu Selatan	Rp	8,761,539,417	8,344,543,250	8,344,543,250	#####	8,344,543,250	8,344,543,250	8,344,543,250	DINAS KESEHATAN
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung											
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	DataBase Kependudukan Bersih (DKB)	%	100	100	100	100	100	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MATRIKS II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TUJUAN SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
1.2 Pada Tahun 2030, Mengurangi setidaknya Setengah Proporsi Laki-laki, Perempuan dan Anak-anak dari Semua Usia,yang Hidup dalam Kemiskinan disemua, sesuai dengan Definisi Nasional														
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
KODE : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.01	Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0024	Nama Sub. Kegiatan : Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	1,546.8	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
KODE : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Kode Kegiatan : 2.08.02.2.02	Nama Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0008	Nama Sub. Kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	20	20	20	20	20	20	196.9	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
Kode Kegiatan : 2.08.02.2.02	Nama Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0009	Nama Sub. Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	20	20	20	20	20	20	101.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
KODE : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
1.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	DOKUMEN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DOKUMEN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODE : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Laporan Peristiwa Penting	DOKUMEN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	LAYANAN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODE: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
Kode Kegiatan : 1.06.05.2.02	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0008	Nama Sub Kegiatan :Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Usulan	450	500	550	600	650	700	133.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL
KODE : 1.04.03 PROGRAM : KAWASAN PERMUKIMAN														
Kode Kegiatan : 1.04.03.2.03	Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luasan Di Bawah 10 (sepuluh) HA	Kode Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002	Nama Sub. Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	%	70	69	70	72	75	80	1,010.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KODE : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
Kode Kegiatan : 2.07.04.2.04	Nama Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0002	Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	ORANG	100	100	100	120	120	150	135.0	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
KODE : 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Kode Kegiatan : 1.03.05.2.01	Nama Kegiatan :Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kode Su b Kegiatan : 1.03.05.2.01.0044	Nama Sub Kegiatan :Penyediaan Unit pengolahan setempat	RUMAH TANGGA	40	40	40	40	40	40	4,000.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE : 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
Kode Kegiatan : 1.03.03.2.01	Nama Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Su b Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026	Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	LITER/DETIK	1	1	1	1	1	1	3,429.9	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 2.09.03.2.02	Nama Kegiatan : Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003	Nama Sub. Kegiatan : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	TON	29.85	27.85	27.85	27.85	27.85	27.85	394.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
KODE : 2.17.07 PROGRAM : PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM)														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.17.07.2.01	Nama Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Kode Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0011	Nama Sub. Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	UNIT USAHA	30	30	30	30	30	30	60.5	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
KODE : 3.30.04 PROGRAM : STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOKDAN BARANG PENTING														
Kode Kegiatan : 3.30.04.2.02	Nama Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 3.30.04.2.02.0003	Nama Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	LAPORAN	1	1	1	1	1	1	121.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
KODE : 3.31.02 PROGRAM : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
Kode Kegiatan : 3.31.02.2.01	Nama Kegiatan :	Kode Sub Kegiatan: 3.31.02.2.01.0005	Nama Sub. Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	242.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
KODE: 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.01	Nama Kegiatan : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kode Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046	Nama Sub. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	PAKET	115	115	115	115	115	115	420.0	DAU	SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODE : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.02	Nama Kegiatan : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kode Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062	Nama Sub. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	PAKET	30	30	30	30	30	30	450.0	DAU	SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok														
KODE ;1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 1.06.04.2.01	Nama Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001	Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	ORANG	100	100	110	120	130	140	115.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002	Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang	ORANG	50	100	110	120	130	140	102.5	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005	Nama Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	ORANG	50	50	55	60	65	70	127.5	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010	Nama Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Kedaruratan	ORANG	25	30	35	40	45	50	132.5	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL
KODE :1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
Kode Kegiatan : 1.06.05.2.02	Nama Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0006	Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	ORANG	7000	7000	7500	8000	8500	9000	67.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0008	Nama Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Usulan	450	500	550	600	650	700	133.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL
1.3.1 (a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.														
KODE : 1.02.02 PROGRAM :PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.01	Nama Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026	Nama Sub. Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	95	96	97	98	99	100	5,693.5	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
1.3.1 (b) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan														
KODE: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.07.05.2.01	Nama Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003	Nama Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	ORANG	100	121	133	147	162	178	50.5	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN

TUJUAN SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan,														
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita														
KODE 1.02.02 PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015	Nama Sub. Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	%	18.3	16.9	15.9	15	14.1	13.3	13,291.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
KODE : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Kode Kegiatan : 2.14.04.2.01	Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kode Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018	Nama Sub. Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	UNIT	1	1	1	1	1	1	25.2	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
		Kode Sub Kegiatan: 2.14.04.2.01.0017	Nama Sub. Kegiatan: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	LAPORAN	4	4	4	4	4	4	25.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.14.04.2.02	Nama Kegiatan: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kode Sub Kegiatan: 2.14.04.2.02.0006	Nama Sub. Kegiatan: Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	2	2	2	2	2	2	30.3	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
		Kode Sub Kegiatan: 2.14.04.2.02.0005	Nama Sub. Kegiatan: Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	2	2	2	2	2	2	25.2	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
KODE : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
Kode Kegiatan : 2.14.03.2.03	Nama Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.03.0008	Nama Sub. Kegiatan: Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	LAPORAN	2	2	2	2	2	2	126.2	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
		Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.03.0003	Nama Sub. Kegiatan: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	ORANG	470	470	470	470	470	470	151.5	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.03.0001	Nama Sub. Kegiatan: Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	LAPORAN	18	18	18	18	18	18	126.2	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
Kode Kegiatan : 2.14.03.2.02	Nama Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.02.0004	Nama Sub. Kegiatan: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	ORANG	50	50	50	50	50	50	75.7	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
Kode Kegiatan : 2.14.03.2.01	Nama Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.01.0013	Nama Sub. Kegiatan: Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	DOKUMEN	3	3	3	3	3	3	171.7	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
		Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.01.0012	Nama Sub. Kegiatan: Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DOKUMEN	2	2	2	2	2	2	151.5	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
		Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.01.0014	Nama Sub. Kegiatan: Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan	ORGANISASI	4	4	4	4	4	4	151.5	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.01.0011	Nama Sub. Kegiatan: Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	LAPORAN	2	2	2	2	2	2	151.5	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
		Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.01.0010	Nama Sub. Kegiatan: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	LAPORAN	22	22	22	22	22	22	171.7	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
Kode Kegiatan : 2.14.03.2.04	Nama Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.04.0006	Nama Sub. Kegiatan: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	KAMPUNG	16	16	16	16	16	16	151.5	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
KODE: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Kode Kegiatan : 2.08.02.2.02	Nama Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Kode Sub Kegiatan: 2.08.02.2.02.0003	Nama Sub. Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	LEMBAGA	10	10	10	10	10	10	126.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
Kode Kegiatan : 2.08.02.2.02	Nama Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Kode Sub Kegiatan: 2.08.02.2.02.0008	Nama Sub. Kegiatan: Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	20	20	20	20	20	20	196.9	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.08.02.2.02	Nama Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 2.08.02.2.02.0008	Nama Sub. Kegiatan: Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	ORANG	20	20	20	20	20	20	940.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														
Kode: Program:														
Kode Kegiatan:	Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan :	Nama Sub. Kegiatan :											DINKES
		Kode Sub Kegiatan :	Nama Sub. Kegiatan :											
KODE : 2.12.02 PROGRAM: PENDAFTARAN PENDUDUK														
1.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	DOKUMEN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DOKUMEN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														
KODE: 2.12.03 PROGRAM: PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DOKUMEN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	LAYANAN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODE : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 2.09.03.2.04	Nama Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kode Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002	Nama Sub. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	LAPORAN	1	1	1	1	1	1	479.4	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
KODE : 2.09.05 PROGRAM : PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.09.05.2.01	Nama Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 2.09.05.2.01.0007	Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	92.1	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
KODE : 1.03.05 PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Kode Kegiatan : 1.03.05.2.01	Nama Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0044	Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Unit pengolahan setempat	RUMAH TANGGA	40	40	40	40	40	40	4,000.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE : 1.03.03 PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
Kode Kegiatan : 1.03.03.2.01	Nama Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026	Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	LITER / DETIK	1	1	1	1	1	1	3,429.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE : 1.04.03 PROGRAM : KAWASAN PERMUKIMAN														
Kode Kegiatan : 1.04.03.2.03	Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luasan Di Bawah 10 (sepuluh) HA	Kode Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002	Nama Sub. Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	%	70	69	70	72	75	80	1,010.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KODE : 2.17.07 PROGRAM : PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
Kode Kegiatan : 2.17.07.2.01	Nama Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Kode Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0011	Nama Sub. Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	UNIR USAHA	30	30	30	30	30	30	60.5	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
KODE : 3.30.04 PROGRAM : STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOKDAN BARANG PENTING														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 3.30.04.2.02	Nama Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 3.30.04.2.02.0003	Nama Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	LAPORAN	1	1	1	1	1	1	121.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
KODE : 3.31.02 PROGRAM : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
Kode Kegiatan : 3.31.02.2.01	Nama Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 3.31.02.2.01.0005	Nama Sub. Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	242.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
KODE : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
Kode Kegiatan : 1.06.05.2.02	Nama Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0006	Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	ORANG	7000	7000	7500	8000	8500	9000	67.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan,														
2.2.2 (a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).														
KODE : 2.09.03 PROGRAM: PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 2.09.03.2.04	Nama Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kode Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001	Nama Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	75.7	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan														
2.4.1* Proporsi Areal Pertanian Produktif dan Berkelanjutan														
KODE : 3.27.03 PROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
Kode Kegiatan 3.27.03.2.01	Nama Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kode Sub Kegiatan 3.27.03.2.01.0015	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/ Kota	DOKUMEN	3	3	3	3	3	3	499.8	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERTANIAN
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu														
2.c.1* Indikator anomali harga pangan														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
KODE: 2.09.03 PROGRAM : PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan: 2.09.03.2.01	Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kot a Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kode Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0008	Nama Sub. Kegiatan : Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	222.7	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
KODE : 3.30.04 PROGRAM : STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
Kode Kegiatan: 3.30.04.2.02	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kot a	Kode Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001	Nama Sub. Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	LAPORAN	48	48	48	48	48	48	101.0	APBD	PASAR AMPERA DAN PASAR KUATU	DINAS PERDAGANGAN
		Kode Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003	Nama Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	101.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN

TUJUAN SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia													
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup													
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)													
KODE : 1.02.02 PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan	ORANG	3072	3072	3072	3072	3072	3,222.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										
		Kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0002	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	ORANG	2823	2823	2823	2823	2823	4,141.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
3.2 Pada tahun 2030, Mengahiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat di cegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 100 kh dan angka kematian balita 25 per 1000													
3.2.1 Angka kematian balita (AKBa ; (b) angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH													

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
KODE : 1.02.02 PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0003	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	ORANG	2623	2623	2623	2623	2623	2623	5,736.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											
		Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya														
3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.														
KODE : 1.02.02 PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0012	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	ORANG	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2,165.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.														
KODE : 1.02.02 PROGRAM : UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0011	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	ORANG	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2,607.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional														
3.7.2 Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.														
Kode : 2.14.02 PROGRAM : PENGENDALIAN PENDUDUK														
Kode Kegiatan : 2.14.02.2.01	Nama Kegiatan: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kode Sub Kegiatan: 2.14.02.2.01.0017	Nama Sub. Kegiatan: Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	KEGIATAN	1	1	1	1	1	1	25.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Kode Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0027	Nama Sub.Kegiatan: Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan	3	3	3	3	3	3	20.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).														
KODE : 2.14.02 PROGRAM : PENGENDALIAN PENDUDUK														
Kode Kegiatan : 2.14.02.2.01	Nama Kegiatan: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kode Sub Kegiatan: 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Nama Sub. Kegiatan: Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	KEGIATAN	1	1	1	1	1	1	25.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
		Kode Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0027	Nama Sub.Kegiatan: Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan	3	3	3	3	3	3	20.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
KODE : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
Kode Kegiatan : 2.14.03.2.01	Nama Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Nama Sub. Kegiatan: Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	DOKUMEN	3	3	3	3	3	3	171.7	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan :2.14.03.2.03	Nama Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.03.0003	Nama Sub. Kegiatan: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	ORANG	470	470	470	470	470	470	151.5	DAK NON FISIK BOBK / APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
		Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.03.0016	Nama Sub. Kegiatan: Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	ORANG	65	65	65	65	65	65	151.5	APBD	Bengkulu Selatan	DINAS PPKBP3A
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang														
3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan esensial.														
Kode dan Nama Program 1.02.05 program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan														
Kode Kegiatan : 1.02.05.2.01	Nama Kegiatan Advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kab/kota	Kode Sub Kegiatan 1.02.05.2.01.0001	Nama Sub. Kegiatan :Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DOKUMEN	10	10	10	10	10	10	4,059.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
Kode dan Nama Program 1.02.02 - pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat														
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan Advokasi pemberdayaan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kab/kota	Kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0012	Nama Sub. Kegiatan :Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	ORANG	2296	2296	2296	2296	2296	2296	2,168.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Kode Sub Kegiatan1.02.02.2.02.0011	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	ORANG	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2,607.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
		kode sub kegiatan : 1.02.02.2.02.0008	nama sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertens	ORANG	33880	33880	33880	33880	33880	33880	2,288.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		kode sub kegiatan : 1.02.02.2.02.0009	nama sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	ORANG	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2,245.8	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
		Kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0010	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	ORANG	289	289	289	289	289	289	2,471.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
		Kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0015	Nama Sub: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DOKUMEN	2	2	2	2	2	2	653.9	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINKES
3.8.1.a Unmet Need Pelayanan Kesehatan.														
KODE : 2.14.03 PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
Kode Kegiatan : 2.14.03.2.03	Nama Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 2.14.03.2.03.0003	Nama Sub. Kegiatan: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	ORANG	470	470	470	470	470	470	150.0	DAK NON FISIK BOBK / APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)														
KODE : 1.02.02 PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.01	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah	Kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0026	Nama Sub. Kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	%	95	96	97	98	99	100	5,693.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0011	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	ORANG	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2,607.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
		kode sub kegiatan : 1.02.02.2.02.0008	nama sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	ORANG	33880	33880	33880	33880	33880	33880	2,288.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		kode sub kegiatan : 1.02.02.2.02.0009	nama sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	ORANG	2039	2039	2039	2039	2039	2039	2,245.8	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
		Kode Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0010	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	ORANG	289	289	289	289	289	289	2,471.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.														
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.														
KODE : 1.02.03 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
Kode Kegiatan : 1.02.03.2.02	Nama Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002	Nama Sub. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	ORANG	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1,865.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN

TUJUAN SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
4.1.1.Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.														
KODE : 1.01.02 PROGRAM : PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.01	Nama Kegiatan PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kode Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0029	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	SATUAN PENDIDIKAN	120	120	120	120	120	120	420.0	DAK NON FISIK (BOS)	SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.02	Nama Kegiatan PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kode Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0042	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	SATUAN PENDIDIKAN	35	35	35	35	35	35	450.0	DAK NON FISIK (BOS)	SEKOLAH	
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.03	Nama Kegiatan PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	Kode Sub Kegiatan 1.01.02.2.03.0018	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	SATUAN PENDIDIKAN	120	120	120	120	120	120	340.0	DAK NON FISIK (BOP)	SEKOLAH	
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.04	Nama Kegiatan PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/ KESETARAAN	Kode Sub Kegiatan 1.01.02.2.04.0017	Nama Sub. Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	SATUAN PENDIDIKAN	14	14	14	14	14	14	250.0	DAK NON FISIK (BOP)	SEKOLAH	

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030					
4.1.2.Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.														
KODE : 1.01.02 PROGRAM : PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.01	Nama Kegiatan PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kode Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0050	Nama Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	SATUAN PENDIDIKAN	120	120	120	120	120	120	420.0	DAU	SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.02	Nama Kegiatan PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kode Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0058	Nama Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	SATUAN PENDIDIKAN	35	35	35	35	35	35	450.0	DAU	SEKOLAH	
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.03	Nama Kegiatan PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	Kode Sub Kegiatan 1.01.02.2.03.0047	Nama Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	SATUAN PENDIDIKAN	230	230	230	230	230	230	340.0	DAU	SEKOLAH	
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.04	Nama Kegiatan PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/ KESETARAAN	Kode Sub Kegiatan 1.01.02.2.04.0046	Nama Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta	SATUAN PENDIDIKAN	80	85	88	90	95	100	250.0	DAU	SEKOLAH	
4.5 Pada tahun 2030, disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam														
4.5.1*Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil														
KODE : 1.01.02 PROGRAM : PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Kode Kegiatan : 1.01.02.2.03	Nama Kegiatan PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	Kode Sub Kegiatan 1.01.02.2.03.0047	Nama Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	SATUAN PENDIDIKAN	230	230	230	230	230	230	340.0	DAU	SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.														
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.														
KODE 2.08.03 PROGRAM : PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub.	ORANG	26	26	26	26	26	26	35.0	DAK NON FISIK PPA	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.08.03.2.02.0008	Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota											
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.														
KODE : 2.08.03 PROGRAM : PERLINDUNGAN PEREMPUAN														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.08.03.2.02	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan 2.08.03.2.02.0008	Nama Sub. Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	ORANG	26	26	26	26	26	26	35.0	DAK NON FISIK PPA	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.														
5.5.1*Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.														
KODE: 2.08.02 PROGRAM : PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Kode Kegiatan : 2.08.02.2.02	Nama Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0005	Nama Sub. Kegiatan Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	LEMBAGA	23	23	23	23	23	23	100.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta														
5.6.1*Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan														
KODE : 2.14.03 PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
Kode Kegiatan : 2.14.03.2.03	Nama Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan 2.14.03.2.03.0003	Nama Sub. Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	ORANG	470	470	470	470	470	470	150.0	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A
5.6.2*Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.														
KODE : 2.14.03 PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
Kode Kegiatan : 2.14.03.2.03	Nama Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan 2.14.03.2.03.0003	Nama Sub. Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	ORANG	470	470	470	470	470	470	150.0	DAK NON FISIK BOKB	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A

TUJUAN SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua														
6.1.1* Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabunPersentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.														
KODE : 1.03.03 PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
Kode Kegiatan : 1.03.03.2.01	Nama Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026	Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	LITER/ DETIK	1	1	1	1	1	1	3,429.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok														
6.2.1* Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun														
KODE :1.03.05 PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Kode Kegiatan : 1.03.05.2.01	Nama Kegiatan :Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0044	Nama Sub Kegiatan :Penyediaan Unit pengolahan setempat	RUMAH TANGGA	40	40	40	40	40	40	4,000.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.3.2 (a) Indeks Kualitas Air (IKA)														
KODE : 2.11.03 PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode Kegiatan : 2.11.03.2.01	Nama Kegiatan :Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001	Nama Sub. Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	LAPORAN	24	36	36	36	36	36	186.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Kode Kegiatan : 2.11.03.2.02	Nama Kegiatan :Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0003	Nama Sub. Kegiatan : Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	TITIK		1	1	2	2	2	75.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.														
6.6.1 (a) Indeks Kualitas Lahan														
KODE : 3.28.04 PROGRAM: KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA														
Kode Kegiatan : 3.28.04.2.01	Nama Kegiatan: Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 3.28.04.2.01.0011	Nama Sub. Kegiatan: Perencanaan Pengelolaan TAHURA	DOKUMEN	1	4	1	1	1	1	270.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Kode Sub Kegiatan: 3.28.04.2.01.0014	Nama Sub. Kegiatan: Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	KEGIATAN	12	12	12	12	12	12	720.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		Kode Sub Kegiatan: 3.28.04.2.01.0008	Nama Sub. Kegiatan: Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	KELOMPOK	4	4	4	4	4	4	300.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		Kode Sub Kegiatan: 3.28.04.2.01.0015	Nama Sub. Kegiatan: Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	HEKTAR	0	5	5	5	5	5	500.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua											Indikatif Alokasi	Sumber	Lokasi	Instansi Pelaksana
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Anggaran 5 Tahun	Pendanaan	(6)	(7)	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang														
8.1.1* Laju Pertumbuhan Ekonomi														
KODE 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														
Kode Kegiatan : 3.31.02.2.01	Nama Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan 3.31.02.2.01.0003	Nama Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	226.4	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
Kode 2.17.07 - Nama Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)														
Kode Kegiatan : 2.17.07.2.01	Nama Kegiatan - Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kode Sub Kegiatan 2.17.07.2.01.0011	Nama Sub. Kegiatan - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	UNIT USAHA	30	30	30	30	30	30	99.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
Kode 3.31.02 - Nama Program Perencanaan dan Pembangunan Industri														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.17.05.2.01	Nama Kegiatan : Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kot a	Kode Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005	Nama Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	332.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
Kode Kegiatan : 2.17.05.2.01	Nama Kegiatan : Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kot a	Kode Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005	Nama Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	332.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
8.1.1 (a) PDRB per kapita														
KODE : 3.30.04 PROGRAM : STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
Kode Kegiatan : 3.30.04.2.02	Nama Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kot a	Kode Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001	Nama Sub. Kegiatan - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	LAPORAN	48	48	48	48	48	48	180.0	APBD	PASAR AMPERA DAN PASAR KUATU	DINAS PERDAGANGAN
KODE : 3.30.02 PROGRAM : PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
Kode Kegiatan : 3.30.02.2.02	Nama Kegiatan : Penerbitan tanda daftar gudang	Kode Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001	Nama Sub. Kegiatan - Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	DOKUMEN	12	10	10	10	10	10	124.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya														
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka														
KODE : 2.07.04 PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA														
Kode Kegiatan : 2.07.04.2.01	Nama Kegiatan : Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten	Kode Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002	Nama Sub. Kegiatan : Pelayanan antar Kerja	ORANG	100	100	100	120	120	150	50.5	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
Kode Kegiatan : 2.07.04.2.04	Nama Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kot a	Kode Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0002	Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	ORANG	100	100	100	120	120	150	135.0	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
8.1.1.(a) PDB per kapita														
8.8 Melindungi hak hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.														
8.8.1.a Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional														
KODE : 2.07.05 PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.07.05.2.01	Nama Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003	Nama Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	ORANG	100	121	133	147	162	178	50.5	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN

Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan														
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan Kabupaten														
KODE : 1.03.10 PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN														
Kode Kegiatan : 1.03.10.2.01	Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan 1.03.10.2.01.0029	Nama Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	DOKUMEN	26	26	26	26	26	26	4,290.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	KM	128.92	128.92	128.92	128.92	128.92	128.92	2,525.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	KM	10	10	10	10	10	10	5,050.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	KM	10	10	10	10	10	10	1,010.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	KM	7	7	7	7	7	7	40,400.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	KM	4	4	4	4	4	4	20,209.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	KM	10	10	10	10	10	10	55,550.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	KM	10	10	10	10	10	10	1,010.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan	METER	180	180	180	180	180	180	1,767.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan rutin Jembatan	JEMBATAN	50	50	50	50	50	50	4,545.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara					Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber	Lokasi	Instansi Pelaksana	
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)					Satuan (2)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Anggaran 5 Tahun	Pendanaan	(6)	(7)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH															
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional															
10.1.1 (a) Rasio Gini															
KODE : 2.17.07 PROGRAM : PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
Kode Kegiatan : 2.17.07.2.01	Nama Kegiatan : pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kode Sub Kegiatan :2.17.07.2.01.0004	Nama Sub Kegiatan : Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	UNIT USAHA	200	350	500	550	600	600	148.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERDAGANGAN	
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan															
10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan															
KODE : 2.08.03 PROGRAM : PERLINDUNGAN PEREMPUAN															
Kode Kegiatan : 2.08.03.2.03	Nama Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0005	Nama Sub. Kegiatan : Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	LEMBAGA	10	10	10	10	10	10	47.0	APBD / DAK NON FISIK PPA	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A	
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.															
10.4.1(b) Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan															
KODE 2.07.05 PROGRAM: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL															

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.07.05.2.01	Nama Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003	Nama Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	ORANG	100	121	133	147	162	178	50.5	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN

Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan					Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH															
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh															
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau															
KODE : 1.04.03 PROGRAM : KAWASAN PERMUKIMAN															
Kode Kegiatan : 1.04.03.2.03	Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luasan Di Bawah 10 (sepuluh) HA	Kode Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002	Nama Sub. Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	%	70	69	70	72	75	80	1,010.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin															
11.5.1.* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang															
KODE: 1.06.06 PROGRAM : PENANGANAN BENCANA															
Kode Kegiatan : 1.06.06.2.01	Nama Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001	Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Makanan	PAKET	50	60	65	70	75	80	54.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL	
		Kode Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01..0002	Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Sandang	PAKET	0	60	65	70	75	80	53.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL	
		Kode Sub Kegiatan 1.06.06.2.02.0002	Nama Sub. Kegiatan : Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	ORANG	15	15	15	15	15	15	43.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS SOSIAL	
KODE : 1.05.03 PROGRAM : PENANGGULANGAN BENCANA															
Kode Kegiatan : 1.05.03.2.02	Nama Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kode Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0021	Nama Sub. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	ORANG	30	30	35	35	35	35	500.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BPBD	

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Kode Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003	Nama Sub. Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	ORANG	20	20	25	25	35	35	250.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BPBD
		Kode Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009	Nama Sub. Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	ORANG	80	80	80	90	90	90	500.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BPBD
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.														
11.6.1.(a) Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah														
KODE : 2.11.11 - PROGRAM : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Kode Kegiatan : 2.11.11.2.01	Nama Kegiatan : FASILITAS PEMENUHAN KETENTUAN TERIKAT IZIN USAHA DAN STANDAR TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH	Kode Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0017	Nama Sub. Kegiatan : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST ,SPA,PSEL/PLTS a,RDF	TAHUN	55	60	65	70	75	80	6,000.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
11.6.1.(b) Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah														
KODE : 2.11.03 - PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode Kegiatan : 2.11.03.2.01	Nama Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0007	Nama Sub. Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	LAPORAN	0	8	8	8	8	8	125.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
11.6.2.(a) Indeks Kualitas Udara														
KODE : 2.11.03 PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Kode Kegiatan : 2.11.03.2.01	Nama Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0007	Nama Sub. Kegiatan : Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	LAPORAN	0	8	8	8	8	8	125.0	DAU / DAK	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	
					2025	2026	2027	2028	2029					2030
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional														
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun														
KODE : 2.11.03 PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.11.03.2.01	Nama Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Kode Sub Kegiatan: 2.11.03.2 .01.0002	Nama Sub. Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	12.1	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KODE : 5.01.03 PROGRAM : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
Kode Kegiatan : 5.01.03.2.02	Nama Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kode Sub Kegiatan: 5.01.03.2.02.0006	Nama Sub. Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	370.0	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	BAPPEDA LITBANG
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim														
13.3.1 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.														
KODE : 1.01.03 PROGRAM : PENGEMBANGAN KURIKULUM														
Kode Kegiatan : 1.01.03.2.01	Nama Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kode Sub Kegiatan 1.01.03.2.01.0002	Nama Sub. Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	dokumen	1	1	1	1	1	1	550.0	DAU	DIKBUD	DIKBUD

Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat														
16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP														
Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah														
KODE : 5.02.02 PROHRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
Kode Kegiatan :5.02.02.2.01	Nama Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0001	Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusun KUA dan PPAS	DOKUMEN	2	2	2	2	2	2	1,525.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0002	Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	DOKUMEN	2	2	2	2	2	2	1,528.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0007	Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	DOKUMEN	2	2	2	2	2	2	3,134.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0008	Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	DOKUMEN	2	2	2	2	2	2	3,226.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0009	Nama Sub Kegiatan : Koordinasi & Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	DOKUMEN	2	2	2	2	2	2	803.1	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
Kode Kegiatan : 5.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001	Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	DOKUMEN	12	12	12	12	12	12	428.7	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0004	Nama Sub Kegiatan : Penatausahaan Pembiayaan Daerah	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	448.7	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005	Nama Sub Kegiatan : Koordinasi , Fasilitasi, Asistansi, Sinkronisasi, Suoervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	DOKUMEN	12	12	12	12	12	12	1,444.9	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007	Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	LAPORAN	4	4	4	4	4	4	933.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011	Nama Sub Kegiatan : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	ORANG	41	41	41	41	41	41	1,537.8	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
kode kegiatan : 5.02.02.2.03	Nama Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001	Nama Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	DOKUMEN	4	4	4	4	4	4	1,003.2	DANA ALOKASI UMUM (APBD)	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004	Nama Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LAPORAN	7	2	2	2	2	2	1,622.0	DANA ALOKASI UMUM (APBD)	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005	Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	DOKUMEN	2	4	4	4	4	4	1,798.2	DANA ALOKASI UMUM (APBD)	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011	Nama Sub Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	LAPORAN	41	41	41	41	41	41	706.2	DANA ALOKASI UMUM (APBD)	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
KODE : 5.02.03 PROGRAM : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
Kode Kegiatan : 5.02.03.2.01	Nama Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kode Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006	Nama Sub Kegiatan : Inventarisasi Barang Milik Daerah	LAPORAN	1	1	1	1	1	1	812.5	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007	Nama Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah	LAPORAN	50	30	25	20	20	20	1,775.1	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011	Nama Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	LAPORAN	4	4	4	4	4	4	625.2	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN KEUANGAN DAERAH
KODE : 6.01.02 PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
6.01.02.2.01	Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kode Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007	Nama Sub. Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	83,00	83,50	84,00	84,50	84,90	85,00	673.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	INSPEKTORAT
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B														
KODE : 6.01.03 PROGRAM : PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
Kode Kegiatan : 6.01.03.2.02	Nama Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Kode Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002	Nama Sub. Kegiatan Pendampingan , Asistensi , Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PERSENTASE	24	28	29	30	31	35	1,972.1	Apbd	KAB. BENGKULU SELATAN	INSPEKTORAT
Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan														
KODE : 4.01.01 PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kode Kegiatan : 4.01.01.2.13	Nama Kegiatan : PENATAAN ORGANISASI	Kode Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003	Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	NILAI LAPORAN KINERJA (LKjIP)	11	12	13	14	15	15	600.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BAGIAN ORTALA SETDA
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B														
KODE : 4.01.0 PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kode Kegiatan : 4.01.01.2.13	Nama Kegiatan : PENATAAN ORGANISASI	Kode Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003	Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	NILAI INDEKS RB	71,00 (BB)	72,00 (BB)	75,00 (BB)	78,00 (BB)	80,10 (A)	80,25 (A)	600.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BAGIAN ORTALA SETDA
16.6.2(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik														
Kode Kegiatan : 4.01.01.2.13	Nama Kegiatan : PENATAAN ORGANISASI	Kode Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002	Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Indeks Pelayanan Publik	3.97	4	4.2	4.5	4.75	5	300.0	APBD	Kab. Bengkulu Selatan	BAGIAN ORTALA SETDA
		Kode Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002	Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Kepatuhan Maladministrasi Pelayanan Publik	95.27	95.5	95.8	96	96.35	96.75	300.0	APBD	Kab. Bengkulu Selatan	
KODE : 4.01.01 PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 4.01.01.2.13	Nama Kegiatan : PENATAAN ORGANISASI	Kode Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002	Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	NILAI INDEKS PELAYANAN PUBLIK	3.97	4	4.2	4.5	4.75	5	300.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BAGIAN ORTALA SETDA
		Kode Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002	Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	NILAI KEPATUHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK	95.27	95.5	95.8	96	96.35	96.75	300.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	BAGIAN ORTALA SETDA

16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan

16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kode Kegiatan : 2.08.02.2.02	Nama Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0005	Nama Sub. Kegiatan Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	LEMBAGA	23	23	23	23	23	23	100.0	APBD	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PPKBP3A

16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran

16.9.1 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur

KODE : 2.12.02 PROGRAM : PENDAFTARAN PENDUDUK														
2.12.02.01	Pelayanan Pendafrtan Penduduk	2.12.02.2.01.0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	DOKUMEN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBN	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DOKUMEN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBN	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

16.9.1 (b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

KODE : 2.12.03 PROGRAM : PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DOKUMEN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBN	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	LAYANAN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBN	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TujuanSDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan											
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya											
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya											
Pajak Daerah (Proxy)											
KODE : 5.02.04 PROGRAM : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 5.02.04.2.01	Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kode Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002	Nama Sub. Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	DOKUMEN	5	2	2	2	2	2	606.0	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003	Nama Sub. Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	LAPORAN	11	12	12	12	12	12	404.0	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006	Nama Sub. Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	LAPORAN	1	1	1	1	1	1	303.0	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009	Nama Sub. Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	LAYANAN	2	2	2	2	2	2	151.5	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013	Nama Sub. Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	DOKUEN	2	2	2	2	2	2	505.0	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Kode Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0015	Nama Sub. Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	LAPORAN	2	2	2	2	2	2	505.0	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik														
Dana Bagi Hasil sawit (Proxy)														
KODE : 3.27.03 NPROGRAM : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
Kode Kegiatan : 3.27.03.2.01	Nama Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	Kode Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003	Nama Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung pertanian lainnya	LAPORAN	4	4	4	4	4	4	20.0	DANA BAGI HASIL SAWIT	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PERTANIAN
KODE: 2.07.05 PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 2.07.05.2.01	Nama Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003	Nama Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	ORANG	100	121	133	147	162	178	50.5	DAU	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN
KODE : 1.03.10 PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN														
Kode Kegiatan : 1.03.10.2.01	Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	KM	10	10	10	10	10	10	9.7	DBH	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Cukai Rokok (Proxy)														
KODE : 1.02.02 PROGRAM : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah	Kode Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026	Nama Sub. Kegiatan : pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	%	95	96	97	98	99	100	41,722.0	Dana Bagi Hasil Cukai Rokok	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KESEHATAN
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara														
17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).														
KODE : 2.12.03 PROGRAM : PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	DOKUMEN	11	11	11	11	p	11	126.2	APBN	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	LAYANAN	11	11	11	11	11	11	126.2	APBN	KAB. BENGKULU SELATAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



MATRIKS 1 DAN MATRIKS 2B KABUPATEN KAUR



Matrik 1 Target Pencapaian Indikator Tujuan TPB/SDGs Kabupaten Kaur

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.2 Pada Tahun 2030, Mengurangi setidaknya Setengah Proporsi Laki-laki, Perempuan dan Anak-anak dari Semua Usia,yang Hidup dalam Kemiskinan disemua,											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran.	%	17.12	16.6	15.62	14.69	13.81	12.99	11.85	
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya											
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor dan SUSENAS Modul Konsumsi dan Pengeluaran.	%								
	Capaian SPM Urusan Pendidikan		%	64.55	64.25	70.00	72.00	75.00	80.00	85.00	Dinas Pendidikan
	Capaian SPM Urusan Kesehatan		%	94.13	95	95.5	95.8	96	96.2	96.4	Dinas Kesehatan
	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum		%	75	77.5	78.5	80.5	81.75	83	85	Dinas PUPR
	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat		%	55	58	60	63	65	70	75	Dinas Perkim
	Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas		%	90	90	90	90	90	90	90	Satpol PP
	Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas		%	90	90	90	90	90	90	90	Damkar
	Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas		%	90	90	90	90	90	90	90	BPBD

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	1. BPS: Sensus Penduduk 2. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor. 3. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).	%								

Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian											
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	1. Kementerian Kesehatan- Riset kesehatan dasar/ Survei Kesehatan Indonesia 2. Kementerian Kesehatan- Direktorat Bina Gizi melalui Pemantauan Status Gizi (PSG).	Angka	15,9	14,79	13,8	12,5	11,00	10,8	9,5	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	1. Kementerian Kesehatan- Riset kesehatan dasar/ Survei Kesehatan Indonesia; 2. Kementerian Kesehatan- Direktorat Bina Gizi melalui Pemantauan Status Gizi (PSG).	Angka	15,9	14,79	13,8	12,5	11,00	10,8	9,5	Dinas Kesehatan
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan											

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	Badan Pusat Statistik Provinsi									

Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup											
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.	Orang	2.312	1.969	1.97	1.971	1.972	1.973	1.974	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi											
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Kementerian Kesehatan: Laporan Tahunan.	Orang	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	Kementerian Kesehatan: laporan administratif tahunan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.									
	Intevensi penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis)		Persentase	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Dinas Kesehatan
	Intevensi penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)		Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar											
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1. BPJS Kesehatan; 2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian.	Orang	7869	8450	8500	8600	8700	8800	8900	Dinas Kesehatan

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.	Orang	129,416	129,417	129,418	129,419	129,420	129,421	129,422	Dinas Kesehatan

Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat											
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan,											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) Kor.	%								
4.5 Pada tahun 2030, disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) Kor.									
	Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD		Angka	97.27	97.30	97.35	97.42	97.45	97.51	97.55	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP Sederajat		Angka	87.95	89.55	90.05	90.55	91.75	92.05	92.55	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA Sederajat		Angka	99.65	99.70	99.75	99.77	99.82	99.85	99.88	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Perguruan Tinggi Sederajat		Angka								Dinas Pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan,											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) Kor.	%	97.52	97.55	97.65	97.75	97.92	98.00	98.30	Dinas Pendidikan

Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan											

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.									

Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua											
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat											
6.2.1*	Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Data Industri yang melakukan swapantau melalui Aplikasi SIMPEL dan melaporkannya secara berkala.	%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	Dinas PUPR
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Data Industri yang melakukan swapantau melalui Aplikasi SIMPEL dan melaporkannya secara berkala.	%	2%	2%	2.25%	2.84%	10.25%	11.65%	12%	Dinas PUPR

Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM); 2. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).	Rasio	90.1	92.3	93.57	94.27	94.57	95.37	95.75	Dinas Perkim
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).	-								

Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Badan Pusat Statistik: Publikasi PDB Triwulanan dan Pendapatan Nasional Indonesia sesuai tahun berjalan.	%								BPS
8.1.1.(a)	PDRB Per Kapita	BPS	Rp. juta	37.42	38,3-40,32	41,26-43,43	41,26-43,43	43,93-46,24	46,76-49,22	49,77-52,39	BPS

Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong											
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi											
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Badan Pusat Statistik (BPS).	%								

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Nilai produksi industri* (Proxi)	Badan Pusat Statistik (BPS).	Rp. juta	181,63	182,40	183,45	184,52	185,66	186,69	187,71	Dikoperindag
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Kementerian Komunikasi dan Informatika.	-								Diskominfo

Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat											
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran.	%	17.12	16.6	15.62	14.69	13.81	12.99	11.85	
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).	%								

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1[b]	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	1. BPJS Ketenagakerjaan: data jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan untuk program JKK dan JKm. 2. BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk data estimasi populasi jumlah semesta penduduk bekerja.	%	1. 2.778	2.778	2.878	2.988	3000	3.578	3.778	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Badan Pusat Statistik: Survei ekonomi sosial nasional (Susenas).	%								
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial											
11.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Perhitungan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB.	Orang	32	30	28	25	23	20	18	BPBD

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 16 : Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses											
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat											
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-								
	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah		-	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	OPD								
	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kaur (Proxi)		Predikat	B	BB	BB	A	A	A	A	Sekertariat Daerah
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	%	CC	B	BB	BB	A	A	A	
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Ombudsman RI	Angka	96.14	96.17	96.20	96.23	96.25	96.27	96.29	Sekertariat Daerah
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	orang (%)								
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);	%	97.93	97.95	98.0	97.99	98.01	98.03	98.05	Disdukcapil

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas);	%	95.51	99.50	97	97.02	97.04	97.06	97.08	Disdukcapil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	1. Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor; 2. Kementerian Dalam Negeri: Data Pencatatan Sipil.	%	95.51	99.50	97	97.02	97.04	97.06	97.08	Disdukcapil

TujuanSDGs 17 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Badan Pusat Statistik.									BPKAD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	1. Kementerian Keuangan; 2. Kementerian Dalam Negeri; 3. Badan Pusat Statistik untuk data PDB dan PDRB.	%								
	Laju pertumbuhan PDRB (Proxi)		Rp. juta	103.79	108.09	112.39	116.69	120.99	125.29	129.59	BPKAD
	Pajak daerah (Proxi)		Rp. juta	8,897.61	9,342.49	9,809.61	10,300.09	10,815.09	11,355.84	11,923.64	BPKAD

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Kementerian Keuangan untuk tingkat nasional dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Bappeda untuk tingkat daerah.	%	2.00	2.20	2.42	2.66	2.92	3.22	3.54	BPKAD

Matriks IIB : Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kaur															
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH															
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar															
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
1.05.04.201	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	1.05.04.201.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	90	90	90	90	90	90	Rp 268,967,250	APBD	Dinas Damkar	Dinas Damkar	
		1.05.04.201.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	90	90	90	90	90	90	Rp 2,747,195,000	APBD	Dinas Damkar	Dinas Damkar	
		1.06.04.1.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	90	90	90	90	90	90	Rp 328,792,000	APBD	Dinas Damkar	Dinas Damkar	
		1.05.04.201.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	90	90	90	90	90	90	Rp 325,298,000	APBD	Dinas Damkar	Dinas Damkar	
		1.05.04.201.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	%	90	90	90	90	90	90	Rp 335,780,000	APBD	Dinas Damkar	Dinas Damkar	
		1.05.04.201.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	55	55	55	55	55	55	Rp 1,336,785,000	APBD	Dinas Damkar	Dinas Damkar	
1.05.04.204	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.204.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	Desa/ Kelurahan	195	195	195	195	195	195	Rp 994,280,356	APBD	Dinas Damkar	Dinas Damkar	
		1.05.04.204.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebaka	Desa/ Kelurahan	195	195	195	195	195	195	Rp 518,445,092	APBD	Dinas Damkar	Dinas Damkar	
1.05.04 Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas, 11.5.1.* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang															
1.06.04. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
1.05.03.2.02	Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100	125	150	175	200	225	Rp800,000,000	APBD	15 kecamatan	BPBD	
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur, 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah, 16.9.1.(b)															
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	%	97.95	97.97	97.99	98.01	98.03	98.05	Rp 165,000,000	APBD	Dinas Dukcapil	Dukcapil	
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
2.12.03.2.01	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0002	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	%	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	Rp 124,172,521	APBD	Dinas Dukcapil	Dukcapil	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
2.12.04.2.01.0001	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	%	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	Rp 107,027,998	APBD	Dinas Dukcapil	Dukcapil	
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat,															
1.06.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
		1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	150	150	150	150	150	150	2.095.287.900,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	31	31	31	31	31	31	2.657.500.000,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	110	110	110	110	110	110	992.500.000,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	120	120	120	120	120	120	991.999.700,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	250	250	250	250	250	250	80.811.246,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	180	180	180	180	180	180	250.290.400,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	300	300	300	300	300	300	50.359.755,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	30.550.000,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	10	10	10	10	10	10	73.918.646,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	48.397.606,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	250	250	250	250	250	250	103.122.526,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	250	250	250	250	250	250	39.892.113,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	6	6	6	6	6	6	4.233.025.324,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	300	300	300	300	300	300	3.641.579.100,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	3	3	3	3	3	3	2.066.381.600,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	90	90	90	90	90	90	1.028.700.000,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	165	165	165	165	165	165	249.599.400,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	37.267.854,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	150	150	150	150	150	150	91.512.852,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	10	10	10	10	10	10	591.833.000,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik	5378	5378	5378	5378	5378	5378	375.144.432,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	1	1	1	1	1	1	300.490.700,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	270	270	270	270	270	270	350.000.000,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	195	195	195	195	195	195	199.985.600,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1	1	1	1	1	1	146.649.300,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	205	205	205	205	205	205	63.324.993,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	5	5	5	5	5	5	69.638.353,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	10	10	10	10	10	10	71.777.503,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik	500	500	500	500	500	500	153.680.920,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	100	100	100	100	100	100	123.750.000,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	18	18	18	18	18	18	36.730.251,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	180.241.800,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1	1	1	1	1	1	423.803.700,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	150	150	150	150	150	150	2.060.421.679,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	6	6	6	6	6	6	600.000.000,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	25	25	25	25	25	25	1.300.801.000,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	5	5	5	5	5	5	1.511.498.550,00	APBD	Kab. Kaur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B, 16.6.1.(c) Nilai Evaluasi RB Pemerintah Kabupaten Kaur, 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik														
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN														
4.01.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	OPD	48	48	48	48	48	48	650,000,000	APBD	Setda Kab Kaur	Bagian Organisasi Setda
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	OPD	8	8	8	8	8	8	450,000,000	APBD	Setda Kab Kaur	Bagian Organisasi Setda
		5.1.02.02.01.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Menyusun rencana Aksi Reformasi Birokrasi)	OPD	12	12	12	12	12	12	500,000,000	APBD	Setda Kab Kaur	Bagian Organisasi Setda
		5.1.02.02.01.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata Laksana	OPD	8	8	8	8	8	8	300,000,000	APBD	Setda Kab Kaur	Bagian Organisasi Setda
		5.1.02.02.01.0005	koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintahan Daerah (Bimtek dan Coaching Klinik Lakip Organisasi Perangkat	OPD	46	46	46	46	46	46	500,000,000	APBD	Setda Kab Kaur	Bagian Organisasi Setda
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur														
3.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	12	14	16	18	19	20	300 Juta	APBD	Gedung Pengelolaha n Industri Pondok Pusaka	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP														
5.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH														
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0001	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	71,588,000	APBD	Kantor BPKAD	BPKAD
		5.02.02.2.03.0002	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	1	1	1	1	1	1	165,220,000	APBD	Kantor BPKAD	BPKAD
		5.02.02.2.03.0003	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	1	1	1	1	1	1	82,720,000	APBD	Kantor BPKAD	BPKAD
		5.02.02.2.03.0004	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	1	1	1	1	1	679,846,000	APBD	Kantor BPKAD	BPKAD
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik														
5.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0001	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1,016,557,860	APBD	Kantor BPKAD	BPKAD
		5.02.04.2.01.0002	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	467,500,000	APBD	Kantor BPKAD	BPKAD
		5.02.04.2.01.0003	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	467,500,000	APBD	Kantor BPKAD	BPKAD
		5.02.04.2.01.0004	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	1	1	1	1	1	1	467,500,000	APBD	Kantor BPKAD	BPKAD
		5.02.04.2.01.0005	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1,397,000,000	APBD	Kantor BPKAD	BPKAD
		5.02.04.2.01.0006	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	770,000,000	APBD	Kantor BPKAD	BPKAD
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar														
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Rp 300,000,000.00	APBD	Dinas Perkimtan	Dinas Perkimtan
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang	50	50	50	50	50	50	Rp 132,500,000.00	APBD	Dinas Perkimtan	Dinas Perkimtan
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit	5	5	5	5	5	5	Rp 480,000,000.00	APBD	Dinas Perkimtan	Dinas Perkimtan
7.1.1* Rasio Elektrifikasi														
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	1	Rp 869,898,464.00	APBD	Dinas Perkimtan	Dinas Perkimtan
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar														
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan ketertiban Umum	%	91	93	93	94	95	96	Rp 15,947,126.00	APBD	Dinas Satpolpp	Dinas Satpolpp
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan satuan perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	%	89	91	94	94	96	97	Rp 15,367,191.00	APBD	Dinas Satpolpp	Dinas Satpolpp
		1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	95	95	98	98	100	100	Rp 11,521,151.00	APBD	Dinas Satpolpp	Dinas Satpolpp

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
		1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	%	80	86	90	95	98	100	Rp 907,006,752.00	APBD	Dinas Satpolpp	Dinas Satpolpp
		1.05.02.2.01.16	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Berdasarkan perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	%	84	86	89	94	96	98	Rp337,053,181.00	APBD	Dinas Satpolpp	Dinas Satpolpp
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/wali Kota	1.05.02.2.02.10	Sosialisasi Penegaka Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Desa/ Kelurahan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	Rp 16,734,492.00	APBD	Dinas Satpolpp	Dinas Satpolpp
		1.05.02.2.02.12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Desa/ Kelurahan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	Rp 31,113,986.00	APBD	Dinas Satpolpp	Dinas Satpolpp
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar														
1.2.02 PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.2.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.2.02.02.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	2120 Orang	2130 Orang	2140 Orang	2150 Orang	2160 Orang	2170 Orang	35,828,970.00	1. DAK Non Fisik- BOKKB- BOK, 2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1733 Orang	1743 Orang	1753 Orang	1763 Orang	1773 Orang	1783 Orang	491,725,000.00	1.DAK Non Fisik- BOKKB- BOK , 2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	1626 Orang	1636 Orang	1706 Orang	1716 Orang	1726 Orang	1736 Orang	14,700,000.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	8149 Orang	8159 Orang	8169 Orang	8179 Orang	8189 Orang	8199 Orang	55,279,310.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	11317 Orang	11337 Orang	11327 Orang	11347 Orang	11357 Orang	11367 Orang	23,368,696.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	18351 Orang	18361 Orang	18371 Orang	18381 Orang	18391 Orang	18401 Orang	28,769,666.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	360 Orang	370 Orang	380 Orang	390 Orang	400 Orang	410 Orang	314,714,163.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	700	709	719 Orang	729 Orang	739 Orang	749 Orang	137,289,465.00	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	13872	13872	13882	13892	13902	13912	28,346,968.00	1. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK , 2.Pendapata n Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	6200	6284	6294	6304	6314	6324	171,631,020.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	370	370	360	350	340	330	286,103,785.00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Orang	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	417,645,272.00	1. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK , 2.Pendapata n Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12	12	12	12	12	12	11,561,870,000.00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	16 Puskesmas di wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan

2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, 2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														
1.2.02 PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.2.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	12	12	12	12	12	12	230,393,936.00	1. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, 2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	718,566,486.00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	253,718,864.00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan, 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang, 3.3.5* Jumlah orang yang														
1.2.02 PROGRAM PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.2.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	16	16	16	16	16	16	189,378,684.00	1. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, 2. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Orang	8450	8500	8600	8700	8800	8900	12,812,077,946.00	1. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, 2. Pendapata n Bagi Hasil Pajak Rokok, 3. Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/ Nonkapitasi	Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1733 Orang	1743 Orang	1753 Orang	1763 Orang	1773 Orang	1783 Orang	491,725,000.00	1. DAK Non Fisik- BOKKB- BOK , 2. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	wilayah Kabupaten Kaur	Dinas Kesehatan
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, 6.2.1* Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun, 6.1.1* Persentase rumah														
1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
1.03.03.2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota	1.03.03.2.01.28	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit	500	500	500	500	500	500	15,000,000,000	APBD	Seluruh wilayah Kab. Kaur	DPUPR
		1.03.03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit	200	200	200	200	200	200	6,000,000,000	APBD	Seluruh wilayah Kab. Kaur	DPUPR
1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
1.03.05.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.02.01.22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	500	500	500	500	500	500	45,000,000,000	APBD	Seluruh wilayah Kab. Kaur	DPUPR
		1.03.05.02.01.38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	300	300	300	300	300	300	18,000,000,000	APBD	Seluruh wilayah Kab. Kaur	DPUPR
1.3.1[b] Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan														
2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
2.07.05.2.02	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	2.778	2.878	2.988	3.000	3.578	3.778	1,633,464,000	DAU	Kabupaten Kaur	Dinas Nakertrans
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Km	0.2	0.5	1	1.5	2	2.5	Rp5,386,676,185	DAU Umum, dan DBH	Kec. PD Guci Hilir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	2	3	4	5	6	7	Rp5,625,447,055	DAU Umum, dan DBH	Kec. Kaur Utara, Kec. PD Guci Hilir, Kec. PD Guci Hulu,	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
		1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	1	2	3	4	5	6	Rp1,000,000,000	DAU Umum, dan DBH	Kab. Kaur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	4	5	6	7	8	9	Rp3,190,981,037	DAU Umum, dan DBH	Kec. Kaur Selatan, Kec. Kaur Utara, Kec. Luas, Kec. Tetap, Kec. Tj Kemuning	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	2	3	4	5	6	7	Rp665,804,191	DAU Umum, dan DBH	Kab. Kaur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah	10	10	10	10	10	10	Rp1,037,250,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Rp 1,663,087,265	Dana Alokasi Umum (DAU Umum)	Kab. Kaur	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Rp 5,552,840,455	Dana Alokasi Umum (DAU Umum)	Kab. Kaur	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga	1	2	3	4	5	6	Rp 500,000,000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Kab. Kaur	DINAS SOSIAL
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	120	150	160	170	180	200	Rp 96,065,175	DAU (Dana Alokasi Umum)	Kab. Kaur	DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang	100	120	150	160	170	180	Rp 112,500,000	DAU (Dana Alokasi Umum), Dana Bagi Hasil	Kab. Kaur	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Orang	7	10	12	14	16	18	Rp 154,934,260	DAU (Dana Alokasi Umum), Dana Bagi Hasil	Kab. Kaur	DINAS SOSIAL
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	50	60	70	80	90	100	Rp 144,512,000	DAU (Dana Alokasi Umum)	Kab. Kaur	DINAS SOSIAL
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Orang	100	120	150	160	170	180	Rp 569,686,225	DAU (Dana Alokasi Umum), DAU yang ditentukan Bidang Kesehatan	Kab. Kaur	DINAS SOSIAL
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	2	4	6	8	10	12	Rp 155,789,950	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2	2	2	2	2	2	Rp 78,705,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Rp 356,152,260	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Ketahanan Pangan
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	1	1	1	1	1	Rp 1,999,851,600	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita														
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang	120	150	160	170	180	200	Rp 1,093,894,740	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kepala Keluarga	30	30	30	30	30	30	Rp 645,163,790	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	1	Rp 259,867,165	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Pertanian
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Ton	8	16	20	22	25	30	Rp 52,489,480	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Pertanian
		3.27.02.2.01.0010	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata	12000	30000	40000	50000	60000	70000	Rp 52,489,480	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Pertanian
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	70	70	70	70	70	70	Rp 251,849,950	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Pertanian
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	10	20	30	40	50	60	Rp 2,375,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Perikanan
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	1	2	3	4	5	6	Rp 804,043,160	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Perikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	1	2	3	4	5	6	Rp 1,759,750,000	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kaur	Dinas Perikanan



MATRIKS 1 DAN MATRIKS 2B KABUPATEN KEPAHANG



Matrik 2b Target Indikator Tujuan TPB/SDGs Kabupaten Kepahiang											
Kode Indikator (3)	Target/Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar Baseline (2024) (7)	Target Pencapaian (8)						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nama Tujuan SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.2 Pada Tahun 2030, Mengurangi setidaknya Setengah Proporsi Laki-laki, Perempuan dan Anak-anak dari Semua Usia,yang Hidup dalam Kemiskinan disemua, sesuai dengan Definisi Nasional											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	12.9	10.38	9.88	9.38	8.88	8.38	7.88	-DINKES -DIKBUD -PUSKESMAS -DINSOS -DPPKBP3A -DUKCAPIL -DPMD DISHUB DPKP -DINAS PERTANIAN -DISPRINAKER
1.4 Pada Tahun 2030, Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1 (a)	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
1.4.1 (b)	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	81.5%	80.0%	85.0%	90.0%	93.0%	95.0%	95.0%	DINKES
1.4.1 (c)	Persentase Rasio Akseptor KB	DPPKBP3A	Rasio	79.43	79.50	79.60	79.70	79.80	79.90	80.01	DPPKBP3A
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Perjanjian Kinerja Thn 2022 DPUPR	%	91.8	93.3	94.5	95.7	97	98.3	-	DPUPR
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi	Perjanjian Kinerja Thn 2022 DPUPR	%	66.15	67.5	69	70.5	72	73.5	-	DPUPR
1.4.1 (f)	Angka partisipasi sekolah (APS) 7-15 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepahiang	%	98.77	99.03	99.28	99.53	99.78	100.00	100.00	DIKBUD
1.4.1 (g)	Pensentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun	DUKCAPIL	%	98.7	99.5	99.9	100	100	100	100	DUKCAPIL
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator (3)	Target/Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar Baseline (2024) (7)	Target Pencapaian (8)						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nama Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan											
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang diseakati secara internsional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	17	17.4 - 13.2	14.3 - 10.1	11.6 - 7.8	8.3 - 6.3	6.6 - 3.4	3.6 - 0.0	DINKES
2.2.2*	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	91.56	91	92	93	94	95	100	DINKES
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim											
2.c.1*	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	%	65.61	89.3	88.9	88.5	88	87.5	87.5	DPKP
Nama Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
3.1.2*	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, turberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	per 1000	1 per 1000	1 per 1000	1 per 1000	1 per 1000	1 per 1000	1 per 1000	1 per 1000	DINKES
3.3.5*	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
3.8 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
3.8.2. (a)	Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	98.16	73	80	90	95	98	100	DINKES
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	<10	<11	<10,2	<9,2	<8,0	<7,5	<7	DINKES
Nama Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua											
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.5 Pada tahun 2030, disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan											

Kode Indikator (3)	Target/Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar Baseline (2024) (7)	Target Pencapaian (8)						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas (Angka partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepahiang	%	98.77	99.03	99.28	99.53	99.78	100	100	DIKBUD
4.5.1* (a)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APS) pada tingkat SD/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepahiang	%	99.98	99.98	100	100	100	100	100	DIKBUD
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nama Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan kaum Perempuan											
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nama Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua											
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
6.2.1	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi	DPUPR	%	66.15	67.5	69	70.5	72	73.5	-	DPUPR
Nama Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern											
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nama Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Prodiktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	%		4.42	4.56	4.7	4.84	4.98	4.98	BPS
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	BPS	Rp. juta		42.47 - 45.02	44.02 - 47.72	46.72 - 50.59	49.59 - 53.62	52.62 - 56.84	55.84 - 60.25	BPS
Nama Tujuan SDGs 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi											

Kode Indikator (3)	Target/Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar Baseline (2024) (7)	Target Pencapaian (8)						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang											
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	%	6.65	6.75	6.85	6.95	7.05	7.15	7.15	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nama Tujuan SDGs 10 : Mengurangi kesenjangan intra-dan antar negara											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1. (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (Jumlah rumah tidak layak huni)	DPUPR	Unit	1.615	1.565	1.515	1.465	1.415	1.365	1.315	DPUPR
Nama Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan											
11.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	orang	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
Nama Tujuan SDGs 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, Akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan											
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1.(a)	Opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten.	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD KEUANGAN
16.6.1.(b)	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepahiang	RPJMD Kabupaten Kepahiang	Predikat	B	B	B	B	B	B	B	BAG. ORGANISASI

Kode Indikator (3)	Target/Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar Baseline (2024) (7)	Target Pencapaian (8)						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.6.1.(c)	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten.	Inspektorat	NILAI	B	B	B	B	B	B	B	INSPEKTORAT
16.6.2.(a)	Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Kepahiang	Bag. Organisasi	ZONA	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	BAG. ORGANISASI
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	BPS	orang	1	1	1	1	1	1	1	DPPKBP3A
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS	%	95.98	96.98	97.98	98.98	99.98	100	100	BPS
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Renstra DUKCAPIL Kab. Kepahiang	%	98.7	99.5	99.9	100	100	100	100	DUKCAPIL
TujuanSDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan											
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	RPJMD Kabupaten Kepahiang	Rp		886,781,869,783.00	666,268,362,350.26	680,254,244,312.60	694,317,317,390.00	708,909,691,377.64	0	BKD KEUANGAN
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB										
	Laju pertumbuhan PDRB	RPJMD Kabupaten Kepahiang	%		4.42	4.56	4.7	4.84	4.98	0	BKD KEUANGAN
	Pajak daerah	RPJMD Kabupaten Kepahiang	Rp. 000		17,415,902,737.00	16,509,179,239.43	17,128,784,025.34	17,776,062,993.00	18,452,438,411.13	0	BKD KEUANGAN
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	RPJMD Kabupaten Kepahiang	Rp		69,027,547,124.00	69,859,852,647.28	71,917,564,415.56	73,813,903,895.02	75,996,209,612.76	0	BKD KEUANGAN

Matrik 2b Target Indikator Tujuan TPB/SDGs Kabupaten Kepahiang											
Kode Indikator (3)	Target/Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar Baseline (2024) (7)	Target Pencapaian (8)						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nama Tujuan SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.2 Pada Tahun 2030, Mengurangi setidaknya Setengah Proporsi Laki-laki, Perempuan dan Anak-anak dari Semua Usia,yang Hidup dalam Kemiskinan disemua, sesuai dengan Definisi Nasional											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	12.9	10.38	9.88	9.38	8.88	8.38	7.88	-DINKES -DIKBUD -PUSKESMAS -DINSOS -DPPKBP3A -DUKCAPIL -DPMD DISHUB DPKP -DINAS PERTANIAN -DISPRINAKER
1.4 Pada Tahun 2030, Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1 (a)	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
1.4.1 (b)	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	81.5%	80.0%	85.0%	90.0%	93.0%	95.0%	95.0%	DINKES
1.4.1 (c)	Persentase Rasio Akseptor KB	DPPKBP3A	Rasio	79.43	79.50	79.60	79.70	79.80	79.90	80.01	DPPKBP3A
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Perjanjian Kinerja Thn 2022 DPUPR	%	91.8	93.3	94.5	95.7	97	98.3	-	DPUPR
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi	Perjanjian Kinerja Thn 2022 DPUPR	%	66.15	67.5	69	70.5	72	73.5	-	DPUPR
1.4.1 (f)	Angka partisipasi sekolah (APS) 7-15 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepahiang	%	98.77	99.03	99.28	99.53	99.78	100.00	100.00	DIKBUD
1.4.1 (g)	Pensentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun	DUKCAPIL	%	98.7	99.5	99.9	100	100	100	100	DUKCAPIL
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Indikator (3)	Target/Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar Baseline (2024) (7)	Target Pencapaian (8)						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nama Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan											
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang diseakati secara internsional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	17	17.4 - 13.2	14.3 - 10.1	11.6 - 7.8	8.3 - 6.3	6.6 - 3.4	3.6 - 0.0	DINKES
2.2.2*	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	91.56	91	92	93	94	95	100	DINKES
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim											
2.c.1*	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	%	65.61	89.3	88.9	88.5	88	87.5	87.5	DPKP
Nama Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
3.1.2*	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, turberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	per 1000	1 per 1000	1 per 1000	1 per 1000	1 per 1000	1 per 1000	1 per 1000	1 per 1000	DINKES
3.3.5*	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
3.8 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
3.8.2. (a)	Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	98.16	73	80	90	95	98	100	DINKES
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun	Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang	%	<10	<11	<10,2	<9,2	<8,0	<7,5	<7	DINKES
Nama Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua											
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4.5 Pada tahun 2030, disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan											

Kode Indikator (3)	Target/Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar Baseline (2024) (7)	Target Pencapaian (8)						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas (Angka partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepahiang	%	98.77	99.03	99.28	99.53	99.78	100	100	DIKBUD
4.5.1* (a)	Rasio Angka Partisipasi Murni (APS) pada tingkat SD/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kepahiang	%	99.98	99.98	100	100	100	100	100	DIKBUD
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nama Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan kaum Perempuan											
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nama Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua											
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
6.2.1	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi	DPUPR	%	66.15	67.5	69	70.5	72	73.5	-	DPUPR
Nama Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern											
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nama Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Prodiktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	%		4.42	4.56	4.7	4.84	4.98	4.98	BPS
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	BPS	Rp. juta		42.47 - 45.02	44.02 - 47.72	46.72 - 50.59	49.59 - 53.62	52.62 - 56.84	55.84 - 60.25	BPS
Nama Tujuan SDGs 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi											

Kode Indikator (3)	Target/Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar Baseline (2024) (7)	Target Pencapaian (8)						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang											
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	%	6.65	6.75	6.85	6.95	7.05	7.15	7.15	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nama Tujuan SDGs 10 : Mengurangi kesenjangan intra-dan antar negara											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10.1.1. (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (Jumlah rumah tidak layak huni)	DPUPR	Unit	1.615	1.565	1.515	1.465	1.415	1.365	1.315	DPUPR
Nama Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan											
11.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	orang	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
Nama Tujuan SDGs 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, Akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan											
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1.(a)	Opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten.	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepahiang	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD KEUANGAN
16.6.1.(b)	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepahiang	RPJMD Kabupaten Kepahiang	Predikat	B	B	B	B	B	B	B	BAG. ORGANISASI

Kode Indikator (3)	Target/Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar Baseline (2024) (7)	Target Pencapaian (8)						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.6.1.(c)	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten.	Inspektorat	NILAI	B	B	B	B	B	B	B	INSPEKTORAT
16.6.2.(a)	Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Kepahiang	Bag. Organisasi	ZONA	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	HIJAU	BAG. ORGANISASI
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	BPS	orang	1	1	1	1	1	1	1	DPPKBP3A
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS	%	95.98	96.98	97.98	98.98	99.98	100	100	BPS
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Renstra DUKCAPIL Kab. Kepahiang	%	98.7	99.5	99.9	100	100	100	100	DUKCAPIL
TujuanSDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan											
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	RPJMD Kabupaten Kepahiang	Rp		886,781,869,783.00	666,268,362,350.26	680,254,244,312.60	694,317,317,390.00	708,909,691,377.64	0	BKD KEUANGAN
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB										
	Laju pertumbuhan PDRB	RPJMD Kabupaten Kepahiang	%		4.42	4.56	4.7	4.84	4.98	0	BKD KEUANGAN
	Pajak daerah	RPJMD Kabupaten Kepahiang	Rp. 000		17,415,902,737.00	16,509,179,239.43	17,128,784,025.34	17,776,062,993.00	18,452,438,411.13	0	BKD KEUANGAN
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	RPJMD Kabupaten Kepahiang	Rp		69,027,547,124.00	69,859,852,647.28	71,917,564,415.56	73,813,903,895.02	75,996,209,612.76	0	BKD KEUANGAN



MATRIKS 1 DAN MATRIKS 2B KOTA BENGKULU



Matrik 1 Target Pencapaian Indikator TPB/SDGs
Kota Bengkulu

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.2 Pada Tahun 2030, Mengurangi setidaknya Setengah Proporsi Laki-laki, Perempuan dan Anak-anak dari Semua Usia,yang Hidup dalam Kemiskinan disemua, sesuai dengan Definisi Nasional											
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrem	BPS	%	0.41	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, Dinas
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	13.76	12.97	12.48	11.99	11.49	11	10.51	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
1.3.1[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Yankes	orang	100	100	100	100	100	100	100	DINKES
1.3.1[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan										DISNAKER
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	15	15	15	15	20	20	20	Dinas Perkim
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	58.54	60	61	62	63	64	65	Dinas Perkim
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.											
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030..	BNPB	Angka	128.25	128	127	127	126	126	125	BPBD
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerja sama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi											
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	25.37	24.43	24.43	24.43	24.43	24.48	25.4	BPKAD
Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	EPPGM	Orang	0.74%	0.50%	0.40%	0.35%	0.25%	0%	0%	Dinkes
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Survey SSGi 2024	Orang	16.10%	15.05%	14.08%	13.16%	12.30%	11.50%	10.76%	Dinkes
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	EPPGM	Orang	0.76%	0.71%	0.66%	0.62%	0.58%	0.54%	0.51%	Dinkes
	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Survey SSGi 2024	Orang	10.40%	9.72%	9,09%	8,50%	7,95%	7,43%	6,95%	Dinkes
2.2.2.[a]	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	Susenas Panel Modul Konsumsi BPS Tahun 2024	Skor	89.31	89.85	90,40	90.95	91,50	92,05	92,60	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.											
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Luas Sawah Dilesatirkan (LDS) 2022 dan Perda RTRW	Persen	72.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	100.00%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim											
2.c.1*	Indikator Anomali Harga Pangan	Surevy Harga di Pasar-Pasar Tradisional dan Modern	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup											
3.1.1*	Angka kematian ibu (AKI)	Kesmas	Per 100.000 Kelahiran Hidup	69.98	78	77.55	77	76.5	76	76	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Kesmas	Orang	6368	6468	6568	6668	6768	6868	6968	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000											
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa);		Per 1000 Kelahiran Hidup	6.3	6	5.7	5.4	5.1	4.8	4.8	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup		Per 1000 Kelahiran Hidup	3.6	10.55	10,10	9,70	9,30	8,70	8,70	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menul											
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk	P2P	Per 1000 Penduduk	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.31	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	P2P	per 100.000 Penduduk	178.94	168.94	158.94	148.94	138.94	128.94	128.94	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	P2P	Per 1000 Penduduk	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis	P2P	Orang	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
	(b) Kusta	P2P	Orang	3	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan											
3.4.1*	Jumlah Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis										Dinas Kesehatan
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional											
3.7.1*	Proporsi kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	BKKBN	Satuan MCPR Persentase	Baseline (2024) 54,6	55, 0	55.4	55.8	56.1	56.5	56.9	DP3AP2KB
3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur15-19 tahun per 1000 perempuan	BKKBN	Satuan ASFR Persentase	10, 0	10, 0	9.9	9.8	9.7	9.7	9.6	DP3AP2KB
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	BKKBN	Satuan TFR , Nilai rata-rata	2.15	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	2.13	DP3AP2KB
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang											
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Yankes	Orang	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	P2P	Orang	28.09	29.21	30.08	30.98	31.91	32.87	32.96	Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	SDMK	Orang	5904	6004	6104	6204	6304	6404	6504	Dinas Kesehatan
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua											
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.1.1.(a)	Skor Literasi SD	SPM/rapot pendidikan	nilai	63.5	64.7	73.27	73.27	73.27	73.27	73.27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Skor Literasi SMP	SPM/rapot pendidikan	nilai	73.29	76.23	76.33	76.33	76.33	76.33	76.33	
	Skor numerasi SD	SPM/rapot pendidikan	nilai	45.75	53	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	
	Skor Numerasi SMP	SPM/rapot pendidikan	nilai	63.38	65	77.22	77.22	77.22	77.22	77.22	
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	RPJMD	satuan pendidikan	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.5 Pada tahun 2030, disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	RPJMD	Angka	99,66	99,66	101,27	104,19	108,17	112,2	112,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	RPJMD	Angka	99,32	99,32	99,67	100,22	100,91	101,05	101,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≤15 tahun	BPS	%	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	97,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	(b) internet untuk tujuan pengajaran										
	(c) komputer untuk tujuan pengajaran,										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(d) air minum layak										
	(e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin										
	(f) fasilitas cuci tangan (terdiri air,										
	sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)										
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil											
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan										Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan											
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.											
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi	DP3AP2KB	Dokumen		1	2	2	2	2	2	DP3AP2KB
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3AP2KB	SATUAN	4	6	5	12	6	5	4	DP3AP2KB
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3AP2KB	SATUAN	4	4	5	5	5	4	4	DP3AP2KB
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan											
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah	-	Orang	6	6	6	6	6	6	7	DP3AP2KB
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	BPS Kota Bengkulu	%	95.19	-	-	-	-	-	-	
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua											
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	PDAM TIRTA HIDAYAH	%	60	68	72	76	80	85	89	Dinas PUPR

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan											
6.2.1*	Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	96.15	96.81	96.94	97.06	97.19	97.31	97.44	Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global											
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	indeks	III	III	III	III	II	II	II	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern											
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Renstra Perdagrin	-	1663	1718	1798	1898	1998	2098	2198	Dinas Perdagrin
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	4	3	3	3	3	3	3	Bapenda
8.1.1.(a)	PDRB per kapita (ADHK)	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	Rp. juta	46.8	48.22	49.72	51.21	52.71	54.21	55.7	Bapenda
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan											
8.3.1.[a]	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	43.59	44	44.5	45	45.5	46	46.5	Koperasi Dan UKM
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	5.00	4.96	4.89	4.81	4.74	4.66	4.59	Dinas Tenaga Kerja
8.8 Melindungi hak hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya											
8.8.1.(a)	Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional										Dinas Tenaga Kerja
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	1.8	0.5	1	2	3	4	4	Bapenda
8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	2.15	0.5	1	2	3	4	4	Dinas Pariwisata
8.9.1.[c]	Jumlah PAD sektor pariwisata.	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	0.32	0.5	1	2	2.5	3	3	Bapenda
Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorng inovasi											
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Kota	Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Bengkulu (SK Jalan No.113 Tahun 2025)	%	55.609	56.55	58.78	60.25	61.12	63.45	65	PUPR
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan											
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur		%								Bapenda
	Rasio PDRB Industri pengolahan	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	2.83	2.63	2.41	2.32	2.10	2.02	1.80	
	Nilai produksi industri*		Rp. juta	343,328,510,000	347,143,510,000	348,143,510,000	349,143,510,000	350,143,510,000	351,143,510,000	352,143,510,000	Dinas Perdagrin
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	BPS Kota Bengkulu	%	87.91	-	-	-	-	-	-	
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata											
10.1.1.(a)	Rasio Gini	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	Indeks		0.38	0.37	0.37	0.36	0.36	0.35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan Perindustrian , Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketenagakerjaan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	13.76	12.97	12.48	11.99	11.49	11	10.51	Dinas Sosial
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	-	%	-	-	-	-	-	-	-	DINSOS
	Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni (Proxi)	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	%	5.08	15	15	15	15	20	20	Dinas Perkim
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar											
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan										Dinas Tenaga Kerja
Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Rentsra Perkim	%	73.44	75	76.56	78.13	79.69	81.25	82.81	Dinas Perkim
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan											
11.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Renstra BPBD	orang	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif											
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat											
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP		persen	100	100	100	100	100	100	100	BPKAD
	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	OPINI LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	Renstra Inspektorat	OPD	92.5	93	94	95	96	97	98	Inspektorat
	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Bengkulu	Ranperda RPJMD Kota Bengkulu 2025-2029	Predikat	B	B	B	B	B	B	B	Setda Bagian Ortala
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B (Indeks RB Pemerintah Kota Bengkulu	Renstra Setda	Indeks	69.82	70	71	73	74	75	78	Setda Bagian Ortala
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Renstra Setda	Angka	7	9	11	13	15	17	19	Setda Bagian Ortala
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Renstra DP2AP2KB	orang (%)	28.4	28.6	29	30	30	31	31	DP3AP2KB
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Renstra Dukcapil	%	NA	98.00	98.00	98.10	98.20	98.29	98.39	Dinas Dukcapil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Renstra Dukcapil	%	97.00	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.40	Dinas Dukcapil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Renstra Dukcapil	%	97.00	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.40	Dinas Dukcapil
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional											
TujuanSDGs 17 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan											
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya										Bapenda
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB		%	1.14	1.17	1.2	1.24	1.27	1.3	1.33	Bapenda
	Laju pertumbuhan PDRB		persen								Bapenda
	Pajak daerah		Rupiah	Rp201,973,538	Rp220,700,156	Rp252,679,343	Rp258,471,894	Rp264,166,816	Rp269,914,984		Bapenda
17.1.2*	Proporsi anggaran daerah yang didanai oleh pajak daerah										Bapenda

MATRIKS IIB: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KOTA BENGKULU

Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
1.2 Pada Tahun 2030, Mengurangi setidaknya Setengah Proporsi Laki-laki, Perempuan dan Anak-anak dari Semua Usia,yang Hidup dalam Kemiskinan disemua, sesuai dengan Definisi Nasional														Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian , BPBD, Dinas Perhubungan
1.1.1 Tingkat Kemiskinan Ekstrem dan 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	unit usaha	35	50	50	50	50	108	580	APBD	Kota Bengkulu, semua Kecamatan Dan Kelurahan	Dinas Koperasi dan UKM
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	unit usaha	10	10	10	10	10	10	530	APBD	Kota Bengkulu, semua Kecamatan Dan Kelurahan	Dinas Koperasi dan UKM
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
2.17.08.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	20	25	25	25	25	25	960	APBD	Kota Bengkulu, semua Kecamatan Dan Kelurahan	Dinas Koperasi dan UKM
2.17.07 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI KSP/USP														
2.17.07.02.01	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	2.17.07.2.01.0001	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	65	75	75	75	75	75	410	APBD	Kota Bengkulu, semua Kecamatan Dan Kelurahan	Dinas Koperasi dan UKM
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM														
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Unit Usaha	2	3	3	3	3	3	280	APBD	Kota Bengkulu, semua Kecamatan Dan Kelurahan	Dinas Koperasi dan UKM
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Koperasi	35	20	20	20	20	20	670	APBD	Kota Bengkulu, semua Kecamatan Dan Kelurahan	Dinas Koperasi dan UKM
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadapTumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Persen	0.82	1.89	1.89	1.89	1.89	2.70	2,377	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Perkimtan
1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum														
1.03.03.2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sambungan Rumah (SR)	1500	2000	2500	2500	2500	3000	91,000	DAK (APBN) /DAU (APBD)	Kecamatan Teluk Segara Kecamatan Kampung Melayu	Dinas PUPR Kota Bengkulu
Kode dan Nama Program														
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	5000	6000	7000	8000	9000	10000	450	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Sosial Kota Bengkulu
Kode dan Nama Program														
2.13.05.2.01	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat adat pelakunya hukum adat yang sama daerah kabupaten/kota	2.13.05.201.01.0009	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	4	4	4	4	4	4	1,655	APBD	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
Kode dan Nama Program														
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Laporan	12	12	12	12	12	12	260	APBD	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
3.25.06 Program Pengelolaandan Pemasaran Hasil Perikanan														
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.0002	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	44	46	49	52	55	58	114	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Perikanan
3.25.04 Program Pengelolaan Budidaya														
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	300	315	331	345	360	375	500	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Perikanan
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap														
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.01.0004	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	75	79	83	87	91	95	387	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Perikanan
2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan	30	30	30	30	30	30	500	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Perhubungan
Kode dan Nama Program														
01.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	6865	6934	7003	7073	7144	7144	100	DAU	Kota Bengkulu	Dinkes
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	6553	6619	6685	6752	6819	6819	765.1	DAK/DAU	Kota Bengkulu	Dinkes
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	2	2	2	2	2	2	369.1	DAK/DAU	Kota Bengkulu	Dinkes
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	2	2	2	2	2	357	DAK/DAU	Kota Bengkulu	Dinkes
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	orang	1	1	1	1	1	0	60	DAU	Kota Bengkulu	Dinkes
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	2	2	2	2	2	204	DAK/DAU	Kota Bengkulu	Dinkes
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	5	5	5	5	5	170,172	JKN	Kota Bengkulu	Dinkes
01.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	peserta didik	4000	4000	4000	4000	4000	4000	2,000	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah pertama	peserta didik	3448	3448	3448	3448	3448	3448	1,400	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3.1(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Kesehatan
1.3.1(b) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Ketenagakerjaan
1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar														
1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)														
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Persen	0	15	15	15	20	20	2,400	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Perkimtan
1.4.2 Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan														
2.10.10 Program Penatagunaan Tanah													DINAS PERKIMTAN	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persen	58.54	60	61	62	63	64	499	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Perkimtan
1.5.3 Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030														
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana														
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	100	100	100	575	APBD	Kota Bengkulu	BPBD
1.a.2 Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan : 5.02.02.2.01	Nama Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kode Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.07	Nama Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2	2	2	2		APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														DINKES
01.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	2	2	2	2	2	357	DAK/DAU	Kota Bengkulu	Dinkes
2.2.2 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														DINKES
01.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	2	2	2	2	2	357	DAK/DAU	Kota Bengkulu	Dinkes
2.2.2.[a] Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)														
2.09.03 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat														
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	221	APBD Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bengkulu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan														
3.27.03 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian														
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	441	APBD Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bengkulu pada 6 Kecaamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.c.1 Indikator Anomali Harga Pangan														
2.09.03 Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat														DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Laporan	1	1	1	1	1	1	268	APBD Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bengkulu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
3.1.1* Angka kematian ibu (AKI)														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Kesehatan
3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														DINKES

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
01.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	6553	6619	6685	6752	6819	6819	765	DAK/DAU	Kota Bengkulu	Dinas Kesehatan
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa);														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Kesehatan
3.2.1* (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Kesehatan
3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan	per 1.000 penduduk	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06				Dinas Kesehatan
3.3.2* Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan	per 100.000 penduduk	329	252	231	211	190	190				Dinas Kesehatan
3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
01.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	orang	1	1	1	1	1	0	60.6	DAU	Kota Bengkulu	DINKES Dinas Kesehatan
3.3.5 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
01.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	2	2	2	2	2	204	DAK/DAU	Kota Bengkulu	DINKES Dinas Kesehatan
3.4.1* Jumlah Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Kesehatan
3.7.1* Proporsi kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Kesehatan
3.7.2* Angka kelahiran remaja umur15-19 tahun per 1000 perempuan														
Kode dan Nama Program														
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	4	4	4	4	4	380	DAK/DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).														
Kode dan Nama Program														
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12	12	12	12	12	352	DAK/DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	60	60	60	60	60	60	921	DAK/DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang	30	30	30	30	30	30	250	DAK/DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	90	90	90	90	90	90	260	DAK/DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														DINKES
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	5	5	5	5	5	170,172.3	JKN	Kota Bengkulu	Dinkes
3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														DINKES
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Tatanan	1	2	3	4	5	5	60.6	DAU	Kota Bengkulu	Dinkes
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Kesehatan
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
4.1.1.(a) Skor Literasi SD/SMP dan Skor Numerasi SD/SMP														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)														
01.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan														DIKNAS
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket sekolah	72	72	72	72	72	72	1,500	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	paket sekolah	4	4	4	4	4	4	500	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil														
01.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan														DIKNAS
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	satuan pendidikan	156	156	156	156	156	156	164,967	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	satuan pendidikan	25	25	25	25	25	25	101,699	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun														
01.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan														DIKNAS
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	satuan Pendidikan	298	298	298	298	298	298	23,885	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air,sanitasi, dan higienis bagi														
Kode dan Nama Program														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan														
Kode dan Nama Program														
														Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminas														
Kode dan Nama Program														
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	330	DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60	60	60	60	60	325	DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir														
Kode dan Nama Program														
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4	6	7	8	8	370	DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	40	40	40	45	45	45	370	DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
5.2.2*Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir														
Kode dan Nama Program														
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60	60	60	60	60	285	DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	10	12	12	15	17	18	315	DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	12	15	17	17	18	19	261	DAU	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah														
Kode dan Nama Program														
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Lembaga	35	35	35	35	40	42	241			DP3AP2KB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	151			DP3AP2KB
5.6.1 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam														
Kode dan Nama Program														Dinas KOMINFO
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman														
1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum														
1.03.03.2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	%	68	72	76	80	85	89	91,000			
6.2.1 Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun														
1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengmabnag Sistem Air Limbah														
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	1904	1800	1800	1800	1800	1800	47,200	DAK / DAU	Kec.Sungai Serut, Kec.Kampung melayu	Dinas PUPR
6.3.2.(a) Indeks Kualitas Air (IKA)														
2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	1	1	1	1	184	DAU	Kota Bengkulu	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	332	DAU	Kota Bengkulu	Dinas Lingkungan Hidup
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	1	1	1	1	1	600	DAU	Kota Bengkulu	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12	12	12	12	12	12	1,427	DAU	Kota Bengkulu	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kot a yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2	2	552	DAU	Kota Bengkulu	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	60	60	60	60	65	67	331	DAU	Kota Bengkulu	Dinas Lingkungan Hidup
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga														
Kode dan Nama Program														Dinas PERDAGRIN
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan		4184320	4184320	4184320	4184320	4184320	4184320	-	0	9 Kecamatan Kota Bengkulu	
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
8.1.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita														
Kode dan Nama Program														BAPENDA
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											
8.3.1.[a] Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal														
.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	10	10	10	10	10	10	530	APBD	Kota Bengkulu, semua Kecamatan Dan Kelurahan	Dinas Koperasi dan UKM
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka														
Kode dan Nama Program														DISNAKER
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											
8.8.1.(a) Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional														
Kode dan Nama Program														BAPENDA

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											
8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB														
3.26.2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											DINAS PARIWISATA
5.3.26.2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	5.3.26.2.2.03.7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2,371	APBD	Kawasan Wisata Pantai Panjang	
8.9.1.[a] Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara														
5.3.26.3 Program Pemasaran Pariwisata														
5.3.26.03.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	5.3.26.03.1.04	Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	2,307	APBD		DINAS PARIWISATA
8.9.1.[c] Jumlah PAD sektor pariwisata.														
5.3.26.5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif														
5.3.26.5.2.01	Pelaksanaan Peninkatan Kapasitas Sumber Daya Manusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5.3.26.5.2.01.6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	25	25	25	25	25	25	132	APBD	Pokdarwis di Kota Bengkulu	DINAS PARIWISATA
5.3.26.5 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual														
5.3.26.4.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/ Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Instansi Kreatif di Daerah Kota	5.3.26.4.2.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	ruang	1	1	1	1	1	1	110	APBD	Seluruh Kecamatan	
Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
9.1.1.[a] Kondisi mantap jalan Kota														
1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan														
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Kilo Meter (KM)	17	25	23	20	18	15	212,400			Dinas PUPR
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											BAPENDA
9.c.1 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
10.1.1.[a] Rasio Gini														
10.1.1.[b] Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial														
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	120	120	120	120	120	120	150	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang	100	100	100	100	100	100	100	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Sosial
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1.(f) Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni														
1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh														Dinas Perkim
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persen	60	65	70	75	80	85	2,377	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Perkim
10.4.1.(b) Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan														
Kode dan Nama Program														
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub. Kegiatan											Dinas Ketenagakerjaan
Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau														
1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sipasi, Sarana dan utilitas umum (PSU)														
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persen	0	15	15	15	20	20	90	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Perkim
1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh														
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persen	60	65	70	75	80	85	2,377	APBD	Kota Bengkulu	Dinas Perkim
11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang														
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														BPBD
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Orang	NA	100	100	100	100	100	210	APBD	Kota Bengkulu	BPBD
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	100	100	100	575	APBD	Kota Bengkulu	BPBD
Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP														
5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah														BPKAD
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	dokumen	2	2	2	2	2	2	1,816	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	2	2	2	2	2	2	1,806	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2	2	2	2	2	2	4,033	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	2	2	2	2	2	2	4,147	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.02.2.1.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	5	5	5	5	5	5	1,203	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1,088	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	12	12	12	12	12	12	902	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	12	12	12	12	12	12	538	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen	40	40	40	40	40	40	1,028	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.02.2.02.07	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	dokumen	4	4	4	4	4	4	985	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.02.2.02.08	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan untuk 40 OPD	1	1	1	1	1	1	3,086	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan untuk 40 OPD	5	5	5	5	5	5	812	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan untuk 40 OPD	7	7	7	7	7	7	1,088	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dokumen	5	5	5	5	5	5	1,055	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	dokumen	40	40	40	40	40	40	811	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	dokumen	15	15	15	15	15	15	1,020	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan jumlah opd	40	40	40	40	40	40	3,702	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan untuk 40 opd	2	2	2	2	2	2	598	APBD	KOTA BENGKULU	BPKAD
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														INSPEKTORAT
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi BirokrasiNama Sub. Kegiatan	%	93	94	95	96	97	98	2,030	DAU	Kota Bengkulu	
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B														
4.01.01 PROGRAM PENUNJNG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA														Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan RB	Indeks	70	71	73	74	75	78	250			
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik														
4.01.01 PROGRAM PENUNJNG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA														Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah	7	9	11	13	15	17	250			
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)														
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTMAAN GENDER DAN PEMEBRDAYAAN GENDER														DP3AP2KB
2.8.02.2.02	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	2.8.02.2.02.0008	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kab/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	151	APBD	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
		2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	35	35	35	35	40	42	151	APBD	Kota Bengkulu	DP3AP2KB
16.9.1 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur														
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL														DUKCAPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase	98.00	98.00	98.10	98.20	98.29	98.39	1,000	APBD	Kota Bengkulu	Disdukcapil
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah														
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL														DUKCAPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.40	1,000	APBD	Kota Bengkulu	Disdukcapil
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun														
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL														DUKCAPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.40	1,000	APBD	Kota Bengkulu	Disdukcapil
TujuanSDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah														BAPENDA
Kode Kegiatan : 5.02.04.2.01	Nama Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB														
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah														BAPENDA
Kode Kegiatan : 5.02.04.2.01	Nama Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	220,700	252,679	258,471	264,166	269,914		1,265,930	APBD	Kota Bengkulu	Bapenda



MATRIKS 1 DAN MATRIKS 2B KABUPATEN LEBONG



Matrik 1 Target Pencapaian Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Lebong

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.											
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrem.										
1.2 Pada Tahun 2030, Mengurangi setidaknya Setengah Proporsi Laki-laki, Perempuan dan Anak-anak dari Semua Usia,yang Hidup dalam Kemiskinan disemua, sesuai dengan Definisi Nasional											
	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		%								BPS
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Renstra 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten	%	10.45	10.1	9.8	9.55	9.35	9.2	9	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
1.3.1.[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Renstra 2025-2029 Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong		75.1	83	85	87	89	91	93	Dinas Kesehatan Kab. Lebong
1.3.1.[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Renstra 2025-2029 Disnakertrans Kabupaten Lebong	%	0	29.04	29.44	30.23	31.42	32.06	33.02	Disnakertrans Kabupaten Lebong
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya											
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Renstra 2025-2029 Dinas Sosial Kabupaten	%			100	100	100	100	100	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	Renstra 2025-2029 Dinas Perkim Kabupaten Lebong	%			30	40	50	80	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).										
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Laporan	%	85	88	89	91	93	95	97	Dinkes Kabupaten Lebong
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis,											
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Laporan	Angka	0	0	0	0	0	0	0	Dinkes Kabupaten Lebong
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Laporan	Kasus	1	0	0	0	0	0	0	Dinkes Kabupaten Lebong
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang											
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)										
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta											
3.4.1.[c]	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Renstra OPD Din	Angka		0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	Dinkes
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan											
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).	Renstra OPD DP3AP2KB		2.4	2.39	2.39	2.38	2.38	2.37	2.37	
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan											
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.										
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Laporan	%	75.65	80	82	85	87	90	95	
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Laporan	%	0	70	75	70	75	90	90	
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk											
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan											
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat			99.74	99.67	99.6	99.53	99.46	99.39	99.32	
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/ sederajat			64.85	61.85	58.85	55.85	52.85	49.85	46.85	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebong	Nilai	76.25	82.04	87.83	93.62	99.41	105.2	110.99	
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/ sederajat			108.49	107.8	107.11	106.42	105.73	105.04	104.35	
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat			85.35	83.48	81.61	79.74	77.87	76	74.13	
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/ sederajat			95.88	97.47	99.06	100.65	102.24	103.83	105.42	
	(a) perempuan/ laki-laki,										
	(b) perdesaan/ perkotaan,										
	(c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.										
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemamp											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebong	Nilai	98.4	98.79	99.24	99.69	100.14	100.59	101.04	Dinas Dikbud Kabupaten Lebong
Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan											
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pembe											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Renstra DP3APPKB 2025-2029	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	DP3APPKB Kabupaten Lebong
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua											
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman		%								
6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan											
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Renstra DPUPR-Hub 2025-2029	%	71.68	73.76	75.84	77.92	80	82.08	84.16	Dinas PUPR-Hub Kabupaten Lebong
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan											
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air (IKA)										
Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	Renstra Dinas Perindagkop & UKM	Laporan	1	1	2	4	6	8	10	Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Lebong
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita		%								
8.1.1.(a)	PDB per kapita	RPJMD Kab. Lebong 2025-2029	Rp. juta	40.99	41.47	42.01	42.58	43.17	43.74	44.32	
Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorng inovasi											
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri											
9.2.1.(a)	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	-	%	0	0	0	0	0	0	0	
	Nilai produksi industri*	-	Rp. juta	0	0	0	0	0	0	0	
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	BPS (Lebong Dalam Angka Tahun 2025)	Desa/ Kelurahan	98	98	101	101	101	101	101	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Lebong
Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Renstra 2025-2029 Dinas Perkim	%	3		22.4	41.8	61.2	80.6	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian											
11.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lebong	orang	15	10	10	7	5	3	1	BPBD Kabupaten Lebong
Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan											
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat											
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	RPJMD Kab. Lebong 2025-2029	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD, Inspektorat Kabupaten Lebong

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	LHE Kemenpanrb	Predikat/ Nilai	B (63,33)	B (66)	BB (71)	BB (72)	BB (73)	BB (74)	BB (75)	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	LHE Kemenpanrb	Nilai / Predikat	B (66,88)	B (70)	BB (72)	BB (74)	BB (76)	BB (78)	BB (80)	Bagian Ortala Setda Kabupaten Lebong
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	LHE dari Ombudsman RI	Nilai / Opini	93,76 (Kualitas Tertinggi / Zona Hijau)	94 (Kualitas Tertinggi / Zona Hijau)	94,5 (Kualitas Tertinggi / Zona Hijau)	95 (Kualitas Tertinggi / Zona Hijau)	95,5 (Kualitas Tertinggi / Zona Hijau)	96 (Kualitas Tertinggi / Zona Hijau)	96,5 (Kualitas Tertinggi / Zona Hijau)	Bagian Ortala Setda Kabupaten Lebong
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	APBD	orang (%)	7	7	7	7	7	7	7	Sekretariat DPRD & DP3APPKB Kabupaten Lebong
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Renstra Dinas Dukcapil 2025-2029	%	97	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil Kabupaten Lebong
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Renstra Dinas Dukcapil 2025-2029	%	98	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil Kabupaten Lebong
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Renstra Dinas Dukcapil 2025-2029	%	98	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil Kabupaten Lebong

MATRIKS II : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBONG

Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
Kode dan Nama Program :1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang		21,657	21,657	21,657	21,657	21,657	699,200,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang		20	20	20	20	20	200,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang		20	20	20	20	20	200,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang		120	120	120	120	120	1,750,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 3.8.2 (a) Cakupan jaminan kesehatan nasional														
Kode dan Nama Program 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		12	12	12	12	12	87,979,301,819	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
Kode Kegiatan: 2.07.05.2.01	Nama Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 2.07.05.2.01.0003	Nama Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	162,435,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Lebong
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs :1.4.1 Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar														
Kode dan Nama Program : 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	1.06.04.2.01.0001	- Penyediaan Perumahan	Orang		100	100	100	100	100	1,500,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang		50	60	70	80	100	360,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Orang		20	20	20	20	20	300,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang		10	10	10	10	10	250,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang		5	5	5	5	5	125,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang		10	10	10	10	10	200,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang		6,000	6000	6000	6000	6000	250,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang		10	10	10	10	10	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang		40	40	40	40	40	200,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Orang		40	40	40	40	40	200,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10	10	10	10	10	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang		0	1	1	1	1	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Orang		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen		0	5	5	5	5	100,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Sosial Kabupaten Lebong
NAMA TUJUAN SDGs : 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs :1.4.2 Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe														
Kode dan Nama Program :2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH														
Kode Kegiatan: 2.10.10.2.01	Nama Kegiatan: Penggunaaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kotal	Kode Sub Kegiatan: 2.10.10.2.01.0001	Nama Sub Kegiatan: - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen		1	1	1	1	1	350,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
NAMA DAN TUJUAN SDGs 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana														
1.05.03.* Program Penanggulangan Bencana														
Kode Kegiatan: 1.05.03.2.03	Nama Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kode Sub Kegiatan: 1.05.03.2.03.0003	Nama Sub Kegiatan: Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang		15	15	15	15	15	365,000,000	APBD	Kab. Lebong	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong
		Kode Sub Kegiatan: 1.05.03.2.03.0007	Nama Sub. Kegiatan: Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana	Dokumen		1	1	1	1	1	375,000,000	APBD	Kab. Lebong	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong
		Kode Sub Kegiatan: 1.05.03.2.03.0009	Nama Sub. Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang		100	100	100	100	100	1,665,000,000	APBD	Kab. Lebong	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong
Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.														
Kode dan Nama Program 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang		2217	2212	2207	2202	2197	1,072,910,174	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang		2104	2154	2204	2254	2304	317,855,296	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang		10195	10295	10395	10495	10595	256,200,522	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang		16089	16092	16095	16098	16101	408,248,037	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		1	1	1	1	1	398,076,940	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 2.2.2 Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun. Berdasarkan tipe														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		1	1	1	1	1	691,952,034	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		2	2	2	2	2	120,758,878	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans	Dokumen		13	13	13	13	13	126,357,570	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen		2	2	2	2	2	400,738,764	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen		1	1	1	1	1	183,153,000	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi														
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	1	1	1	1	320,000,000	APBD	Kabupaten Lebong	Dinas Ketahanan Pangan
NAMA TUJUAN SDGs Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong olen tenaga kesehatan terlatih, (b) di fasilitas kesehatan														
Kode dan Nama Program 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang		2195	2180	2175	2170	2165	398,076,940	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1	288,771,330	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Dokumen		1	1	1	1	1	183,153,000	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		1	1	1	1	1	121,145,941	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tempat		13	13	13	13	13	460,422,222	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
Kode dan Nama Program 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen		1	1	1	1	1	183,153,000	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen		1	1	1	1	1	227,720,230	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		1	1	1	1	1	274,729,500	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Orang		100	100	100	100	100	300,160,295	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		1	1	1	1	1	436,844,325	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang		100	100	100	100	100	3,652,217,342	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 3.3.3 Kejadian Malaria per 1.000 orang.														
Kode dan Nama Program 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		2	2	2	2	2	188,647,590	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen		12	12	12	12	12	183,153,000	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Orang		0	0	0	0	0	198,275,333	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 3.3.5 Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta														
Kode dan Nama Program 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang		3977	3977	3977	3977	3977	207,573,400	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang		31933	31933	31933	31933	31933	299,272,002	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Orang		452	452	452	452	452	548,189,139	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 3.7.2(a) : Total Fertility Rate (TFR).														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode dan Nama Program 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
KODE KEGIATAN : 2.14.02.2.01 -	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	KODE SUB KEGIATAN : 2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen	1	1	1	1	1	1	515,000,000	APBD	Kabupaten Lebong	Dp3AP2KB
KODE KEGIATAN : 2.14.02.2.02 -	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KODE SUB KEGIATAN : 2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana		Dokumen	1	1	1	1	1	1	440,000,000	APBD	Kabupaten Lebong	Dp3AP2KB
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 3.8.2 (a) Cakupan jaminan kesehatan nasional														
Kode dan Nama Program 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		12	12	12	12	12	87,979,301,819	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 18 tahun														
Kode dan Nama Program 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Laporan		2	2	2	2	2	87,979,301,819	APBD	Kabupaten Lebong	DINKES
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun														
KODE DAN NAMA PROGRAM 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01 -	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	10 Paket	0 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	6,350,000,000			
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	48,349,273,440			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	800 Peserta SD/SMP	250 Peserta didik SD dan SMP	250 Peserta didik SD dan SMP	250 Peserta didik SD dan SMP	250 Peserta didik SD dan SMP	250 Peserta didik SD dan SMP	6,907,039,065			
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	5,025,631,250			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	20 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	5,782,039,065			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	92 satuan pendidikan	92 satuan pendidikan	92 satuan pendidikan	92 satuan pendidikan	92 satuan pendidikan	3,894,223,440			
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	2,637,815,625			
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	15 Konten Digital	15 Konten Digital	15 Konten Digital	15 Konten Digital	15 Konten Digital	15 Konten Digital	2,287,815,625			
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	1,381,407,815			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2,637,815,625			
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,262,815,625			
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	3,769,223,440			
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,256,407,815			
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	500 Buku	500 Buku	500 Buku	500 Buku	500 Buku	500 Buku	1,381,406,815			
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	41,442,234,375			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	7,163,446,875			
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	119 satuan pendidikan	119 satuan pendidikan	119 satuan pendidikan	119 satuan pendidikan	119 satuan pendidikan	119 satuan pendidikan	5,657,039,065			
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik		2640 Peserta didik	2640 Peserta didik	2640 Peserta didik	2640 Peserta didik	2640 Peserta didik	27,628,156,250			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19,339,709,375			
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	Pesert Didik	780 Peserta Didik	780 Peserta Didik	780 Peserta Didik	780 Peserta Didik	780 Peserta Didik	5,525,631,250			
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	2,637,815,625			
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	15 Konten Digital	15 Konten Digital	15 Konten Digital	15 Konten Digital	15 Konten Digital	15 Konten Digital	2,312,815,625			
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	1,256,407,815			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2,637,815,625			
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,637,815,625			
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dokumen	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	20 Komunitas	3,644,223,440			
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,156,407,815			

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	3,619,223,440			
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	27,628,156,250			
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	4,775,631,250			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	78 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	9,426,262,500			
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	Konten Digital	15 Konten Digital	Konten Digital	Konten Digital	Konten Digital	Konten Digital	2,025,000,000			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,512,815,625			
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokkumen	Dokkumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,262,815,625			
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	2,362,815,625			
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8,288,446,875			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	2,262,815,625			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	552.5			

Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan														
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memanfaatkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan														
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.0007	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	295	APBD	Kabupaten Lebong	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada

1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	0	1	0	0	0	0	10,000	APBD	Kabupaten Lebong	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
		1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja\	Unit	0	0	20	0	1	1	4,000	APBD	Kabupaten Lebong	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
		1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Rumah Tangga	21378	300	1932	2254	1288	644	70,510	APBD	Kabupaten Lebong	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
		1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	2	0	0	0	400	APBD	Kabupaten Lebong	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern

3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Laporan	1	2	4	6	8	10	221	APBD	Kabupaten Lebong	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang														
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka														
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Laporan	1	1	1	1	1	1	605.1	APBD	Kabupaten Lebong	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	73.2	APBD	Kabupaten Lebong	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh														
Kode dan Nama Program : 1.04.03* PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
Kode Kegiatan: 1.04.03.2.02	Nama Kegiatan: Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kode Sub Kegiatan: 1.04.03.2.02.0010	Nama Sub Kegiatan: - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10	Dokumen		1	1	1	1	1	375	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah		807	605	403	200	0	2,906	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
		1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit Rumah		677	508	339	170	0	11,200	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
Kode dan Nama Program : 1.04.04* PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit Rumah		807	605	403	200	0	3,375	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
Kode dan Nama Program : 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
Kode Kegiatan: 1.04.02.2.01	Nama Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.04.02.2.01.0009	Nama Sub Kegiatan: - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		1	1	1	1	1	299	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
Kode Kegiatan: 1.04.02.2.03	Nama Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.04.02.2.03.0001	Nama Sub. Kegiatan: Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah		20	30	40	45	50	370	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
		Kode Sub Kegiatan: 1.04.02.2.03.0004	Nama Sub. Kegiatan: Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah		20	30	40	45	50	370	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
		Kode Sub Kegiatan: 1.04.02.2.03.0007	Nama Sub. Kegiatan: Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga		20	25	30	40	50	330	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
Kode Kegiatan: 1.04.02.2.04	Nama Kegiatan: Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.04.02.2.04.0005	Nama Sub Kegiatan: Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		10	15	15	20	25	95	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
		Kode Sub Kegiatan: 1.04.02.2.04.0006	Nama Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	rumah Tangga		10	15	20	25	25	95	APBD	Kab. Lebong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lebong
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana,														
1.05.03.* Program Penanggulangan Bencana														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang		15	15	15	15	15	365	APBD	Kab. Lebong	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong
		Kode Sub Kegiatan: 1.05.03.2.03.0007	Nama Sub. Kegiatan: Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana	Dokumen		1	1	1	1	1	375	APBD	Kab. Lebong	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong
		Kode Sub Kegiatan: 1.05.03.2.03.0009	Nama Sub. Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang		100	100	100	100	100	1,665	APBD	Kab. Lebong	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong
NAMA TUJUAN SDGs : 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, Dan														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 16.6.1.(a)* Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP														
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		75	60	60	60	60	1,000	APBD	Kab. Lebong	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		3	6	6	6	6	1,000	APBD	Kab. Lebong	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			40	1	1	1	1	400	APBD	Kab. Lebong	INSPEKTORAT
Kode dan Nama Program : 5.02.02* PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan		4	4	4	4	4	500	APBD	Kab. Lebong	BKD
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan		2	2	2	2	2	550	APBD	Kab. Lebong	BKD
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			2	2	2	2	2	600	APBD	Kab. Lebong	BKD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 16.6.1.(b)* Persentase Perangkat daerah dengan Nilai SAKIP ≥ B														
Kode dan Nama Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1	1	1	1	1	320	APBD	Kabupaten Lebong	Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 16.6.1.(c)* Nilai Evaluasi RB Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong														
Kode dan Nama Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		10	10	10	10	20	891.8	APBD	Kab. Lebong	Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 16.6.2.(a)* Nilai tingkat kepatuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong														
Kode dan Nama Program : 4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah														
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		3	3	3	3	3	700	APBD	Kab. Lebong	SEKDA
		4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen		1	1	1	1	1	255	APBD	Kab. Lebong	SEKDA
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 16.9.1.* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur														
Kode dan Nama Program : 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			12	12	12	12	12	300,000,000	APBD	Kab. Lebong	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong
16.9.1.(a)* Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah														
16.9.1.(b)* Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun														
Kode dan Nama Program : 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			1	1	1	1	1	105	APBD	Kab. Lebong	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong
		2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil			12	12	12	12	12	229	APBD	Kab. Lebong	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong
TujuanSDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan														
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya														
Kode dan Nama Program : 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha		10	10	10	10	10	165.7	APBD	Kab.Lebong	DISPERINDAGKOP
		2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha	Unit Usaha		968	988	1008	1028	1048	221	APBD	Kab.Lebong	DISPERINDAGKOP
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha		331	351	371	391	411	221	APBD	Kab.Lebong	DISPERINDAGKOP
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya														
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang		30	30	30	30	30	750	APBD	Kab.Lebong	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong
		3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan		1	1	1	1	1	500	APBD	Kab.Lebong	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 17.1.1 (a)* Rasio penerimaan pajak terhadap PDB														
Kode dan Nama Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0001	Nama Sub Kegiatan: - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		1	1	1	1	1	525	APBD	Kab. Lebong	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	500	APBD	Kab. Lebong	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
		5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Objek Pajak		1	1	1	1	1	575	APBD	Kab. Lebong	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik														
Kode dan Nama Program : 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kode Kegiatan: 5.02.04.2.0 1	Nama Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kode Sub Kegiatan: 5.02.04.2.01.0014	Nama Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan		1	1	1	1	1	563	APBD	Kab. Lebong	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong



MATRIKS 1 DAN MATRIKS 2B KABUPATEN MUKOMUKO



Matrik 1 Target Pencapaian Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Mukomuko

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.2 Pada Tahun 2030, Mengurangi setidaknya Setengah Proporsi Laki-laki, Perempuan dan Anak-anak dari Semua Usia,yang Hidup dalam Kemiskinan disemua, sesuai											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	10.76	10.52	10.28	10.04	9.8	9.56	9.32	BPS
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai											
1.3.1*	Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial		%								
	Indeks Kesejahteraan Sosial	RPJMD	Indeks (skala 0 – 100). Semakin tinggi nilainya, semakin baik tingkat kesejahteraan sosial. Target meningkat setiap tahun (misal: 71,5 → 73,0 → 75,0).	73	76.65	80.48	84.51	88.73	93.17	97.83	Dinas Sosial
1.3.1.(b)	Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek	RPJMD	%	20.73	26.54	33.97	43.48	55.66	71.24	91.19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya											
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	RPJMD	%	62.5	67	72	77	82	88		Dinas PU dan Tata Ruang

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian

Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan											
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan,											
2.1.1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment).	RPJMD	%	5.56	10.56	11.41	12.32	13.31	14.37	15.52	Dinas Ketahanan Pangan
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	%	21.50	18.80	17.50	16.30	15.20	14.20	14.02	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	%	2.45	8	7.5	7	6.5	5		Dinas Kesehatan
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	RPJMD	Per 100.000 Kelahiran Hidup	189	122	122	122	122	122	77	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal											
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa);	Dinas Kesehatan	%	0.6	15	13.8	13.1	12.5	11.9		Dinas Kesehatan
	(b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	%	10.1	12.62	11.63	10.97	10.46	9.96		Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta											
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	Per 1000 Orang	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta		%								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	RPJMD	%	71.25	74.10	77.06	80.15	83.35	86.69	90.15	Dinas Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	RPJMD	%	90.00	90.90	91.81	92.73	93.65	94.59	95.54	Dinas Kesehatan
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-											
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	RPJMD	%	99.37	99.49	99.61	99.37	99.85	99.97	100.00	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	RPJMD	%	12.4	12.4	11.4	10.4	9.4	9.4	8.4	Dinas Kesehatan

Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua											
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan											
4.1.1(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) kelas 11 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) literasi membaca, (ii) numerasi.										
	Literasi Membaca	RPJMD	%	58.76	63.46	68.54	74.02	79.94	86.34	93.24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Numerasi	RPJMD	%	51.8	56.98	62.68	68.95	75.84	83.42	91.77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rata-rata Lama Sekolah	RPJMD	Tahun. Kategori Interpretasi (opsional): Sangat Rendah: < 6 tahun, Rendah: 6 – 7,9 tahun, Sedang: 8 – 9,9 tahun, Tinggi: 10 – 11,9 tahun, Sangat Tinggi: ≥ 12 tahun	8.57	8.95	9.5	9.95	10.25	10.75	11.25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.5 Pada tahun 2030, disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak(e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	RPJMD	%	75.00	78.00	81.12	84.36	87.74	91.25	94.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	RPJMD	%	98.25	99.23	100.22	101.23	102.24	103.26	104.29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks SPM Pendidikan	RPJMD	Skor (0 - 100). Kategori Interpretasi (opsional): Sangat Rendah: 0 – 40, Rendah: >40 – 55, Sedang: >55 – 70, Tinggi: >70 – 85, Sangat Tinggi: >85 – 100	98.25	99.23	100.22	101.23	102.24	103.26	104.29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan											
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.											
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indeks pembangunan gender (IPG)	RPJMD	Indeks Skala (0 - 100)	85.11	86.81	88.55	90.32	92.13	93.97	95.85	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua											
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	RPJMD	%	32.4	39	47	56	67	81	97	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.2.1*	Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	RPJMD	%	37.6	44	51	59	68	79	92	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.2.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)	RPJMD	%	37.6	44	51	59	68	79	92	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.2.1.(e)	Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan lumpur tinja	RPJMD	%	37.6	44	51	59	68	79	92	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern											
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per											
8.1.1.(a)	PDB per kapita										
	PDRB per kapita	RPJMD	Rp. juta	37513.25	39979.48	42445.72	44911.95	47378.18	49844.41	52310.65	Dinas Pertanian
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	#N/A	Rp. juta	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang											
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	RPJMD	%	2.41	2.36	2.31	2.26	2.21	2.16	2.11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi											
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional										
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	RPJMD	%	45.76	51.71	58.43	66.03	74.61	84.31	95.27	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk											
9.2.1.	Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita										
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	RPJMD	%	5.88	6.93	7.98	9.03	10.08	11.13	12.18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang											
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri										
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	RPJMD	%	-	28.1	29	31	32	33.8	35	
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang											
10.1.1.(a)	Rasio Gini	RPJMD	%	0.28	0.29	0.28	0.27	0.26	0.26	0.25	
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	RPJMD	%	10.76	10.52	10.28	10.04	9.8	9.56	9.32	BPS
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.		%								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Nilai Indeks Desa	RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	RPJMD	%	20.73	26.54	33.97	43.48	55.66	71.24	91.19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	RPJMD	%	30	36	43	52	62	75	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative											
11.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		orang								
	Indeks Risiko Bencana	RPJMD	Skala 0 - 100 (Semakin tinggiansangka , semakin tinggi risiko)Kategori Skor : 0 – 20 : SangatRendah 21 – 40 : Rendah 41 – 60 : Sedang 61 – 80 : Tinggi 81– 100 : Sangat Tinggi	72	70	65	60	55	50	45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	RPJMD	Skor (0 - 100). Kategori Interpretasi (opsional): Sangat Rendah: 0 – 25, Rendah: >25 – 50, Sedang: >50 – 65, Tinggi: >65 – 80, Sangat Tinggi: >80 – 100	68.11	72.2	76.53	81.12	85.99	91.15	96.62	Inspektorat
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat											
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP		-								
	Opini BPK atas laporan keuangan	RPJMD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B		OPD								
	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Mukomuko	RPJMD	Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan	Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B		%								
	Indeks Reformasi Birokrasi setiap OPD	RPJMD	Skor (0 - 100)	63.04	67.45	72.17	77.23	82.63	88.42	94.61	Sekretariat Daerah/ Bagian Organisasi dan Kepegawaian
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik		Angka								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indeks Pelayanan Publik	RPJMD	Skor (0 - 100). Kategori Interpretasi (opsional): Sangat Buruk: 0-25, Buruk: >25-50, Cukup Baik: >50-75, Baik: >75-90, Sangat Baik: >90-100	37.8	44.23	51.74	60.54	70.83	82.87	96.96	Sekretariat Daerah/ Bagian Organisasi dan Kepegawaian
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
TujuanSDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan											
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya										

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Proporsi jumlah UKM non pertanian	RPJMD	%	216.78	238.46	262.3	288.53	317.39	349.13	384.04	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
	Proporsi jumlah IKM	RPJMD	%	306.09	336.7	370.37	407.41	448.15	492.96	542.26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	RPJMD	%	0.01	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	0.02	Badan Keuangan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	

MATRIKS II: PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUKOMUKO

Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
1.3.1 Persentase PMKS yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial														
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	10	20	20	20	22	25	285	DAU	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang	10	20	20	20	22	25	345	DAU	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Orang	18	15	20	20	20	20	318	DAU	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	4	5	5	5	5	5	150	DAU	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Orang	15	10	10	10	10	10	150	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang		15	15	18	20	20	376	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	5	5	5	5	5	5	200	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Orang	5	5	5	5	5	5	200	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	60000	15000	20000	25000	30000	30000	465	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	100	60	80	80	80	80	315	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	500	300	350	400	450	500	315	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
		1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Usulan	15000	15000	15000	15000	15000	15000	245	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Sosial
1.3.1.(b) Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek														
1.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	7300	7300	7300	7300	7300	7300	6,945	DAU dan DBH	Kabupaten Mukomuko	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar														
1.03.03. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	13	13	13	3	3	11,327	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	22	4	4	4	4	4	5,525	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
				(2)	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
2.1.1 Prevalensi ketidakcakupan konsumsi pangan (Prevalience of Undernourishment).														
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DANKETAHANAN PANGANMASYARAKAT														
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kot a dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/K ota	Laporan	4	4	4	4	4	4	643	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kot a	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/K ota	Ton	7	7	7	7	7	7	680	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Ketahanan Pangan
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Layanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	20724	20756	20788	20,820	20852	20884	370	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kabupaten Mukomuko	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	131778	132801	133824	134847	134847	135870	260	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Mukomuko	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	4	4	4	4	275	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Kabupaten Mukomuko	Dinas Kesehatan
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4	4	4	4	4	575	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kabupaten Mukomuko	Dinas Kesehatan

Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia													
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)			Satuan	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (5)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
				(2)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Anggaran 5 Tahun	(5)	(6)	(7)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kot	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	4,125	4,120	4,113	4,106	4,099	4,092	282.7	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kabupate Mukomuko	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	3938	3932	3926	3920	3914	3908	395	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Kabupate Mukomuko	Dinas Kesehatan
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.														
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kot	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	3,750	3,744	3,738	3,732	3,726	3,720	370	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kabupate Mukomuko	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	14497	14490	14483	14476	14469	14462	390	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kabupate Mukomuko	Dinas Kesehatan
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang														
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kot	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Orang	0	50	100	100	100	100	450	Dana Alokasi Umum	Kabupate Mukomuko	Dinas Kesehatan
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta														
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kot	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	11	6	12	12	12	12	2,390	Dana Alokasi Umum	Kabupate Mukomuko	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)														
1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	60,781	Dana Alokasi Umum	Kabupate Mukomuko	Dinas Kesehatan

Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
4.1.1(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) kelas 11 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) literasi membaca, (ii) numerasi.														
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	199	200	200	200	200	200	395	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.														
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik	3	50	50	50	50	50	406	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	3	50	50	50	50	50	405	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak(e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan														
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1	1	1	1	1	1	240	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.a.1.(a) Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.														
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	3	3	3	3	3	428.7	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.														
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	10	10	10	10	150	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.														
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	4	6	6	6	6	6	7,694	DAU dan DAK	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.2.1* Persentase rumah tangga layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun														
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Rumah Tangga	25	0	200	200	200	200	4,310	DAU dan DAK	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.2.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)														
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	5,525	DAU dan DAK	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.2.1.(e) Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan lumpur tinja														
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	5000	5000	5000	5000	5000	5000	2,762	DAU dan DAK	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga											
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)					Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH															
8.1.1.(a) PDB per kapita															
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dosis	2500	2600	2700	2800	2900	3000	2,707	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pertanian	
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN															
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	500	500	500	500	500	500	1,750	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pertanian	
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka															
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Orang	16	16	16	16	16	16	200	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorng inovasi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)					Satuan (2)	2025	2026	2027	2028	2029				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional														
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
1.03.10.2.01	Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kot a	1.03.10.2.01.00 51	Pemeliharaan Rutin Jalan	KM	45	60	90	100	100	100	9,550	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9.2.1. Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita														
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.00 06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	30	0	10	10	10	10		Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
10.1.1.(b) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	7	7	7	7	7	7	680	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Ketahanan Pangan
10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri.														
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	148	1	1	1	1	1	5,550	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.4.1.(b) Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.														
1.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	7300	7300	7300	7300	7300	7300	6,945	DAU dan DBH	Kabupaten Mukomuko	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau														
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUM														
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kot	1.03.03.2.01.0028	Pembanguna n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	22	4	4	4	4	4	5,525	DAU	Mukomuko	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11.5.1.* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang														
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	50	100	100	100	100	100	394	DAU	Mukomuko	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	100	100	100	788.9	DAU	Mukomuko	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TujuanSDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).														
6.01.03. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	1	1	1	1	1	617.5	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Inspektorat
16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP														
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan	Dokumen	8	8	8	8	8	8	530	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Badan Keuangan Daerah

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	3	3	3	3	3	3	1,000	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Badan Keuangan Daerah
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	3	3	3	3	3	3	440	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Badan Keuangan Daerah
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	2	950	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Badan Keuangan Daerah
		5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	470	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Badan Keuangan Daerah

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	380	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Badan Keuangan Daerah
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B														
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	9	9	9	9	9	9	422	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Inspektorat
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B														
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	580	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Sekretariat Daerah/ Bagian Organisasi dan Kepegawaian
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik														
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	1	1	1	1	1	213	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Sekretariat Daerah/ Bagian Organisasi dan Kepegawaian
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur														
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5	5	5	5	5	5	838.2	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah														
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5	5	5	5	5	5	838.2	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun														
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	5	5	5	5	5	5	838.2	Dana Alokasi Umum	Mukomuko	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.														
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	10	10	10	10	150	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TujuanSDGs 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya														
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen (objek pajak)	1 (1050)	1 (1050)	1 (1050)	1 (1050)	1 (1050)	1 (1050)	530	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Badan Keuangan Daerah
17.1.1.(a)Rasio penerimaan pajak terhadap PDB														
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Objek Pajak	2	2	2	2	2	2	710	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Badan Keuangan Daerah
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik														
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.00 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Objek Pajak	2	2	2	2	2	2	710	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Badan Keuangan Daerah
		5.02.04.2.01.00 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	12	510	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Badan Keuangan Daerah
		5.02.04.2.01.00 11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen (objek pajak)	1 (1050)	1 (1050)	1 (1050)	1 (1050)	1 (1050)	1 (1050)	530	Dana Alokasi Umum	Kabupaten Mukomuko	Badan Keuangan Daerah



MATRIKS 1 DAN MATRIKS 2B KABUPATEN REJANG LEBONG



**Matrik 1 Target Pencapaian Indikator Tujuan TPB/SDGs
Kabupaten Rejang Lebong**

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDG's 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari											
1.1.1	Tingkat kemiskinan	BPS	%	14.65	14.14 - 14.51	13.77 - 14.14	13.41 - 13.77	13.04 - 13.41	12,67 - 13.04	12,30 - 12,67	BPS
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semuadimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	14.65	14.14 - 14.51	13.77 - 14.14	13.41 - 13.77	13.04 - 13.41	12,67 - 13.04	12,30 - 12,67	BPS
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Renstra Dinkes	%	99	99	99	99	99	99	99	Dinas Kesehatan
1.3.1 (b)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Renstra Disnakertrans	Jiwa	9,972	9,972	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DTSEN	KK	14,127	14,100	14,050	14,000	13,950	13,900	13,850	Dinas Sosial
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro											

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Renstra Dinkes	%	87.18	95	95	95	95	95	95	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Renstra DP3APPKB	%	77.7	80.78	82.22	83.66	85.1	86.54	88	DP3APPKB
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Renstra PUPRPKP	%	45.46	0.77%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	PUPRPKP
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Renstra PUPRPKP	%	45.46	0.77%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	0.69%	PUPRPKP
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Renstra Dikbud	%	113.38	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Renstra Dikbud	%	81.82	92.53	98.60	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	RPJMD Kab RL	%	92:57:00	93.5	94	94.5	95	95.5	96	Dinas Pendidikan

1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana											
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Renstra Dinas Sosial	Orang	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Sosial

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Renstra Dinas Sosial	Orang	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Sosial

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan											
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	RPJMD Kab RL	%	28,6 (SKI 2023)	18.8	17.7	16.6	15.5	14.4	13.3	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	%	6	8	7.5	7	6.5	5	4.5	Dinas Kesehatan

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup											
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Renstra Dinkes		113.10	115	104	94	85	77	75	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000											
3.2.1.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
3.2.2.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Renstra Dinkes		5.65	12,62	11,63	10,97	10.46	9,96	9.46	Dinas Kesehatan
3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Renstra Dinkes	%	87.18	95	95	95	95	95	95	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Renstra Dinkes		84	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk											
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Renstra Dikbud	%	109.78	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Renstra Dikbud	%	84.04	94.53	98.47	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.											
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Renstra Dikbud	%	49.85	55	56	57	58	50	50	Dinas Pendidikan

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.											
4.c 1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Renstra Dikbud	%	PAUD 10,57	6.12	8	9	10	11	12	Dinas Pendidikan
				SD 32,99	35.83	36	38	40	42	44	
				SMP 36,30	41.03	42	44	46	48	50	

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan											
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.											
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Renstra DP3APPKB	%	100	100	100	100	100	100	100	DP3APPKB
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Renstra DP3APPKB	%	30	28	26	24	22	20	18	DP3APPKB
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat											
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat parlemen daerah dan pemerintah daerah	Renstra DP3APPKB	%	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	DP3APPKB
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut											
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Renstra DP3APPKB	%	3.80	3.70	3.27	2.84	2.41	2.00	2.00	DP3APPKB

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua											
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Renstra PUPRPKP	%	45.46	45.46	45.46	45.46	45.46	45.46	45.46	PUPRPKP
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air											
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Renstra PUPRPKP	%	4.90%	0.46%	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	PUPRPKP
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinkes	Desa/Ke 1	156	156	156	156	156	156	156	DINKES

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	BPS
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Rp. juta	45.24	45.24	45.24	45.24	45.24	45.24	45.24	BPS
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan											
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya											
8:05:02	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	BPS
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan empromosikan budaya dan produk lokal.											
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Renstra Dispar	Orang	50,519	51,000	51,200	51,500	52,000	52,500	53,000	Dinas Pariwisata

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi											
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	RPJMD Kab RL	Nilai	47.38	49.44	51.59	53.74	55.89	58.04	60.19	PUPRPKP
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.											
9.4.1.(a)	Persentase Penurunan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	RPJMD Kab RL	%	20:37	20:37	24.31	28.25	32.19	36.13	40.07	Dinas Pertanian

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari pulasi											
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Renstra DPMD	Desa	7	7	5	5	4	2	0	DPMD
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Renstra DPMD	Desa	14	14	14	15	16	17	18	DPMD

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih											
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Renstra Nakertrans	Jiwa	9,972	9,972	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerusakan											
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	RPJMD Kab RL	Indeks	112.35	111,35	110,35	108,35	106,35	104.35	102,35	BPBD
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota											
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Renstra DLH	%	42.87	54.73	53.43	59.73	62.23	64.73	67.23	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan											
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat											
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	RPJMD Kab RL	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	RPJMD Kab RL	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD

Kode Indikato	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2024)	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	RPJMD Kab RL	%	B (63.75)	B (63.75)	B (66.52)	B (69.29)	BB (72.07)	BB (74.84)	BB (77.61)	Bag Organisasi
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	RPJMD Kab RL	%	B (65.68)	B (65.68)	B (66.94)	B (67.57)	B (68.21)	B (69.47)	B (70.10)	Inspektorat
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	RPJMD Kab RL	%	B (65.68)	B (65.68)	B (66.94)	B (67.57)	B (68.21)	B (69.47)	B (70.10)	Inspektorat
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Renstra DP3APPKB	%	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	DP3APPKB
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BPS	%	10	10	10	10	10	10	10	DP3APPKB

MATRIKS 2B : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

Tujuan SDGs : 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
1:01:01		Tingkat kemiskinan												
1.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
1.06.04.2.01	Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Orang	50	350	350	350	350	350	518.3	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang	25	25	25	25	25	25	82.1	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Sosial
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Orang	50	50	50	50	50	50	273.8	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Sosial
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.														
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Orang	284,542	286,020	288,000	291,600	294,600	297,500	200,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Kesehatan
1.3.1 (b) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan														
2.07.05.PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
1.4.1.(b)		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap												
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Orang	4,898	5,143	5,400	5,670	5,954	6,251	126	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Kesehatan
1.4.1.(c)		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.												
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	3	3	3	3	3	3	699.5	APBD	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB
		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	1	1	1	1	233.1	APBD	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	25	27	30	33	34	37	1,491.1	APBD	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	1022	1022	1022	1022	1022	1022	13,349	DAK Non Fisik	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
		2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	10	11	12	13	14	15	147	APBD	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB
1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak dan berkelanjutan														
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/ Detik	5	5	5	5	5	5	9,100	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	PUPRPK
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	553	500	500	500	500	500	14,000	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	PUPRPKP
1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan														
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Unit Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	306	150	150	150	150	150	12,500	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	PUPRPKP
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	-	50	50	50	50	50	2,500	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	PUPRPKP

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat														
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.00.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1	2	2	3	3	3	4,520	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	2	2	2	2	2	2,795	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	2	2	2	2	2	2	4,055	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Unit	-	484	532	585	585	585	1,693	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	2	2	2	2	2	2	1,425	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.10	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	3	3	3	3	3	2,790	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	-	500	500	500	500	500	1,776	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	9	252	252	252	252	260	9,600	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	800	800	800	800	800	800	2,070	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	416	4614	5,000	175	185.00	195	8,568	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Siswa	189	182	182	182	182	182	1,420	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah	189	182	182.00	182.00	182.00	182	123,110	APBN	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.01.00.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	5	-	5	5	5	5	9,650	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	250	364	364	150	3,354	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.36	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Konten Digital	-	-	10	15	20	25	1,200	APBN	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keg			4	4	4	4	1,250	APBN	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Siswa	Stel	4729 Stel	-	5,250	5,300	5,350	5,400	20,700	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	8,669	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket	2 Paket	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1,279	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.49	Bimbingan Teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Orang	-	-	60	90	90	90	2,600	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.50	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Sekolah	189	182	182	182	182	182	1,833	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	38	5	5	5	5	5	4,836	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Peserta Didik		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,475	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	2	2	2	2	2	2,795	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	-	2	2	2	2	2	4,065	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Ruang	-	2	2	2	2	2	7,757	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	2	5	5	5	5	5	4,494	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	-	5	5	5	5	5	6,081	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Unit	100	500	500	500	500	500	2,760	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	-	1000	1000	1000	1000	1000	3,300	APBN	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik danPeraga Peserta Didik	Paket		7	7	7	7	7	2,250	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	800	800	800	850	900	950	2,336	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	3,180	1,752	1,752	1,752	1,752	1,752	7,500	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peserta	59	59	59	59	60	60	2,152	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidik	59	59	59	59	59	60	86,783	APBN	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	118	118	118	118	118	2,040	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.49	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Konten Digital	-	5	10	15	20	25	975	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan,dan intoleransi	Keg	-	4	4	4	4	4	900	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dsatuan Pendidik	59	59	59	59	59	60	1,741	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	-	4	4	4	4	4	8,669	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.02.60	Bimbingan Teknis,pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Orang	-	30	30	60	60	60	1,600	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Siswa	Siswa	5,326	5,200	5,210	5,230	5,240	5,250	25,160	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	-	5	5	5	5	5	4,836	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial														
PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
	Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan sosial kabupaten/Kota		Penyediaan Makanan	Orang	25	25	25	25	25	25	371.6	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Orang	25	25	25	25	25	25	53	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Sosial
			Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	25	25	25	25	25	25	79.6	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Sosial
1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial														
PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
	Perlindungan Sosial Korban bencana alam dan sosial kabupaten/Kota		Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	25	25	25	25	25	25	47.7	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Sosial
Tujuan SDGs : 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	%	73	76	79	82	85	88	-	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Kesehatan
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia														
3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)														
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	4262	4418	4632	4851	5018	5189	318	APBD	Kab Rejang .Lebong	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	4642	4749	4857	4968	5086	5195	1,188	APBD	Kab Rejang .Lebong	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
3.2.1.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	20220	21037	21870	23019	24190	25385	176.7	APBD	Kab Rejang .Lebong	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	4,457	4,557	4,660	4,763	4,869	4,977	174.8	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Kesehatan
3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Orang	4,898	5,143	5,400	5,670	5,954	6,251	126.2	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Kesehatan
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Orang	24	20	16	12	8	0	265.1	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Kesehatan
3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.													
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	Laporan	150	150	150	150	150	150	2,238.4	DAK Non Fisik	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH											

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	25	27	30	33	34	37	1,491.1	DAK Non Fisik	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB
3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).													
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	SDM	30	30	30	30	30	30	101.2	APBD	Kab Rejang Lebong	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2	2	2	2	2	2	2,140.6	DAK Non Fisik	Kab Rejang Lebong	
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dok	4	4	4	4	4	4	447.6	DAK Non Fisik	Kab Rejang .Lebong	DP3APPKB
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dok	12	12	12	12	12	12	940.1	DAK Non Fisik	Kab Rejang .Lebong	DP3APPKB
		2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dok	1	1	1	1	1	1	1,343	DAK Non Fisik	Kab Rejang .Lebong	DP3APPKB
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).													
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dok	1	1	1	1	1	1	444.8	DAK Non Fisik	Kab Rejang .Lebong	DP3APPKB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dok	21 Satuan Pendidika n	42 Satuan Pendidik an	63 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	105 Satuan Pendidika n	126 Satuan Pendidika n	64.6	APBD	Kab Rejang .Lebong	DP3APPKB
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jiwa	284,542	286,020	288,000	291,600	294,600	297,500	221.9	APBD	Kab Rejang .Lebong	Dinas Kesehatan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat													
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.00.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1	2	2	3	3	3	4,520	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	2	2	2	2	2	2,795	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	2	2	2	2	2	2	4,055	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Unit	-	484	532	585	585	585	1,693	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	2	2	2	2	2	2	1,425	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.10	Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	-	3	3	3	3	3	2,790	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	-	500	500	500	500	500	1,776	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	9	252	252	252	252	260	9,600	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa	800 Siswa	800 Peserta Didik	800 Siswa	0 Peserta Di	800 Siswa	800 Peserta Didik	2,069.5	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.01.00.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	416	4614	5,000.00	175.00	185.00	195	8,568.1	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidik	189	182	182	182	182	182	1,420	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah	189	182	182	182	182	182	123.1	APBN	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	5	-	5	5	5	5	9,650	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	-	-	250	364	364	150	3,354	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.36	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Konten Digital	-	-	10	15	20	25	1,200	APBN	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan,dan intoleransi	Keg			4	4	4	4	1,250	APBN	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Siswa	Paket	4729	-	5250	5300	5350	5400	20,700	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	4	-	4	4	4	4	8,669	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2	-	2	2	2	2	1,279	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.49	Bimbingan Teknis,pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Orang		-	60	90	90	90	2,600	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.50	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Satuan Pendidik	189	182	182	182	182	182	1,833	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
		1.01.02.2.01.00.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	38	5	5	5	5	5	4,836	DAK-APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		1.01.02.2.01.00.14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,475	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
5.2.1.(a)	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik													
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PendidikanNonformal/Kesetaraan		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	3	3	3	3	3	3	1,600	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pendidikan
Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan														
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).													
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	SDM	30	30	30	30	30	30	101.2	APBD	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0001	0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2	2	2	2	2	2	2,140	DAK Non Fisik	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat parlemen daerah dan pemerintah daerah													
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0006	0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	SDM	30	30	30	30	30	30	101.2	DAK Non Fisik	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0001	001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2	2	2	2	2	2	2,140	DAK Non Fisik	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
5.6.1.(a)		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)												
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	162	178	196	196	216	218	181.3	DAK Non Fisik	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Laporan	76	84	92	101	102	112	2,808	DAK Non Fisik	Kab Rejang Lebong	DP3APPKB

Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua														
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
6.1.1.(a)		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	-	3 Liter/ Detik	Liter/ Detik	3 Liter/ Detik	3 Liter/ Detik	3 Liter/ Detik	6,500	APBD - DAK	Kab. Rejang Lebong	DPUPRPKP
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Liter/ Detik	5 Liter/ Detik	Liter/ Detik	5 Liter/ Detik	5 Liter/ Detik	5 Liter/ Detik	10,786	APBD - DAK	Kab. Rejang Lebong	DPUPRPKP
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	553 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	16,418	APBD - DAK	Kab. Rejang Lebong	DPUPRPKP
6.2.1.(b)		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Unit Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	306 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	15,000	APBD	Kab. Rejang Lebong	DPUPRPKP
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	-	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	2,500	APBD	Kab. Rejang Lebong	DPUPRPKP
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen	-	-	1 dok	-	-	-	200	APBD	Kab. Rejang Lebong	DPUPRPKP

Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan	Target Tahunan (3)	Indikatif Alokasi	Sumber	Lokasi	Instansi	

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
				(2)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Anggaran 5 Tahun	Pendanaan	(6)	Pelaksana
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
8.9.1.(b)		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara												
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota		Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana & Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata Kab/Kota	Unit	3	15	15	15	15	15	86,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pariwisata
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	50	60	60	60	60	60	340	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pariwisata
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	15	15	15	15	15	15	22,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pariwisata
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Lokasi	1	1	1	1	1	1	750	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pariwisata

Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi															
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH															
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.														
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis	Dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	2,822	APBD	Kab Rejang Lebong	PUPRPKP	
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	KM	1 KM	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	11,388	APBD	Kab Rejang Lebong	PUPRPKP
			Pembangunan	KM	13,953 KM	12 KM	14,5 KM	16 KM	16,2 KM	16,3 KM	42,367	APBD	Kab Rejang Lebong	PUPRPKP	
			Rekonstruksi Jalan	KM	-	22 KM	22,7 KM	22,9 KM	23,4 KM	23,9 KM	259,131	APBD- DAK	Kab Rejang Lebong	PUPRPKP	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	KM	-	5 KM	5,85 KM	6 KM	6,2 KM	6,38 KM	2,775	APBD	Kab Rejang Lebong	PUPRPKP	

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)					Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			

9.4.1.(a)	Persentase Penurunan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.													
Program: Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)														
	Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3		Sub Kegiatan: Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		-	5	5	5	5	5	250,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup
			Sub Kegiatan: Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		-	5	5	5	5	5	250,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan														
	Kegiatan Pengelolaan Sampah		Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota		-	3	3	3	3	3	8,000,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup
			Sub Kegiatan: Penanganan sampah melalui pengangkutan	Ton	21,275	22,326	29,360	29,360	29,360	29,360	43,000,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup
			Sub Kegiatan: Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSA,RDF,Pusat Pengomposan ,Biodigister, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Ton	-	-	4,380	4,380	4,380	4,380	3,400,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			Sub Kegiatan: Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA /TPST Kabupaten /Kota Atau TPA/ /TPST	Ton	-	29,360	29,360	29,360	29,360	29,360	3,080,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Lap	-	1	1	1	1	1	2,040,402,004	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dok		2	2	2	2	2	2,040,402,004	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Unit	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1,530,301,503	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi	Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	765,150,752	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Pertanian dan Perikanan
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara														
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal													
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri													
PROGRAM PENATAAN DESA														
	Penyelenggaraan Penataan Desa		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Desa	5	5	5	5	5	5	610,510,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas PMD
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Desa	23	24	25	25	25	25	1,410,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas PMD

Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan													
Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)			Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
11.5.1.(a)			Indeks Risiko Bencana (IRBI)										
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1,741,452,013	APBD	Kab Rejang Lebong	BPBD	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	754,216,787	APBD	Kab Rejang Lebong	BPBD	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	930,606,024	APBD	Kab Rejang Lebong	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	1,008,536,602	APBD	Kab Rejang Lebong	BPBD	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1,192,776,245	APBD	Kab Rejang Lebong	BPBD	
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.														
Program: Pengelolaan Persampahan															
	Pengelolaan Sampah		Penyediaan Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Unit	-	3	3	3	3	3	8,000,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup	
			Penyusunan rencana ,kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	-	-	-	-	-	-	100,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	Ton	21,275	22,326	29,360	29,360	29,360	29,360	29,360	3,400,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R,PDU,TPST,T PS,SPA,PSEL/PLTS a,RDF,Pusat Pengomposan ,Biodigister, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Ton	-	-	4,380	4,380	4,380	4,380	3,080,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup	

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)				Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5	Sumber Pendanaan	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA /TPST Kabupaten /Kota Atau TPA//TPST	Ton	29,360	29,360	29,360	29,360	29,360	29,360	600,000,000	APBD	Kab Rejang Lebong	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan SDGs 16 : Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di														
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)													
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	SDM	30	30	30	30	30	30	101,240,650	DAK Non Fisik	Kab Rejang .Lebong	DP3APPKB
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2	2	2	2	2	2	2,140,626,153	DAK Non Fisik	Kab Rejang .Lebong	DP3APPKB



LAMPIRAN 2

MATRIKS 3 ORGANISASI NON PEMERINTAH



**MATRIKS BAGIAN III : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH
HUMAN INITIATIVE**

Nama Tujuan SDGs : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Wilayah Provinsi Bengkulu dalam upaya Membangun Ketangguhan dan Keberlanjutan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
5.3.1* Proporsi Perempuan Umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a)sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs :												
Nama Program 1: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Derajat Kesehatan, Taraf Ekonomi, Ketahanan dan Kapasitas Masyarakat												
Program HOME (Hug, Opportunity, Mentality dan Education) Pembinaan dan Pendampingan Anak-anak Nelayan Pesisir Pantai Malabero	1.1 Terbentuknya komunitas masyarakat yang menjadi penggerak pemenuhan pendidikan non formal di pesisir pantai malabero.	Orang	60	65	70	80	80	100	180	Kerjasama Komunitas ODOT (One Day One Thousand) dengan Human Initiative	Jl.tongkol rt.4 rw.1 no.10 Malabero, Teluk segara kota Bengkulu (masuk gang sebelah Masjid Al-Hasyim pasar barukoto)	Human Initiative Cabang Bengkulu
	1.2 Terselenggaranya pendidikan pengembangan diri anak yg mudah diakses oleh-oleh masyarakat malabero	Orang	60	65	70	80	80	100	180	Kerjasama Komunitas ODOT (One Day One Thousand) dengan Human Initiative	Jl.tongkol rt.4 rw.1 no.10 Malabero, Teluk segara kota Bengkulu (masuk gang sebelah Masjid Al-Hasyim pasar barukoto)	Human Initiative Cabang Bengkulu
	1.3 Orang tua memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemenuhan hak pendidikan, perlindungan dan pengembangan diri anak-anak nelayan malabero	Orang	60	65	70	80	80	100	180	Kerjasama Komunitas ODOT (One Day One Thousand) dengan Human Initiative	Jl.tongkol rt.4 rw.1 no.10 Malabero, Teluk segara kota Bengkulu (masuk gang sebelah Masjid Al-Hasyim pasar barukoto)	Human Initiative Cabang Bengkulu
Program OTA (Orang Tua Asuh)	2.1. Anak mendapatkan bantuan dana untuk kebutuhan pendidikannya.	Orang	40	40	40	40	40	40	48	Personal Donatur	6 Lokasi di Kota Bengkulu (Desa Talang Kering Benteng, Muhajirin, Panorama, Malabero, Merapi Ujung)	Human Initiative Cabang Bengkulu
	2.2. Terselenggaranya program pembinaan yang mendorong pengembangan diri anak yang mudah diakses.	Orang	40	40	40	40	40	40	48	Personal Donatur	6 Lokasi di Kota Bengkulu (Desa Talang Kering Benteng, Muhajirin, Panorama, Malabero, Merapi Ujung)	Human Initiative Cabang Bengkulu
	2.3. Orang tua memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemenuhan hak pendidikan, perlindungan dan pengembangan diri anak.	Orang	40	40	40	40	40	40	48	Personal Donatur	6 Lokasi di Kota Bengkulu (Desa Talang Kering Benteng, Muhajirin, Panorama, Malabero, Merapi Ujung)	Human Initiative Cabang Bengkulu
	2.4. Tersedianya pangan bergizi bagi anak (optional)	Orang	40	40	40	40	40	40	48	Personal Donatur	6 Lokasi di Kota Bengkulu (Desa Talang Kering Benteng, Muhajirin, Panorama, Malabero, Merapi Ujung)	Human Initiative Cabang Bengkulu
	2.5. Tersedianya layanan kesehatan fisik dan mental bagi anak (optional)	Orang	40	40	40	40	40	40	48	Personal Donatur	6 Lokasi di Kota Bengkulu (Desa Talang Kering Benteng, Muhajirin, Panorama, Malabero, Merapi Ujung)	Human Initiative Cabang Bengkulu
Program Khitanan	3.1 Meringankan beban ekonomi Keluarga prasejahtera	100	100	100	100	100	100	100	315	YBM PLN UPT Bengkulu dengan Human Initiative	6779+4F3, Suka Merindu, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu, Bengkulu 38115	Human Initiative Cabang Bengkulu
Akikah Berbagi	4.1 Tersedianya pangan bergizi bagi anak -anak panti asuhan	150	150	150	150	150	150	150	552	Personal Donatur	Jalan Danau Kelurahan Panorama Kota Bengkulu	Human Initiative Cabang Bengkulu
Qurban Berbagi	5.1 Tersedia Pemenuhan gizi kepada masyarakat di wilayah Bengkulu dan Meningkatkan dukungan multipihak akan kepedulian terhadap pencegahan stunting	500	500	500	500	500	500	500	300	Personal Donatur & Corporate	Kepahiang, Seluma, Kota Bengkulu, Bengkulu tengah, lebong, Bengkulu Utara, rejang Lebong	Human Initiative Cabang Bengkulu
Ramadan Bahagia Bersama Yatim	6.1 Membantu Pemenuhan Kebutuhan ekonomi keluarga Prasejahtera	200	200	200	200	200	200	200	200	Personal Donatur & Corporate		
Program Ketahanan Pangan & Sarana Prasarana Pesantren Madinatul Kepahiang	7.1. Mendorong Peningkatan kemandirian pesantren dalam memenuhi kebutuhan yang layak	90	90	90	90	90	90	90	600	Personal Donatur, PLN UIP3B SUM UPT Bengkulu dengan Human Initiative	Desa Pematang Donok Kelurahan Kepahiang Kab. Kepahiang	Human Initiative Cabang Bengkulu
Makan Siang Amal (MAKSIMAL)	8.1 Pemenuhan Gizi bagi masyarakat Bengkulu	200	200	200	200	200	200	200	300	Personal Donatur	Kota Bengkulu	Human Initiative Cabang Bengkulu
Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat	9.1 Peningkatan pendapatan ekonomi keluarga masyarakat prasejahtera	7	7	7	7	7	7	7	70	Personal Donatur & Corporate	Kota Bengkulu	Human Initiative Cabang Bengkulu
PROGRAM BIODIVERSITY DAN ANCAMAN BIOLOGIS	10.1 Peningkatan keamanan corporate dan Masyarakat di sekitar pesisir pantai Pulau baai	200	200	200	200	200	200	200	370	Fuel Terminal Pertamina Pulau Baai dengan Human Initiative	Wilayah pesisir pantai Pulau Baai	Human Initiative Cabang Bengkulu
Program Pemberdayaan Nelayan Pesisir Pantai KUB Lang Buana Macho	11.1 Meningkatnya taraf ekonomi keluarga Nelayan Pesisir Pantai Malabero	Orang	9	9	9	9	9	9	136	PLN UIP3B SUM UPT Bengkulu dengan Human Initiative	Jl. Bawal, RT.09 RW.03 Kelurahan Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu	Human Initiative Cabang Bengkulu

	MATRIKS BAGIAN III : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH: CAHAYA PEREMPUAN BENGKULU												
	Nama Tujuan SDGs												
	Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
	5.3.1* Proporsi Perempuan Umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a)sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun												
	Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 5.3.1, 4, dan 16.												
	Nama Program 1:												
	1. Pencegahan dan penanganan perempuan korban perkawinan usia di bawah 19 tahun	1.2. OSS&L dan WCC mengoperasikan sistem Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) dan Kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang terintegrasi	Unit	4	4	4	4	4	4	205	Kerjasama Cahaya Perempuan dan program INKLUSI	Puskesmas Sumber Urip& Puskesmas Perumnas Kab. Rejang Lebong; Puskesmas Kelobak Kab. Kepahiang; Puskesmas Talang Tinggi Kab. Seluma	Cahaya Perempuan Bengkulu
		1.2. Perempuan dan perempuan muda merasakan manfaat ekonomi dan sosial melalui keterlibatan di kelompok Kredit Union (CU) di Desa	Kelompok	10	10	10	10	10	15	280,7	Kerjasama Cahaya Perempuan dan program INKLUSI	Kab. Rejang Lebong; Kab. Kepahiang; Kab. Seluma	Cahaya Perempuan Bengkulu
		1.3. Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKAR) menduduki posisi kepemimpinan di arena publik	orang	45	45	45	45	45	45	2,7	Kerjasama Cahaya Perempuan dan program INKLUSI	Kab. Rejang Lebong; Kab. Kepahiang; Kab. Seluma	Cahaya Perempuan Bengkulu
		1.4. Perubahan cara pandang dan sikap Pemerintah Daerah, Kabupaten, Desa terhadap perubahan kebijakan	Peraturan/kebijakan/regulasi	3	3	3	3	3	3	100,26	Kerjasama Cahaya Perempuan dan program INKLUSI	Kab. Rejang Lebong; Kab. Kepahiang; Kab. Seluma	Cahaya Perempuan Bengkulu
		1.5. Forum keluarga pembaharu melaksanakan kegiatan PPA dan KtP	keluarga	15	15	15	15	15	15	50,06	Kerjasama Cahaya Perempuan dan program INKLUSI	Kab. Rejang Lebong; Kab. Kepahiang; Kab. Seluma	Cahaya Perempuan Bengkulu

MATRIKS BAGIAN III : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH: CAHAYA PEREMPUAN BENGKULU												
	Nama Tujuan SDGs											
	Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	2. Organisasi Bantuan Hukum (OBH)	2.1.Terpenuhinya hak perempuan dan anak perempuan korban kekerasan	orang	23	23	23	23	23	12,7	Kerjasama Cahaya Perempuan Dengan KEMENKUMHAM	Bengkulu	Cahaya Perempuan Bengkulu

Petunjuk Umum Pengisian Matriks Renaksi TPB/SDGs:

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah harus terukur baik target, indikator dan kegiatannya, indikasi anggaran, sumber pendanaan, serta lokasi cakupan program.

- Nama Tujuan TPB/SDGs: diisi dengan nomor Tujuan dan nama TPB/SDGs;
- Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: diisi dengan nomor dan nama indikator TPB/SDGs global atau indikator proksi nasional sesuai kode indikator;
- Program/Kegiatan/ Output Kegiatan (1): diisi dengan nama program, nama kegiatan, dan output kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator TPB/SDGs;
- Satuan (2): diisi dengan satuan untuk mengukur output kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst.);
- Target Tahunan (3): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target yang ditetapkan dalam dokumen lembaga pelaksana;
- Indikatif Alokasi Anggaran (4): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, dst.) untuk setiap output kegiatan dalam juta rupiah;
- Sumber Pendanaan (5): diisi dengan sumber pendanaan untuk pelaksanaan output kegiatan selama periode tertentu (tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan, dst.);
- Lokasi (6): diisi dengan lokasi cakupan program dan kegiatan pada lembaga pelaksana non pemerintah (tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa); dan
- Lembaga Pelaksana (7): diisi dengan nama organisasi/lembaga non pemerintah yang melaksanakan program tersebut

**MATRIKS BAGIAN III : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH
LAZISMU**

Nama Tujuan SDGs

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030					
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
5.3.1* Proporsi Perempuan Umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a)sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs :												
Nama Program 1:												
Nama Kegiatan 1: Pendidikan Berkualitas	Output Kegiatan: Beasiswa Mentari Lazismu untuk siswa miskin berprestasi	Program	100	110	120	130	140	150	1,500	Donatur tetap Lazismu dan CSR	Seluruh Kab/Kota Bengkulu	Lazismu Wilayah & Daerah
Nama Kegiatan 2: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Output Kegiatan: Program Ambulans dan Layanan Kesehatan Gratis	Program	50	60	70	80	90	100	2,000	Donatur Lazismu, mitra RS	Seluruh Kab/Kota Bengkulu	Lazismu & Klinik Muhammadiyah
Nama Kegiatan 3: . Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	Output Kegiatan: Program UMKM Berdaya untuk warga rentan ekonomi	Program	75	85	100	115	130	150	3,000	ZIS & Mitra Produktif	Rejang Lebong, Kota Bengkulu	Lazismu & Majelis Ekonomi
Nama Kegiatan 4: Tanpa Kemiskinan	Output Kegiatan: Bantuan Sembako & Paket Gizi Keluarga Dhuafa	Program	300	320	350	375	400	450	2,500	ZIS & Donatur Kemanusiaan	Bengkulu Selatan, Kaur	Lazismu & MDMC
Nama Kegiatan 5: Kota & Komunitas Berkelanjutan	Output Kegiatan: Pembangunan Rumah Tahan Bencana & Sanitasi Layak	Program	10	12	15	18	20	25	1,800	Donatur & Program Resiliensi	Lebong, Bengkulu Utara	Lazismu & LPB
Nama Kegiatan 6: Penanganan Perubahan Iklim	Outpur Kegiatan: Gerakan Sedekah Sampah & Penanaman Pohon	Program	1000	1200	1500	1800	2000	2500	1,000	ZIS, Sekolah, Mitra Hijau	Bengkulu Tengah, Kepahiang	Lazismu, Sekolah, Pemuda Muhammadiyah

**MATRIKS BAGIAN III : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH
SDGs DAN RENPER UNIVERSITAS BENGKULU**

Nama Tujuan SDGs 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030					
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : 4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang												
Nama Program 1: Beasiswa Mahasiswa Asing												
Nama Kegiatan 1: Beasiswa mahasiswa asing Universitas Bengkulu	1.1 Output Kegiatan: Jumlah mahasiswa asing yang mendapatkan beasiswa dan menjadi mahasiswa Universitas Bengkulu	Orang	3	3	3	3	3	3	At cost: Pengurusan visa dan izin tinggal, Biaya hidup bulanan, BPJS, Biaya kuliah, asrama, Tiket pesawat ke UNIB dan pulang ke negara asal setelah selesai studi	RBA Universitas Bengkulu	Nasional	Universitas Bengkulu

**MATRIKS BAGIAN III : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH
PIMPINAN WILAYAH AISIYAH BENGKULU**

Nama Tujuan SDGs

Program/Kegiatan/Output Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Lembaga Pelaksana (7)	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030					
PROGRAM PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA												
5.3.1* Proporsi Perempuan Umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a)sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs : Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Peningkatan Gizi												
Nama Program 1: Penurunan Angka Stunting, Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB)												
Nama Kegiatan 1: Pendampingan intensif ibu hamil dan balita oleh Kader Stunting MKES PWA Bengkulu	1.1 Output Kegiatan: Meningkatkan pengetahuan multipihak terkait penurunan angka stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi	Keluarga	5	10	15	20	25	30	250	Dana mandiri dari LazisMu, Kerjasama dengan FIKES UMB dan Mitra Lainnya	Desa Nakau Kabupaten Seluma	Majelis Kesehatan PWA Bengkulu dengan FIKES UM Bengkulu
	1.2 Output Kegiatan: Meningkatkan status gizi bayi dari keluarga yang beresiko stunting	Keluarga	5	10	15	20	25	30	250	Dana mandiri dari LazisMu, Kerjasama dengan FIKES UMB dan Mitra Lainnya	Desa Nakau Kabupaten Seluma	Majelis Kesehatan PWA Bengkulu dengan FIKES UM Bengkulu
Nama Kegiatan 2: Penyuluhan dan Edukasi bagi Calon pengantin dan Pasangan Usia Subur	2.1 Outpur Kegiatan: Meningkatkan pengetahuan terkait pola asuh, ASI eksklusif dan MP-ASI	Desa/Kelurahan	3	6	9	12	15	18	180	Dana mandiri dari LazisMu, Kerjasama dengan FIKES UMB dan Mitra Lainnya	Kota Bengkulu	Majelis Kesehatan PWA Bengkulu dengan FIKES UM Bengkulu